

Prof. Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si.

Sosiologi Pendidikan

INTEGRATIF



SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Integratif

Prof. Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prof. Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si.

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Integratif



SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Integratif

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh The UINSA Press*

ISBN: 978-602-332-200-8
xiv + 602 hal; 14,8 x 21 cm
Cetakan Pertama, April 2025

Copyright © 2025 The UINSA Press

Penulis	: Prof. Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si.
Penyunting	: M. Yusuf
Desain Sampul	: Ucup
Layouter	: Ucup

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Cover by: canva.com

Dirterbitkan oleh:



The UINSA Press
Anggota IKAPI
Gedung Percetakan Wisma Transit Dosen Lt. 1
UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya
Tlp. 031-8410298
percetakan@uinsa.ac.id

Pengantar Penulis

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT buku “Sosiologi Pendidikan Integratif” ini bisa diselesaikan. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Diterbitkannya buku ini sebagai kontribusi penulis dalam memberikan dasar sekaligus pengembangan khazanah dan bahan ajar sosiologi pendidikan, sehingga memudahkan mahasiswa dalam belajar.

Buku ini mengkaji secara integratif sosiologi pendidikan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, Berasal dari berbagai sumber referensi, bahan dan hasil kajian penulis dengan para mahasiswa selama perkuliahan. Kajiannya secara teoritis, praktis dan empiris, sehingga menarik untuk dicermati dan dikaji lebih lanjut secara mendalam.

Buku Sosiologi Pendidikan Integratif ini memberikan pemahaman tentang teori dan empiri pendidikan dengan pendekatan sosiologi dan Islam, melalui pengenalan mahasiswa kepada sejumlah teori dan kajian (literer dan penelitian lapangan) dalam sosiologi pendidikan dan Islam; terkait stratifikasi sosial, interaksi dan sosialisasi, hidden curriculum, fungsi dan peran pendidikan, sistem sekolah/madrasah, pesantren, serta pembelajaran dan berbagai pendidikan pada masyarakat kontemporer. Kajian-kajian ini menjadi

bekal bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pendidikan, menyusun menjadi naskah artikel dan mempublikasikannya ke jurnal bereputasi.

Kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap penulisan buku ini saya sampaikan terimakasih, terutama seluruh mahasiswa yang pernah menempuh mata kuliah sosiologi pendidikan yang saya ampuh. Bapak Rektor UINSA beserta jajarannya yang sudah berkontribusi dalam penyusunan, pembahasan dan penerbitan buku ini, Istri Nur Chasanah, S.Ag., putri Relisa Nuris Shifa, S.Keb. bd. yang terlibat secara langsung dalam penyusunan dan penyelesaian buku ini, dan putra Ghazwu Fikril Haq, ST., saya ucapkan terimakasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga menjadi amal shaleh. Mudah-mudahan kehadiran buku ini bagi para pembaca bermanfaat, berkontribusi dalam memudahkan memahami sosiologi pendidikan, membuka wawasan pengembangan pendidikan, serta memberikan inspirasi para praktisi pendidikan dalam mengembangkan model pendidikan masa depan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 2 November 2024

Prof. Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si.

Daftar Isi

PENGANTAR PENULIS –[v]

DAFTAR ISI –[vii]

BAB I: KONSEP DASAR SOSIOLOGI –[1]

- A. Tujuan Pembelajaran –[1]
- B. Pengertian, Ruang Lingkup dan Manfaat Sosiologi Pendidikan –[1]
- C. Sejarah Munculnya Disiplin Sosiologi Pendidikan – [13]
- D. Para Ahli Sosiologi Yang Memberikan Kontribusi dalam Disiplin Ilmu Sosiologi Pendidikan –[17]
- E. Kesimpulan –[28]
- F. Daftar Bacaan –[29]

BAB II: PARADIGMA DAN TEORI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN –[31]

- A. Tujuan Pembelajaran –[31]
- B. Paradigma dan Teori –[31]
- C. Teori Dalam Sosiologi Pendidikan –[87]
- D. Kesimpulan –[121]
- E. Daftar Bacaan –[121]

BAB III: PARADIGMA MAKRO DALAM PENDIDIKAN – [123]

- A. Tujuan Pembelajaran –[123]
- B. Paradigma Makro Pendidikan –[123]

- C. Pandangan Islam Terhadap Paradigma Konservatif, Liberalis, Kritis, Fundamentalism, Anarkhis dalam Pendidikan –[184]
- D. Implementasi Paradigma Makro dalam Konteks Pendidikan Islam –[204]
- E. Kesimpulan –[205]
- F. Daftar Bacaan –[205]

BAB IV: PEMIKIRAN PARA TOKOH SOSIOLOGI KLASIK DAN MODERN DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI SOSIOLOGI PENDIDIKAN –[209]

- A. Tujuan Pembelajaran –[209]
- B. Pemikiran Tokoh Peletak Fondasi Sosiologi Pendidikan –[209]
- C. Pemikiran Tokoh Penguat Fondasi Sosiologi Pendidikan –[238]
- D. Relevansi Sosiologi Pendidikan dalam Islam –[255]
- E. Kesimpulan –[260]
- F. Daftar Bacaan –[261]

BAB V: TEORI SOSIOLOGI SEBAGAI PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN, KETERKAITAN PENDIDIKAN DENGAN STRUKTUR SOSIAL, DAN APLIKASI DALAM REALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA –[263]

- A. Tujuan Pembelajaran –[263]
- B. Teori Sosiologi Sebagai Paradigma dalam Pendidikan –[263]
- C. Keterkaitan Pendidikan dengan Struktur Sosial – [281]

- D. Kontribusi teori Sosiologi Pendidikan dalam menganalisis Struktur Social di Lembaga Pendidikan Umum dan Islam –[283]
- E. Implementasi Teori-Teori Sosiologi Pendidikan dalam Konteks Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Islam –[284]
- F. Kesimpulan –[288]
- G. Daftar Bacaan –[289]

BAB VI: FUNGSI PENDIDIKAN MENURUT SOSIOLOGI DAN KONSEP ISLAM –[291]

- A. Tujuan Pembelajaran –[291]
- B. Fungsi-Fungsi Pendidikan –[291]
- C. Fungsi Pendidikan Menurut Islam –[301]
- D. Realisasi fungsi fungsi Pendidikan dalam Kehidupan Sosial –[304]
- E. Kesimpulan –[307]
- F. Daftar Bacaan –[308]

BAB VII: PENDIDIKAN DAN TERBENTUKNYA STRATIFIKASI DAN DEFERENSIASI SOSIAL –[311]

- A. Tujuan Pembelajaran –[311]
- B. Hubungan Pendidikan dengan Mobilitas Sosial – [311]
- C. Pendidikan dan terbentuknya stratifikasi dan diferensiasi sosial –[315]
- D. Contoh tentang Pendidikan sebagai Sarana Mobilitas dan Alat Seleksi Sosial dalam Masyarakat –[321]

- E. Peran Sistem Pendidikan dalam Reproduksi Struktur dan Kultural –[328]
- F. Konsep Islam tentang Stratifikasi dan Diferensiasi dalam Pendidikan –[331]
- G. Kesimpulan –[334]
- H. Daftar Bacaan –[334]

BAB VIII: PENDIDIKAN, INDUSTRIALISASI, TEKNOLOGI, MODERNITAS GAYA HIDUP DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT – [339]

- A. Tujuan Pembelajaran –[339]
- B. Pengertian pendidikan, industrialisasi dan teknologi –[339]
- C. Hubungan Industrialisasi, Teknologi dan Pendidikan –[341]
- D. Modernitas Gaya Hidup dalam Pendidikan dan Konsep Islam –[355]
- E. Pendidikan sebagai Investasi Human Capital –[358]
- F. Pendidikan dan terbentuknya Stratifikasi dan Diferensiasi sosial Ekonomi –[361]
- G. Pendidikan di era Industrialisasi menurut konsep Islam –[363]
- H. Kesimpulan –[365]
- I. Daftar Bacaan –[367]

BAB IX: KETIMPANGAN SOSIAL DAN KAITANNYA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN –[371]

- A. Tujuan Pembelajaran –[371]

- B. Peran Pendidikan dalam Mengentas Kemiskinan – [371]
- C. Akar Permasalahan Ketimpangan dan Keterkaitannya dengan Sistem Pendidikan –[376]
- D. Pendidikan Berkeadilan –[384]
- E. Pandangan Islam Terhadap Ketimpangan Sosial dan Kaitannya dengan Pendidikan –[388]
- F. Kesimpulan –[392]
- G. Daftar Bacaan –[393]

BAB X: SEKOLAH/MADRASAH SEBAGAI SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI/BIROKRASI –[397]

- A. Tujuan Pembelajaran –[397]
- B. Sekolah/Madrasah Sebagai Sistem Organisasi – [397]
- C. Sistem Birokrasi di Sekolah –[401]
- D. Sistem Sosial di Sekolah/Madrasah –[404]
- E. Konsep Islam tentang profesionalisme dalam pendidikan –[407]
- F. Profesionalitas dalam pendidikan di Sekolah –[412]
- G. Kesimpulan –[416]
- H. Bahan Bacaan –[418]

BAB XI: PROSES INTERAKSI DAN SOSIALISASI DI KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT –[421]

- A. Tujuan Pembelajaran –[421]
- B. Proses Interaksi dan Sosialisasi –[421]
- C. Konsep Sosialisasi –[423]
- D. Pembentukan Kepribadian –[429]

- E. Sosialisasi di Keluarga, Masyarakat dan Sekolah – [434]
- F. Konsep Islam terhadap Proses Interaksi dan Sosialisasi, serta Terjadinya Multicultural di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat –[439]
- G. Prinsip Sosialisasi dan Pendidikan Multicultural di Sekolah/Madrasah –[443]
- H. Kesimpulan –[447]
- I. Daftar Bacaan –[449]

BAB XII: KELAS SEBAGAI SISTEM SOSIAL SERTA RELEFANSINYA DENGAN AJARAN ISLAM –[453]

- A. Tujuan Pembelajaran –[453]
- B. Pengertian Kelas Sebagai Sistem Sosial –[453]
- C. Peran Ruang Kelas sebagai sistem sosial –[460]
- D. Karakteristik Suasana Kelas yang Berdaya dan Berhasil, Serta Relefansinnya Dengan Ajaran Islam –[465]
- E. Kesimpulan –[469]
- F. Daftar Bacaan –[471]

BAB XIII: HIDDEN CURRICULUM, PENGEMBANGAN KARAKTER DAN PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKOLAH/MADRASAH BESERTA RELEFANSINYA DALAM KEHIDUPAN –[475]

- A. Tujuan Pembelajaran –[475]
- B. Pengertian Hidden Currikulum dan Karakter – [475]
- C. Pentingnya Hidden Curriculum di Sekolah –[479]

- D. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Hidden Curriculum di kelas dan di sekolah –[481]
- E. Relefans Hidden Curriculum dalam pembelajaran –[482]
- F. Peran Pendidikan karakter di Sekolah/Madrasah dalam pembentukan sumber daya manusia –[484]
- G. Pengembangan Karakter dan pembentukan Sumber Daya Manusia di Sekolah/madrasah dengan ajaran Islam –[487]
- H. Kesimpulan –[491]
- I. Daftar Bacaan –[492]

BAB XIV: KONSEP GENDER DAN Keadilan Gender DALAM PENDIDIKAN –[495]

- A. Tujuan Pembelajaran –[495]
- B. Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan –[495]
- C. Keterkaitan Gender Dalam Pencapaian Pendidikan –[500]
- D. Keterkaitan Gender Dengan Pendidikan Menurut Konsep Islam –[502]
- E. Penyebab Prestasi Rendah Yang Dicapai di Antara Perempuan –[504]
- F. Persoalan Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan di Indonesia –[505]
- G. Kesimpulan –[509]
- H. Daftar Bacaan –[510]

BAB XV: PERUBAHAN SOSIAL ATAS TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL –[513]

- A. Tujuan Pembelajaran –[513]
- B. Perubahan Sosial –[513]
- C. Teori Perubahan Sosial –[527]
- D. Konsep kemajuan Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 –
[528]
- E. Perubahan perilaku anak atas perkembangan
kemajuan teknologi digital –[534]
- F. Perubahan – perubahan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Berbagai Permasalahan di Sekolah,
Madrasah dan Pondok Pesantren –[541]
- G. Kesimpulan –[568]
- H. Daftar Bacaan –[569]

DAFTAR PUSTAKA –[573] IDENTITAS PENULIS –[595]

Bab 1

Konsep Dasar

Sosiologi Pendidikan

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara utuh, jujur dan bertanggungjawab tentang:

1. Pengertian, ruang lingkup, bidang kajian, tujuan dan manfaat mempelajari Sosiologi Pendidikan
2. Sejarah Munculnya disiplin Sosiologi Pendidikan
3. Para ahli Sosiologi barat dan Islam yang memberikan Kontribusi dalam Disiplin Ilmu Sosiologi Pendidikan

B. Pengertian, Ruang Lingkup dan Manfaat Sosiologi Pendidikan

Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial yang membahas kehidupan masyarakat, yakni bagaimana masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga melahirkan nilai dan norma sebagai dasar bersikap dan berperilaku, menjadi pranata social yang harus ditaati dalam suatu kelompok, organisasi, bahkan institusi sosial.

Awalnya, sosiologi menjadi ilmu sosial, cabang dari filsafat, kemudian berdiri sendiri seiring dengan perkembangan zaman. Sosiologi dapat dibedakan menjadi dua, yakni sosiologi umum dan sosiologi

khusus. Sosiologi umum menganalisa fenomena sosiokultural yang terjadi dalam masyarakat secara umum. Sedangkan, sosiologi khusus menganalisa fenomena sosiokultural yang terjadi dalam masyarakat secara khusus dan lebih mendalam. Sosiologi pendidikan termasuk kedalam sosiologi khusus bersama dengan sosiologi perdesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi agama, sosiologi Islam dan sebagainya. (Ahmadi, 2004). Pencabangan ini terjadi karena titik fokus yang dikaji berbeda-beda.

1. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Secara etimologis, sosiologi pendidikan berasal dari kata ‘sosiologi’ dan ‘pendidikan.’ ‘Sosiologi’ berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni ‘socius’ dan ‘logos’. ‘Socius’ (Yunani) berarti ‘kawan’, ‘berkawan’, ataupun ‘bermasyarakat’, sedangkan ‘logos’ berarti ‘ilmu’ atau dapat juga ‘berbicara tentang sesuatu’. Dengan demikian secara harfiah istilah “sosiologi” dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Pendidikan berasal dari kata Arab, yakni *ta’dib* (*mendidik budi pekerti*), *tarbiyah* (mengasuh, merawat, membimbing, mengarahkan) dan *ta’lim* (*mengajar*). Pendidikan merupakan proses usaha sadar yang dilakukan pendidik kepada terdidik untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku yang lebih dewasa, sehingga dapat bertanggungjawab. Pendidikan merupakan proses interaksi, dimulai dengan kontak sosial (langsung atau tidak langsung),

dilanjutkan dengan komunikasi secara lisan, tulisan atau isyarat, untuk menyampaikan pesan, ide dan gagasan. Melalui proses interaksi inilah terjadi akulturasi maupun asimilasi, sehingga dapat membentuk kepribadian baru yang lebih sempurna, baik bagi pendidik maupun terdidik. Melalui proses pendidikan inilah dapat terbentuk kepribadian sempurna, yakni pemimpin, kholifah (Q.S. Al Baqoroh: 30-32), baik di keluarga, masyarakat, maupun negara yang diharapkan bisa mewujudkan tatanan dan kehidupan sosial yang berkeadilan, berkemakmuran dan berkesejahteraan.

Berbagai ahli berbeda pendapat dalam menjabarkan definisi sosiologi pendidikan namun berkesesuaian, antara lain:

- a. Abu Ahmadi, menyatakan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan berisi tinjauan sosiologis terhadap proses pendidikan dan pengajaran.
- b. Charles A. Ellwood, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan seluruh poin antara proses pendidikan dan proses sosial.
- c. Dr. Ellwood, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar secara *inter-learning* antara satu orang dengan yang lainnya.

- d. E. George Payne, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan dan menjelaskan bahwa didalam interaksi sosial seperti lembaga pendidikan, kelompok sosial, maupun proses sosial terdapat individu yang memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Interaksi sosial ini membentuk tingkah laku manusia. Perubahan kondisi dan situasi baru menimbulkan interaksi sosial yang baru dan individu akan terus belajar dalam berinteraksi sosial. Hal ini menyebabkan sistem pendidikan akan terus berkembang.
- e. E. B. Reuter, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang berkewajiban melakukan analisa evolusi dari lembaga pendidikan yang berhubungan dengan perkembangan manusia, serta dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari setiap individu. Prinsip antara individu dengan lembaga-lembaga sosial adalah saling mempengaruhi.
- f. F.G. Robbins, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan

hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan.

- g. L. J. Saha, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengfokuskan pada factor-faktor sosial baik dalam menyebabkan dan disebabkannya sebuah pendidikan. Faktor-Faktor sosial yang dimaksud adalah gender, kelas sosial, ras dan etnis, serta penduduk rural-urban.
- h. R. J. Stalcup, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menganalisis proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan.
- i. S. Nasution, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Definisi ini menginginkan pendidikan sebagai aktivitas sosial agar dapat mencetak generasi yang memiliki kepribadian, karakter, dan moral yang baik.
- j. Sedangkan W. Dodson, mendefinisikan sosiologi Pendidikan sebagai Ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memanipulasi proses

pendidikan melalui lingkungan dan kebudayaan untuk mengembangkan kepribadian.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan para ahli diatas terlihat, bahwa sosiologi pendidikan mencakup individu, kelompok dan lingkungan sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Institusi pendidikan dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan luaran Pendidikan, begitu pula sebaliknya. Hubungan timbal-balik antara pendidikan dan perkembangan sosial akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial, begitu juga perubahan sosial mempengaruhi arah pendidikan, Hal ini menunjukkan adanya hubungan simbiosis-mutualisme.

Sosiologi pendidikan digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses sosial (hubungan dan interaksi manusia) dan pola sosial dalam sistem pendidikan suatu kelompok masyarakat. Sehingga, proses pendidikan dapat disesuaikan kembali dengan budaya dan kebutuhan masyarakat. Ilmu ini diperlukan agar para pendidik dan praktisi Pendidikan memahami, bahwa proses pendidikan dapat mengembangkan kepribadian yang lebih baik, serta dapat mengkaji secara utuh bahwa prinsip-prinsip dan generalisasi hubungan manusia dalam sistem pendidikan berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman.

Hasil analisis dengan ilmu sosiologi pendidikan dapat menunjukkan gambaran bahwa masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan tersebut kerap menimbulkan masalah-masalah baru dalam praktek pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, madrasah, pondok pesantren, maupun di masyarakat. Melalui kajian sosiologi Pendidikan ini diharapkan berbagai permasalahan Pendidikan bisa dianalisis, diurai dan ditemukan akar permasalahannya, sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Para pendidik maupun praktisi pendidikan sangat diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui sumbangsih pemikiran dan praktik baik mereka dalam dunia pendidikan yang fundamental.

Sosiologi pendidikan memiliki arah yang sama dengan psikologi pendidikan dalam merealisasikan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan kepribadian individu, serta menyiapkan kesanggupan mereka dalam masyarakat. Proses pengembangan itu dibutuhkan, karena masyarakat dan kebudayaan bersifat dinamis, yang mana akan berbeda setiap zaman. Namun, sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan memiliki perbedaan pada fokus perbaikannya. Sosiologi pendidikan berfokus pada struktur sosial masyarakat, sehingga menekankan pada akibat sosial dari pendidikan dan memandang masalah dari sudut pandang totalitas

lingkup sosial kebudayaan, politik, dan ekonomi. Implikasi sosiologi pendidikan terletak pada pembuatan kurikulum, pengorganisasian kelas, dan metode pengajaran. Sedangkan, psikologi pendidikan berfokus perilaku dan perkembangan pribadi melalui pembentukan kebiasaan baru dalam diri individu. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. (Ahmadi, 2004; Nasution, 1995)

Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi pendidikan mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi. Para ahli sosiologi pendidikan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pokok bahasan utama dalam sosiologi pendidikan adalah institusi pendidikan formal. Institusi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat adalah sekolah yang menawarkan pendidikan formal mulai jenjang prasekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Di samping pendidikan formal yang menjadi pokok bahasan utama sosiologi pendidikan, pendidikan non formal dan informal pun tidak luput dari perhatian para ahli sosiologi.

Tugas pendidik menurut sosiologi Pendidikan adalah sebagai pemelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat. Umumnya kaum pendidik memandang tujuan akhir

pendidikan lebih bersifat sosialis daripada individualistis. Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap masyarakat mengalami perubahan dan kontinuitas, integrasi dan desintegrasi, kerjasama dan konflik.

2. Ruang lingkup sosiologi pendidikan

Menurut Brookover (1976, hlm. 14-16) ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah:

- a. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain.
- b. Hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya.
- c. Berbagai hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan.
- d. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik.

Selanjutnya, Vembriarto (1990, hlm. 6) berpendapat bahwa ruang lingkup sosiologi pendidikan ialah sebagai berikut:

- a. Pendidikan ditinjau dari sudut orientasi sosial yang bersifat umum.
- b. Masalah proses sosialisasi anak.
- c. Kehidupan dan kebudayaan sekolah, dan pendidikan ditinjau dari sudut hubungan antar pribadi.

Sedangkan menurut Nasution (1995, hlm 6) ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah,

- a. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat

- b. Hubungan antar-manusia didalam sekolah
- c. Pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak disekolah
- d. Sekolah dan masyarakat

3. Tujuan mempelajari sosiologi pendidikan

Tujuan utama dalam mempelajari sosiologi Pendidikan adalah:

- a. Menganalisis proses sosiologi

Hasil analisis ini dapat membuat diri mengetahui bagaimana kelompok sosial dan lingkungan budaya mempengaruhi perkembangan kepribadian individu, sehingga dapat menentukan cara mengendalikan proses pendidikan yang dapat menghasilkan perkembangan kepribadian sosial yang lebih baik.

- b. Menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat

Hasil analisis ini dapat membuat diri mengetahui kedudukan dan fungsi pendidikan dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat menyesuaikan fungsi sekolah dengan struktur status sosial dalam lingkungannya.

- c. Menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat

Hasil analisis ini menyebabkan diri dapat mengetahui pola-pola interaksi dan peranan sosial dalam sekolah dan masyarakat disekitarnya.

d. Menganalisis struktur dan dinamika proses pendidikan

Hasil analisis ini dapat membuat diri mengetahui struktur yang meliputi sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan seluruhnya dengan tata sosial masyarakat. Serta, dinamika yang meliputi proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan seluruhnya dengan proses pendidikan.

e. Menganalisis tujuan pendidikan secara obyektif

Hasil analisis ini menyebabkan diri mengetahui landasan dasar dalam menetapkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan masyarakat.

f. Mempelajari perilaku sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.

g. Membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan yang mendasar

Hasil analisis masalah pendidikan dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah. Dalam sosiologi terapan pemecahan masalah dapat berupa membantu dalam pembuatan kurikulum dan metode pembelajaran yang berpengaruh dalam kehidupan berkelompok maupun lebih luas lagi dalam masyarakat, lalu dipadukan dengan ilmu lainnya pada seluruh proses pendidikan.

h. Melatih petugas pendidikan

Ilmu ini dapat digunakan oleh petugas pendidikan dalam menganalisis dan memahami karakteristik hubungan sosial dalam masyarakat dan sekolah, sehingga dapat menyesuaikan proses pembelajaran pada anak didiknya.

4. Manfaat Sosiologi Pendidikan

Terdapat berbagai manfaat mempelajari sosiologi Pendidikan, yakni:

- a. Untuk memberi pengetahuan profesional, kreativitas dan kapabilitas kepada peserta didik untuk memahami dunia yang berubah dengan segala dampaknya, yang mana dunia tersebut tempat mereka akan bekerja dan menjalani hidupnya.
- b. Untuk menumbuhkan tata nilai kemanusiaan, tata masyarakat yang di semangati oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.
- c. Untuk memberikan pencerahan kepada siswanya terkait tentang memahami dunia yang selalu berubah cepat. Misalnya: pendidikan harus membekali kepada anak didiknya untuk selalu siap berubah dan siap belajar.
- d. Menjadi jembatan untuk memajukan masyarakat agar tidak ketinggalan dalam dinamika perubahan.
- e. Menjadi panduan penelitian pada berbagai tingkat dan tipe pendidikan, serta berkontribusi

pada perkembangan metodologi dan teknik statistik (Saha, 2015)

- f. Memberikan kontribusi bagi kompetensi, keahlian, dan kemampuan dalam memahami fenomena pendidikan dan kependidikan (Damsar, 2015; hal 21)

C. Sejarah Munculnya Disiplin Sosiologi Pendidikan

Lahirnya sosiologi pendidikan disebabkan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada perubahan peran pendidik, serta perubahan interaksi antar manusia. Manusia tumbuh dan berkembang bukan hanya di sekolah melainkan di masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial. Dunia pendidikan memiliki keharusan dalam melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian secara seirama dengan arus modernisasi dan transformasi yang berlangsung dalam masyarakat modern.

Perubahan sosial yang begitu cepat mengakibatkan hubungan antar manusia berubah pula, dari sifat hubungan intim dalam kelompok primer ke sifat hubungan impersonal dalam kelompok sekunder. Pergeseran bersumber dari berbagai masalah sosial. Institusi pendidikan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang cepat, utamanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai ketimpangan budaya.

Situasi semacam ini menyebabkan proses sosialisasi anak mengalami kesulitan, sedangkan lembaga-lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya. Kemudian ahli sosiologi menyumbangkan pemikiran-pemikirannya, untuk turut memecahkan masalah pendidikan itu, maka lahirlah suatu disiplin ilmu baru yang disebut dengan sosiologi pendidikan.

Sosiologi pendidikan menjadi cabang ilmu pengetahuan baru yang berkembang menjelang awal abad ke-20. Namun, Sanafiyah Faisal dalam bukunya dikemukakan bahwa **Jhon Dewey** (1859-1952) termasuk tokoh pertama yang memandang begitu esensialnya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Menurutnya, terlihat nyata adanya perubahan struktur masyarakat yang berawal pada bentuk yang bersahaja menjadi lebih kompleks. Dalam arus perubahan yang begitu rupa tersebut, Dewey melihat betapa kecil, dan bahkan tidak ada sama sekali peranan penyiapan anak didik yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan supaya peserta didik dapat menyadari masyarakat baru yang sedang tumbuh di sekitarnya.

Dewey ingin memperbaiki keadaan tersebut melalui sekolah percobaannya di Chicago. Melalui sekolah tersebut, Dewey berupaya mengembangkan pengalaman belajar di kelas dan di sekolah menjadi suatu bentuk kehidupan yang dapat menumbuhkan semangat sosial, semangat saling membantu dan gotong royong. Oleh karena itu, beberapa upaya

persekolahan menjadi lebih dekat hubungannya dengan lingkungan rumah, anak-anak, maupun dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.

Hal serupa pula dilakukan oleh **Emille Durkheim** (1858-1917), yang dikala itu menjadi menjadi Direktur Ilmu Pendidikan dan Sosiologi. Selaku orang yang mendapat latihan dan memiliki minat utama dalam sosiologi, Durkheim memandang pendidikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sosial. Masyarakat beserta setiap lingkungan sosial di dalamnya menjadi penentu cita-cita yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Suatu masyarakat dapat bertahan hidup apabila terdapat homogenitas yang memadai dikalangan para warganya. Keseragaman menjadi komponen esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut. Pendidikan memiliki peran dalam memperkekal dan memperkuat penanamannya semenjak dini di kalangan anak didik. Namun, sebuah kerjasama tidak mungkin ada tanpa kehadiran keanekaragaman. Hal tersebut menyebabkan keanekaragaman menjadi komponen essensial pula yang perlu diupaya dan dijamin pendidikannya melalui jalan pengadaan pendidikan yang beraneka ragam, baik pada berbagai jenjang maupun spesialisasinya. Uraian diatas tidak bermaksud merinci pokok pemikiran Durkheim, tetapi sekedar untuk menekankan bahwa betapa pentingnya pengembangan sosiologis terhadap pemikiran pendidikan.

Jhon Dewey merupakan pelopor sosiologi pendidikan yang menekankan pendapat mengenai sekolah sebagai institusi sosial. Pendapat ini beliau tuliskan dalam bukunya yang berjudul *School and Society*, terbitan tahun 1899. Ahli ilmu pendidikan dan sosiologi pula menekankan pentingnya peranan sosiologi bagi pendidikan di waktu yang sama dengan pernyataan John Dewey. Kemudian diikuti para tokoh lainnya misal, A.W.Small, E.A.Kirkpatrick, C.A.Elwood, Alvin Good, dan S.T.Dutton. Mereka mempersoalkan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan pengalaman anak dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian Jhon Dewey menerbitkan kembali buku lainnya dengan judul *Democracy and Education* pada tahun 1916, yang berisikan pendapat yang lebih mendorong timbulnya sosiologi pendidikan tersebut.

Kuliah sosiologi pendidikan pertama kali diberikan oleh Henry Suzallo pada tahun 1910 di *Teacher College, University Columbia*. Namun, buku yang membahas sosiologi pendidikan baru pertama kali terbit pada tahun 1917. Buku ini merupakan karya Walter R. Smith dengan judul *Introduction to Educational Sociology*. Tahun 1916 didirikan jurusan sosiologi pendidikan di universitas New York dan Columbia. Selanjutnya, pada tahun 1928 terbitlah *the journal of educational sociology* dibawah pimpinan E.George Payne. Majalah pendidikan sosial mulai terbit dalam tahun 1936. Dilanjutkan pada tahun

1940, artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan sosiologi pendidikan mulai dimuat dalam jurnal yang berjudul *Review of Educational Research*.

Indonesia pertama kali mencantumkan mata kuliah Sosiologi pendidikan dalam kurikulum pada tahun 1967. Mata kuliah ini dimasukkan dalam kurikulum Jurusan Didaktik dan Kurikulum, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta. Hal ini menandakan pertama kalinya sosiologi pendidikan mulai diajarkan di Indonesia.

D. Para Ahli Sosiologi Yang Memberikan Kontribusi dalam Disiplin Ilmu Sosiologi Pendidikan

Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan bermula dari sosiologi yang muncul dalam dunia Islam pada abad 13, oleh Abdul Rahman ibnu Khaldun (George Ritzer-Douglas J. Goodman, 2008), kemudian berkembang di dunai Barat pada abad 19. Berdasarkan sejarah lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan, ilmu ini merupakan disiplin ilmu yang sudah lama (namun berbagai referensi menyatakan relatif masih muda), terbukti adanya sosiolog yang mempunyai perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, yakni Ibnu Khaldun. Sejarah berdirinya sosiologi pendidikan tidak terlepas dari peran para tokoh sebagai berikut:

1. Ibnu Khaldun (1332-1406)

Abdul Rahman Ibnu Khaldun yang kemudian dikenal Ibnu Khaldun, merupakan tokoh muslim

yang memiliki kontribusi besar bagi terlahirnya sosiologi pada masa klasik, sebelum masa modern di dunia Barat. Lahir di Tunisia, Afrika Utara, 27 Mei 1332 (George Ritzer, 2008), Awalnya, selama dua dekade aktif dalam bidang politik, bahkan pernah dipenjara selama 2 tahun di Maroko karena keyakinannya bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Kemudian kembali ke Afrika Utara, lebih fokus melakukan studi ilmiah tentang masyarakat, riset empiris, menganalisis sebab-sebab fenomena sosial, kemudian menulis menjadi karya fenomenal. Karya-karyanya mengantarkan beliau diangkat menjadi guru di Universitas Islam Al Azhar Kairo. (George Ritzer, 2008).

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya menghubungkan pemikiran sosiologi dan observasi sejarah. Menjelang kematiannya tahun 1400, Ibnu Khaldun menghasilkan karya berjudul “Muqoddimah Ibnu Khaldun”, mengandung berbagai macam pemikiran yang mirip dengan sosiologi zaman sekarang. Ia memusatkan perhatian pada berbagai Lembaga social (misalnya lembaga politik dan ekonomi) dan hubungan antara lembaga sosial tersebut. Tertarik melakukan studi perbandingan masyarakat primitive dengan masyarakat modern, bahkan studi tentang Pendidikan di masyarakat.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang Pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis dan empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi dan tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Ibnu Khaldun menyakini, bahwasannya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya, berusaha untuk melestarikan eksistensi masyarakat yang akan datang. Tantangan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, melahirkan masyarakat yang berkebudayaan, serta berusaha untuk melestarikan dan meningkatkannya untuk eksistensi masyarakat selanjutnya (Komarudin, 2022).

2. Lester Frank Word (1841-1913)

Lester Frank Word adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya *Applied Sociology* (sosiologi terapan) yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi, kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial

tersebut mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kecakapan-kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Sumbangan Word yang penting terhadap sosiologi pendidikan adalah pemikirannya tentang evolusi sosial. Evolusi sosial adalah perkembangan masyarakat secara gradual yang menunjukkan proses perubahan dalam dinamika kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Misalnya, adat serta peraturan diubah sesuai dengan desakan keperluan-keperluan baru dari individu-individu dalam masyarakat. Menurut Word, pendidikan adalah alat penting untuk mendorong terjadinya proses evolusi masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Sekolah merupakan institusi penting untuk menuju perubahan masyarakat dan mempunyai fungsi sosial yang lebih besar daripada peran mengajar individu.

3. John Dewey (1859-1952)

Gagasan Lester Frank Word tersebut dikembangkan kembali oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyhurnya yang berjudul *School and Society* terbit pada tahun 1899. Buku tersebut menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Dewey memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting.

Dewey meneliti tentang kehidupan anak-anak kota yang tampak acuh dan buta terhadap produk yang dimanfaatkan setiap hari, seperti pakaian, gas, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, mereka hanya tinggal memakai tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Kondisi yang seperti ini dapat diperbaiki melalui dengan jembatan lembaga pendidikan. Dewey memandang bahwa tipe dari pragmatismenya diasumsikan sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai wahana yang strategis dan sentral dalam upaya kelangsungan hidup di masa depan. Pendidikan Nasional Amerika, menurut Dewey, hanya mengajarkan muatan-muatan yang sudah usang (*out of date*) dan hanya mengulang-ulang sesuatu lampau, yang sebenarnya tidak layak lagi untuk diajarkan kepada anak didik. Pendidikan yang demikian hanya mengebiri intelektualitas anak didik.

Buku yang ditulis Dewey dengan judul *Democracy and Education* (1916), menawarkan suatu konsep pendidikan yang adaptif dan progresif bagi perkembangan masa depan. "*Dewey elaborated upon his teory that school reflect the community and be patterned after it so that when children graduate from school they will be properly adjusted to asumse their place in sociaty.*" Dari kutipan di atas dapat dipahami secara bebas

bahwa pendidikan harus mampu membekali anak didik sesuai dengan kebutuhan yang ada pada lingkungan sosialnya. Sehingga, apabila anak didik tersebut telah lulus dari lembaga sekolah, ia dapat beradaptasi dengan masyarakatnya.

Untuk merealisasikan konsepnya tersebut, Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran yaitu:

a. *Problem Solving Method*

Metode *problem solving*, anak dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah-masalah yang menantang, dan anak didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memecahkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan perkembangan kemampuannya. Dalam proses belajar mengajar seperti itu, guru bukannya satu-satunya sumber, bahkan kedudukan seorang guru hanya membantu siswa dalam memecahkan kesulitan yang dihadapinya. Metode semacam ini dengan sendirinya menyebabkan pola lama yang hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya pusat informasi (metode “*paedegogy*”) diambil alih kedudukannya oleh metode “*andragogy*” yang lebih menghargai perbedaan individu anak didik.

b. *Learning by Doing*

Konsep ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia

pendidikan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran ini adalah agar anak didik yang telah menyelesaikan pendidikannya dapat hadir dalam masyarakat, serta ketrampilan-ketrampilan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sosialnya.

4. Emile Durkheim (1858-1917)

Salah seorang tokoh penting dalam khazanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emile Durkheim terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu *social thing* (ikhtiar sosial). Atas dasar pandangan ini beliau mengatakan bahwa “pendidikan itu bukan hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk yang dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri”.

Teori pemikiran Durkheim terangkum dalam konsep “solidaritas sosial” yang dibagi menjadi dua yakni,

a. Solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama. Menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata terletak pada warga masyarakat yang sama. Indikator paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan

itu (*repressive*). Ciri khas penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Homogenitas serupa itu hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim.

b. Solidaritas organik

Solidaritas organik didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Bertambahnya ketergantungan sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan menggalakan bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan daripada yang bersifat represif. Dalam sistem organik, kemarahan kolektif yang timbul karena perilaku menyimpang menjadi kecil kemungkinannya, karena kesadaran kolektif itu tidak begitu kuat.

Pandangan sosiologi Durkheim di atas, berpengaruh terhadap pandangan pendidikan. Dia mengatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan dan lingkungan sosialnya merupakan penentu cita-cita yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Suatu masyarakat dapat bertahan hidup hanya kalau terdapat suatu tingkat homogenitas yang memadai di

kalangan warganya. Keseragaman yang esensial dituntut dalam kehidupan bersama, dapat diupayakan melalui pendidikan semenjak dini di kalangan anak-anak. Keanekaragaman yang penting itu dapat dijamin oleh upaya pendidikan dengan jalan pengadaan pendidikan yang beraneka ragam, baik jenjang pendidikan maupun spesialisasinya. Pandangan Durkheim tentang pendidikan ini menekankan bahwa pendidikan bukanlah hanya satu model tetapi bermacam-macam. Dengan demikian, masyarakat secara keseluruhan dan lingkungan sosialnya dapat menentukan tipe-tipe pendidikannya.

Adanya beragama saluran pendidikan, menurut Durkheim sebagai sarana untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan psikologis mendasar manusia. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial, menjadi satu paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna.

5. Karl Mannheim (1893-1947)

Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Mannheim sebagai sosiolog yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan, memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Mannheim menyatakan

bahwa “ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia”. Terlebih lagi jika pendidikan dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan tahap pertumbuhannya.

Pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang mengkaji hubungan masyarakat dan pengetahuan. Menurut Mannheim penggunaan pendekatan sosiologis terhadap permasalahan pendidikan, tidak saja dapat membawa nilai positif di dalam perumusan tujuan pendidikan, akan tetapi dapat pula membantu pada pengembangan konten dan metodologi. Dalam konteks sosiologi pengetahuan, pendidikan mempunyai peran penting dalam perkembangan masyarakat. Menurut Mannheim, pendidikan tidak semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transformasi keahlian teknis. Pendidikan merupakan bagian dari proses mempengaruhi manusia. Pendidikan hanya dapat dipahami dalam konteks untuk membentuk masyarakat seperti apa yang kita inginkan.

Pemikiran pendidikan Mannheim terangkum dalam publikasinya dengan judul *An Introduction the Sociology of Education*. Artikel ini mencantumkan tiga hal penting dalam kurikulum yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan guru, yakni:

- a. Sosiologi untuk guru, yang meliputi; (1) sifat manusia dan tata sosial; (2) dampak kelompok sosial terhadap individu; (3) struktur sosial.
- b. Sosiologi pendidikan, meliputi pembahasan; (1) sekolah dan masyarakat; (2) sosiologi pendidikan dan aspek-aspek sejarahnya; (3) sekolah dan tata sosial.
- c. Sosiologi mengajar, mencakup: (1) interpretasi sosiologi terhadap kehidupan sekolah; (2) hubungan guru dan murid; (3) masalah-masalah organisasi sekolah.

6. George Payne

Menurut George Payne, yang kerap disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan, mengemukakan secara konseptual yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan adalah “*by educational sosiologi we the science whith describes andexplains the institution, social group, and social processes, that is the spcial relationships in which or through which the individual gains and organizes experiences*”. Payne menegaskan bahwa, di dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, terdapat apa yang dinamakan

hubungan-hubungan sosial, dimana dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologisnya.

E.G Payne secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komperhensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Bagi Payne sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utamanya ialah memberikan guru-guru, para peneliti dan orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan.

E. Kesimpulan

Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membahas kehidupan masyarakat terkait dengan Pendidikan, yakni usaha sadar untuk mendewasakan peserta didik. Sosiologi Pendidikan membahas dan diterapkan untuk memecahkan segala problematika yang ada dalam pendidikan, terutama terkait interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan, guru, dan sesamanya. Juga melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem Pendidikan. Aspek-aspek

sosial dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan segala suatu yang berhubungan dengan pendidikan, guna tercapainya kemajuan pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah mengkaji bagaimana institusi dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan outcome pendidikan dan begitu pula sebaliknya.

Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan bermula dari sosiologi yang muncul dalam dunia Islam pada abad 13, kemudian berkembang di dunia Barat pada abad 19. Ibnu Khaldun merupakan sosiolog yang memiliki konsen terhadap fenomena sosial, termasuk Pendidikan, kemudian dilanjutkan oleh berbagai sosiolog di Barat, misalnya Lester Frank Word, John Dewey, Emile Durkheim, Karl Mannheim, George Payne dan lain-lain.

F. Daftar Bacaan

1. *Al Quran dan Terjemahnya*, Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, Kerajaan Saudi Arabia.
2. Anshori, Isa. (2020). *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center. <http://digilib.uinsa.ac.id/39333/>
3. Billington, Ray, (1988). *Living Philosophy: an Introduction to Moral Thought*, New York, Routledge & Kegen Paul,
4. Faisal, Sanafiah, (tt), *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, .

5. Komarudin, K. (2022). "Pendidikan Perspektif Ibnu Khaldun". *PANDAWA*, 4(1), h: 23-41. Retrieved from <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/1419>
6. Maliki, Zainudin, (2008). *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
7. Nasution, S. (2010). *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
8. Pidarta, Made. (2000). *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,
9. Ritzer, George & Goodman, Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi Moderen*, Terjemahan, Jakarta: Kencana,
10. Sahakian, William S. (1968). *History of Philosophy: from Earliest Times to the Present*, New York: Barnes & Nobles Books.
11. Zaitun, (2016). *Sosiologi Pendidikan (Teori dan Aplikasinya)*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company.

Bab 2

Paradigma dan Teori dalam Sosiologi Pendidikan

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara utuh, jujur dan bertanggungjawab tentang:

1. Pengertian paradigma, teori serta perbedaan paradigma dengan teori
2. Paradigma dan teori sosiologi Pendidikan (behaviorisme, constructivisme , humanism, serta social and situationalism)

B. Pardigma dan Teori

1. Pengertian Paradigma

Istilah paradigma muncul pada abad pertengahan di benua Eropa yakni di Inggris. Paradigma merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani paradigma ditulis *paradeigma (para dan deiknuna)* yang berarti “membandingkan” dan “memperlihatkan”. Sehingga, paradigma dapat didefinisikan sebagai cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia sendiri paradigma diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan.

Secara umum paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara pandang yang dipergunakan oleh seseorang atau ilmuwan untuk mempelajari objek keilmuan mereka. Istilah paradigma digunakan untuk menjelaskan sudut pandang seseorang dalam melihat sesuatu. Paradigma juga dapat diartikan sebagai bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu, sehingga dapat mempengaruhi proses berpikir.

Dari kalangan para ahli sendiri, istilah paradigma menjadi terkenal oleh Thomas Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution* (Nurani, 2010). Paradigma dalam buku ini didefinisikan sebagai landasan berpikir, konsep dasar, maupun suatu landasan berpikir yang digunakan sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Denzin dan Lincoln pula berpendapat senada, yang mana paradigma dapat dipandang sebagai seperangkat kepercayaan dasar yang bersifat pokok atau prinsip utama.

Paradigma sosiologi merupakan pandangan mendasar yang digunakan oleh sekelompok sosiolog tentang sesuatu yang diyakini benar terhadap kehidupan sosial. Paradigma sosiologi

terbagi atas tiga jenis paradigma yaitu (Alimandan, 1992),

a. Paradigma fakta sosial

Paradigma Fakta sosial merupakan suatu konsep yang diprakarsai sosiolog Prancis bernama Émile Durkhem. Landasan paradigma ini terletak pada karyanya yang berjudul *the Rules of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897). Buku *the Rules of Sociological Method* mengandung pandangan Durkheim terkait kedudukan sosiologi yang terpisah dari psikologi dan filsafat, sedangkan bukunya yang berjudul *Suicide* mendokumentasikan hasil studi adanya faktor sosial berupa tekanan negatif dalam masyarakat yang menyebabkan tingginya tingkat keinginan untuk berperilaku membunuh diri sendiri. Berbagai buku tersebut memunculkan kesadaran bahwa ranah dan objek penelitian sosiologi wajib berupa sesuatu yang berasal dari dunia nyata bukan hasil dari introspeksi dan spekulatif. Oleh karena itu, muncul konsep paradigma fakta sosial. (Alimandan, 1992; Ritzer and Murphy, 2019)

Manusia adalah makhluk sosial yang berusaha memuaskan hasrat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Durkheim berpandangan bahwa hawa nafsu harus dikendalikan, namun manusia tidak dapat mengontrol sendiri, Sehingga, Durkheim berpendapat bahwa fakta-

fakta sosial diperlukan untuk membatasi dan mengendalikan hawa nafsu manusia. (Ritzer and Murphy, 2019; Rizer and Murphy, 2020)

Fakta-fakta sosial merupakan seperangkat keyakinan atau kesadaran kolektif (*Collective Conscience*). Hal ini memberikan integrasi dan regulasi yang mempengaruhi maupun memaksa seseorang dalam bertindak. Oleh karena itu, terbentuklah suatu situasi dan batasan yang mengontrol masyarakat. Fakta sosial ini dinilai bermanfaat dalam mengendalikan hawa nafsu (Ritzer and Ryan, 2011; Ritzer and Stepnisky, 2013; Ritzer and Murphy, 2019).

Kehadiran berbagai fakta sosial mewajibkan penelitian sosiologi berlandaskan pada dunia nyata bukan hasil dari ide, intropeksi, ataupun spekulatif. Cara pandang penelitian menggunakan penyusunan data yang nyata bukan sebuah pemikiran manusia. Data yang digunakan dalam konsep fakta sosial adalah sesuatu dianggap nyata bagi individu dan memiliki pengaruh pada kehidupannya. Menurut Durkheim, terdapat dua macam bentuk fakta sosial yaitu, (Alimandan, 1992)

1) Berbentuk material

Suatu barang yang dapat dipelajari dan diobservasi. Bentuk material adalah bagian dari dunia nyata (*external world*), seperti arsitektur dan norma hukum.

2) Berbentuk non material

Sesuatu yang dianggap nyata (*external*). Bentuk non-material merupakan fenomena yang bersifat *intersubjektif* yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia dan tidak dapat diraba, Hal ini merupakan hasil dari pergaulan hidup manusia seperti egoism, altruism, dan opini.

Charles K. Warriner memiliki pandangan yang berbeda dengan Durkheim terkait bentuk fakta sosial. Dirinya menyakini bahwa seluruh fakta sosial merupakan suatu barang yang nyata (*real thing*) seperti pada kehidupan kelompok. Warriner menyakini bahwa kelompok adalah fakta sosial terpenting. Pendapat ini sama seperti Broom dan Biersted (1970). Terdapat 4 proporsi yang mendukung posisi kelompok sebagai sesuatu yang nyata yaitu,

- 3) Kelompok tampak lebih abstrak dari individu. Hal ini diakibatkan diri dapat melihat individu, namun tidak dapat melihat kelompok kecuali dapat mengamati individu.
- 4) Kelompok tersusun atas individu
- 5) Fenomena sosial hanya mempunyai realitas individu
- 6) Tujuan mempelajari kelompok adalah untuk mendapatkan pandangan dan meramalkan perilaku individu

Konsep paradigma fakta sosial memusatkan perhatian penyelidikan sosiologi pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial. Menurut Ritzer (1992), fakta sosial memiliki 2 tipe dasar yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Struktur sosial diartikan sebagai jaringan hubungan sosial yang memiliki proses interaksi sosial secara terorganisir, serta melalui kedudukan sosial dari individu dan sub-kelompok yang dapat dibedakan. Sedangkan, sosiologi modern mengartikan pranata sosial sebagai hubungan antara berbagai norma dan nilai yang berada disekitar aktivitas manusia.

Paradigma fakta sosial mencakup sejumlah perspektif teoritis. Varian teorinya seperti berikut,

1) Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini menekankan pada keteraturan, mengabaikan konflik, dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang mana didalamnya terdiri atas berbagai elemen sosial yang dapat dibedakan. Elemennya yang dimaksud dalam teori ini adalah fakta-fakta sosial. Setiap elemen memiliki fungsi yang berbeda dan saling bergantung satu sama lain. (Alimandan, 1992; Hidayat, 2016)

Suatu Elemen dapat dikatakan berfungsi apabila terjaganya stabilitas sosial melalui adaptasi dan penyesuaian status atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem, sehingga terbentuk keseimbangan sistem sosial. Terdapat 2 jenis sifat fungsi yaitu fungsi manifes (nyata) dan fungsi laten (sembunyi). Fungsi manifes adalah suatu konsekuensi yang diharapkan dan diakui. Sedangkan, fungsi Laten adalah suatu konsekuensi yang tidak diharapkan dan tersembunyi. Suatu elemen pula dapat menimbulkan efek disfungsi. Hal ini terjadi apabila terdapat perubahan pada elemen yang menimbulkan konflik dan mengganggu stabilitas sosial. Masyarakat akan memusatkan perhatian pada masalah untuk mencari cara menyelesaikannya agar kembali terjadi keseimbangan (*equilibrium*). (Alimandan, 1992; Hidayat, 2016)

Keseimbangan sistem sosial hadir akibat adanya homogenitas, kerja sama dan solidaritas sosial. Keseimbangan sosial dapat dipertahankan melalui lembaga sosialisasi. seperti keluarga, pendidikan, hukum, politik ekonomi, dan agama. Lembaga ini akan memperkuat dan mempertegas setiap elemen sosial antar generasi. Setiap generasi akan menyatu dengan kelompok masyarakat dan

kelangsungan hidup akan terjaga. (Hidayat, 2016)

Elemen sosial dapat memiliki efek ganda baik disfungsional dan fungsional, seperti kejahatan. Kejahatan secara disfungsional berkaitan dengan kekerasan fisik, kerugian harga benda, dan ketakutan. Sedangkan, adanya pandangan efek fungsional pada kejahatan bagi masyarakat karena dapat menyebabkan kesadaran yang tinggi tentang ikatan moral bersama dan meningkatkan kohesi sosial. Pandangan efek ini pula dapat berbeda pada masing-masing kelompok dalam masyarakat, contohnya kemiskinan. Efek fungsional maupun disfungsional dari kemiskinan bergantung pada kelompok masyarakat mana yang mengalaminya. (Alimandan, 1992; Hidayat, 2016)

Unsur dasar dalam teori fungsionalisme structural adalah fungsi, disfungsi, fungsi manifest, fungsi laten, dan keseimbangan. Hal penting yang dapat disimpulkan pada teori ini adalah masyarakat berada dalam keadaan statis. Masyarakat bergerak dalam keseimbangan untuk memelihara peran seseorang dalam suatu sistem sosial. Setiap elemen akan memberikan stabilitas pada masyarakat. Teori ini melihat masyarakat

dengan kondisi dinamika dalam keseimbangan (Alimandan, 1992)

2) Teori Konflik

Teori konflik yang diprakarsai Ralp Dahrendorf hadir untuk menentang teori fungsionalisme struktural, dengan menekankan ketidakteraturan dalam elemen fakta-fakta sosial dan gagasan bahwa ketertiban dipertahankan oleh berbagai kekuatan koersif dalam masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan posisi dan wewenang individu dalam masyarakat yang menyebabkan konflik. Masyarakat berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan secara terus-menerus. Teori ini memandang bahwa elemen fakta-fakta sosial memberikan disintegrasi sosial. (Alimandan, 1992; Ritzer, 2022)

Kekuasaan dan wewenang menempatkan individu dalam sebuah posisi dari golongan yang berkuasa dan golongan yang dikuasai. Konflik terjadi akibat adanya distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata, sehingga mereka berusaha mencapai kepentingan masing-masing. Golongan berkuasa berusaha mempertahankan *status-quo*, sedangkan golongan yang dikuasai ingin adanya perubahan. Golongan berkuasa memiliki kepentingan yang nyata

dalam mempertahankan posisinya, sedangkan golongan yang dikuasai memiliki kepentingan laten yang menyebabkan adanya usaha dalam bersikap dan bertindak agar dapat menyesuaikan diri dengan peran yang diharapkan.

Dahrendorf membagi golongan tersebut kedalam 2 tipe, yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu berisi kumpulan para pemegang kekuasaan atau jabatan yang berasal dari kelompok kepentingan. Sedangkan, kelompok kepentingan merupakan bentuk struktural dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan memiliki kejelasan pada anggota, struktur, organisasi, dan program. Pencetus konflik dalam masyarakat berasal dari golongan kelompok kepentingan.

Unsur dasar dalam teori konflik adalah kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok semu dan kepentingan, serta posisi dan wewenang. Unsur ini dapat menerangkan berbagai bentuk dari konflik dan sebab timbulnya konflik sosial. Fokus utama peneliti sosiolog dalam teori ini adalah perbedaan posisi dan wewenang individu dalam masyarakat. Analisa konflik sosial

dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai peran kekuasaan dalam masyarakat dan memperhatikan struktur dalam susunan sosial yang dibantu oleh harapan terhadap kemungkinan mendapatkan kekuasaan.

Teori ini menyimpulkan bahwa masyarakat tidak pernah merasa aman dari pertentangan atau konflik. Adanya pengabaian pada berbagai norma dan nilai masyarakat yang menjamin terciptanya keseimbangan. Teori ini terlalu mengabaikan stabilitas dan keteraturan yang memang sedang berdampingan dengan konflik dalam masyarakat.

3) Teori Sistem

Teori system ini tidak dominan pada paradigma fakta sosial apabila dibandingkan dengan dua teori diatas (Ritzer, 2022).

a) Teori sosiologi makro

Paradigma ini mengarah pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif untuk melihat perilaku yang tampak dan tidak memerlukan pengkajian mendalam. Teknik Pengumpulan data kuisisioner-wawancara dan *historical-comparative* paling sesuai dengan metode peneitian ini. Teknik kuisisioner-wawancara memiliki kelemahan yang memungkinkan

tercampurnya fakta sosial dengan fakta individual. Sehingga, James Coleman (1970) memberikan tips pembuatan kuisisioner yang dapat mengatasi permasalahan dalam pengumpulan data seperti berikut,

- Menyusun pertanyaan secara runtut dan rasional agar memperoleh data sosiometrik, dengan demikian memperoleh data tentang struktur kelompok. Hal ini cara pertama dalam memperoleh informasi fakta sosial.
- Mengajukan pertanyaan kepada individu sesuai unit sosialnya sendiri. Hal ini merupakan cara terakhir memperoleh informasi fakta sosial.

- Menggunakan teknik sampling tertentu

- *Snow ball sampling*

Teknik ini dilakukan dengan cara menanyakan siapa saja teman terdekat dari anggota sampel, dan dilakukan hal yang serupa pada teman sampel. Sehingga memperoleh informasi dengan sampel yang relative besar.

- *Saturation sampling*

Teknik ini mengajukan pertanyaan sosiometrik dalam jumlah yang banyak.

- *Multy stage sampling*

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang terlihat oleh panca indra, tidak sampai pada memahami dibalik berbagai fenomena tersebut. Teknik dapat menggunakan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertanyaan hanya sebatas “apa” dan “bagaimana” tidak sampai menjawab pertanyaan “mengapa semuanya terjadi”, sehingga pembahasan tidak mendalam untuk membongkar dibalik yang nampak.

b. Paradigma definisi sosial

Paradigma definisi sosial merupakan cara pandang yang diprakarsai oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman. Sosiologi dalam paradigma ini dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha menafsirkan dan memahami tindakan sosial dalam hubungan dan situasi sosial, agar sampai ke penjelasan kausal. Tindakan dan hubungan manusia dipahami sebagai hasil dari cara individu mendefinisikan sesuatu. Segala tindakan dan hubungan sosial yang terjadi akan penuh dengan makna dan arti, serta selalu ada tujuan maupun manfaat yang ingin diperoleh dan diberikan kepada lainnya.

Hal tersebut menyebabkan paradigma struktur sosial dicirikan sebagai suatu fenomena rasionalisasi (Alimandan, 1992; Ritzer and Stepnisky, 2013; Ritzer and Murphy, 2019; Ritzer, 2022)

Konsep dan pokok persoalan dalam paradigma ini adalah tindakan sosial dan hubungan sosial. Tindakan sosial diartikan sebagai sebuah tindakan individu yang mempunyai makna maupun arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain. Terdapat motivasi dalam melakukan interaksi sosial. Apabila interaksi diarahkan pada benda mati atau objek fisik, tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain/sosial maka disebut sebagai tindakan individu. (Alimandan, 1992; Genov, 2022)

Tindakan sosial memiliki beberapa tipe yang dibagi berdasarkan rasionalitasnya yaitu (Alimandan, 1992),

1) *Zwerk rational*

Tindakan sosial murni yang mana individu dapat menilai cara terbaik dalam mencapai tujuan dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tindakan ini paling rasional.

2) *Werktrational artion*

Sebuah tindakan sosial yang mana individu tidak memahami dirinya sendiri,

Individu tersebut kebingungan maupun tidak mampu menilai apakah tindakan yang dilakukan merupakan cara terbaik dalam mencapai tujuan. Hal ini pula terjadi dalam menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tindakan ini masih rasional, namun memiliki tingkatan yang lebih rendah dari tipe pertama.

3) *Affectual action*

Tindakan yang dibuat-buat. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan, Rasionalitas tindakan ini lebih rendah dari 2 tipe diatas atau tidak rasional sama sekali..

4) *Traditional action*

Tindakan yang didasarkan pada berbagai kebiasaan dimasa lalu saja.

Hubungan sosial diartikan sebagai tindakan beberapa individu yang memiliki makna dan diarahkan pada tindakan individu lainnya. Hubungan ini ada karena setiap individu saling menyesuaikan (*mutual orientation*). Manusia secara umum memiliki akal sehat-nalar positif yang secara sosial bersifat bijaksana, kreatif, dan alamiah. Oleh karena itu, pelaku utama dalam paradigma ini bersifat dinamis dan mempunyai kekuatan berupa pemikiran kreatif yang memunculkan tindakan aktif dan kreatif dalam proses interaksi. Paradigma ini memiliki berbagai bentuk empiris

berupa sebuah pola-pola dengan pendekatan yang sama dengan paradigma fakta sosial seperti agama dan ekonomi. (Alimandan, 1992; Ritzer and Murphy, 2019)

Terdapat berbagai macam teori yang menggunakan paradigma definisi sosial. Setiap teori ini mengandung berbagai cara untuk mengamati proses pemikiran kreatif manusia yang tidak dapat dilihat secara langsung. Berikut teorinya (Alimandan, 1992; Ritzer, 2005; Ritzer and Stepnisky, 2013)

1) Teori Aksi (*Action theory*)

Teori ini dikembangkan oleh berbagai tokoh dan mengalami puncak perkembangannya pada tahun 1940. Berbagai karya yang menggambarkan teori ini diantaranya karya Florian Znaniecki "*the method of sociology*" (1934) dan "*social action*" (1936), Robert M. Mac Iver "*sociology: it's structure and changes* (1936), Talcot parsons "*The structure of social action*" (1937). Hinkle merangkumkan berbagai asumsi dasar teori aksi berdasarkan karya dari berbagai tokoh diatas menjadi 7 premis, yaitu:

- a) Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek

- b) Sebagai subyek manusia bertindak untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tanpa tujuan
- c) Manusia dalam bertindak menggunakan berbagai cara, teknik, prosedur, metode, dan seperangkat pertimbangan kesesuaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut
- d) Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dirinya sendiri
- e) Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi berbagai tindakan yang akan, sedang, dan telah terjadi
- f) Berbagai ukuran, aturan, maupun prinsip moral diharapkan timbul saat pengambilan keputusan
- g) Studi mengenai antar hubungan sosial membutuhkan penggunaan teknik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode *verstehen*, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau *vicarious experience*.

Terdapat 2 tokoh lainnya yang semakin memperjelas bahwa teori aksi termasuk ke dalam paradigma definisi sosial yaitu C. H. Cooley dan Talcot Parsons. Cooley berpendapat bahwa arti penting dalam kehidupan masyarakat mengandung berbagai faktor seperti kesadaran subyektif, perasaan individual, sentimental, dan ide-ide. Faktor-

faktor tersebut yang mendorong manusia untuk berinisiatif maupun mengakhiri tindakannya terhadap orang lain. Cooley menyatakan bahwa metodologis yang tepat digunakan dalam teori aksi adalah metode verstehen. Pendekatan menggunakan metode tersebut memungkinkan sosiolog dapat memahami pengalaman personal dan kesadaran internal dari setiap perilaku manusia secara sosial, sehingga tidak memusatkan perhatian pada tingkah laku yang tampak diluar.

Tokoh selanjutnya terdapat Talcot Parson yang menerangkan konsep voluntarisme atau kesukarelaan dalam teori aksi. Konsep voluntarisme menjelaskan bahwa pelaku sosial mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternative tindakan, walaupun pelaku dibatasi oleh berbagai kendala seperti tujuan yang hendak dicapai, kondisi, norma sosial, nilai sosial, dan situasi penting lainnya. Sehingga, konsep ini menunjukkan bahwa pelaku sosial memiliki kemampuan dalam berpikir secara aktif dan kreatif untuk mengambil keputusan tentang sarana dan cara apa yang akan dipilih dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini pula menunjukkan bahwa pelaku sosial memiliki kemampuan evaulatif, karena dapat menilai

dan memilih alternatif tindakan. Proses pemahaman tindakan sosial dalam teori ini memerlukan pendekatan yang bersifat subyektif. Hal ini menyebabkan metodologis yang dapat menggunakan pendekatan subyektif dengan cara penafsiran dan pemahaman tindakan sosial.

Berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori aksi menggambarkan tindakan sosial sebagai suatu proses yang melibatkan pelaku sosial dalam pengambilan berbagai keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Walaupun terdapat batasan dan kendala dalam sistem kebudayaan (norma, ide, nilai sosial), pelaku sosial tetap memiliki keinginan untuk bebas memilih dan menentukan tindakan sosialnya melalui proses orientasi.

2) Interaksionisme simbolik

Interaksionisme simbolik merupakan suatu perspektif baru yang dihasilkan dari pengembangan *action theory*. Teori ini digagas oleh G. H. Mead yang ingin membedakan teori interaksionisme simbolik dengan behaviorisme radikal. Mead menekankan pentingnya aspek terselubung dalam melakukan tindakan, sehingga memerlukan teknik intropeksi dalam

mempelajari tindakan sosial. Teknik ini diperlukan agar dapat mengetahui berbagai hal yang melatarbelakangi tindakan sosial dari sudut pandang pelaku sosial secara obyektif. Mead pula berpendapat bahwa manusia tidak bisa disamakan dengan hewan, perbedaan terletak pada aspek kualitatif yang mana manusia menggunakan bahasa dan kemampuan belajar. Sehingga, perilaku manusia tidak dapat direndahkan dengan perilaku hewan.

Tokoh selanjutnya yang membedakan teori ini dengan behaviorisme adalah Herbert Blumer. Interaksi manusia dipandang memiliki sifat khas berupa proses interpretasi dan kemampuan dalam berpikir yang saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakan. Sifat ini menyebabkan setiap respon atau tindakan yang ditimbulkan memiliki makna untuk pihak lain dan dirinya. Interaksi antar individu diperantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, ataupun usaha saling memahami makna dari tindakan masing-masing pihak.

Fakta sosial dalam teori ini dipandang sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, bukan sesuatu yang mengendalikan dan memaksakan tindakan manusia. Fakta sosial seperti organisasi

masyarakat mengandung kerangka dengan berbagai simbol interaksi manusia. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa sebuah organisasi masyarakat atau kumpulan berbagai orang merupakan unit tindakan yang bertindak menurut situasi tertentu, bukan menurut kekuatan dari luar (budaya, struktur sosial, maupun keinginan sesukanya).

Terminologi utama dalam teori interaksionisme simbolik untuk memahami kehidupan sosial adalah individual, interaksi, dan interpretasi. Individu atau berbagai unit tindakan terdiri atas sekelompok orang yang saling menyesuaikan tindakan mereka dengan lainnya melalui proses interpretasi. Teori ini memandang manusia memiliki kedudukan, sehingga mampu menciptakan dunianya sendiri.

Tokoh selanjutnya yang membahas teori ini adalah Arnold Rose, yang mana memberikan gambaran konsep tindakan menurut pandangan teori interaksionisme simbolik melalui runtutan seri asumsi dan proposisi umum seperti dibawah ini:

a) Asumsi 1

Asumsi ini membahas pokok perhatian analisa sosiologi dalam teori ini. Pokok pembahasan terkait pembeda antara manusia dengan hewan seperti

kemampuan berkomunikasi, belajar, dan memahami makna dari berbagai simbol. Simbol merupakan hasil belajar dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hal ini dapat divisualisasikan dan dikomunikasikan secara verbal dengan pemakaian bahasa.

b) Asumsi 2

Asumsi ke 2 menjelaskan bahwa symbol mengandung makna yang dapat menimbulkan reaksi berbeda bagi setiap orang. Simbol yang disampaikan belum tentu diterjemahkan dengan hal yang sama dengan pihak lainnya. Komunikasi simbol merupakan proses dua arah yang mana kedua pihak saling memberikan makna maupun arti terhadap berbagai symbol tersebut, Oleh karena itu, diperlukan komunikasi simbol yang baik dengan cara,

- *Role Taking*

Menempatkan diri seperti lawan bicara, sehingga dapat memahami sudut pandang orang lain

- *Generalized others*

Menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami proses komunikasi dalam kelompok

c) Asumsi 3

Asumsi ke 3 menunjukkan bahwa berbagai simbol merupakan pusat kehidupan yang mengandung berbagai pengetahuan maupun informasi berupa arti, nilai, dan cara orang lain bertindak. Hal ini dapat dipelajari dengan cara komunikasi.

Proposisi umum/deduksi I

Terdapat beberapa syarat agar dapat berlangsungnya interaksi yaitu,

- Adanya seperangkat makna atau arti yang sama antar perilaku. Budaya dalam masyarakat yang menyediakan kesamaan makna terhadap simbol-simbol tertentu dapat menyebabkan masyarakat tidak terpecah belah dan bubar. Mempelajari budaya maupun sub-budaya dapat digunakan untuk memprediksi tindakan sosial dan mengeksplorasi tindakan diri yang dapat digunakan dalam memprediksi tindakan orang lain.
- Adanya tanggapan atas komunikasi yang pantas dan memiliki kepastian dalam berkomunikasi. Masyarakat akan kacau apabila tidak ditanggapi dengan pantas, keliru, maupun tidak mempunyai kepastian.

d) Asumsi 4

Asumsi ke 4 menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pelaku sosial dalam kelompok dengan berbagai simbol yang memiliki kesamaan makna dan nilai-nilai dalam berbagai satuan kelompok.

Proporsi Umum/Deduksi II

Setiap pelaku sosial dapat menentukan sesuatu yang bermakna bagi dirinya dan memiliki saran tindakan yang personal, serta bersifat khas dalam mencapai tujuan. Menurut Mead, manusia memiliki kepribadian personal yang dapat membuat dirinya memiliki kemampuan dalam menciptakan sasaran tindakan untuk dirinya sendiri. Blummer mencirikan kepribadian manusia seperti marah, kasar, berbicara dan mendukung keteguhan hatinya, menata tujuan-tujuannya, berkompromi, dan merencanakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Seluruh kemampuan ini berpijak pada kepribadian dan memberikan kebebasan setiap individu dalam menjalani kehidupan sosialnya.

e) Asumsi 5

Asumsi ke 5 fokus pada penekanan teori ini yaitu berpikir. Hal ini diartikan sebagai sebuah proses pencarian kemampuan yang bersifat simbolis dan

bermanfaat untuk berbagai tindakan yang akan datang, dengan cara melakukan penilaian individual melalui proses menimbang keuntungan dan kerugian. Proses ini dapat membantu dirinya dalam memilih berbagai alternative tindakan yang tersedia.

Mead berpendapat bahwa manusia akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Proses ini untuk mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan secara mental yang tertutup. Berpikir diterjemahkan sebagai proses seorang pelaku sosial sedang berinteraksi dengan dirinya sendiri menggunakan berbagai simbol yang bermakna. Proses interaksi ini digunakan menentukan stimulus/rangsangan mana yang akan diberi respon/tanggapan/tindakan lebih dahulu, serta untuk memilih respon atas stimulus tersebut. Pelaku sosial akan melakukan penilaian berupa trial-error dalam pikirannya untuk mengetahui dampak yang akan muncul apabila memilih menggunakan respon-respon tertentu, sehingga dirinya akan menunda tindakannya sampai dapat memastikan bahwa respon yang akan dilakukan memiliki resiko yang kecil.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa,

- Kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar kelompok, dengan menggunakan berbagai simbol yang dapat dipahami maknanya melalui proses belajar.
- Tindakan seseorang dalam proses interaksi bukan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus eksternal, namun diperantarai oleh proses interpretasi sebelum menimbulkan suatu tindakan. Proses intepretasi merupakan hasil dari proses belajar memahami dan menyesuaikan makna dari berbagai simbol.
- Kemampuan berpikir manusia menyebabkan timbulnya kebebasan diri dalam menentukan tindakan dan berbagai tujuan yang akan dicapai, walaupun terdapat batasan (norma, nilai sosial, dan makna dari simbol) dalam melakukan tindakan.

3) Fenomenologi

Tokoh utama dalam teori fenomenologi adalah Alfred Schutz. Karya Schutz yang membahas teori ini adalah "*The phenomenology of the social world*" (1932). Fenomenologi merupakan teori dengan

orientasi mikro sosiologis yang berfokus pada studi tentang metode yang digunakan individu dalam “melakukan” kehidupan sosial untuk menghasilkan interaksi yang dapat dikenali satu sama lain dalam konteks situasi, sehingga menghasilkan keteraturan. Oleh karena itu, fokus terletak pada kesadaran biologis (*consciousness*) atas apa yang pelaku sosial pikirkan, sehingga dapat mengeksplorasi bagaimana pelaku sosial menghasilkan dan mengelola situasi yang terorganisir dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil pemikiran atas makna dan motif dalam melalui kehidupan sehari-hari merupakan inti dari etnometodologi, Metode yang menghasilkan dan memelihara keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam aktivitas kehidupan mereka, memanfaatkan pengetahuan akal sehat dalam situasi duniawi. Pokok persoalan teori ini terletak pada bagaimana kehidupan masyarakat dapat dibentuk. Schutz menyatakan bahwa sebuah tindakan dapat menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan makna/arti terhadap sebuah tindakan dan dapat memahami bahwa tindakan yang telah terjadi tersebut merupakan sesuatu yang penuh makna. Pemahaman secara subyektif tersebut sangat

menentukan kelangsungan proses interaksi sosial. Oleh karena itu dalam sebuah interaksi terdapat 2 pihak yaitu,

- a) Pihak yang memberikan makna terhadap tindakan dirinya
- b) Pihak yang menerjemahkan dan memahami tindakan yang telah dilakukan pihak lainnya, serta akan bereaksi maupun bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan pihak lainnya

Schutz mengfokuskan perhatian pada salah satu bentuk subyektif yaitu intersubyektivitas. Hal ini menyebabkan seseorang menciptakan realitas sosial yang dibatasi oleh struktur budaya dan sosial yang telah diciptakan pendahulunya. Konsep intersubyektivitas pula merujuk pada pemisahan keadaan subyektif dengan cara menggeser dimensi kesadaran umum menuju kesadaran khusus kelompok sosial yang saling berintegritas. Konsep ini memungkinkan pergaulan terjadi, namun bergantung pada setiap peran yang telah diperoleh melalui pengalaman pribadi. Pembentukan konsep berdasarkan kenyataan bahwa berbagai kelompok sosial saling menginterpretasikan tindakan dan pengalaman setiap pelaku sosial yang pernah dialami dalam proses interaksi secara individual. Saling mengintrepetasi

mengandung makna bahwa setiap individu maupun setiap kelompok saling memahami. Faktor ini diperlukan untuk menciptakan kerjasama disemua organisasi sosial. Selain itu, Schutz pula menfokuskan perhatian pada struktur kesadaran. Hal ini dibutuhkan untuk saling bertindak ataupun berinteraksi, serta dibutuhkan untuk saling memahami antar sesama. Oleh karena itu, interaksi sosial dipandang terjadi melalui penafsiran dan pemahaman tindakan pada antar individu maupun antar kelompok.

Terdapat 4 unsur pokok dalam teori fenomenologi yaitu,

a) Pelaku sosial menjadi perhatian utama dalam pengumpulan data

Hal ini perlu dilakukan agar memperoleh data terkait tindakan sosial se-subyektif mungkin. Terdapat 2 hal yang dapat menciptakan realita sosial dan mengetahui bagaimana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pelaku sosial, yaitu:

- Data terkait berbagai kesan dan hasil interpretasi individu tentang tindakannya. Hal ini diperlukan karena adanya pandangan bahwa manusia merupakan pencipta dunianya sendiri

- Data terkait pemahaman makna tindakan pelaku sosial yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri
- b) Memusatkan perhatian pada tindakan sehari-hari sesuai dengan kenyataan penting dan sikap alamiah
- Pemusatan ini diperlukan karena tidak seluruh gejala kehidupan sosial mampu diamati sesuai dengan teori ini yang bermaksud mempelajari proses terbentuknya fakta sosial, pula untuk mempelajari bagaimana individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial yang memaksa pelaku-pelaku sosial tersebut.
- c) Masalah mikro menjadi pusat perhatian
- Hal ini diperlukan untuk mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahami hubungannya dengan situasi tertentu.
- d) Memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan
- Unsur ini dibutuhkan untuk memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari. Berbagai norma dan aturan yang mengendalikan tindakan manusia, serta penetapan

struktur sosial terhadap kejadian-kejadian yang pernah dialaminya, Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukan wadah/tempat pasif yang menyimpan dan mengawetkan berbagai norma.

4) Etnometodologi

Etnometodologi merupakan teori yang memiliki orientasi mikro sosiologis pada tindakan dan perilaku pelaku sosial. Bapak teori etnometodologi merupakan sosiolog amerika bernama Harold Garfinkel. Garfinkel merupakan murid dari Alfred Schutz dan Talcolt Parson, sehingga teori ini merupakan hasil perpaduan teori fenomenologi dan teori aksi yang menghasilkan orientasi yang berbeda. Fondasi teori ini terletak pada karya Garfinkel yang berjudul “*Studies in Ethnomethodology*” (1967). Teori ini berfokus pada pengetahuan untuk mempelajari kehidupan harian pelaku sosial yang lebih berhubungan dengan apa yang sebenarnya orang lakukan dalam berbagai percakapan. Berbagai struktur dalam teori ini seperti birokrasi, kapitalisme, pembagian kerja, dan sistem sosial. (Ritzer, 2005; Ritzer, 2011).

5) Eksistensialisme

Paradigma definisi sosial menghasilkan penelitian kualitatif dengan metode khas

berupa observasi dan wawancara-kuisisioner. Metode ini memungkinkan terjadi proses penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding*), sehingga dapat memahami intrasubjektif dan intersubjektif dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Seorang sosiolog perlu menginterpretasikan tindakan pelaku utama, bukan hanya meneliti perilaku saja, diharuskan memahami setiap motif dari tindakannya. Motif dari setiap tindakan dapat diketahui melalui 2 cara yaitu melalui kesungguhan maupun saat mencoba mengenang dan menyelami pengalaman diri. Selama proses penelitian, peneliti menempatkan dirinya sebagai pelaku utama. (Alimandan, 1992; Ritzer ad Stepnisky, 2013; Ritzer, 2022)

c. Paradigma perilaku sosial

Paradigma perilaku sosial diprakarsai oleh Burrhus Frederic Skinner yang merupakan seorang psikolog. Pandangan ini berawal dari konsep behaviorsm radikal yang diciptakan Skinner sebagai metode baru dalam menganalisis perilaku. Sosiologi dalam paradigma ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan lingkungannya. Perilaku yang dipelajari sosiolog adalah bagaimana perilaku dua orang atau lebih secara bersama-sama dipengaruhi oleh

kontinjensi sosial (*social contingencies*) yang saling menguntungkan. Sehingga, pokok persoalan ditekankan pada perilaku dan stimulus eksternal berupa kekuasaan maupun kekuatan (*reinforcement*). Proses interaksi memiliki hubungan fungsional antara tingkah laku individu dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. (Alimandan, 1992; Ritzer, 2005)

Perilaku maupun stimulus yang dimaksudkan dalam paradigma perilaku sosial berbeda dengan 2 paradigma sebelumnya. Perilaku individu dalam masyarakat dipandang sebagai suatu tanggapan pasif tanpa proses berpikir dan tingkah lakunya bersifat mekanik, sehingga tidak ada kebebasan maupun kekuatan kreatif dalam merespon stimulus eksternal. Pelaku sosial hanya berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Begitu pula terdapat perbedaan stimulus eksternal yang terletak pada sumber pengendaliannya. Stimulus dalam paradigma ini merupakan kontinjensi penguatan (*contingencies of reinforcement*). *American Psychology Association* (APA) mengartikan kontinjensi penguatan sebagai proses atau keadaan yang ditimbulkan untuk menyebabkan suatu kinerja dan perilaku yang diinginkan, seperti menimbulkan berbagai peristiwa dengan stimulus positif (pujian, materil, dll) maupun

mengeleminasi peristiwa dengan stimulus negatif (hukuman, penalti, dll). Stimulus ini digunakan untuk memotivasi individu dalam berperilaku sosial. Stimulus positif berupa penghargaan akan menimbulkan perilaku yang diinginkan, sedangkan stimulus negatif seperti hukuman akan menimbulkan hambatan dalam berperilaku (Alimandan, 1992; Ritzer 2022; APA, 2023)

Paradigma perilaku sosial ini dapat menghasilkan penelitian kuantitatif maupun kualitatif, melalui metode eksperimental. Terdapat 2 teori yang perkembangannya sangat kuat dipengaruhi oleh paradigma ini yaitu, (Alimandan, 1992; Ritzer and Stepnisky, 2013),

- *Behavioral Sociology*

Penemu teori *Behavioral Sociology* adalah George C. Homans. Teori ini sangat aktif digunakan pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Tujuan dibentuk teori ini adalah untuk menjelaskan berbagai dampak dari tingkah laku yang pernah dilakukan dalam fenomena sosial melalui penerapan berbagai filosofi dan prinsip psikologi behaviorism. Subyek *behavioral sociology* adalah perilaku sosial pada pasangan, jaringan, dan kelompok, bukan perilaku individual. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku sosial (hubungan antara perilaku dua orang atau lebih) dengan kontinjensi penguatan

(*reinforcement contingencies*). Kontinjensi penguatan dalam teori ini digunakan untuk mempelajari bagaimana dua pihak atau lebih secara bersama-sama berperilaku untuk saling menguntungkan, sehingga menimbulkan kebergantungan satu sama lain. (Alimandan, 1992; Ritzer, 2005)

Fokus perhatian lainnya dalam teori ini terletak pada hubungan sejarah atas perilaku yang telah dilakukan pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Perilaku dimasa lalu akan mempengaruhi perilaku dimasa kini, begitu pula perilaku masa kini akan berpengaruh pada perilaku dimasa depan. Metode peramalan berdasarkan teori ini digunakan untuk mengetahui perilaku apa yang akan terjadi pada masa kini maupun masa depan. Konsep dasar pemahaman terletak pada *reinforcement*. Sehingga, terdapat pandangan bahwa perilaku dapat terulang apabila terdapat ganjaran yang membawa pengaruh pada pelaku utama. Kerugian pada sisi psikologis akan menimbulkan pemaksaan yang berpotensi adanya pengulangan atau sebaliknya dalam berperilaku, Faktor pemaksa tidak hanya bersifat psikologi, namun pula dapat berupa sesuatu yang dapat dipelajari. (Alimandan, 1992)

- *Social Exchange Theory*

Teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*) merupakan hasil pengembangan dari *Behavioral Sociology*. Terdapat 3 sosiolog amerika yang menjadi tokoh utama dalam perkembangan teori ini yaitu George C. Homans, Richard M. Emerson, dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial merupakan teori mikrobehavioristik dalam ilmu pengetahuan sosial khususnya sosiologi. Teori ini dapat digunakan sebagai teknik menganalisis dan menteorisasikan berbagai hubungan, perilaku, dan struktur sosial yang memiliki sifat pertukaran pada tingkat mikro. Perspektif umumnya berakar pada sejumlah ilmu pengetahuan sosial seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan mikro-ekonomi. Teori ini dipengaruhi oleh pragmatis, utilitarianisme, behaviorisme, dan fungsionalisme. Disisi lain, pula dipengaruhi oleh beberapa karya psikolog sosial dan antropolog budaya. (Alimandan, 1992; Ritzer, 2005; Ritzer and Murphy, 2019)

George C. Homans mengawali pembentukan teori ini. Tujuan pembentukannya untuk mengkritisi gagasan Durkheim yang perlu diperbarui dan diperjelas, khususnya pada pandangan terhadap timbulnya suatu fenomena baru, pandangan tentang psikologi, dan metode penjelasan dari

Durkheim. Homans berpendapat bahwa dalam menjelaskan suatu fenomena baru atas perilaku sosial yang sederhana tidak memerlukan proposisi baru, serta ilmu psikologi sudah berbeda dengan zaman Durkheim saat itu yang tidak lagi memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk tingkah laku yang bersifat insingtif dan asumsi secara universal. Sehingga, konsep psikologi dapat digunakan dalam menjelaskan perilaku sosial dalam ilmu sosiologi. Proposisi psikologi dengan pendekatan behavioristik dinilai dapat memperjelas hubungan sebab-akibat dari terbentuknya fakta sosial baru. (Alimandan, 1992; Ritzer, 2005)

Homans berupaya memperjelas fakta sosial dan pranata sosial yang sebelumnya dikembangkan oleh Durkheim. Fakta sosial diakui Homans menjadi penyebab fakta sosial baru melalui perantara variabel psikologi khususnya behavioral. Fakta sosial dinilai memiliki peran penting dalam perubahan tingkah laku yang bersifat psikologis dan selanjutnya memunculkan fakta sosial baru. Sedangkan, pranata sosial dipandang Homans sebagai sebuah pola tingkah laku yang bersifat relatif sesuai dengan kesepakatan banyak pihak. Terdapat 2 metode yang diterima Homans untuk digunakan dalam menganalisa berbagai pranata sosial tersebut yaitu (Alimandan, 1992):

1) Metode penjelasan struktural

Metode penjelasan secara fungsional dapat menjelaskan kemunculan pranata khusus dalam hubungan antara pranata lain dalam masyarakat. Homans berpendapat bahwa pranata muncul karena masyarakat tidak dapat bertahan hidup atau tidak dapat bertahan dalam keseimbangan tanpa pranata tersebut. Pranata dalam penjelasan ini menjadikannya syarat mutlak bagi kehidupan suatu masyarakat. Homans pula berpendapat bahwa teori fungsional struktural dari paradigma fakta sosial tidak menerangkan persoalan praktis. Teori fungsional struktural memiliki karakteristik proporsisi umum yang tergambar konklusinya secara logika, yang mana hidup matinya suatu masyarakat tidak memiliki hubungan dengan eksistensi dari jenis pranata tertentu.

2) Metode penjelasan historis

Homans menerima penjelasan histori dalam teori fungsional, serta menyatakan bahwa penjelasan historis merupakan dasar dari penjelasan psikologis. Analisa histori secara tepat dapat membawa ke dalam konklusi bahwa penjelasan tentang berbagai perubahan institusional terletak pada tingkatan psikologi. Alasan homans menyatakan hal serupa cukup sederhana,

yang mana seluruh institusi atau pranata adalah hasil proses perubahan yang bersifat historis dan dapat dijelaskan menggunakan sistem deduksi. Penjelasan sistem deduksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis seperti berikut,

- Tindakan sosial dilihat sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan nilai (*equivalen*) dengan tindakan ekonomis, sedangkan suatu tindakan merupakan hasil rasionalisasi berdasarkan perhitungan untung-rugi.
- Selama proses interaksi pelaku sosial mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (*cost benefit ratio*). Proporsisi yang perlu diperhatikan sebagai berikut,
 - a) Semakin tingginya imbalan (*reward*) yang diperoleh maka semakin besar kemungkinan suatu tingkah laku akan diulang
 - b) Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman (*punishment*) yang diperoleh maka semakin kecil kemungkinan suatu tingkah laku terulang.
 - c) Adanya hubungan berantai antara berbagai stimulus, serta antara berbagai

tanggapan. Poin ini bertolak belakang dengan 2 proporsi diatas.

Pembahasan teori pertukaran sosial oleh Homans tercantum dalam karyanya yang berjudul "*Social Behavior: It's Elementary Forms*" edisi pertama tahun 1961 dan edisi kedua tahun 1974. Karya tersebut menginterasikan perilaku sosial dengan berbagai prinsip psikologi khususnya pendekatan behavioristik, sehingga dapat menjelaskan bagaimana proses mendasar perilaku sosial (konformitas, kekuasaan, dan keadilan) yang muncul dari pertukaran sosial antara pihak yang sedang mencari sebuah imbalan. Homans pula memodifikasi dan mengintegrasikan prinsip dasar ekonomi ke dalam pendekatan behavioristik, khususnya beberapa asumsi tentang perhitungan rasional atas timbulnya dampak dari perilaku alternatif yang akan digunakan. Perilaku sosial didefinisikan Homans sebagai suatu aktivitas pertukaran antara pasangan (paling sedikit 2 orang) ataupun kelompok-kelompok kecil. Pertukaran dapat berupa sesuatu yang berwujud (*tangible*) maupun tidak (*intangible*), serta memiliki manfaat dan nilai ataupun tidak. Seluruh interaksi sosial dipandang selalu melibatkan pertukaran untuk mencari imbalan dan menghindari

hukuman. Imbalan yang diperoleh dari proses pertukaran dapat berupa imbalan ekonomi (moneter), imbalan sosial (status, persetujuan, nasihat, kepuasan, dan kepatuhan), dan Imbalan psikologis (stimulus, penghargaan, hukuman, keberhargaan, dan nilai). Fokus utama homans dalam teori ini adalah perilaku sosial yang timbul akibat proses saling menguatkan (*mutual reinforcement*) pada 2 pihak yang terlibat dalam pertukaran diadik (*dyadic exchange*). Kebutuhan manusia dipenuhi oleh orang lain, melalui interaksi pertukaran sosial yang saling memberikan imbalan (keuntungan) maupun penghukuman. Imbalan ini sangat subjektif karena diukur dan dianalisa berdasarkan ekspektasi atas keadilan distributif, keseimbangan, kekuasaan, status, otoritas, kepemimpinan, dan solidaritas. Sehingga, respon dapat berbeda setiap individu. Respon atas imbalan berupa suatu emosi seperti senang ataupun marah. Kerjasama atau koorperasi menjadi kontijensi sosial dalam berperilaku dan menimbulkan interaksi yang saling menguatkan. Hubungan timbal-balik ini dapat dipelihara apabila berbagai pihak saling menghargai dan menjadi penguat satu sama lain. (Ritzer, 2005)

Secara garis besar homans mempercayai terdapat banyak aspek penting dalam perilaku sosial yang dapat diturunkan menjadi berbagai proposisi perilaku sederhana. Berikut proposisi yang dibutuhkan dalam menjelaskan kondisi individu dalam berinteraksi (Alimandan, 1992; Ritzer, 2005),

1) Proporsisi stimulus

Kehadiran stimulus berupa penghargaan di masa lalu dapat menyebabkan seseorang cenderung mengulangi tindakannya. Proporsi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi dimasa lalu dengan apa yang terjadi dimasa kini.

2) Proporsisi kesuksesan

Seseorang cenderung melakukan suatu tindakan yang sama dengan masa lalu, apabila tindakan tersebut sering membuat dirinya berhasil memperoleh imbalan atau keuntungan. Konteks proporsi kesuksesan terletak pada frekuensi menerima imbalan atau keuntungan akibat keberhasilan melakukan tingkah laku tertentu di situasi maupun peristiwa yang sama. Semakin sering seseorang menerima ganjaran atas tingkah laku yang sama dimasa lalu, maka semakin adanya peluang tingkah laku terulang dimasa kini.

3) Proporsisi nilai

Seseorang cenderung melakukan suatu tindakan yang dirinya anggap akan memperoleh hasil yang sangat bernilai.

4) Proporsisi perampasan-kekenyangan (*deprivation-satiation*)

Nilai suatu imbalan akan semakin menurun apabila seseorang sering menerima penghargaan dimasa lalu.

5) Proporsisi agresi-persetujuan

Agresi atau emosi berupa kemarahan timbul apabila “imbangan yang diterima tidak sesuai harapan” maupun “hukuman lebih besar dari yang diharapkan”. Sedangkan, persetujuan dan perilaku yang menyenangkan timbul apabila “imbangan yang diterima lebih besar dari harapan” ataupun “hukuman kurang dari harapan”.

6) Proporsisi rasionalitas

Pemilihan tindakan ditentukan oleh nilai relatif terhadap hasil tindakannya dan dikalikan dengan probabilitas yang diri rasakan

Proposisi pada nomor 1-4 merupakan dasar dari prinsip-prinsip psikologi perilaku, khususnya hubungan antara *reinforcement*, stimulus diskriminatif, dan perilaku. Mereka mencerminkan asumsi utama dalam mempelajari *operant*, yang diartikan sebagai

berbagai individu cenderung mengulangi perilaku apabila dimasa lalu telah menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Proposisi ke 6 mencerminkan asumsi ekonomi mikro, yang mana berbagai individu secara rasional memperhitungkan dan membandingkan berbagai keuntungan yang diperoleh dimasa depan apabila memilih untuk melakukan suatu tindakan. Berdasarkan 2 asumsi diatas diperoleh kesimpulan bahwa terkadang manusia bertindak atas dasar konsekuensi masa lalu tanpa disertai perhitungan dan kesadaran, namun disisi lain manusia pula dapat memilih tindakan berdasarkan hasil penilaian dan perbandingan atas hasil yang akan diperoleh dimasa depan. Proposisi ke 5 merupakan konsep keadilan distributif atau keseimbangan, yaitu sebuah prinsip bahwa imbalan harus didistribusikan secara proporsional antara 2 pihak yang sama. Ketidakadilan terjadi apabila terdapat salah satu pihak yang kekurangan maupun kelebihan dalam memperoleh keuntungan dari yang diharapkan. Apabila imbalan yang diperoleh lebih rendah dari ekspektasi maka seseorang cenderung marah dan menunjukkan bentuk perilaku agresif. (Ritzer, 2005)

Homans berpendapat bahwa sosiolog harus mempelajari bentuk-bentuk dasar kehidupan sosial dalam struktur sosial skala

mikro. Tingkat analisis subinstitusional digunakan dalam menentukan faktor-faktor penentu dari dasar perilaku sosial yang menjadi landasan dalam berkelompok dan beroorganisasi. Homans percaya bahwa bentuk dasar perilaku sosial pada tingkat subinstitusional dapat merentas lapisan institusional, dan memaksa terjadinya perubahan atas cara-cara melakukan sesuatu dalam sebuah institusi. Dorongan perubahan sosial dapat berupa pemberontakan, revolusi, dan lainnya. (Ritzer, 2005)

Tokoh kedua terdapat Richard M. Emerson. Pembahasan teori pertukaran sosial tercantum dalam karya Emerson yaitu "*Power-Dependence Relations*" (1962) dan "*Logical positivism*" (1972 dan 1982). Emerson berkontribusi dalam pandangan mendasar mengenai sifat relasional *power* secara alamiah dan ekstensi teori pertukaran untuk menganalisis jaringan sosial yang diciptakan oleh hubungan pertukaran. Emerson menyatakan bahwa pusat permasalahan teoritikal dalam teori pertukaran sosial terletak pada hubungan antara *power* dan struktur sosial. *Power-Dependence Relations* memperkenalkan keterkaitan antara *power* dan *dependence* dalam hubungan pertukaran sosial. Karya tersebut berpandangan bahwa *power* antara seseorang maupun kelompok terletak

pada “*control of significant modes*” yang dipengaruhi atau dinilai berbagai sumber daya (*resources*). Kedua komponen ini menjadi unsur penting dalam perspektif sosiologi khususnya teori pertukaran. Hubungan pertukaran dipandang menjadi suatu ikatan antara dua pihak yang saling melakukan sesuatu untuk memberikan manfaat dengan alasan tertentu. *Power* yang dimaksud disini adalah “kekuasaan atas mitra pertukaran” maupun “kemampuan untuk mempengaruhi perilaku mitra”, sedangkan *Dependence* mengacu pada “sejauh mana pelaku sosial memiliki kendali atas suatu hal yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaan mitranya”. Prinsip lainnya adalah tidak berkepentingan, yang diartikan sebagaimana dalam hubungan terdapat pihak dengan kepentingan yang paling kecil dan terdapat pihak yang memiliki kekuasaan paling besar. (Ritzer, 2005)

Karya Emerson lainnya adalah *Logical positivism*. Karya ini terbagi atas 2 volume yaitu “*deductive theory of social exchange*” (Vol. 1; 1972) dan “*social relations and exchange network*” (Vol. 2; 1987). Volume 1 terletak pada proporsi perilaku dalam hubungan pertukaran sosial dengan prinsip behaviorisme sosial yang dipopulerkan Skinner dan diterapkan dalam teori pertukaran sosial oleh Homans. Fokus

utama pada volume ini terletak pada hubungan *power-dependence* yang menghasilkan 2 teori tentang *social exchange relations* dan *social exchange network*. Emerson berpendapat bahwa imbalan dan harga yang perlu dibayarkan (*cost*) mendorong pelaku sosial dalam melakukan dan terlibat dalam hubungan pertukaran tertentu. Konsep hubungan pertukaran yang seimbang pula diperkenalkan dalam teori pertukaran sosial. Keseimbangan diartikan sebagai suatu keadaan dimana berbagai pelaku sosial berada dalam hubungan yang memiliki kesetaraan *dependence* pada satu sama lain untuk memperoleh *resource* yang bernilai. *Resource* dapat berupa apapun yang bernilai seperti suatu hal berwujud berupa materil maupun suatu hal tidak berwujud seperti aktivitas dan perilaku. Hubungan pertukaran menjadi tidak seimbang apabila hubungan berada pada tingkat kebergantungan yang berbeda, sehingga menciptakan perbedaan kekuatan dalam hubungan. Adanya tingkat kebergantungan yang rendah pada pihak dalam hubungan pertukaran, menyebabkan pihak lainnya memiliki tingkat *power* yang lebih tinggi. Situasi ini disebut dengan ketidakseimbangan hubungan pertukaran sosial. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan berbagai tekanan yang menyebabkan

perubahan struktural. Volume ke 2 dalam karya "*Logical Positivism*" memiliki fokus utama pada penentuan nilai dalam pertukaran sosial. Karya ini merupakan makalah terakhir yang dituliskan Emerson sebelum meninggal dunia. Makalah ini melakukan eksplorasi teoritis tentang berbagai jenis nilai dan pengukuran yang dapat dilakukan, penukaran dapat berupa barang atau resource. Sehingga, mengandung wawasan terbaik mengenai pertanyaan tentang nilai dan manfaat yang menjadi penentu dalam pertukaran sosial yang ditemukan dalam lapangan. Volume ke 2 ini mengembangkan teori tentang "*power, dependence, and social exchange network*" (Ritzer, 2005)

Peter Blau menjadi tokoh utama ketiga dalam teori pertukaran sosial. Teori ini dibahas dalam bukunya yang berjudul "*Exchange and Power in Social Life*" (1964 dan 1986). Blau menfokuskan mikroteori pada tingkat sosiologis institusi, hal ini berbeda dengan Homans dan Emerson yang berfokus pada status antar individu. Hubungan sosiologis institusi dalam masyarakat terletak pada seseorang-institusi dan institusi-institusi. Hasil pengamatannya digunakan untuk menghormati pejabat atau pihak yang berkuasa dalam lembaga masyarakat. Persamaan teori yang dikembangkan ketiga tokoh utama teori ini

adalah terletak pada motivasi yang menjadi awal mula hubungan pertukaran diadik sederhana. Motivasi berinteraksi terletak dalam keinginan memperoleh imbalan baik berupa intrinsik maupun ekstrinsik. Apabila interaksi pertukaran terjadi, maka kedua pihak akan bertukar hadiah, barang, jasa, rasa menghargai, maupun rasa hormat. (Ritzer, 2005)

Blau mencirikan hubungan pertukaran sebagai suatu ketegangan (*strain*) yang memunculkan ketidakseimbangan. Pernyataan ini berbeda dengan Homans dan Emerson yang memerlukan keseimbangan dalam hubungan pertukaran sosial. Ketidakseimbangan akan memunculkan suatu sistem akuntansi antar kedua belah pihak yang disebut dengan norma timbal-balik (*reciprocity norm*). Norma timbal-balik mengharuskan pihak yang menerima lebih banyak keuntungan untuk membayar hutangnya melalui pemberian status pada pihak yang memberi lebih. Status dapat berupa rasa menghargai maupun rasa hormat. Pemberian status ini dinilai dapat menyeimbangkan ketidaksetaraan dalam hubungan pertukaran. Blau berpendapat bahwa perbedaan status dianggap sah dalam ketidaksetaraan interaksi pertukaran. (Ritzer, 2005)

Power dapat dipertahankan dalam pertukaran sosial apabila terdapat pihak yang

dapat menyediakan *resource* berupa produk dan jasa, kegagalan penyediaan *resource* dapat menyebabkan pertentangan dalam hubungan, Blau menyatakan bahwa setiap pihak dapat menggeneralisasikan rasa kewajiban terhadap berbagai perannya dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan relasi pertukaran tidak langsung (*indirect exchange relations*). Ciri pertukaran antar kelompok pada tingkat institusi terletak pada adanya nilai-nilai partikularistik atau universalistik dalam pertimbangan untuk “integrasi dan solidaritas dalam kelompok” maupun “diferensiasi dan kompetisi antar kelompok”

Teori pertukaran sosial mengklasifikasikan pertukaran menjadi 2 kategori yaitu (Ritzer, 2005),

1) *Restricted (direct) exchanges*

Jenis pertukaran terbatas (*restricted exchanges*) hanya melibatkan 2 pihak. Proses pertukaran terjadi secara langsung (*direct*) antara 2 pihak, Pelaku sosial pertama akan memberikan *resource* kepada pelaku sosial ke 2, kemudian pelaku sosial ke 2 akan memberikan *resource* kepada pelaku sosial pertama (A ke B dan B ke A). Benitez, Ayala, dan Frank (2022) menyatakan bahwa terdapat 4 unsur dalam interaksi pertukaran

secara langsung yang diperlukan agar sebuah hubungan sosial berkualitas, yaitu:

- *Kepercayaan (trust)*

Kepercayaan diartikan sebagai sebuah harapan atau ekspektasi pelaku sosial terhadap pelaku sosial lainnya, bahwa mereka akan melakukan aktivitas dengan benar dan adil demi keuntungan bersama tanpa perlunya pengawasan.

- *Komitmen*

Pelaku sosial perlu berkomitmen dalam melaksanakan berbagai tugasnya demi kelanjutan dan kelangsungan hubungan mereka.

- *Timbal-balik (reciprocity)*

Perlunya interaksi yang bersifat dua arah dalam hubungan pertukaran sosial.

- *Power*

Power dalam hal ini mengacu pada ketergantungan yang bersifat relative antara pelaku sosial dalam melaksanakan proyek utama dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi berbagai keputusan dan perilaku.

2) *Generalized (indirect) exchanges*

Jenis pertukaran yang digeneralisasikan (*generalized exchanges*) melibatkan lebih dari 2 pihak dan terjadi secara tidak langsung (*indirect*). Tidak ada hubungan antara pihak

yang memberi dan menerima resource, balasan kepada pihak pertama kemungkinan berasal dari pihak ke 3 (A ke B, C ke A). Jenis pertukaran ini terjadi saat suatu pihak yang membantu tidak berharap keuntungan kembali kepadanya secara langsung, sehingga memungkinkan hubungan timbal-balik secara tidak langsung (*indirect reciprocity*). Terdapat 3 bentuk *generalized exchanges* yaitu,

- Chain-generalized (network-generalized) exchange

Bentuk ini memiliki struktur jaringan pada 3 pelaku sosial. Pihak pertama memberikan *resource* kepada pihak ke 2, namun pihak ke 2 tidak membalas secara langsung. Pihak ke 3 yang memiliki kedudukan atau wewenang dalam jaringan (*network*) sosial diperolehkan memberikan *resource* pada pihak pertama.

- Group-generalized exchange

Bentuk pertukaran ini terletak dalam berbagai pelaku sosial yang tergabung dalam kelompok. Seluruh anggota kelompok akan mengumpulkan *resource* mereka, kemudian semua anggota akan memperoleh manfaat yang dihasilkan dari pengumpulan tersebut.

- *Pure-generalized exchange*

Bentuk pertukaran ini tidak memiliki struktur jaringan yang tetap (*fixed*). Setiap pelaku sosial dapat memberikan resource kepada siapapun dalam kelompok. Hal ini ditandai dengan pemberian *resource* secara unilateral atau sepihak yang terkadang dianggap altruisme.

Berbagai asumsi utama dari teori pertukaran sosial telah dirangkum Linda Molm dan Karen S. Cook dalam karya mereka yang berjudul "*Social Exchange and Exchange Networks*" (1995). Asumsi ini digunakan untuk memprediksi perilaku pelaku sosial yang terlibat dalam proses pertukaran dan perbedaan dampak dari berbagai faktor dalam luaran proses pertukaran. Berikut asumsi utama yang dimaksud (Ritzer, 2005),

- 1) Perilaku dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan dan menghindari kerugian, maupun untuk meningkatkan luaran yang bernilai positif dan mengurangi luaran yang bernilai negatif
- 2) Berbagai hubungan pertukaran dikembangkan dalam kebergantungan yang sama (*mutual dependence*), kedua pihak memiliki beberapa alasan untuk terlibat dalam proses pertukaran. Alasannya untuk

memperoleh sumber daya yang bernilai, apabila tidak mengandung nilai maka tidak memerlukan membentuk hubungan pertukaran.

- 3) Pelaku sosial terlibat dalam pertukaran yang berulang dan saling bergantung dengan mitra tertentu dari waktu ke waktu, sehingga mereka tidak akan terlibat apabila transaksi terjadi sekali dan memiliki keuntungan yang sederhana
- 4) Imbalan yang bernilai disesuaikan dengan hukum ekonomi tentang utilitas marginal (*marginal utility*) yang semakin berkurang maupun prinsip psikologi berupa rasa kenyang (*satitiation*).

Selain asumsi utama diatas, prinsip *power-dependence* pula memungkinkan digunakan dalam merumuskan berbagai prediksi mengenai dampak meningkatnya nilai dari sumber daya yang telah terlibat dalam proses pertukaran dan availabilitas sumber daya dari berbagai sumber alternatif.

Dalam sosiologi pendidikan terdapat tiga paradigma sebagai berikut:

a. Paradigma Konservatif

Paradigma konservatif memandang pendidikan sebagai media untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan. Dalam hal ini manusia harus mau belajar dan mampu bekerja

keras untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan. Selain itu, paradigma juga memandang lembaga pendidikan yakni sekolah dibentuk untuk memahami ajaran Tuhan tentang ketidakadilan dan ketidakseimbangan.

b. Paradigma Liberal

Paradigma liberal memandang bahwa pendidikan dilakukan seumur hidup untuk membuat manusia memperbaiki kemampuannya. Selain itu, paradigma ini berpendapat bahwa lembaga sekolah dibentuk sebagai ajang kompetisi individual ditengah masyarakatnya.

c. Paradigma Kritis

Paradigma kritis memandang, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah didirikan untuk mengukuhkan status quo seseorang.

2. Pengertian Teori

Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori memiliki tiga pengertian yakni sebagai berikut :

- a. Teori merupakan pendapat yang digunakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.
- b. Teori adalah asas dan hukum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan.

c. Teori merupakan pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Menurut pendapat para ahli, misalnya Jhonathan H. Turner berpendapat bahwa teori merupakan sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi (Richard, 2008). Teori juga dapat dipahami sebagai ide-ide, asumsi, atau hipotesis yang diekspresikan melalui hubungan antar variable atau konsep yang menjelaskan tentang “apa”, “bagaimana” atau “mengapa” suatu fenomena terjadi.

3. Perbedaan Paradigma dengan Teori

Pada penjelasan sebelumnya bahwa paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Paradigma merupakan suatu cara pandang yang dipergunakan oleh seseorang atau ilmuan untuk mempelajari objek keilmuan mereka. Sedangkan, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep yang membantu kita untuk mehami sebuah fenomena. Paradigma dan teori merupakan konsep penting dalam ilmu pengetahuan. Paradigma dan teori merupakan dua konsep yang berbeda namun terkait satu sama lain. Paradigma memiliki jangkauan yang lebih luas daripada teori yang berfungsi sebagai kerangka referensi yang dapat membantu kita untuk menyalurkan pengamatan dan penemuan.

Berbeda dengan paradigma, teori memiliki jangkauan yang terbatas. Teori memungkinkan kita untuk memahami sifat fenomena dan hubungan sebab dan akibatnya.

C. Teori dalam Sosiologi Pendidikan

Terdapat berbagai teori dalam sosiologi pendidikan, yaitu Behaviorisme, Konstruktivisme, Humanisme, serta Social and Situationalism.

1. Teori Behaviorisme

Menurut teori behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimeneksperimen, baik pada manusia maupun pada hewan (Kusmintardjo dan Mantja, 2011). Terdapat empat prinsip filosofis utama dalam pengembangan teori ini yaitu : Manusia adalah binatang yang sangat berkembang dan manusia belajar dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan binatang lainnya; pendidikan adalah proses perubahan perilaku; peran guru adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif; efisiensi, ekonomi, ketepatan dan obyektivitas merupakan perhatian utama dalam pendidikan.

Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses tingkah laku yang timbul akibat proses kematangan fisik, keadaan mabuk, lelah, dan jenuh tidak dapat dipandang sebagai proses belajar (Syah, 2003). Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon (Slavin, 2000). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Dalam proses pembelajaran input ini bisa berupa alat peraga, gambar-gambar, atau cara-cara tertentu untuk membantu proses belajar (Budiningsih, 2003). Teori belajar Behavioristik memandang individu sebagai

mahluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka.

Belajar merupakan perubahan perilaku dan pengetahuan yang relatif lama dari hasil praktek maupun penguasaan. Ada beberapa poin kunci untuk membahas hal tersebut dikutip dari Kusmintardjo dan Mantja (2011). Pertama, belajar menghasilkan perubahan. Pengalaman peserta didik tentang bagaimana melakukan sesuatu di sekolah telah berubah melalui belajar yang diawali sejak menjadi peserta didik baru. Demikian halnya perilaku dokter berubah ketika dia mampu menyembuhkan pasien.

Kedua, perubahan dalam pengetahuan atau perilaku terjadi dalam waktu yang relatif permanen atau cukup lama. Ketika peserta didik pertama kali mendaftarkan diri ke sekolah, peserta akan menanyakan kepada temannya tentang bagaimana cara pengisian borang pendaftaran, maka hal itu bukan belajar karena tidak ada suatu perubahan permanen dalam cara pendaftaran. Demikian halnya, dokter yang menangani pasien gawat darurat karena kecelakaan juga bukan belajar karena tidak ada perubahan yang permanen dalam penanganan tersebut.

Ketiga, belajar merupakan hasil dari praktek atau melalui pengalaman melihat orang lain. Pikirkan kembali ketika seorang individu belajar

cara mengemudi mobil. Hanya dengan melalui praktek seseorang akan menguasainya. Demikian halnya dengan praktek dan pengalaman, seorang sekretaris belajar bagaimana cara penggunaan software baru, belajar seorang analis keuangan belajar implikasi hukum pajak yang baru, insinyur belajar bagaimana cara mendesain kendaraan yang efisien, dan pramugari belajar bagaimana cara menghidangkan makanan di atas pesawat.

Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar.

Faktor yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka responpun akan semakin kuat. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik, meliputi: (1) *Reinforcement and Punishment*; (2) *Primary and Secondary Reinforcement*; (3) *Schedules of Reinforcement*; (4) *Contingency Management*; (5) *Stimulus Control in Operant Learning*; (6) *The Elimination of Responses* (Gage, Berliner, 1984).

Beberapa tokoh Behaviorisme, antara lain:

a. Edward Lee Thorndike (1874 – 1949)

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan (akibat adanya rangsangan). Jadi perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkrit, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkrit yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme (Slavin, 2000). Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon (R).

Eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar (puzzle box) diketahui bahwa

supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respons, perlu adanya kemampuan untuk memilih respons yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan (trials) dan kegagalan-kegagalan (error) terlebih dahulu. Bentuk paling dasar dari belajar adalah “trial and error learning atau selecting and connecting learning” dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi.

Ada tiga hukum belajar yang utama, yakni (1) hukum efek; (2) hukum latihan dan (3) hukum kesiapan (Gredler, 1991). Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut:

- 1) Hukum kesiapan (law of readiness), yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat.
- 2) Hukum latihan (law of exercise), yaitu semakin sering suatu tingkah laku

diulang/dilatih (digunakan), maka asosiasi tersebut akan semakin kuat.

- 3) Hukum akibat (law of effect), yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan.

b. Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990)

Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Menurut Skinner hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi. Interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku (Slavin, 2000). Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan

berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya.

Prinsip-prinsip utama pandangan Skinner:

- 1) *Descriptive behaviorism*, pendekatan eksperimental yang sistematis pada perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hubungan S-R. Pendekatannya induktif. Dalam hal ini pengaruh Watson jelas terlihat.
- 2) *Empty organism*, menolak adanya proses internal pada individu.
- 3) Menolak menggunakan metode statistikal, mendasarkan pengetahuannya pada subyek tunggal atau subyek yang sedikit namun dengan manipulasi eksperimental yang terkontrol dan sistematis.

Konsep-konsep utama:

- 1) *Proses operant conditioning*:
 - Memilah perilaku menjadi respondent behavior dan operant behavior. Respondent terjadi pada kondisioning klasik, dimana reinforcement mendahului UCR/CR. Dalam kondisi sehari-hari yang lebih sering terjadi adalah operant

behavior dimana reinforcement terjadi setelah respons.

- *Positive dan negative reinforcers* (kehadirannya PR menguatkan perilaku yang muncul, sedangkan justru ketidakhadiran NR yang akan menguatkan perilaku).
- *Extinction*: hilangnya perilaku akibat dari dihilangkannya reinforcers
- *Schedules of reinforcement*, berbagai variasi dalam penjadwalan pemberian reinforcement dapat meningkatkan perilaku namun dalam kadar peningkatan dan intensitas yang berbeda-beda (Lundin, 1991)
- *Discrimination*: organisme dapat diajarkan untuk berespon hanya pada suatu stimulus dan tidak pada stimulus lainnya.
- *Secondary reinforcement*, adalah stimulus yang sudah melalui proses pemasangan/kondisioning dengan reinforcer asli sehingga akhirnya bisa mendapatkan efek reinforcement sendiri.
- *Aversive conditioning*, proses kondisioning dengan melibatkan suasana tidak menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan punishment. Reaksi organisme adalah melarikan diri (*escape*) atau menghindar (*avoidance*).

2) *Behavior Modification*

Adalah penerapan dari teori Skinner, sering juga disebut sebagai behavior therapy. Merupakan penerapan dari shaping (pembentukan TL bertahap), penggunaan positive reinforcement secara selektif, dan extinction. Pendekatan ini banyak diterapkan untuk mengatasi gangguan perilaku.

Kritik terhadap Skinner:

- Pendekatannya yang lebih bersifat deskriptif dan kurang analitis dianggap kurang valid sebagai sebuah teori
- Validitas dari kesimpulan yang diambilnya yang merupakan generalisasi berlebihan dari satu konteks perilaku kepada hampir seluruh perilaku umum
- Pandangan ‘empty organism’ mengundang kritik dari pendukung aspek biologis dan psikologi kognitif yang percaya pada kondisi internal manusia, entah itu berupa proses biologis atau proses mental

Manajemen kelas menurut Skinner adalah berupa usaha untuk memodifikasi perilaku (behavior modification) antara lain dengan proses penguatan (reinforcement) yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat.

Operant Conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan (penguatan positif atau negatif) yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan.

Perilaku operan adalah perilaku yang dipancarkan secara spontan dan bebas Skinner membuat eksperimen sebagai berikut: dalam laboratorium. Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut "Skinner box" yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat pembeli makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik.

Karena dorongan lapar (*hunger drive*), tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak kesana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol, makanan keluar. Secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus, proses ini disebut *shaping*.

Unsur terpenting adalah penguatan (*reinforcement*). Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan

menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang.

Beberapa prinsip belajar menurut Skinner antara lain (Kusmintardjo dan Mantja, 2011):

- 1) Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat.
- 2) Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar.
- 3) Materi pelajaran, digunakan sistem modul.
- 4) Dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktivitas sendiri.
- 5) Dalam proses pembelajaran, tidak digunakan hukuman. Untuk ini lingkungan perlu diubah, untuk menghindari adanya hukuman.
- 6) Tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variable rasio reinforcer.
- 7) Dalam pembelajaran, digunakan *shaping*.

Beberapa kekeliruan dalam penerapan teori, Skinner adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendiskripsikan siswa menurut Skinner hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari

perbuatannya misalnya anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verba maupun fisik seperti : kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa.

Selain itu kesalahan dalam reinforcement positif juga terjadi di dalam situasi pendidikan seperti penggunaan rangking juara di kelas yang mengharuskan anak menguasai semua mata pelajaran. Sebaliknya setiap anak diberi penguatan sesuai dengan kemampuan yang diperlihatkan sehingga dalam satu kelas terdapat banyak penghargaan sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan para siswa; misalnya: penghargaan di bidang bahasa, matematika, fisika, menyanyi, menari, atau olahraga.

c. Edwin Ray Guthrie (1886 – 1959)

Azas belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontiguiti yaitu Contiguity dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa, hal-hal atau benda-benda yang terus saling berkait antara satu dengan lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Ray Guthrie (1886-1956). Guthrie menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respon tertentu (Hitipew, 2009).

Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, oleh karena dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman (punishment) memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang.

Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak.

2. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan, sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme alangkah lebih baiknya diketahui

dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Filsafat Pendidikan mendefinisikan konstruktivisme sebagai suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, konstruktivisme dipandang sebagai sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Sifat membangun tersebut dapat diharapkan memicu keaktifan pada siswa yang selanjutnya meningkatkan kecerdasannya.

Merasa kurang lengkap untuk mengetahui dari pada teori konstruktivisme sebelum mengetahui pendapat-pendapat dari pada pakar ahli, diantaranya yaitu : Hill, mengatakan, sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang di pelajari. Menurut hill konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya, dengan kata lain bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan.

Shymansky mengatakan konstuktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan

ide-ide baru dengan kerangka berfikir yang telah ada dimilikinya. Berdasarkan pendapatnya di atas, maka dapat di pahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang di ketahuinya kemudian memaktikkannya ke dalam kehidupansehari-harinya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berfikir kepada siswa dan memberikan siswa di tuntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah di ketahuinya dalam kehidupannya.

d. Asumsi-Asumsi Konstruktivisme

Konstruktivisme menyoroti interaksi orang-orang dan situasi-situasi dalam penguasaan dan penyempurnaan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan. Konstruktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal-balik. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah, pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri. Dimana siswa diberikan

keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen maupun berdiskusi sesama siswa. Dengan hal seperti itu maka ilmu-ilmunya tersebut akan berkembang dan bertambah

Kedua. Guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial. Maksudnya seorang pendidik atau guru dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan, selain itu juga guru harus bisa menggunakan media dalam proses pembelajaran. Jangan hanya menggunakan metode-metode yang sudah lama atau jaman dulu, seperti ceramah, mencatat sampai habis, akan tetapi guru harus mengajar dengan cara bagaimana supaya siswa harus di buat aktif dan masuk dalam pembelajaran tersebut.

Adapun aktivitas-aktivitas pembelajaran meliputi mengamati fenomena-fenomena, mengumpulkan data-data, merumuskan dan menguji hipotesis-hipotesis, dan bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan lainnya adalah mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di

luar ruangan kelas. Guru-guru dari berbagai disiplin ilmu diperlukan untuk merencanakan kurikulum bersama-sama. Siswa perlu diarahkan untuk dapat mengatur diri sendiri dan berperan aktif dalam pembelajaran mereka dengan menentukan tujuan-tujuan, memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka, dan bertindak melampaui standar-standar yang disyaratkan bagi mereka dengan menelusuri hal-hal yang menjadi minat mereka.

e. Beberapa Perspektif Dalam Konstruktivisme

Pertama, konstruktivisme eksogenuus mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan merepresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Pandangan ini mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi pengetahuan, seperti pengalaman-pengalaman, pengajaran dan pengamatan terhadap model-model.

Kedua, konstruktivisme endogenus menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan; karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Pengetahuan berkembang melalui aktifitas kognitif dari abstraksi dan mengikuti sebuah

rangkaian yang dapat diprediksikan secara umum.

Ketiga, konstruktivisme dialektikal. berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah akan tetapi bisa juga di dapatkan melalui saling berinteraksi sesamatemam, guru, tetangga dan bahkan lingkungan sekitar kita. Selain itu juga interpretasinya tidak terikat dengan dunia luar. Bahkan pengetahuan atau pemahaman timbul akibat saling berlawanan mental dari interaksi antara lingkungan sekitar dengan seseorang.

Dari ketiga pandangan tersebut memiliki kelebihan masing-masing, seperti konstruktivisme eksogenus yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang siswa terhadap ilmu tertentu secara akurat dan terperinci. Kemudian konstruktivisme endogenus yaitu untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi secara terstruktur mulai dari yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi. Sedangkan konstruktivisme dialektikal digunakan ketika guru atau pendidik ingin merencanakan itervensi-intervensi untuk mendorong pemikiran siswa dan untuk mengarahkan penelitian untuk menemukan efektifitas dari pengaruh-pengaruh

sosial seperti paparan terhadap model-model dan kerja sama dengan teman sebaya.

f. Kelebihan Konstruktivisme

Hidup ini, tidak ada yang sempurna ada kebaikan ada juga keburukan, begitu juga dengan sebuah teori. Tidak ada teori yang sempurna akan tetapi saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya begitu juga konstruktivisme. Adapun kelebihan dari teori konstruktivisme diantaranya :

Pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran, siswa tuntutan untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik dan lain sebagainya, jadi guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam konstruktivisme pengetahuan itu tidak hanya di dapatkan dalam proses pembelajaran akan tetapi bisa juga di dapatkan melalui diskusi, pengalaman dan juga bisa di dapatkan di lingkungan sekitarnya.

Kedua, siswa (pembelajaran) lebih aktif dan kreatif. Maksudnya dimana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya baik di dapatkan di sekolah dan yang dia

dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama, selain itu juga siswa di tuntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat di koneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama.

Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi-informasi yang dia dapatkan baik dari temanya, tetangganya, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya.

Keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkannya. Kelima, perbedaan individual terukur dan di hargai. Keenam, guru berfikir proses membina pengetahuan baru, siswa berfikir untuk menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan.

g. Kekurangan Konstruktivisme

Pertama, proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Kedua, peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Ketiga, peran guru. Dalam pendekatan ini guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri.

Keempat, sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktifitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Kelima, evaluasi, pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktifitas-aktifitas lain yang didasarkan pada pengalaman.

3. Teori Humanism

Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan-batasan aplikasinya dalam dunia pendidikan mengundang berbagai macam arti pula. Sehingga perlu adanya satu pengertian yang disepakati mengenai kata humanistik dalam pendidikan. Dalam artikel “What is Humanistik Education?”, Krischenbaum menyatakan bahwa sekolah, kelas, atau guru dapat dikatakan bersifat humanistik dalam beberapa kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa tipe pendekatan humanistik dalam pendidikan.

Dalam artikel “some educational implications of the Humanistic Psychologist” Abraham Maslow mencoba untuk mengkritisi teori Freud dan behavioristik. Menurut Abraham, yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi yang dimilikinya. Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada “ketidaknormalan” atau “sakit” seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah “sakit” tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini.

Kemampuan positif disini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif, misalnya ketrampilan membangun dan menjaga relasi yang hangat dengan orang lain, bagaimana mengajarkan kepercayaan, penerimaan, kesadaran, memahami perasaan orang lain, kejujuran interpersonal, dan pengetahuan interpersonal lainnya. Intinya adalah meningkatkan kualitas ketrampilan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menitik beratkan pada hubungan interpersonal, para pendidikan yang beraliran humanistik juga mencoba untuk membuat pembelajaran yang membantu anak didik untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat, berimajinasi, mempunyai pengalaman, berintuisi, merasakan, dan berfantasi. Pendidik humanistik mencoba untuk melihat dalam spektrum yang luas mengenai perilaku manusia. “Berapa banyak hal yang bisa dilakukan manusia? Dan bagaimana aku bisa membantu mereka untuk melakukan hal-hal tersebut dengan lebih baik?

Melihat hal-hal yang diusahakan oleh para pendidik humanistik, tampak bahwa pendekatan ini mengedepankan pentingnya emosi dalam dunia pendidikan. Freudian melihat emosi sebagai hal yang mengganggu perkembangan, sementara humanistik melihat keuntungan pendidikan emosi. Jadi bisa dikatakan bahwa

emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanistik. Karena berpikir dan merasakan saling beriringan, mengabaikan pendidikan emosi sama dengan mengabaikansalah satu potensi terbesar manusia. Kita dapat belajar menggunakan emosi kita dan mendapat keuntungan dari pendekatan humanistik ini sama seperti yang kita dapatkan dari pendidikan yang menitikberatkan kognisi.

Berbeda dengan behaviorisme yang melihat motivasi manusia sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologis manusia atau dengan freudian yang melihat motivasi sebagai berbagai macam kebutuhan seksual, humanistik melihat perilaku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Hal ini memunculkan salah satu ciri utama pendekatan humanistik, yaitu bahwa yang dilihat adalah perilaku manusia, bukan spesies lain. Akan sangat jelas perbedaan antara motivasi manusia dan motivasi yang dimiliki binatang. Hirarki kebutuhan motivasi maslow menggambarkan motivasi manusia yang berkeinginan untuk bersama manusia lain, berkompetensi, dikenali, aktualisasi diri sekaligus juga menggambarkan motivasi dalam level yang lebih rendah seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan.

Menurut aliran humanistik, para pendidik sebaiknya melihat kebutuhan yang lebih tinggi dan

merencanakan pendidikan dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Beberapa psikolog humanistik melihat bahwa manusia mempunyai keinginan alami untuk berkembang, untuk lebih baik, dan juga belajar. Jadi sekoah harus berhati-hati supaya tidak membunuh insting ini dengan memaksakan anak belajar sesuatu sebelum mereka siap. Jadi bukan hal yang benar apabila anak dipaksa untuk belajar sesuatu sebelum mereka siap secara fisiologis dan juga punya keinginan. Dalam hal ini peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, bukan sebagai konselor seperti dalam Freudian ataupun pengelola perilaku seperti pada behaviorisme.

Secara singkatnya, pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik.

Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.

Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka.

a. Teori Humanistik menurut Carl Rogers

Terdapat beberapa konsep untuk memahami teori Humanisme Carl Rogers, yakni:

- 1) Teori Rogers disebut humanis karena teori ini percaya bahwa setiap individu adalah positif, serta menolak teori Freud dan behaviorisme.
- 2) Asumsi dasar teori Rogers adalah kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi.
- 3) Diri (self) adalah terbentuk dari pengalaman mulai dari bayi, di mana diri terdiri dari 2 subsistem yaitu konsep diri dan diri ideal.
- 4) Kebutuhan individu ada 4 yaitu: (1) pemeliharaan, (2) peningkatan diri, (3)

penghargaan positif (positive regard), dan (4) Penghargaan diri yang positif (positive self-regard)

- 5) Stagnasi psikis terjadi bila terjadi karena pengalaman dan konsep diri yang tidak konsisten dan untuk menghindarinya adalah pertahanan (1) distorsi dan (2) penyangkalan. Jika gagal dalam menerapkan pertahanan tersebut konsep diri akan hancur dan menyebabkan psikotik.
- 6) Dalam terapi, terapis hanya menolong dan mengarahkan klien dan yang melakukan perubahan adalah klien itu sendiri.

Bagaimana penerapannya teori Humanistik Carl Roger Dalam Pendidikan? Teori Roger dalam bidang pendidikan adalah dibutuhkan tiga sikap dalam fasilitator belajar, yaitu (1) realitas di dalam fasilitator belajar, (2) penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan, dan (3) pengertian yang empati.

1) Realitas di dalam fasilitator belajar

Merupakan sikap dasar yang penting. Seorang fasilitator menjadi dirinya sendiri dan tidak menyangkal diri sendiri, sehingga ia dapat masuk kedalam hubungan dengan pelajar tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

2) Penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan
Menghargai pendapat, perasaan, dan sebagainya membuat timbulnya penerimaan akan satu dengan lainnya. Dengan adanya penerimaan tersebut, maka akan muncul kepercayaan akan satu dengan lainnya.

3) Pengertian yang empati

Untuk mempertahankan iklim belajar atas dasar inisiatif diri, maka guru harus memiliki pengertian yang empati akan reaksi murid dari dalam. Guru harus memiliki kesadaran yang sensitif bagi jalannya proses pendidikan dengan tidak menilai atau mengevaluasi. Pengertian akan materi pendidikan dipandang dari sudut murid dan bukan guru.

Guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki mobil. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas belajar experiential learning mencakup : keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek yang membekas pada siswa.

Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu:

- 1) Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya.
- 2) Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa
- 3) Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa.
- 4) Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses.

Dari bukunya *Freedom To Learn*, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah :

- 1) Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami.
- 2) Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri.
- 3) Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya.
- 4) Tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil.

- 5) Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar.
- 6) Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya.
- 7) Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggungjawab terhadap proses belajar itu.
- 8) Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari.
- 9) Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas, lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting.
- 10) Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu.

Salah satu model pendidikan terbuka mencakup konsep mengajar guru yang fasilitatif yang dikembangkan Rogers diteliti oleh Aspy

dan Roebuck pada tahun 1975, mengenai kemampuan para guru untuk menciptakan kondisi yang mendukung, yaitu empati, penghargaan dan umpan balik positif. Hasil penelitiannya menemukan, bahwa ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah :

- 1) Merespon perasaan siswa
- 2) Menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang
- 3) Berdialog dan berdiskusi dengan siswa
- 4) Menghargai siswa
- 5) Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan
- 6) Menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa (penjelasan untuk mementapkan kebutuhan segera dari siswa)
- 7) Tersenyum pada siswa

Dari penelitian itu diketahui, guru yang fasilitatif mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep diri siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik termasuk pelajaran bahasa dan matematika yang kurang disukai, mengurangi tingkat problem yang berkaitan dengan disiplin dan mengurangi kerusakan pada peralatan sekolah, serta siswa menjadi lebih spontan dan menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi.

4. Social and Situationalism

Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas, yakni sebagai sesuatu yang ada pada

masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. Masyarakat senantiasa berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Situasionis terkait dengan aktifitas praktek untuk mengkonstruksikan situasi-situasi, yakni seseorang yang terlibat dalam upaya mengkonstruksikan situasi. Situasionalisme sebuah faham yang menyakini bahwa situasi social tertentu dapat mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang, menjadi doktrin untuk menginterpretasikan kondisi-kondisi yang eksis.

Situasionalism merupakan teori dalam sosiologi Pendidikan yang menekankan pentingnya konteks sosial dan situasi dalam memahami perilaku individu. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya di mana individu berada.

Ciri-ciri situationalism dalam Pendidikan adalah:

- a. Konteks social, membahas bagaimana situasi sosial, seperti kelas, komunitas, dan budaya, mempengaruhi pengalaman belajar.
- b. Interaksi social. Menekankan interaksi antara guru dan siswa serta antara siswa itu sendiri sebagai faktor penting dalam proses pendidikan
- c. Fleksibilitas. Mengakui bahwa metode dan strategi belajar harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan siswa

- d. Pengalaman. Menyadari bahwa pengalaman individu dalam situasi tertentu dapat memengaruhi pemahaman dan pembelajaran mereka.

Adapun Teori yang berhubungan dengan situationalism adalah:

- a. Teori pembelajaran social. Menyoroti bagaimana individu belajar dari interaksi dengan orang lain dalam konteks sosial.
- b. Teori konstruktivisme. Menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dalam konteks tertentu.
- c. Teori ekologi manusia. Melihat bagaimana lingkungan sosial dan fisik mempengaruhi perkembangan individu.

Implikasi teori social dan situasionalism terhadap Pendidikan adalah:

- a. Kurikulum yang Responsif: Kurikulum harus dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan konteks siswa.
- b. Pengajaran Berbasis Konteks: Metode pengajaran harus mempertimbangkan latar belakang sosial siswa.
- c. Kolaborasi: Mendorong kerja sama antara siswa untuk meningkatkan pembelajaran melalui interaksi sosial.

D. Kesimpulan

Paradigma dan teori dalam sosiologi pendidikan memiliki perbedaan. Paradigma dan teori merupakan konsep penting dalam ilmu pengetahuan. Paradigma dan teori merupakan dua konsep yang berbeda namun terkait satu sama lain. Paradigma merupakan pandangan mendasar dari sekelompok ilmuwan terkait sesuatu yang diyakini benar. Teori merupakan sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Teori merupakan bagian dari paradigma, menjadi kerangka acuan dalam menganalisis fenomena yang terjadi, yang kebenarannya sudah terbukti secara ilmiah. Dalam sosiologi pendidikan teori digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan setidaknya terdapat empat teori yakni teori behaviorisme, konstruktivisme, humanisme dan sosial dan situasionalisme.

E. Daftar Bacaan

1. Alwilsol. (2004), *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press
2. Budiningsih, C. Asri. (2005). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
3. Degeng & Sudana, I Nyoman. (2006). *Ilmu Pengajaran Taksonomi Variable*. Jakarta: Depdikbud.

4. Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Prenada Media.
5. Freist, J & Freist, Gregory. (1998), *Theories of Personality*, Amerika : Mc Graw Hill.
6. Gredler, Bell. (1991). *Belajar dan Membelajarkan*. Jakarta: CV. Rajawali.
7. Hitipeuw, Imanuel. (2009). *Belajar & Pembelajaran*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
8. Hall, Calvin S., & Lindzey, Gardner. (2000), *Teori-Teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)*, Dr. A. Supratiknya (ed.), Jogjakarta : Kanisius .
9. Langgulang, Hasan. (1986). *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna
10. Maliki, Zainudin. (2008). *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
11. Richard West, Richard. (2008), *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi* .Edisi Ke 3, Jakarta : Salemba Humanika,
12. Robert, Thomas B. (1975). *Four Psychologies Applied to Education*, New York: Hals Ted Press
13. Smith, Mark K. , (1997), *Carl Rogers, Core Conditions and Education*, www.Infred.org/thinkers/et-rogers.htm#intro.

Bab 3

Paradigma Makro dalam Pendidikan

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggali, mengkaji dan memahami secara komprehensif, jujur, dan bertanggungjawab tentang:

1. Ciri-Ciri paradigma makro sosiologi pendidikan
2. Pandangan Islam Terhadap Paradigma Konservatif , Liberalis, Kritis , Fundamentalis, Anarkhis
3. Implementasi Paradigma Pendidikan Makro dalam Konteks Manajemen Pendidikan Islam

B. Paradigma Makro Pendidikan

Paradigma merupakan pandangan mendasar dari sekelompok ilmuwan terkait suatu fenomena yang diyakini atau dinilai benar. Sistem keyakinan atau nilai yang diterima sebagai kebenaran tersebut dikenal dengan ideologi, sehingga ideologi dan paradigma merupakan satu kesatuan. Ideologi Pendidikan berkaitan dengan berbagai sifat esensial dan cara pelaksanaan persekolahan yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan sosial dan tatanan sosial, oleh sebab itu ideologi tertentu yang diterapkan dalam pendidikan dapat menjadi sebab-akibat dari perubahan sosial.

Pada skala makro, pada saat ini, para ilmuwan dalam mengukur kemajuan suatu bangsa mengalami pergeseran, dari bertumpu kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), menjadi bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia (SDA).¹ Paradigma ini mengharuskan suatu bangsa memperkuat sektor pendidikan. Kemajuan suatu bangsa akan sumber daya manusia yang unggul mengharuskan adanya pendidikan yang unggul dan adanya pendidikan yang unggul mengharuskan adanya berbagai komponen atau aspek pendidikan yang unggul pula. Kepada pendidikan yang unggul itulah harapan terwujudnya bangsa yang besar dan maju akan segera terwujud.² Salah satu strategi untuk mewujudkan pendidikan yang unggul adalah bagaimana mengelola input sebuah pendidikan agar peserta didik yang telah menempuh masa pendidikan dapat bersaing dengan dunia luar pendidikan yang notabeneanya lebih kompetitif dalam meraih yang diharapkan dari semua bidang kehidupan.

Paradigma Makro Sosiologi Pendidikan mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat. Analisis makro membicarakan fenomena sosial pada level masyarakat luas, seperti negara atau bangsa. Dalam

¹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 1

² *Ibid*, hlm.11

hal pendidikan (sosiologi pendidikan), analisis level makro membicarakan kebijakan dan situasi pendidikan secara umum pada level nasional.

Paradigma makro pendidikan mengkaji pendidikan secara makro, berskala besar dan holistik. Mengedepankan pengembangan kesadaran pendidikan untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum.

Para sosiolog berbeda pendapat dalam memetakan paradigma makro Pendidikan, berdasarkan ideologi yang dianut. **William F. O'Neil** (1981), membagi bentuk ideologi pendidikan menjadi dua aliran pandangan besar, yaitu *konservatif* (pelestarian prakiraan) dan *liberal* (kebebasan dalam berpikir kritis). Kedua aliran tersebut dikategorikan berdasarkan syarat yang diperlukan untuk menerapkan dan implikasi filosofi moral dan politik. Perbedaan filosofi pada setiap kategori ideologi pendidikan bergantung pada sesuatu yang dinilai oleh ilmuwan mampu mencapai kebahagiaan dan kesadaran diri, berkaitan dengan petunjuk moral dan potensi tertentu dalam diri manusia agar menciptakan perilaku dan tatanan sosial yang baik.

Sedangkan **Henry A. Giroux** dan **Stanley Aronowitz** (1985), membagi menjadi tiga paradigma, yaitu **konservatif** (menjaga status quo), **liberal** (perubahan moderat), dan **kritis** (perubahan struktur

secara fundamental). Pembagian tiga paradigma ini sependapat dengan analisis kesadaran ideologi masyarakat oleh **Paulo Freire** (1970), yang mana menggolongkan kesadaran manusia menjadi kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis.

Berikut penjelasan masing-masing pengkategorian paradigma, **konservatif** dan **liberal** dalam Pendidikan yang dikemukakan oleh William F. O'Neil³:

1. Paradigma Konservatif dalam Pendidikan

Konservatif merupakan bentuk pendidikan yang memiliki kewenangan (otoritas) dan kendali (kontrol). Kaum konservatif berpandangan bahwa anak didik dapat memperoleh kebahagiaan dan kesadaran diri melalui cara tidak langsung, yakni melalui cara pengenalan dan ketaatan terhadap hukum dan/atau ketuhanan yang secara historis telah mutlak dan mapan. Pendidikan memusatkan perhatian pada berbagai tradisi (etnosentrisme) dan lembaga sosial dominan yang ada, stabilitasnya lebih dibutuhkan daripada perombakan. Tradisi dan Lembaga sosial diyakini sebuah “hal yang pasti” karena telah teruji waktu. Oleh sebab itu, keyakinan terhadap bentuk pendidikan konservatif akan menimbulkan konsep pendidikan yang kaku

³ William F. O'Neil, *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

dan bersifat otoriter, karena berfokus pada pelestarian prakiraan yang telah turun-menurun.

Pendidikan Konservatif memiliki tiga bentuk dengan perbedaan terletak pada Tingkat konservatifnya, yakni:

a. Fundamentalisme Pendidikan

Fundamentalisme pendidikan merupakan bentuk ideologi pendidikan yang paling konservatif, dibandingkan 2 bentuk ideologi pendidikan konservatif lainnya. Kebahagiaan dan kesadaran personal yang diyakini oleh fundamentalisme pendidikan berasal dari filosofi moral berupa ketaatan terhadap keyakinan dan perilaku yang intuitif dan/atau diwahyukan, Keyakinan cenderung kepada penerimaan dan kepatuhan terhadap sesuatu yang telah dibenarkan, baik berupa kesepakatan sosial yang dianggap telah mapan secara intuisi ataupun berupa suatu wahyu yang telah yakini oleh iman. Kebenaran atas pengetahuan moral dalam tatanan sosial hanya perlu diterima anak didik secara spontan tanpa perlu bukti dan tidak dapat dibantah. Kaum fundamentalisme meyakini bahwa nilai moral konvensional dapat memulihkan tatanan sosial dimasa kini yang telah hancur, karena tatanan sosial masa kini diyakini mengarah pada kesalahan dan kejahatan. Kaum fundamentalisme menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mengarahkan,

menanamkan, dan melestarikan nilai moral konvensional yang dianggap telah menghasilkan anggota masyarakat dan tatanan sosial yang lebih baik.

Filosofi politik pada bentuk fundamentalisme memiliki tingkat konservatisme reaksioner (otoritarianisme anti-intelektual). Kaum fundamentalis memiliki sifat anti-intelektual, sehingga akan menentang pengujian kritis terhadap berbagai pola keyakinan dan perilaku yang telah diyakini benar. Hal ini menyebabkan adanya minimalis berbagai pertimbangan filosofis dan/atau intelektual.

Berbagai penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa bentuk pendidikan ini memiliki tujuan untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali berbagai cara lama yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan cara baru dimasa kini. Oleh sebab itu, proses pewarisan atau regenerasi moral digunakan pendidikan untuk pembangunan masyarakat. Prosesnya dilakukan dengan 2 cara yaitu mendorong kembali anak didik kepada tujuan-tujuan awal dimasa lalu (konvensional) dan menyalurkan berbagai informasi maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat berhasil dalam tatanan sosial yang ada. Timbulnya kesamaan dan kesederajatan moral antar-individu dipandang

mampu membuat anak didik berfungsi dengan baik dalam tatanan sosial yang ada. Terdapat berbagai dasar pendidikan yang menjadi ciri khas dari pandangan fundamentalisme pendidikan yaitu,

1) Anak didik

- a) Anak didik perlu dibuat sama antar individu, bukan berbeda diantara masyarakat. Persamaan ini digunakan sebagai penentu program pendidikan.
- b) Anak didik merupakan individu dari masyarakat yang memiliki fungsi menerima pencerahan.
- c) Anak didik bertugas dalam menerima dan menaati berbagai tolak ukur intuitif dan/atau wahyu, kemudian perlu meyakini dan menjadikannya dasar dalam berperilaku sosial.
- d) Anak didik perlu diarahkan dan diajarkan secara tegas agar dapat menyesuaikan diri secara ideologis dengan masyarakat, sehingga diharapkan tidak melakukan kesalahan maupun kejahatan. Pengajaran ilmu berkaitan dengan kebutuhan agar anak didik mampu menjadi anggota yang efektif, memiliki fungsi, dan kemampuan khas dalam tatanan sosial.

- 2) Administrasi dan pengendalian pendidikan
 - a) Kewenangan pengelola pendidikan diberikan kepada manajer yang terlatih dalam menentukan dan mengarahkan kegiatan belajar, tidak perlu seorang intelektual maupun pendidik professional.
 - b) Pendidik menjadi tokoh/panutan/model kebajikan bagi anak didiknya.
- 3) Sifat Kurikulum
 - a) Menekankan pada pewarisan watak bermoral dan berpusat pada pengembalian pola budaya ke arah lampau.
 - b) Orientasi utama kurikulum tertelak pada penanaman ideologi pada kemampuan anak didik, melalui pengajaran berbagai nilai moral yang telah diyakini masyarakat. Kemampuan akademik dan hal praktis menjadi orientasi kedua. Kurikulum dengan pandangan fundamentalisme dapat mengecilkan kemampuan intelektual anak didik, yang mana berkaitan dengan berbagai gagasan dan teori luas tentang dunia.
 - c) Anak didik hanya dapat menerima mata pelajaran yang telah diberikan sekolah.
- 4) Mata pelajaran
 - a) Mata pelajaran berkaitan dengan pewarisan moral dan berbagai jenis

keampilan akademik maupun praktis. Pemilihan mata pelajaran disesuaikan dengan efektifitas pengamplikian secara langsung dalam tatanan sosial, sehingga anak didik dapat langsung terlibat dan menyatu dengan masyarakat.

- b) Mata pelajaran menekankan pada berbagai ketrampilan belajar dasar, pelatihan watak, pendidikan fisik dan kesehatan, sejarah, sastra, agama, dsb.
- 5) Metode pengajaran dan penilaian hasil belajar
- a) Tatacara dalam kelas yang dilakukan seperti ceramah, menghafal, belajar mandiri dibawah pengawasan guru, dan diskusi-diskusi kelompok yang terstruktur.
 - b) Pembelajaran pada anak didik
 - Menekankan identifikasi dan peniruan (imitasi) melalui pelatihan watak dan kognitif konvensional, selanjutnya pada nilai afektif dan interpersonal.
 - Menekankan pada pemulihan berbagai prinsip dan praktik tradisional yang telah mengakar pada warisan nasional.
 - c) Pengendalian ruang kelas
 - Warga negara yang baik adalah saat anak didik mampu menyesuaikan diri dengan cita-cita masyarakat (meregenerasi moral).

- Guru bersifat tegas dan non permisif dalam berbagai tatacara pengendalian situasi ruang kelas, sedangkan anak didik diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan wewenang yang telah ditetapkan.
 - Pendidikan moral menjadi aspek utama dalam persekolahan.
- d) Penilaian hasil belajar
- Tes atau ujian yang digunakan lebih kepada pengukuran ketrampilan dan informasi yang telah diwariskan, bukan menekankan kepada kemampuan analitis dan spekulasi abstrak. Oleh sebab itu, ujian ini lebih dikenal dengan “metode luar kepala” yaitu penilaian kemampuan menghafal jawaban yang persis dengan apa yang telah guru ajarkan.
 - Ujian dilakukan agar menimbulkan persaingan antar anak didik dan terdapat peringkat nilai tradisional.
 - Ujian akan berbeda pada tahap pendidikan, seperti berikut:
 - Tingkat awal pendidikan akan dilakukan ujian hafalan pasca pembelajaran, dengan tujuan untuk memampukan kebiasaan anak didik.

- Tingkat lanjutan pendidikan ada dilakukan ujian dengan frekuensi yang lebih sering dan banyak, dengan tujuan untuk mengembangkan inisiatif anak didik agar mampu mengarahkan dirinya.
- e) Anak didik
- Mampu menjawab pertanyaan persis seperti yang pendidik ajarkan.
 - Mampu mengidentifikasi dan meniru moral yang diyakini oleh masyarakat luas.
 - Mampu menyesuaikan diri dengan kewenangan yang ada agar menjadi warga negara yang baik, kewenangan dapat berupa cita-cita maupun gagasan ideal masyarakat yang diwariskan secara moral.
 - Mampu saling bersaing dalam memperoleh peringkat nilai tradisional.
- f) Guru
- Bertindak sebagai penentu dan pengarah kegiatan belajar.
 - Berperan sebagai tokoh moral dan akademik, sehingga dapat menjadi panutan bagi anak didiknya.
- g) Sekolah tidak berfungsi sebagai pembimbing dan terapi kejiwaan pribadi,

hal ini merupakan tugas keluarga dan tokoh agama.

Terdapat dua jenis fundamentalis pendidikan yaitu,

1) Fundamentalisme Pendidikan Sekular

Fundamentalis sekular lebih menganut pada kebenaran sesuai intuisi dan dapat diterima akal sehat. Kaum dengan pandangan ini berkomitmen secara kaku pada sesuatu yang dianggap pasti dan benar secara akal sehat, serta telah disepakati oleh mayoritas masyarakat.

2) Fundamentalisme Pendidikan Religius

Fundamentalisme religius lebih menganut agama dan ketuhanan, yang mana kebenaran adalah sesuatu yang telah diwahyukan dan diyakini oleh iman. Wahyu yang tercantum dalam kitab masing-masing agama ini dinilai dapat menjadi penyelamat jiwa secara kekal. Anak didik akan dikenalkan dengan wahyu tersebut, lalu membuat mereka dapat mengakui dan patuh terhadap kehendak Tuhan.

b. Intelektualisme Pendidikan

Intelektualisme pendidikan memiliki tujuan yang sama seperti bentuk fundamentalis pendidikan, yaitu regenerasi moral. Perbedaan bentuk pendidikan ini terletak pada keyakinan filosofi moral dan filosofi politik. Filosofi moral

berupa pencerahan filosofis dan/atau religious yang didasarkan pada penalaran spekulatif dan kebijaksanaan metafisis. Filosofis politik berupa konservatisme filosofis atau absolutism/otoritarianisme intelektual, yakni meritokrasi intelektual dan/atau moral yang tertutup secara ideologis. Terdapat 2 bentuk intelektualisme pendidikan berdasarkan ahli filsafat, yaitu intelektualisme teologis (religious) dan intelektualisme filosofis.

Intelektualisme pendidikan terbentuk dari adanya optimisme terhadap potensi manusia dalam menggunakan nalar, yaitu cara berpikir logis, analitis, dan rasional terhadap baik buruknya suatu hal. Kemampuan penalaran menjadi komponen utama yang diyakini dapat menuntun anak didik menjadi bijaksana dalam berperilaku di tatanan sosial baik dalam lingkup nasional maupun etnik. Bentuk pendidikan yang otoritarian menyebabkan tuntutan intelektual bersifat tegas dan idealis secara epistemologi. Kemampuan nalar dimanfaatkan untuk merasionalisasi hakikat filosofis dan/atau teologis pada nilai moral dan ilmu pengetahuan yang dogmatis, karena dianggap sebagai kebenaran mutlak. Ilmu pengetahuan mengandung makna dan nilai penting kehidupan yang telah mapan dalam masyarakat sejak masa lalu. Kemampuan nalar

menyebabkan anak didik tercerahkan dengan nilai filosofis dan/ atau religious yang pernah ada, sehingga dapat menyesuaikan diri menjadi warga yang baik dan tercapainya pola kesempurnaan moral yang pernah ada dimasa lalu. Bentuk pendidikan ini secara tidak langsung menentang pengujian kritis terhadap pola keyakinan dan perilaku, karena anak didik diarahkan untuk patuh dan taat terhadap aturan moral dan nilai patriotisme yang diyakini telah jelas dan lengkap.

Berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan tujuan pendidikan adalah indoktrinisasi (penyesuaian) moral menggunakan penalaran. Pendidikan merupakan alat untuk mengenalkan, merumuskan, melestarikan, dan menyalurkan kebenaran mutlak yang telah diyakini masyarakat dalam berkehidupan secara umum. Cara pengajaran berpusat pada bagaimana cara menalar dan menyalurkan kebijaksanaan yang telah ada dari masa lalu. Terdapat berbagai dasar pendidikan yang menjadi ciri khas dari pandangan intelektualisme pendidikan yaitu,

1) Anak didik

- a) Anak didik adalah manusia, makhluk rasional dan sosial yang condong pada kebijaksanaan dan kebaikan.

- b) Anak didik perlu dibuat sama antar individu, bukan berbeda diantara masyarakat. Persamaan ini sebagai penentu program pendidikan.
 - c) Anak didik sebagai individu dari agen rasional yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Individualisme digunakan sebagai kemampuan untuk mengenali keterkaitan diri dengan semesta secara rasional.
 - d) Anak didik memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keunggulan intelektual, walaupun pada akhirnya tingkat kemampuan intelektual tidak tersebar merata dalam populasi
 - e) Anak didik memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya secara personal dalam artian tradisional, yang mana cenderung ke arah pengakuan atas pandangan mutlak tertentu mengenai kenyataan. Dirinya memiliki kemampuan dalam mengenali keterkaitan diri dengan semesta secara rasional.
- 2) Administrasi dan pengendalian pendidikan
- a) Kewenangan pengelola pendidikan diberikan kepada elit intelektual yang berpendidikan tinggi.
 - b) Kewenangan guru didasarkan pada kebijaksanaan guru yang lebih tinggi dibandingkan murid selaku anak didik.

3) Sifat kurikulum

- a) Menekankan pada disiplin intelektual, melatih anak didik agar mampu melakukan penalaran secara jelas dan tertata.
- b) Memusatkan kurikulum pada penalaran dan kebijaksanaan spekulatif.
- c) Menekankan kurikulum yang terpusat pada berbagai gagasan dan teori abstrak.
- d) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara terarah dan mengikuti garis yang telah ditetapkan.
- e) Menekankan indoktrinasi moral (proses penyesuaian nilai moral menggunakan nalar dengan meminimalkan penyesuaian intelektual atau penafsiran), lalu selanjutnya ilmu praktis (ilmu yang langsung berguna bagi anak didik) maupun akademis (ilmu terkait bagaimana cara belajar dan menguasai jenis pengetahuan teknis secara tidak langsung melalui terjun kedalam berbagai persoalan manusia yang nyata).

4) Mata Pelajaran

Mata pelajaran ditekankan pada masalah kajian filosofi dan ilmu kemanusiaan (dalam konteks filosofi dan/atau religious) seperti latihan moral, ketrampilan akademis, dan praktis. Berbagai hal tersebut dinilai

dapat menyebabkan regenerasi anak didik dan membuat anak didik langsung aktif dalam tatanan sosial. Mata pelajar yang dipilih adalah ketrampilan belajar dasar, pelatihan pembentukan karakter, pendidikan fisik, tafsir sejarah nasional, kesusasteraan nasional, pelajaran agama, dsb.

- 5) Metode pengajaran dan penilaian hasil belajar
 - a) Tatacara ruang kelas menekankan pada metode tradisional seperti ceramah, hafalan, tes sokratik, dan diskusi kelompok yang sangat terstruktur.
 - b) Pembelajaran pada anak didik
 - Menekankan pada kognitif informasional yang bersamaan dengan kemampuan afektif dan interpersonal.
 - Menekankan pada pemulihan kembali berbagai prinsip dan praktik pendidikan tradisional, baik dalam lingkup nasional maupun etnis. Prinsip dan praktik tersebut yang telah diidentifikasi dan dirumuskan oleh para pemikir besar dalam tradisi intelektual barat.
 - c) Pengendalian ruang kelas
 - Anak didik mampu memegang tolak ukur moral yang telah mutlak dan secara moral menganggap mereka

dapat bertanggungjawab dengan perilaku dirinya sendiri.

- Anak didik mampu menyesuaikan diri dengan wewenang yang telah ditetapkan, sehingga terdapat regenerasi moral sesuai dengan cita-cita masyarakat dalam keyakinan dan perilaku tradisional
- Guru mampu menampilkan kewenangan yang dapat diabsahkan oleh nalar anak didik.
- Guru mampu bersikap ketat dan non-permisif dalam berbagai tatacara pengendalian situasi kelas.

d) Penilaian hasil belajar

- Tes atau ujian menggunakan corak esai dengan tujuan mengukur ketajaman intelektual, daripada menggunakan pilihan ganda yang mana menekankan isi faktual.
- Ujian atau tes akan berbeda pada tahap pendidikan, seperti berikut:
 - Tingkat awal pendidikan akan dilakukan ujian hafalan pasca pembelajaran, dengan tujuan untuk memapankan kebiasaan anak didik
 - Selama tingkat lanjutan pendidikan akan ada perkembangan soal ujian kearah pendekatan intelektual yang

lebih terbuka, dengan tujuan untuk menampilkan penalaran formal menggunakan metode deduktif (dari umum ke khusus)

e) Anak didik

- Kemampuan kognitif antar anak didik lebih ditekankan, melebihi kemampuan afektifnya.
- Setiap anak didik dipacu untuk bersaing dalam memperoleh nilai terbaik dan peringkat tertinggi dikelas. Metode ini bertujuan untuk memupuk kesempurnaan.

f) Guru

- Bertindak sebagai penentu dan pengarah pembelajaran agar intelektual anak didik dapat berkembang dengan optimal.
- Dipandang sebagai sosok panutan keunggulan intelektual dan menjadi juru penengah kebenaran.

g) Sekolah tidak memiliki fungsi dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan pribadi maupun terapi kejiwaan, hal tersebut dilakukan dalam keluarga maupun tempat keagamaan.

c. Konservatisme Pendidikan

Konservatisme pendidikan memiliki bentuk pendidikan yang paling kurang

konservatif dibandingkan 2 bentuk lainnya, sehingga memiliki bentuk yang paling kurang kaku dan kurang moralistis dalam pembenaran dan pemahaman dasar sosial maupun politis. Bentuk ini memiliki keyakinan bahwa kebahagiaan dan kesadaran diri berasal dari filosofi moral berupa ketaatan terhadap suatu ukuran keyakinan dan perilaku yang telah mapan. Sedangkan, pengungkapan diri dalam tingkat politik sebagai konservatisme sosial yakni kapitalisme demokratis. Terdapat 2 bentuk ungkapan dasar konservatisme pendidikan yang diyakini dapat menjamin perhananan hidup secara sosial dan kuat secara efektifitas, yaitu:

1) Konservatisme pendidikan religious

Bentuk ini menekankan aspek rohani sebagai dasar dalam pembangunan karakter moral yang tepat.

2) Konservatisme pendidikan secular

Bentuk ini menekankan pendekatan utilitarian dan praktis dalam tradisi sosial yang mapan, sehingga cukup melestarikan dan meneruskan berbagai keyakinan dan praktik yang ada.

Konservatisme pendidikan memandang bahwa pengetahuan adalah cara terbaik untuk mengemukakan berbagai nilai dan fungsi sosial yang mapan. Manusia dapat

memerankan diri sebagai warga negara yang baik apabila memiliki kemampuan nalar dalam menyesuaikan diri. Pandangan ini sama dengan bentuk intelektualisme pendidikan, namun perbedaannya terletak pada penerimaan adanya perubahan budaya. Perubahan dapat dilakukan dengan catatan harus menjaga stabilitas tatanan sosial yang telah mapan. Stabilitas budaya adalah kebutuhan utama kaum konservatisme dalam menjaga kesejarahan yang berpusat pada etnisnya sendiri (etnosetris). Kaum konservatisme berpedoman pada gagasan dan praktik yang pasti telah teruji waktu karena lebih meyakinkan, mapan, dan handal, dibandingkan dengan gagasan dan praktik yang lahir dari spekulasi yang relatif tidak terkendalikan. Oleh sebab itu, apabila perubahan budaya diperlukan maka perlu dilakukan secara konstruktif dan bertahap yang bersamaan dengan mempertahankan tradisi sosial dominan agar situasi sosial tetap stabil. Tradisi dapat dipertahankan melalui ketaatan terhadap lembaga dan proses budaya, yang diiringi dengan rasa hormat terhadap hukum dan tatanan sosial. Hal ini perlu dilakukan karena adanya keyakinan bahwa budaya dominan memegang

wewenang intelektual tertinggi dalam sistem keyakinan dan perilaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar dan tujuan pendidikan adalah indoktrinasi moral dengan cara melestarikan dan menyalurkan berbagai pola perilaku konvensional, namun tetap dapat menerima adanya perubahan kebudayaan sesuai keadaan dimasa kini dengan catatan mengutamakan stabilitas tatanan sosial yang telah ada. Pendidikan memiliki sasaran dalam pelestarian dan penerusan pola kemapanan sosial dan tradisi yang berorientasi dimasa kini. Kaum konservatif berpandangan bahwa pendidik perlu menghormati kebenaran dimasa lalu, namun tetap memusatkan perhatiannya pada kegunaan dan penerapan pola belajar mengajar dalam konteks sosial dimasa kini. Oleh sebab itu, perubahan dapat terjadi dengan catatan perlu terjadi secara perlahan dan bersifat organik sesuai dengan keperluan legal dan kelembagaan yang telah mapan. Perubahan perlahan tersebut dapat terjadi apabila anak didik memahami dan menghormati tatanan sosial yang telah mapan. Agar hal tersebut tercapai, anak didik perlu melalui pelatihan watak dan disiplin intelektual. Sekolah akan dirancang untuk

menjamin adanya rasa hormat dan penghargaan kepada lembaga dan praktik sosial yang ada. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut yaitu,

- a) Mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai lembaga, tradisi, proses budaya yang telah teruji waktu. Hal tersebut akan memicu rasa hormat terhadap hukum dan tatanan sosial yang mendalam.
- b) Menyalurkan dan menanamkan informasi, serta kebutuhan informasi lainnya yang diperlukan untuk keberhasilan dalam tatanan sosial yang ada.

Terdapat berbagai dasar pendidikan yang menjadi ciri khas dari pandangan konservatisme pendidikan yaitu,

1) Anak didik

- a) Memiliki kesamaan antarindividu menjadi hal yang lebih penting, daripada perbedaannya. Hal ini sebagai penentu dalam program pendidikan.
- b) Memerlukan pengarahan yang tegas dan jelas, serta pembelajaran yang baik sebelum dirinya secara efektif dapat menjadi warganegara yang bertanggungjawab.

- c) Merupakan individu yang berfungsi dalam sistem sosial yang dominan. Individualisme dengan kedudukan yang sama, tidak terpisahkan secara individu dalam masyarakat yang mapan.
 - d) Memiliki kesempatan yang sama secara moral dalam mencapai ganjaran dunia yang terbatas, keberhasilan sesuai dengan kondisi prestasi kebaikan personal.
 - e) Memiliki kebebasan personal dalam menentukan nasib, namun tetap dalam artian tradisional.
- 2) Administrasi dan pengendalian pendidikan
- a) Kewenangan pengelolaan pendidikan terletak pada pendidik profesional yang mapan, bertanggung jawab, menghormati proses yang telah ditetapkan, dan bijaksana dalam menghindari berbagai perubahan yang berlebihan dalam menanggapi tuntutan masyarakat luas.
 - b) Pendidik memiliki wewenang yang didasarkan pada peran dan status sosialnya sebagai seorang pendidik/guru.
- 3) Sifat kurikulum
- a) Menekankan pembelajaran politis agar dapat melatih anak didik menjadi warga negara yang baik.

- b) Memperhatikan pengkondisian sosial yang dapat membantu anak didik mencapai pemenuhan nilai budaya konvensional.
 - c) Menekankan ketrampilan dasar, pengetahuan praktis, dan pelatihan watak/moral.
 - d) Mengarahkan segala mata pelajaran yang akan diajarkan.
 - e) Menekankan ilmu akademik, melebihi ilmu praktis dan intelektual.
- 4) Mata Pelajaran menekankan pada pelatihan dasar yang relevan (praktis) dengan masalah masyarakat kontemporer yang paling mendesak dan harus segera diselesaikan seperti,
- a) Ketrampilan belajar dasar seperti ilmu alam (biologi, fisika) dan pendidikan fisik (termasuk ilmu tentang kesehatan).
 - b) Pendekatan akademis pada ilmu pengetahuan sosial yang konvensional seperti ilmu sejarah dan politik.
- 5) Metode pengajaran dan penilaian hasil belajar
- a) Tatacara pengajaran dalam kelas dapat menggunakan metode apapun yang paling efektif dalam meningkatkan kegiatan belajar. Metode pengajaran baru harus disesuaikan dengan tatacara tradisional agar terdapat pengarahan dalam proses

pengajaran, metode baru yang dimaksudkan seperti peragaan, studi lapangan, penelitian laboratorium, dsb. Hindari praktik pengajaran tanpa pengarahannya ataupun pengajaran individual seperti “sistem sekolah bebas”.

b) Pembelajaran pada anak didik

Pembelajaran anak didik terbagi atas 2 tahap sesuai tingkatan pembelajaran,

- Tingkat awal pendidikan anak akan diberikan pendisiplinan jasmani dan mental, melalui cara baris-berbaris, berhitung diluar kepala, menghafal, dsb.
- Tingkat lanjutan pendidikan anak didik akan dikembangkan ke arah pendekatan yang lebih terbuka dan lebih intelektual, melalui cara ceramah dan diskusi terarah

Proses pembelajaran lebih menekankan pada kognitif, baru selanjutnya pada kemampuan efektif yang bersifat antarpribadi. Penekanan ini lebih kepada pelestarian prinsip dan praktik pendidikan yang konvensional.

c) Pengendalian ruang kelas

- Warga negara yang baik adalah saat anak didik berpedoman pada pandangan budaya dominan dalam

menerapkan kewarganegaraan dan perilaku yang baik.

- Guru bersifat non-permisif dan menyisipkan penalaran dalam wewenangnya.
- Pendidikan moral menjadi salah satu aspek penting dalam persekolahan.

d) Penilaian hasil belajar

- Hafalan diperlukan dalam penilaian hasil belajar.
- Tes atau ujian yang digunakan lebih kepada pengukuran ketrampilan dan informasi yang dikuasai anak didik, bukan menekankan kepada kemampuan analitis atau spekulasi abstrak.
- Ujian dilakukan agar menimbulkan persaingan antar anak didik, demi memupuk keunggulan.

e) Anak didik

- Mampu bersaing antar personal untuk mengejar peringkat, sehingga dapat memupuk keunggulan.
- Mampu berperan dalam perencanaan pendidikan, namun terbatas pada aspek kurang penting.

f) Guru

- Berperan sebagai penentu dan pengarah proses belajar, namun mengizinkan

anak didik berperan merencanakan pendidikan dalam aspek kurang penting.

- Bertindak sebagai pakar “penyuntik” pengetahuan dan ketrampilan khusus.
- g) Sekolah dapat berfungsi sebagai pembimbing dan terapi kejiwaan pribadi, namun sebatas pada anak didik yang mengalami masalah emosional yang berat dan mempengaruhi kemampuan dirinya untuk belajar dalam situasi persekolahan normal.

2. Paradigma Liberal dalam Pendidikan

Modernitas dan kebebasan individu adalah dasar dari pendidikan liberal, oleh sebab itu bentuk pendidikan ini termasuk kedalam aliran filsafat progresif dan eksistensialis. Kaum liberal berpandangan bahwa warga negara yang baik dapat diciptakan melalui pengetahuan yang berakar dari pengalaman manusia dan tidak ada kemutlakan. Konsep pendidikan liberal akan melatih kecerdasan dengan cara membentuk pemikiran kritis, yang mana dapat memecahkan berbagai permasalahan personal maupun sosial yang ada. Kaum liberal meyakini bahwa anak didik dapat memperoleh kebahagiaan dan kesadaran diri secara langsung, melalui keterlibatan mereka secara bebas dalam pengalaman dan penilaian dunia yang alamiah.

a. Liberalisme Pendidikan

Liberalisme pendidikan memiliki bentuk paling kurang liberal diantara tiga bentuk ideologi pendidikan liberal lainnya. Kebahagiaan dan kesadaran diri didasarkan pada filosofi moral berupa kecerdasan praktis dalam pemecahan masalah, sehingga secara efektif menimbulkan perubahan tatanan sosial yang mapan. Pengungkapan diri berada pada tingkat politis liberalisme yakni demokrasi sosial. Terdapat 3 bentuk liberalisme pendidikan yaitu metodis, direktif (terstruktur), dan non direktif. Liberalisme metodis adalah bentuk pendidikan yang bersifat non-ideologis, yang mana untuk melancarkan capaian sasaran pendidikan dimasa kini diperlukan pemusatan diri pada cara baru dan yang telah diperbaiki. Liberalisme direktif (terstruktur) adalah bentuk liberalisme pendidikan yang dikaitkan dengan tradisi utama pragmatism atau eksperimentalisme. Sedangkan, liberalism non-direktif adalah bentuk liberalisme pendidikan yang dikaitkan dengan psikologis.

Hadirnya bentuk liberalisme pendidikan bertujuan untuk mempromosikan perilaku personal yang efektif. Sekolah diharapkan mampu melakukan fungsinya dalam mengembangkan perilaku efektif melalui 2 cara yaitu menyediakan informasi dan ketrampilan yang diperlukan anak didik dalam belajar secara

efektif, serta mengajarkan bagaimana memecahkan masalah praktis melalui penerapan tatacara penyelesaian masalah secara individual maupun kelompok yang didasarkan pada metode ilmiah-rasional. Setiap anak didik akan dilatih untuk fokus pada kepribadian diri yang unik dan melatih pemikiran efektif (kecerdasan praktis) agar tercapai perilaku efektif. Tatacara pemecahan masalah menekankan pada situasi masa kini-masa depan yang dekat dan perubahan sosial yang tidak langsung. Situasi akan bermanfaat untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ada, sedangkan perubahan sosial bermanfaat untuk memahami perkembangan kemampuan setiap individu dalam berperilaku praktis dan efektif untuk mengejar sasaran personalnya dalam situasi yang stabil. Tatacara pemecahan masalah didasarkan pada hasil pembuktian secara ilmiah-rasional (sistem penyelidikan eksperimental terbuka), hasilnya akan diposisikan sebagai pemegang kewenangan intelektual tertinggi dalam tatacara pengambilan keputusan secara demokratis. Terdapat berbagai dasar pendidikan yang menjadi ciri khas dari pandangan liberalisme pendidikan yaitu,

1) Anak didik

a) Memiliki perbedaan antarindividu adalah hal yang lebih penting daripada

persamaannya. Hal ini sebagai penentu dalam program pendidikan.

- b) Membuat anak didik memiliki kecenderungan menjadi baik (menginginkan/melakukan tindakan yang efektif dan tercerahkan) berdasarkan berbagai konsekuensi alamiah dari perilakunya sendiri yang berkelanjutan
 - c) Merupakan individualism psikologis. Individu sebagai unit psikologis yang otonom, mampu bergerak menanggapi berbagai kondisi personal dan sosial yang selalu berubah.
 - d) Memiliki kesetaraan secara moral, sehingga berkesempatan untuk berjuang demi berbagai ganjaran sosial yang pada dasarnya dibagikan secara merata
 - e) Menumbuhkan kepribadian dari pengkondisian sosial dan menjadikannya sebagai dasar penentuan diri yang bebas dari konteks determinisme sosial dan psikologis
- 2) Administrasi dan pengendalian pendidikan
- a) Kewenangan pengelolaan pendidikan harus ditanamkan pada para pendidik yang telah memperoleh pelatihan tingkat tinggi, yang mana memiliki komitmen terhadap proses penyelidikan kritis dan mampu membuat perubahan yang

diperlukan sehubungan dengan informasi baru yang relevan.

- b) Pendidik memiliki wewenang yang didasarkan pada berbagai ketrampilan yang dimilikinya dalam bidang pendidikan.

3) Sifat kurikulum

- a) Menekankan keefektifan personal, dengan tujuan untuk melatih anak didik menyesuaikan diri secara efektif pada berbagai tuntutan dalam situasi diri sesuai pemahamannya terhadap situasi tersebut.
- b) Menekankan pemecahan masalah secara praktis.
- c) Meletakkan penekanan pada tatacara penyelesaian secara praktis.
- d) Menentukan segala mata pelajaran wajib maupun pilihan diawal dengan porsi yang seimbang.
- e) Meletakkan penekanan pada sesuatu yang bersifat intelektual dan praktis, melebihi akademik.
 - Mata Pelajaran yang terpenting bagi anak didik adalah sesuatu yang menekankan penjelajahan terbuka dan kritis pada berbagai masalah dan isu kontemporer. Penekanan utama tersebut harus diarahkan ke pendekatan pemecahan masalah yang didasarkan

pada kegiatan kelompok dan bersifat keilmuan, melibatkan pelatihan terkait area tertentu seperti logika praktis, metoda ilmiah, ilmu pengetahuan sosial dan perilaku, serta sebagian besar berasal dari ilmu alam dan humanistik.

4) Metode pengajaran dan penilaian hasil belajar

a) Tatacara pengajaran dalam kelas dapat dilakukan lebih terbuka dan bersifat eksperimental, yang mana didasarkan pada minat personal anak didik dalam pemecahan masalah secara personal maupun kelompok.

b) Pembelajaran pada anak didik

- Anak didik mengarahkan kegiatan belajar dan perencanaan pendidikan secara kolaboratif dengan pendidik, sehingga diharapkan kegiatan belajar akan lebih baik daripada saat ditentukan dan diarahkan oleh pendidik.
- Kegiatan belajar bersifat afektif (motivasi) yang mana akan membentuk dasar bagi kognitif, disisi lain pula dapat menjadi landasan bagi indrawi-daya tangkap dan motorik-emosional.
- Kegiatan belajar menekankan pada penyesuaian berbagai prinsip dan

praktik yang ada pada saat ini dan sesuatu yang lebih baik.

c) Pengendalian ruang kelas

- Anak didik harus dianggap bertanggungjawab atas tindakannya sendiri saat itu juga, namun perlu diakui pula bahwa puncak pertanggungjawabannya tidak dapat dituntut dalam ranah konsep tradisional apapun tentang “kehendak bebas”.
- Seorang guru umumnya harus memiliki sifat demokratis dan objektif dalam menentukan standar baku tingkah laku, dirinya harus meminta sudut pandang dan persetujuan anak didik dalam memaparkan aturan tentang perilaku didalam kelas.
- Puncak tindakan bermoral adalah tindakan cerdas dalam situasi khusus, maka pendidikan moral pastilah merupakan keluaran sampingan dari tindakan pendidik dalam membantu anak didik untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam memecahkan masalah secara efektif.

d) Penilaian hasil belajar

- Mengutamakan penilaian dari dampak kegiatan belajar yang bermakna. Kedisiplinan dan hafalan dapat menjadi

penilaian, apabila anak didik perlu menguasai suatu keterampilan untuk menangani berbagai masalah personal penting secara efektif

- Ujian menggunakan metode simulasi atau peragaan aktif dalam kelas yang telah disesuaikan dengan situasi kehidupan. Cara tersebut dinilai lebih baik karena bersifat praktis, dibandingkan dengan ujian tulis.
- Perlu meminimalisir ataupun menghilangkan persaingan antar individu dan perjenjangan peringkat nilai anak didik, karena dinilai dapat menumbuhkan perilaku buruk dan melemahkan motivasi diri siswa.

e) Anak didik

Mampu berperan dalam perencanaan pendidikan dan pengarahan kegiatan belajar secara kolaboratif dengan guru

f) Guru

Mampu berperan sebagai pengorganisir dan penuntun terhadap berbagai kegiatan dan pengalaman belajar

g) Sekolah menormalkan pembimbing penyuluhan dan terapi kejiwaan personal sebagai aspek utama, sebab keduanya dapat menjamin kondisi/syarat emosional

yang diperlukan bagi berlangsungnya kegiatan belajar yang efektif

b. Liberasionisme Pendidikan

Liberasionisme pendidikan berpandangan bahwa kebahagiaan dan kesadaran personal terletak pada filosofi moral berupa pembaharuan lembaga sosial agar lebih manusiawi, oleh karena itu pendidikan digunakan untuk membangun kembali lembaga sosial dalam tatanan sosial agar lebih humanistik. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan perkembangan potensi khas setiap warga sebagai manusia. Pengungkapan diri dalam tingkat politis terletak pada liberasionalisme, yakni sosialisme demokratis. Kaum liberasionisme menginginkan adanya berbagai perubahan yang cepat dan berskala besar dalam hakikat mendasar tentang tatanan sosial yang mapan. Terdapat 3 bentuk liberasionisme pendidikan yaitu reformis, radikal, dan revolusioner. Reformis berisikan tentang sikap kita yang perlu mengoreksi ketidakadilan sosial mendasar yang ada dalam sistem pendidikan (menghapuskan pemisahan atau perbedaan dalam sekolah) maupun dalam masyarakat secara keseluruhan, sekolah diharapkan mampu secara aktif menanamkan prinsip-prinsip demokratis dalam sistem yang telah ada. Radikal merupakan bentuk yang

menggunakan sekolah untuk mengkritik dan membangun kembali dasar kebudayaan dalam masyarakat secara radikal. Revolusioner merupakan bentuk yang menggunakan sekolah sebagai agen dasar penyebarluasan revolusi sosial berlandaskan prinsip yang lebih manusiawi dan rasional melalui pelayanannya terhadap kepentingan budaya, karena budaya sendiri adalah kekuatan utama pendidikan dalam kehidupan anak-anak.

Pendidikan memiliki tujuan utama untuk mendorong berbagai pembaharuan maupun perombakan sosial yang diperlukan untuk pembangunan kembali masyarakat yang berkemanusiaan. Munculnya tujuan ini berawal dari cita-cita sosial kaum liberasionisme yang berkomitmen terhadap perujudan diri. Perujudan ini diyakini timbul dari hasil belajar anak didik dalam melakukan analisis dan penilaian secara objektif terhadap segala kebijakan dan praktis sosial yang menghalangi perujudan diri. Analisis dan evaluasi akan memusatkan perhatian pada kondisi sosial yang menghalangi perujudan potensi individu secara penuh, menekankan pembaharuan dimasa depan yang mana perlu membangun masyarakat yang lebih manusiawi dan dapat memanusiakan manusia ditengah perubahan sistem yang ada dimasa kini.

Pengetahuan diyakini sebagai alat yang paling tepat untuk pembaharuan sosial, karena mampu mengeluarkan berbagai potensi khas setiap individu agar menjadi manusia yang optimal. Cara yang digunakan untuk mencapai pembaharuan adalah memaksimalkan kemerdekaan personal dalam sekolah, disertai membela berbagai kondisi personal yang manusiawi dan memanusiaikan dalam masyarakat secara umum. Sekolah diharapkan mampu mencapai berbagai sasaran seperti membantu anak didik mengenali dan menanggapi kebutuhan akan pembaharuan/perombakan sosial, menyediakan informasi dan ketrampilan yang diperlukan anak didik agar dapat belajar secara efektif bagi dirinya secara personal, serta mengajarkan anak didik tentang bagaimana cara memecahkan berbagai masalah praktis melalui penerapan teknik-teknik penyelesaian masalah secara individual maupun kelompok yang didasarkan pada metode ilmiah-rasional. Terdapat berbagai dasar pendidikan yang menjadi ciri khas dari pandangan liberasionisme pendidikan yaitu,

1) Anak didik

- a) Memiliki perbedaan antarindividu adalah hal yang lebih penting daripada persamaannya. Hal ini sebagai penentu dalam program pendidikan.

- b) Membuat anak didik memiliki kecenderungan menjadi baik (menginginkan tindakan yang efektif dan tercerahkan) dengan cara diasuh dalam masyarakat yang baik yakni bersifat rasional dan berkemanusiaan
 - c) Merupakan individualisme sosio-psikologis. Seorang individu dalam masyarakat tertentu disuatu waktu yang dikondisikan dan dikendalikan oleh berbagai kekuatan sosial yang besar. Individualisme yang terwujud merupakan luaran sampingan psikologis dari sistem sosial yang secara kolektif memiliki komitmen terhadap perujudan politis setiap orang, sebagai sosok mengada yang unik.
 - d) Memiliki kesetaraan secara moral, sehingga memiliki kesempatan yang setara untuk berjuang demi memperoleh ganjaran sosial dan intelektual yang lebih luas, mudah diakses, dan adil/merata.
 - e) Menumbuhkan kepribadian dari pengkondisian sosial dan menjadikannya sebagai dasar penentuan diri yang bebas dari konteks determinisme sosial dan psikologis
- 2) Administrasi dan pengendalian pendidikan

- a) Kewenangan pengelolaan pendidikan harus ditanamkan pada tangan minoritas yang tercerahkan, yakni para intelektual yang bertanggungjawab, memiliki kesadaran penuh akan kebutuhan objektif bagi perubahan sosial yang konstruktif, dan mampu menanamkan perubahan sosial melalui sekolah.
 - b) Pendidik memiliki wewenang utama yang didasarkan pada ketajaman intelektualnya dan kesadaran sosialnya yang tercerahkan.
- 3) Sifat kurikulum
- a) Menekankan pembaharuan/perubahan sosio-ekonomis.
 - b) Memusatkan perhatian pada pemahaman diri dan tindakan sosial.
 - c) Meletakkan penekanan pada tindakan cerdas dalam mengejar keadilan sosial.
 - d) Memilih mata pelajaran dalam batas penentuan yang umum.
 - e) Meletakkan penekanan pada penerapan praktis yang bersifat intelektual (praksis), melebihi praktis dan akademik.
 - Mata Pelajaran yang terpenting bagi anak didik adalah sesuatu yang menekankan masalah sosial yang kontroversial, menekankan pengenalan dan analisis terhadap nilai dan prakiraan dasar yang melandasi isu sosial, dan

memperagakan kepedulian khusus terhadap penerapan apa yang dipelajari di dalam ruang kelas kepada kegiatan yang memiliki arti penting secara sosial diluar kelas. Disiplin keilmuan yang ditekankan meliputi area kajian filosofi, psikologi, kesusasteraan kontemporer, sejarah, serta berbagai ilmu perilaku dan sosial

4) Metode pengajaran dan penilaian hasil belajar

a) Tatacara pengajaran dalam kelas cenderung menekankan pada kesetaraan terhadap pemahaman dan pengenalan masalah dengan tepat, serta pemecahan masalahnya.

b) Pembelajaran pada anak didik

- Anak didik mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam kerangka kerja kurikulum yang ditentukan berdasarkan relevansi sosialnya, hal ini dinilai lebih baik daripada kegiatan belajar yang ditentukan dan diarahkan oleh guru
- Kegiatan belajar menekankan pada pemahaman masalah (pengenalan dan analisis terhadap berbagai masalah secara tepat) dan pemecahan masalah
- Kegiatan belajar terkadang menggunakan metode pendisiplinan

dan hafalan agar anak didik dapat menguasai sebuah ketrampilan yang diperlukan, sehingga dapat menangani berbagai masalah personal maupun sosial yang penting secara efektif. Akan tetapi, kegiatan belajar pada dasarnya merupakan keluaran sampingan dari kegiatan yang bermakna dan harus meminimalisir ataupun menghapuskan sama sekali metode hafalan jika memungkinkan.

c) Pengendalian ruang kelas

- Anak didik harus dianggap bertanggungjawab atas tindakannya sendiri saat itu juga, namun perlu diakui bahwa pertanggungjawaban siswa pada puncaknya tidak dapat diminta berlandaskan pada kondisi tentang “kehendak bebas”.
- Secara umum, guru harus memiliki sifat demokratis dan objektif dalam menentukan standar baku tingkah laku. Anak didik harus berpartisipasi dalam menentukan standar baku perilaku, hal ini bermanfaat untuk mengembangkan rasa tanggungjawab moral anak didik.
- Tindakan bermoral adalah tindakan paling cerdas dalam situasi apapun. Peningkatan kecerdasan praktis

diperlukan agar pendidikan moral lebih efektif. Tindakan cerdas pula merupakan cita-cita atau bentuk ideal yang dianjurkan secara sosial. Oleh sebab itu diperlukan masyarakat yang cerdas (obyektif), hal ini dapat tercapai apabila setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk membuat berbagai pilihan yang tercerahkan berdasarkan kesempatan pendidikan yang setara.

d) Penilaian hasil belajar

- Ujian didasarkan pada tanggapan persoalan sosial yang tercermin pada perilaku anak didik yang tidak dilatih/dipersiapkan lebih dahulu, metode ini lebih disukai ketimbang ujian berdasarkan tes biasa diruang kelas
- Meminimalisir dan/atau menghapuskan metode persaingan antarpribadi dan penyusunan peringkat nilai siswa secara tradisional apabila memungkinkan, hal ini diperlukan karena dapat memicu sikap buruk pada anak didik dan menurunkan motivasi diri

e) Anak didik

Mampu mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam kerangka kerja kurikulum yang ditentukan berdasarkan relevansi sosialnya

f) Guru

Sosok yang dipandang sebagai panutan dalam hal komitmen intelektual dan keterlibatan sosialnya

g) Sekolah dan luar sekolah melakukan pembimbing penyuluhan dan terapi kejiwaan personal sebagai bentuk pengendalian sosial secara terselubung dan melatih penyesuaian diri anak didik. Metode ini akan menghalangi kesadaran anak didik terhadap latarbelakang kondisi sosial dan melahirkan masalah kejiwaan individual.

c. Anarkisme Pendidikan

Anarkisme pendidikan merupakan bentuk pendidikan yang paling liberal apabila dibandingkan 2 bentuk pendidikan liberal diatas. Kebahagiaan dan kesadaran diri diyakini dapat dicapai apabila filosofi moralnya didasarkan pada penghapusan berbagai pembatasan kelembangaan, Hal ini bertujuan agar kebebasan personal dapat bertumbuh-kembang. Anarkisme merupakan pengungkapan diri pada tingkat politis yakni adanya kerjasama bebas yang diinstitusionalisasikan, sehingga timbul demokrasi partisipasional secara langsung dalam sebuah era pasca-sosialistis. Bentuk anarkisme pendidikan menginginkan

pembebasan umat manusia dari keterkekangan kelembagaan.

Anarkisme pendidikan berpandangan bahwa pengetahuan merupakan produk alamiah dari kehidupan sehari-hari dan kepribadian individu mengandung nilai yang melampaui tuntunan masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan utama pendidikan adalah untuk membawa pembaharuan maupun perombakan berskala besar dan segera dalam masyarakat, dengan cara menghilangkan kewajiban mengikuti sistem persekolahan formal yang tradisional. Pendidikan dianggap sebagai sebuah fungsi alamiah dari kehidupan harian dalam lingkungan sosial yang rasional dan produktif. Masyarakat berpendidikan adalah mereka yang mampu berfungsi sebagai makhluk bermoral yang mengatur dirinya sendiri, sehingga perhatian berpusat pada meleyapkan atau meminimalisir secara radikal berbagai keperluan adanya sekolah formal maupun lembaga lainnya karena mengkekang perilaku personal. Pola pendidikan harus digantikan dengan pola belajar sukarela dan mengarahkan diri sendiri, sehingga anak bebas memilih dan menentukan nasibnya. Setiap anak memiliki kebebasan akses secara universal pada bahan pendidikan dan kesempatan belajar yang telah disediakan, namun tanpa adanya kewajiban sistem

pengajaran. Penekanan pendidikan dilatarbelakangi keadaan sosial yang waras dan humanistik, yakni berorientasi pada diri sendiri. Terdapat berbagai dasar pendidikan yang menjadi ciri khas dari pandangan anarkis pendidikan yaitu,

1) Anak didik

- a) Memiliki perbedaan antarindividu adalah hal yang lebih penting daripada persamaannya. Perbedaan ini lebih bijaksana daripada meresepkan pengalaman pendidikan yang serupa bagi setiap anak didik. Oleh sebab itu, perbedaan sebagai penentu berbagai program pendidikan.
- b) Membuat anak didik memiliki kecenderungan menjadi baik (menginginkan tindakan yang efektif dan tercerahkan) dengan cara diasuh dalam masyarakat yang baik (bersifat rasional dan berkemanusiaan).
- c) Merupakan individualisme romantik, yakni individu yang otonom. Dirinya bebas berkerjasama dengan individu lain dalam budaya yang sepenuhnya terbuka, tanpa dikendalikan oleh kelembagaan politis dan ekonomis yang konvensional.
- d) Memiliki kesetaraan moral dalam hal kesempatan belajar apapun yang dirinya

pilih, demi memperoleh tujuan apapun yang layak untuk dikejar.

- e) Menumbuhkan kepribadian dari pengkondisian sosial dan menjadikannya sebagai dasar penentuan diri yang bebas dari konteks determinisme sosial dan psikologis
- 2) Administrasi dan pengendalian pendidikan
- a) Kewenangan pengelolaan pendidikan harus dikembalikan kepada rakyat dengan mengizinkan setiap orang mengendalikan hakikat dan pelaksanaan perkembangan dirinya sendiri.
 - b) Pendidik tidak memiliki wewenang khusus dalam menjadi seorang guru.
- 3) Sifat kurikulum
- a) Menghapuskan sekolah demi memperbesar pilihan personal yang bebas
 - b) Membedakan antara pendidikan dan persekolahan. Kegiatan belajar yang sebenarnya hanyalah belajar yang ditentukan sendiri. Kegiatan belajar akan berlangsung efektif apabila dilakukan dalam sebuah masyarakat yang “tanpa sekolah”.
 - c) Menekankan bahwa setiap individu menentukan sendiri berbagai tujuan belajarnya.

- d) Menekankan bahwa kegiatan belajar harus ditentukan sendiri oleh individu yang belajar.
 - e) Meletakkan penekanan pada apa yang bermakna secara personal dengan mengorbankan perbedaan tradisional antara apa yang akademis, intelektual, dan praktis.
 - Mata pelajarannya harus bebas, setiap individu dibebaskan dalam menentukan hakikat dan sejauh mana dirinya akan belajar.
- 4) Metode pengajaran dan penilaian hasil belajar
- a) Tatacara pengajaran akan ditentukan secara personal oleh individu, disesuaikan dengan tujuan dan rancangan pendidikannya masing-masing.
 - b) Pembelajaran pada anak didik
 - Anak didik sebagai individu yang menentukan metode pengajarannya sendiri
 - Manusia merupakan makhluk yang secara alamiah bersifat sosial dan memiliki keinginan berkerjasama, oleh sebab itu kegiatan belajar harus menekankan kerjasama dan meminimalkan persaingan antar individu. Hal ini diperlukan untuk

memperoleh ganjaran. Disisi lain, manusia memiliki sifat alamiah dalam hal mengujudkan diri, maka secara intrinsik dirinya memiliki rasa persaingan dengan dirinya sendiri dan tidak memerlukan dorongan dari luar untuk belajar.

- Proses belajar sebenarnya memiliki sifat total dan organis, bukannya dipandang memiliki perbedaan tradisional antara kognitif, efektif, dan interpersonal. Perbedaan tradisional tersebut dipandang palsu dan tidak produktif dalam proses pembelajaran.
- Perlunya pemusnahan sekolah, yang mana merupakan lembaga sosial dengan fungsi berkelanjutan dan melestarikan diri.

c) Pengendalian ruang kelas

- Dasarnya terletak pada anak yang harus menentukan dirinya sendiri. Apabila mereka memilih terdapat sekolah, maka pengalaman dalam sekolah harus ditentukan oleh individu yang terlibat bukannya diatur oleh agen-agen dari luar.
- Peran tingkah laku disesuaikan dengan situasi yang diperoleh melalui kerjasama antara seluruh peserta yang terlibat

dalam pembelajaran. Berbagai aturan umum yang diterapkan pada situasi tertentu tidaklah terkait secara organis dengan berbagai tuntutan situasi itu, dan pada akhirnya salah dalam menampilkan jenis kendali dalam kenyataan yang mungkin diperlukan.

- Tindakan bermoral merupakan luaran sampingan dari kehidupan moral dalam sebuah masyarakat moral, sekolah hanya memainkan peranan insidental dalam menentukan tingkah laku bermoral.

d) Penilaian hasil belajar

- Penilaian bersifat rahasia, hanya diketahui oleh anak yang belajar. Mereka yang menghendaki berbagai pendekatan direktif ataupun otoritarian dalam kegiatan belajarnya didasarkan oleh kebebasan memilih bukan paksaan.
- Metode penilaian atau evaluasi terbaik adalah penilaian eksklusif yang dilakukan diri sendiri, hal ini berfungsi untuk tujuan persaingan dalam dirinya.

e) Anak didik

- Peran tradisional anak didik yang ditetapkan Lembaga harus dihapuskan.

f) Guru

- Peran tradisional guru yang ditetapkan lembaga harus dihapuskan.
- Aspek yang harus dihapus atau bisa menjadi pilihan dari proses pendidikan.

g) Pelaksanaan pembimbing penyuluhan dan terapi kejiwaan personal dalam sekolah adalah bentuk pengendalian sosial secara terselubung dan melatih penyesuaian diri anak didik. Metode ini akan menghalangi kesadaran anak didik terhadap latarbelakang kondisi sosial dan melahirkan berbagai masalah kejiwaan individual yang pura-pura sedang disembuhkan.

Terdapat 3 bentuk dasar anarkisme pendidikan yaitu,

▪ Anarkisme taktis

Kaum taktis berpandangan bahwa pendidikan lebih efektif apabila masyarakat yang mendidik individu, bukan melalui sekolah atau sejenisnya karena masalah yang nyata dalam masyarakat berkaitan dengan masalah sosial seperti kemiskinan, rasisme, peperangan, maupun ketidakadilan sosial lainnya. Disisi lain, penghapusan sekolah secara efektif mengalihkan akses biaya ke tangan mereka yang bertujuan

memperbarui kondisi sosial dalam sistem yang sudah ada, bukannya ke aparat persekolahan yang boros dan tidak produktif.

- Anarkisme revolusioner

Kaum revolusioner berpandangan bahwa sekolah hanya sebagai alat kemapanan budaya yang dominan agar rakyatnya patuh, sehingga mampu melayani dan mendukung sistem kontrol sosial yang keyataannya merupakan penindasan. Pandangan tersebut menyebabkan adanya revolusi sosial untuk menghapuskan sekolah, yang diawali dengan memberikan pemahaman dan pengakuan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan merupakan agen patologis yang hanya mereproduksi sistem yang “sakit”. Perombakan sistem pendidikan dimasa kini dan pemapanan masyarakat baru yang lebih tercerahkan diharapkan mampu melahirkan sekolah baru yang penuh makna. Disisi lain, penghapusan sekolah secara efektif menghancurkan sistem yang ada dan membuka era baru dalam sosialisme demokratis.

- Anarkisme utopis

Kaum utopis berpandangan bahwa saat ini masyarakat utopian hidup dimasa

pasca industri, yang mana dicirikan dengan sistem produksi yang nyaris sepenuhnya otomatis menggunakan mesin dan hanya sedikit memerlukan pekerja terlatih. Disisi lain, adanya pandangan bahwa sekolah hanya diadakan untuk memaksakan setiap orang untuk memikul peran pekerjaan yang nyatanya kebanyakan tidak diperlukan lagi. Oleh sebab itu, setiap orang dibebaskan untuk belajar demi dirinya sendiri berdasarkan minat spontan masing-masing agar terciptanya perkembangan kemakmuran dan kesenangan setiap individu dalam masyarakat. Kaum utopis tidak menentang persekolahan, namun menentang lembaga pendidikan yang melestarikan diri dengan memaksa seseorang mempelajari hal tertentu dengan cara tertentu dan disaat-saat tertentu. Pendidikan tidak dapat disamakan dengan persekolahan tradisional, karena masyarakat yang baik tidak memerlukan pola belajar mata pelajaran wajib. Penghapusan persekolahan tradisional secara efektif menjadi kunci pembaharuan yang dapat mencapai tujuan tertingginya dalam menciptakan masyarakat tanpa lembaga, sehingga setiap rakyat akan terus

melampaui dan memperbaharui diri sendiri. Pengaturan sosial akan diraih melalui kerjasama yang bebas berdasarkan kebutuhan timbal-balik.

Berbeda dengan William F. O'Neil (1981) di atas, sosiolog lain, yakni Henry A. Giroux dan Stanley Aronowitz (1985), membaginya menjadi tiga paradigma yaitu konservatif, liberal, dan kritis. Pembagian tiga paradigma tersebut sependapat dengan analisis kesadaran ideologi masyarakat oleh Paulo Freire (1970), yang mana menggolongkan kesadaran manusia menjadi *kesadaran magis*, *kesadaran naif*, dan *kesadaran kritis*. Berikut penjelasan perbedaan masing-masing paradigma yang dikemukakan oleh Henry A. Giroux dan Stanley Aronowitz ⁴:

3. Paradigma Konservatif dalam Pendidikan

Pendidikan konservatif bertujuan untuk menjaga status *quo*. Kaum konservatif memandang pentingnya menjaga harmoni dan menghindari konflik maupun kontradiksi dalam masyarakat. Disisi lain, kaum konservatif berpandangan bahwa ketidaksejahteraan dan penderitaan masyarakat merupakan suatu fenomena masyarakat yang

⁴ Mansour Fakhri, "Ideologi dalam Pendidikan", dalam Pengantar Buku William F. O'Neil, *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul Ideologi-Ideologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), x

mustahil dihindari karena telah menjadi ketentuan sejarah maupun takdir tuhan.

Proses pendidikan paradigma konservatif akan menghasilkan lulusan dengan kesadaran magis. Anak didik tidak memiliki kemampuan analisis, hal ini disebabkan oleh adanya proses pendidikan secara dogmatik tanpa adanya mekanisme pemahaman makna terhadap setiap konsepsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan konservatif dapat berpaham pada implikasi paedagogi (pendekatan pendidikan anak-anak; indoktrinisasi) maupun andragogi (pendekatan pendidikan orang dewasa), dengan dasar menjadikan pendidikan sebagai proses mempasifkan maupun menjinakkan agar anak didik dapat menyesuaikan diri ke dalam sistem dan struktur yang diyakini telah mapan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak menjadi wadah untuk transformasi sosial dan dominasi, namun sekedar menciptakan masyarakat agar sistem dapat berjalan dengan baik.

4. Paradigma Liberal dalam Pendidikan

Modernitas dan kebebasan individu menjadi dasar dalam paradigma liberal. Lebih jelasnya akar paradigma liberal terletak pada pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, kebebasan, serta mengidentifikasi masalah dan upaya perubahan sosial secara instrumental demi menjaga stabilitas jangka

panjang. Kaum liberal berpandangan memang ketidaksejahteraan dan penderitaan merupakan bagian dari permasalahan masyarakat, namun mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan pendidikan. Berbagai masalah dalam masyarakat diyakini akibat ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan keadaan masyarakat yang ada, sehingga akar permasalahan terletak pada manusia didalamnya bukan pada sistem dan struktur yang ada. Oleh sebab itu pendidikan akan mengutamakan adanya kebutuhan akan pencapaian atau prestasi melalui proses persaingan antar anak didik, hal ini dianggap sebagai penentu perubahan sosial, namun sistem ini akan menghasilkan masyarakat individualis.

Pendidikan bertujuan untuk reformasi moderat pada sarana-prasarana dan metodologi pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Pendidikan digunakan sebagai ruang agar anak didik mampu beradaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga mereka mampu berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menstabilkan norma dan nilai masyarakat pada anak didik melalui sosialisasi dan reproduksi dasar tolak ukur penilaian yang telah diyakini masyarakat setempat.

Paradigma liberal termasuk dalam aliran filsafat Progresif dan Eksistensialis. Ciri khas terletak pada rasionalitas empiris dengan nuansa positivistik, yang dipelopori oleh rasionalisme Descartes yang sangat mengedepankan kuasa akal pikiran manusia. Meskipun mengakui keberadaan nilai-nilai transenden, paradigma pendidikan liberal tetap cenderung meninggalkannya. Dalam hal ini, manusia kembali terjebak dalam masalah eksistensialisnya⁵.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa positivisme merupakan ciri khas model pendidikan kaum liberal. Dasar ini akan menghasilkan model pendidikan yang memisahkan berbagai fakta dan nilai agar muncul pemahaman objektif atas realitas sosial. Oleh sebab itu, segala model pendidikan harus disesuaikan dengan metode ilmiah (*scientific*) yang mana perlu objektif, empiris, tidak berpihak, rasional dan bebas nilai, sehingga terdapat pemisahan fakta dengan berbagai nilai dalam proses memahami realitas sosial secara objektif. Pendidikan akan bersikap netral, objektif, dan berjarak dengan masyarakat. Model Pendidikan ini akan menghasilkan lulusan yang harus sesuai dengan “pasar kerja”.

⁵ <https://www.bibliotika.com/2015/09/paradigma-pendidikan-konservatif.html?m=1>

Proses Pendidikan ini akan menghasilkan lulusan dengan kesadaran naif. Anak didik dipicu untuk mengembangkan kebutuhan akan pencapaian dan pembangunan diri secara personal, tanpa mempertanyakan sistem dan struktur yang ada karena dinilai telah baik dan benar. Kesadaran ini akan membuat anak didik mencapai tujuan pendidikan liberal, yaitu dapat beradaptasi dengan sistem dan struktur yang tersedia melalui pengembangan mentalitas, kreativitas, motivasi, ketrampilan teknik, dan kecerdasan anak didik.

Pendidikan liberal dapat berpaham pada implikasi paedagogy (pendekatan pendidikan anak-anak; indoktrinasi) maupun andragogy (pendekatan Pendidikan orang dewasa), dengan dasar menjadikan Pendidikan sebagai proses mempasifkan maupun menjinakkan agar anak didik dapat menyesuaikan diri ke dalam sistem dan struktur yang diyakini telah mapan. Oleh sebab itu, Pendidikan tidak menjadi ruang untuk transformasi sosial dan dominasi, namun sekedar menciptakan masyarakat agar sistem dapat berjalan dengan baik.

5. Paradigma Kritis dalam Pendidikan

Kaum dengan paradigma kritis berpandangan bahwa masalah masyarakat merupakan cerminan dari pendidikan, sehingga anak didiknya diajarkan untuk memiliki refleksi dan kesadaran kritis untuk melakukan transformasi sosial yang diyakini mampu menyelesaikan masalah masyarakat.

Masalah masyarakat dapat meliputi politik, ekonomi, dominasi, kelas strata, diskriminasi gender, penindasan, dan ketimpangan lainnya. Pendidikan bertujuan untuk reformasi struktur secara fundamental dalam sistem politik-ekonomi masyarakat. Masalah masyarakat diyakini tercermin dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan refleksi kritis terhadap ideologi dominasi ke arah transformasi sosial. Terdapat 4 cita-cita atau visi dasar yang ingin dicapai kaum kritis dalam pendekatan pendidikan yaitu,

a. Belajar berpikir

Anak didik akan diberikan pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional, sehingga dirinya berani menyatakan pendapat dan bersikap kritis. Keinginan atas pengetahuan akan membuat anak didik memiliki semangat membaca yang tinggi.

b. Belajar hidup melalui kemampuannya dalam menyelesaikan masalah

Anak didik akan diberikan ketrampilan untuk menyelesaikan masalah dalam kesehariannya.

c. Belajar hidup bersama dalam masyarakat

Anak didik akan diberikan kesadaran bahwa dirinya hidup dalam dunia yang terdiri atas manusia lainnya dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Oleh sebab itu,

toleransi menjadi aspek utama yang perlu ditanamkan dalam kesadaran anak didik.

d. Belajar menjadi diri sendiri

Anak didik akan diberikan pemahaman yang beorientasi pada bagaimana dirinya dapat tumbuh dan berkembang dimasa depan sebagai manusia yang mandiri, memiliki harga diri, dan tidak sekedar memiliki materi maupun jabatan politis⁶.

Model Pendidikan dengan pandangan kritis berlawanan dengan positivisme, yang mana pengetahuan bukan semata-mata refleksi atas dunia statis karena kaum kritis memiliki keyakinan bahwa fenomena masyarakat berada dalam dunia dinamis yang ditandai oleh historisitas atau terus mengalami perubahan. Dasar pilihan manusia tidak terbatas pada masa lalu dan masa kini. Oleh sebab itu, dunia tidak sepenuhnya bebas nilai dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah menggunakan ilmu alam maupun secara objektif. Manusia dipandang memiliki tanggungjawab sepenuhnya atas kebebasan mereka, disisi lain pula punya peran dalam mencegah terjadinya ketidakadilan dan penindasan sesamanya dimasa depan dalam jangka panjang. Kaum kritis berpandangan bahwa Pendidikan merupakan:

⁶ Mohamad Adnan, Paradigma Pendidikan Kritis dalam Perspektif Pendidikan Islam (CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, Juni 2005) 109

- a. Ruang untuk menciptakan sikap kritis terhadap sistem dan struktur yang tidak adil, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan memiliki visi dalam melakukan kritik pada sistem dominan, sebagai bentuk keberpihakan pada kaum non-dominan yang tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru dan lebih adil.
- b. Ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis, dengan tujuan untuk transformasi sosial. Pendidikan memiliki tujuan utama lainnya dalam memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil

Pendidikan kritis berpaham pada implikasi andragogi (pendekatan pendidikan orang dewasa). Oleh sebab itu, anak didik diposisikan sebagai subjek dari sistem pendidikan. Guru sebagai fasilitator bukan menggurui, komunikasi antar kedua pihak bersifat *multicommunication*. Proses Pendidikan ini akan menghasilkan lulusan dengan kesadaran kritis, yang mana mampu melihat sumber masalah masyarakat lainnya seperti pada aspek struktur dan sistem. Kesadaran kritis diharapkan mampu menghasilkan individu seperti berikut,

- a. Mampu mengidentifikasi secara kritis terkait apakah terdapat aspek budaya, sosial, ekonomi,

dan politik yang mungkin menjadi penyebab ketidakadilan masyarakat saat ini.

- b. Mampu menganalisis bagaimana cara kerja aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik dalam menyebabkan ketidakadilan masyarakat saat ini.
- c. Mampu mentransformasikan cara kerja aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar dapat merubah keadaan masyarakat baru yang lebih adil.

C. Pandangan Islam Terhadap Paradigma Konservatif, Liberalis, Kritis, Fundamentalis, Anarkhis dalam Pendidikan

1. Pandangan Islam terhadap Paradigma Konservatif dalam Pendidikan

Imam al-Ghazâli termasuk salah satu pemikir yang syarat dengan sifat keagamaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pemikiran al-Ghazâli adalah memahami kondisi psikologis dirinya yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran pendidikan. Akhirnya, tersusun menjadi formulasi murni keagamaan dan menjadikannya sebagai kekuatan utama konservatisme dalam pemikiran Islam dan dalam pemikiran pendidikan secara khusus. Konsep dasar dalam pendidikann Islam, yaitu upaya transformasi atas nilai-nilai yang sejalan dengan agama Islam, yakni berdasar Al-Qur'ân dan As-Sunah. Karakter religius

merupakan ciri khas dari pendidikan Islam. Maka dari itu, sistem pendidikan yang benar menurut al-Ghazâli adalah pendidikan dijadikan sarana dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan atau kesuksesan di dunia dan akhirat. Maka, epistemologi pemikiran pendidikan al-Ghazâli bertujuan pada sumber-sumber ilmu dan bagaimana cara mendapatkannya.

Al-Ghazâli sangat perhatian bahkan terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan. Diantaranya, melalui karyanya *Ihya' Ulumuddin* dan *Ayyuhal Walad*. Formulasi teori pendidikan dalam karya *Ayyuhal Walad* banyak disampaikan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, sehingga beberapa isi *Ayyuhal Walad* hanyalah merupakan penekanan terhadap materi yang telah disebutkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*.

Peran pendidikan sangat penting yaitu dalam upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia. Maka dari itu, fungsi pendidikan Islam adalah menyiapkan SDM tersebut agar memiliki nilai kualitas tinggi yang mampu membentuk peserta didik yang berilmu, beriman serta beramal shaleh. Sehingga para ahli berusaha untuk menemukan bentuk ideal bagi pengembangan sistem pendidikan Islam dengan landasan utama, yaitu kitabullah (al-Qur'ân), as-Sunah dan ijtihad. Selanjutnya, salah satu dari tipologi yang

dilakukan oleh M. Jawwad Ridlo adalah aliran Religius-Konservatif (al diny al muhâfidz) dengan tokoh utamanya adalah al-Ghazâli. Aliran religius-konservatif atau disebut dengan pendekatan alMuhafidz memberikan makna terhadap ilmu dengan menggunakan makna yang sempit karena dalam aliran ini sangat condong kepada sikap keagamaan yang murni. Hal utama dalam pandangan ilmu adalah segala ilmu yang diperlukan sekarang dan mampu membawa nilai kemanfaatan kelak dalam kehidupan akhirlah⁷. Al-Ghazâli sebagai salah satu tokoh konservatisme telah membahas secara detail tentang pendidikan tertulis dalam karya monumentalnya, yaitu kitab *Ihya' Ulumuddin* dan *Ayyuhal Walad*. Kedua karyanya tersebut merumuskan sistem pendidikan, diantaranya tentang tujuan pendidikan, kode etik seorang pendidik juga peserta didik, kurikulum pendidikan serta metode pengajaran. Prinsip pendekatan pendidikan al-Ghazâli tersebut merupakan jawaban terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi pada masa kehidupannya. Kemudian, prinsip tersebut apabila hendak dilaksanakan dalam masa saat ini, maka akan terlihat relevansinya walaupun perlu adanya penyempurnaan yang disesuaikan dengan

⁷ Ary Antony Putra, "Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazâli", *Jurnal Al-Thoriqah*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2016): hlm. 51.

kebutuhan dan perkembangan jaman. Dalam mewujudkan upaya pendekatan diri kepada Allah, paling tidak harus ada keseimbangan antara penguasaan keilmuan dan kerohanian yang didasarkan pada aspek ketuhanan. Sehingga nampak relevansi pendekatan pemikiran al-Ghazâli dengan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya model pendidikan pesantren⁸.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam senantiasa mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia Nomor 20 tahun 2003, yang menyebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Mencermati undang-undang tersebut di atas yang secara khusus menjelaskan tentang tujuan daripada pendidikan nasional, mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan tersebut antara yang satu dengan tujuan lainnya tidak bisa dipisah. Selanjutnya bisa dikatakan bahwa orientasi utama dari itu semua adalah dalam membentuk manusia yang mempunyai

⁸ Antony Putra, “Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazâli”, *Jurnal Al-Thoriqah*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2016): hlm. 51.

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, yaitu dengan jalan senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian dalam mewujudkan upaya pendekatan diri kepada Allah tersebut yaitu paling tidak harus ada penyeimbangan antara penguasaan keilmuan dan kerohanian yang didasarkan pada aspek ketuhanan. Sehingga nampak relevansi pendekatan pemikiran alGhazâli dengan pendidikan Islam di Indonesia, lebih-lebih model pendidikan yang ada di pesantren. Hal ini terlihat dalam pemikiran al-Ghazâli yang salah satunya mengacu pada tujuan perolehan kehabagiaan di dunia dan akhirat yang menjadi orientasi dalam pemikiran pendidikannya. Maka tidak heran akhir-akhir ini banyak dicetuskan model Pendidikan berbasis pesantren. Hal ini mempunyai alasan yang cukup signifikan karena pesantren di satu sisi dianggap telah berhasil dalam mendidik para peserta didik atau santrinya dalam membentuk karakter yang mulia. Lebih dari itu, Indonesia merupakan Negara yang mengakui ketuhanan sehingga warga negaranya bisa dipastikan termasuk dalam warga yang menganut agama atau beragama. Sehingga aspek akhlak dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan tidak terlepas dari kajian dalam pendidikan agama, termasuk

keharusan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai puncak beragama⁹.

2. Pandangan Islam terhadap Paradigma Liberalis dalam Pendidikan

Liberalis berfokus pada kebebasan individu dalam segala hal. Awalnya liberalis sebatas pada kebebasan berpikir, namun seiring waktu berkembang menjadi kebebasan dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi, pemikiran keagamaan, dan lain sebagainya. Dalam hal politik, awalnya liberalisasi merupakan bentuk perlawanan terhadap penguasa yang feodal. Kehadiran liberalisme politik menyebabkan hak kehidupan diberikan kepada masyarakat, yang mana sebelumnya dipegang secara mutlak oleh raja atau penguasa.

Liberalisasi dalam pendidikan Islam adalah penyebaran pemikiran keagamaan liberal dalam konteks lembaga-lembaga pendidikan Islam. Liberalisasi ini mengintervensi bidang kurikulum, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, kuatnya gerakan intelektual, menyebarkan paham, serta ajaran-ajaran dalam dunia pendidikan Islam. Bahkan, beberapa perguruan tinggi Islam diyakini telah menjadi tempat yang subur dalam

⁹ Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan al Ghazali: gagasan Konsep Teori dan Filsafat al Ghazali mengenai Pendidikan, Pengetahuan dan Belajar, Terj. Sape'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 62.

penyebaran pemikiran liberal, sehingga dikhawatirkan dapat menggoyahkan iman banyak orang¹⁰.

Adanya prinsip-prinsip liberalisme yang memberi kebebasan kepada manusia dalam menyampaikan pikiran dan gagasan tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman bahwa penggunaan akal untuk berpikir merupakan fitrah kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak masalah apabila kebebasan berpikir masuk dalam pendidikan Islam, dengan catatan tidak keluar dari otoritas keagamaan umat Islam berupa Al-Quran dan hadist. Hal yang perlu dikhawatirkan lebih dalam sebenarnya berkaitan dengan liberalisme ekonomi, yang mana melahirkan kapitalisme di Indonesia. Anak-anak di lembaga pendidikan Islam harus diberikan persiapan untuk melawan bentuk liberalisme ekonomi, karena dapat merampas hak-hak masyarakat dalam bidang ekonomi. Kapitalisme telah membuat masyarakat semakin melarat, alih-alih dapat menjadikan *welfare state* sebagaimana idealisme awal¹¹.

¹⁰ Subagja, Soleh. Gagasan Liberalisme Pendidikan Islam. Malang : Madani, 2010.

¹¹ Rachman, Budhy Munawar. Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia. Jakarta: Paramadina, 2010.

3. Pandangan Islam terhadap Paradigma Kritis dalam Pendidikan

Paradigma pendidikan kritis merupakan paradigma pendidikan alternatif yang digagas sebagai sebuah otokritik terhadap paradigma pendidikan konservatif dan liberal, yang kini secara dominan menguasai paradigma pendidikan yang telah diterapkan dalam lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun non formal. Paulo Freire merupakan penggagas paradigma pendidikan kritis, yang dasarnya hadir untuk mengkritiksi paradigma pendidikan konservatif dan liberal yang dianggap telah gagal menjalankan visi dan misi pendidikan sebagai proses humanisasi. Kedua paradigma pendidikan yang dominan tersebut mengimplikasikan berbagai luaran pendidikan yang tidak mampu membawa ke arah perubahan yang konstruktif bagi realitas kemanusiaan¹².

Kegagalan paradigma pendidikan konservatif dan liberal dalam menjalankan visi dan misi pendidikan tersebut, juga menarik perhatian para tokoh pendidikan Islam kontemporer. Salah satu aspek penting yang mendasari pemikir pendidikan Islam merumuskan konsep pendidikannya adalah fenomena realitas

¹² Muhaimin, et. al, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 36

dunia pendidikan barat modern yang ditiru oleh dunia Islam, namun kenyataannya telah gagal mencapai tujuan sejati dari pendidikan. Terdapat berbagai paradigma pendidikan islam dengan penggagas pemikir islam yang memiliki keselarasan dengan paradigma pendidikan kritis yaitu¹³,

a. Sir Muhammad Iqbal

Sir Muhammad Iqbal merupakan pemikir islam asal benua india yang menjadi salah satu penggagas paradigma pendidikan islam. Pemikirannya atas paradigma pendidikan islam memiliki relevansi dengan paradigma pendidikan kritis. Kesamaan terletak pada latarbelakang fenomologis, definisi, dan orientasi pendidikan antar kedua paradigma tersebut. Latar belakang fenomenologis pembentukan antar kedua paradigma tersebut sama-sama berasal dari anggapan adanya dehumanisasi. Iqbal berpandangan bahwa diperlukan pembaharuan paradigma karena terdapat kegagalan pada paradigma pendidikan barat modern, yang mana tercerminkan oleh krisis kemanusiaan berkepanjangan. Menurut pernyataan Iqbal, krisis tersebut diakibatkan adanya penekanan aspek transformasi

¹³ Mohamad Adnan, Paradigma Pendidikan Kritis dalam Perspektif Pendidikan Islam (CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, Juni 2005), 109

pengetahuan tanpa disertai aspek *'isyq* atau cinta¹⁴.

Kesamaan selanjutnya terletak pada orientasi, yang mana kedua paradigma pendidikan sama-sama ingin mencapai humunisasi baik secara individu maupun sosial dalam masyarakat. Paradigma Pendidikan Islam yang digagas Iqbal memiliki orientasi pada pengantaran manusia menuju kesempurnaan diri menjadi manusia, sehingga hidupnya lebih bermakna. Terdapat 2 fokus untuk mencapai hal tersebut yaitu kemampuan diri dalam menyelesaikan berbagai masalah dan kemampuan mengantarkan diri pada tujuan hidupnya yang mulia. Relevansi pula tampak pada pembentukan pribadi manusia secara integral, yang mana pendidikan Islam memperhatikan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki manusia secara menyeluruh. Disisi lain, terdapat relevansi kedua paradigma tersebut dengan sosiologi. Hal ini terletak dari orientasi sosial dalam pendidikan, yang mana adanya penyelesaian berbagai masalah zaman yang dihadapi demi tercapainya transformasi sosial.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Asrar-I Khudi*, diterjemahkan oleh Bahrun Rangkuti dan Arif Husein dengan Judul *Rahasia-rahasia Pribadi* (Jakarta: Pustaka Islam, t.t), 16.

b. Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari merupakan seorang pemikir islam asal iran. Paradigma pendidikan islam yang digagas Muthahhari memiliki relevansi dengan paradigma pendidikan kritis yang digagas Paulo Freire dalam hal sasaran utama pendidikan dan cara pandang mengenai manusia dengan dunia. Sasaran utama pendidikan islam adalah pembentukan masyarakat agar menjadi baik. Pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia dan ketentuan-ketentuan yang tercakup di bidang hukum, ekonomi, maupun politik, yang mana berbagai bidang tersebut sangat terkait erat dengan bidang pendidikan. Pendapat Paulo Freire senada dengan sasaran utama pendidikan islam, yang mana konsep pendidikan kritis menyatakan bahwa pendidikan haruslah mengantarkan manusia pada kesadaran kritis untuk membuat manusia mampu melihat dan memahami seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat yang memiliki keterkaitan erat antar bidang.

Muthahhari berpendapat bahwa fitrah merupakan potensi dasar yang hanya dimiliki manusia dan menjadi pembeda dengan makhluk Tuhan lainnya. Pendidikan dalam Islam identik dengan proses pengembangan untuk membangkitkan dan mengaktifkan berbagai

potensi-potensi yang terkandung (*al-malakah al-kaminah*) dalam diri manusia. Syari'ati berpendapat bahwa manusia telah membawa tiga potensi dasar sejak lahir yaitu kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreatifitas. Potensi dasar ini akan membuat manusia mampu melakukan proses evolusi menuju kesempurnaan sejati kemanusiaan. Pendidikan digunakan sebagai sarana pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan ketiga potensi dasar tersebut. Hal ini bertujuan agar manusia mampu mencapai tujuan penciptaannya sebagai khalifah Allah. Orientasi pendidikan dalam islam tersebut berkaitan dengan karakteristik paradigma pendidikan kritis, yang mana pula berkeinginan mewujudkan dan memaksimalkan potensi dasar manusia agar tercapainya cita-cita ideal kemanusiaan.

Pendidikan dalam islam harusnya mampu mengantarkan akal untuk lepas dari kungkungan tradisi, dengan kata lain mengarahkan pada kebebasan berpikir. Murtadha Muthahhari juga mengkritik paradigma Pendidikan konservatif, yang menurut beliau mengesampingkan peran kemampuan manusia dalam mengembangkan nalar dan daya kreasi. Muthahhari, sangat mengkritik ulama ulama yang secara formal

telah banyak menimba ilmu, namun mereka tidak mampu berkreasi serta tak mampu mengembangkan potensi berpikir kritis. Menurut Muthahhari, mereka tak ubahnya seperti orang awyam yang tak mengerti apabila berhadapan dengan persoalan-persoalan yang mereka tidak pernah pelajari. Oleh sebab itu, Paradigma pendidikan kritis juga memiliki relevansi dengan paradigma pendidikan Islam pada cara pandang mengenai manusia dengan dunia¹⁵.

c. Prof. Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany

Pendidikan Islam dalam pandangan al-Syaibany harus senada dan berkaitan erat dengan realitas masyarakat, kebudayaan, sistem sosial, ekonomi, dan politik. Realitas masyarakat yang dimaksudkan berkaitan dengan aspirasi, harapan, kebutuhan, dan masalah manusia. Pendidikan Islam tidak diperbolehkan berdiri tanpa adanya hal yang mendasari dan tidak diperkenankan terasingkan dari realitas, namun harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang ada dalam masyarakat. Pendidikan Islam harus memiliki posisi sebagai perintis, pembimbing, pemimpin, serta pengkritik terhadap berbagai sistem dominan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Ajaran Islam

¹⁵ Omar Muhammad al-Toumy al-Saybany, hlm. 76.

berpandangan bahwa pendidikan sesuai dengan fitrah manusia, hal ini sangat mutlak dibutuhkan oleh manusia agar dapat memenuhi fungsi, peran, dan eksistensi fitrah kemanusiaannya. Disisi lain, para pemikir muslim berpandangan bahwa pendidikan adalah pemenuhan jati diri atau esensi kemanusiaan yang dihadapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pendidikan dalam perspektif Islam lebih kepada pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan fitrah kemanusiaan¹⁶. Paradigma pendidikan kritis menolak pandangan paradigma Pendidikan liberal yang menganggap adanya keterpisahan antara manusia dengan dunia atau alam semesta. Omar Muhammad al-Taomy al-Syaibany berpandangan serupa, yang mana alam dan manusia berkaitan erat dalam paradigma pendidikan Islam. Alam berperan sebagai mitra manusia dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mencapai kemajuan diri. Oleh sebab itu, manusia dan alam bukanlah dua entitas yang harus diperlawankan. Alam semesta berperan sebagai sumber ilham yang menolong dan mengantarkan manusia dalam menemukan

¹⁶ Mukhtar Solikin dan Rosihan Anwar, Hakekat Manusia : Menggali Potensi Kesadaran Pendidikan Diri dalam Psikologi Islam, (Cet. I ; Bandung : Pustaka Setia, 2005) hlm. 128.

kebenaran dan kebaikan. Sehingga pada akhirnya, kedua paradigma pendidikan kritis maupun Islam menjadikan pendidikan sebagai proses konsintisasi atau proses penyadaran, yang membuat manusia memiliki kesadaran kritis, reflektif, dan holistik dalam mempersepsi, menghadapi, serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam realitas kehidupannya¹⁷.

4. Pandangan Islam terhadap Paradigma Fundamentalisme dalam Pendidikan

Gerakan fundamentalisme Islam memiliki empat motif yang menjadi arah gerakannya yaitu sebagai gerakan pembaruan, reaksi terhadap arus modernitas, reaksi terhadap westernisasi, dan keyakinan terhadap agama sebagai teologi alternatif. Berpegang pada prinsip perlawanan (*oppositionalism*), penolakan terhadap hermeneutika, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme, serta penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis, gerakan fundamentalis berkembang dari gerakan keagamaan menjadi gerakan politik ideologis. Kemunculan fundamentalisme dalam dunia Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya represi (penindasan) politik, kegagalan rezim sekular dalam merumuskan kebijakan dan

¹⁷ Departemen Agama RI., hlm. 207

mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat, respon terhadap Barat (rasionalisasi, modernisasi, sekularisasi dan kapitalisme), respon atas situasi politik internasional yang sering membuat dunia Islam tersudut atau bahkan teraniaya, serangan kultural (budaya) terhadap masyarakat Islam dan terakhir kegagalan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dalam menyejahterakan masyarakat.

Ada beberapa bentuk kecenderungan yang mendorong pemikiran dan gerakan seseorang itu fundamentalis. Fundamentalisme Islam cenderung rigid dan literalis dalam memandang dan memahami berbagai masalah, khususnya masalah-masalah yang berhubungan dengan ijtihad, preseden (teladan) zaman awal Islam, ijma, pluralisme dan hikmah. Kelompok fundamentalis menolak sistem-sistem istnbat hukum di atas jika dihubungkan dengan ruang dan waktu. Mereka berpatokan bahwa doktrin Islam (Al Quran dan As Sunnah) sudah selesai dan tidak bisa digugat lagi.

5. Pandangan Islam terhadap Paradigma Anarkis dalam Pendidikan

Gagasan filosofis dari anarkisme epistemologis fayerabend merupakan awal mula postmodernisme unjuk gigi dalam kancah kajian ilmu pengetahuan dewasa ini, khususnya dalam filsafat ilmu, yang secara sistematis merupakan cabang dari rumpun kajian epistemologi.

Epistemologi akan menunjukkan asumsi dasar ilmu, agar penelaahan filsafat ilmu tidak terpaku pada ragam objek material ilmu. Pertanyaan dari ontologi “ apakah karakter pengetahuan kita tentang dunia?” adalah aspek dari filsafat pengetahuan (epistemologi) yakni menggali kebenaran, kepastian dan tahap-tahapnya, objektivitasnya, abstraksi, intuisi, asal pengetahuan dan arah pengetahuan. Berkaitan dengan itu dan sama vitalnya adalah pertanyaan “apakah sesuatu yang berada di dunia ini?” maka, pertanyaan ontologi dan epistemologi tidak dijawab dengan penyelidikan empiris yang terkait dengannya¹⁸.

Pertanyaan filsafat dipecahkan bukan dengan penyelidikan empiris, tetapi dipecahkan dengan penalaran. Dengan bantuan telaah epistemologis maka akan didapat pemahaman hakiki tentang karakter objek ilmu . Pada dasarnya, postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang berusaha mencari kesatuan menuju kemajemukan, dengan inti pemikiran: desentralisasi vs sentralisasi, dekonstruksi vs konstruksi, subkultur vs kultur, nihilisme vs hermeneutika, anarki vs hirarki, sekte-sekte vs agama, delegitimasi vs legitimasi.

¹⁸ Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan,(Yogyakarta, Liberty: 2003), hlm. 46

Pemikiran Fayerabend mempunyai implikasi tersendiri dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yakni dalam pengembangan ilmu pengetahuan bahwa para ilmuwan (scientist) melakukan penelitian hendaknya berusaha membebaskan diri dari metodologi yang ada, meskipun terbuka kemungkinan menggunakan metode tersebut. Tidak ada metode yang tunggal melainkan setiap ilmuwan hendaknya menerapkan pluralitas teori, sistem pemikiran sesuai dengan kecenderungan masing-masing, karena setiap orang memiliki pilihan untuk melakukan sebuah eksperimen atau riset terhadap sebuah fenomena tertentu.

Oleh sebab itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan perlu ditumbuhkan sikap keterbukaan terhadap alternatif metodologi termasuk filsafat yang mendasarinya. Artinya, silahkan memilih sendiri metode yang dipandang lebih sesuai dengan ilmu yang dikembangkan. Memang tidak dapat disanggah bahwa sering terjadi pemilihan metodologi yang lebih didasarkan pada penguasaan metodologi seseorang. Kuantifikasi dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu keagamaan tidak sepenuhnya salah. Tetapi kuantifikasi dalam landasan filsafat positivisme-titik untuk studi keagamaan juga tidak dapat dibenarkan, dengan artian bahwa studi keagamaan mempunyai nilai relativitas

dalam mengimplementasikan ajarannya, sehingga apabila hal tersebut dikaji secara kuantifikasi (pernyataan jumlah atau kalkulasi terhadap suatu makna dalam studi keagamaan) maka hal itu akan terjadi kontradiksi dalam aplikasinya. Karena hal ini berarti akan menyederhanakan masalah yang sebenarnya sangat kompleks. Adapun hubungan hal tersebut dengan konsep dan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai basis utama dalam mewujudkan kemajuan dalam berbagai lini kehidupan khususnya memajukan pendidikan Islam, pendidikan Islam dapat dipahami merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai ajaran Islam. Disisi lain pendidikan Islam dapat dipahami sebagai sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.

Pada pengertian kedua ini, pendidikan Islam dapat mencakup :

- a. Kepala sekolah/madrasah atau pimpinan perguruan tinggi yang mengelola dan mengembangkan aktivitas kependidikannya yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, serta para tenaga penunjang pendidikan (pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan lain sebagainya) yang mendukung terciptanya suasana, iklim

dan budaya keislaman di sekolah/madrasah atau perguruan tinggi tersebut;

- b. Komponen-komponen aktivitas pendidikan, seperti kurikulum atau program pendidikan, peserta didik yang tidak sekedar pasif-reseptif, tetapi aktif-kreatif, personifikasi pendidik/guru, konteks belajar lingkungan, alat/media/sumber belajar, metode, dan lain-lain dengan semangat atau jiwa ajaran dan nilai-nilai Islam

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa, pertama lebih menekankan aspek kelembagaan dan program pendidikan Islam, dan yang kedua, lebih menekankan pada aspek ruh dan spirit Islam yang melekat pada setiap aktivitas pendidikan. Dalam kajian ini penulis bermaksud memperbincangkan reaktualisasi pendidikan Islam dalam konteks pengertian yang pertama, terutama pada jenis pendidikan madrasah dan pelajaran PAI di sekolah. Sedangkan, upaya reposisi pendidikan Islam terutama ditekankan pada pengertian pendidikan Islam yang kedua. Disisi lain, pengertian pendidikan Islam yang didasarkan pada hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, yakni sebagai bentuk bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkannya, mengajarkan, melatih,

mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam¹⁹.

D. Implementasi Paradigma Makro dalam Konteks Pendidikan Islam

Islam sebagai sebuah agama, juga mempunyai tanggungjawab dalam pengembangan intelektual dan pengembangan pendidikan bagi pemeluknya. Dalam Islam, masalah manusia dan liberalisme yang mempunyai hubungan erat dengan proses pendidikan, juga sering disebut. Konsep Islam tentang nilai-nilai liberalisme dan kebebasan banyak dijumpai. (Muhammad Arkoun 1994. 175) misalnya dengan mengutip Anwar Al Jundi (esai Mesir) berpendapat, bahwa kebebasan manusia merupakan satu diantara data khas Islam, karena Islam yang pertama menganjurkan kebebasan berfikir. (Mastuhu.1994.1) mengatakan bahwasanya dalam Islam, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kemuliaan manusia terletak pada diberikannya daya akal dan kehidupan untuk membentuk peradaban. Dengan daya akal itulah, manusia membutuhkan pendidikan agar bisa bermakna dalam hidupnya. Ini dimaksudkan bahwa antara manusia, peradaban dan pendidikan merupakan satu korelasi utuh yang tak dapat

¹⁹ Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya, Arkola : 1994), hlm. 384

dipisahkan, dan pendidikan menduduki maenstrim pertama dalam pembentukan kehidupan manusia dan peradaban ini. Adalah amat naif, apabila dalam pentas peradaban, manusia hanya menjadi penonton dalam proses sejarah kemanusiaannya. Manusia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk merubah sejarah kemanusiaannya.

E. Kesimpulan

Paradigma makro dalam pendidikan merupakan paradigma yang lebih berorientasi pada desentralistik, kebijakan pendidikan yang bersifat *bottom up* yang pemikirannya mencakup area yang lebih komprehensif atau luas dibanding dengan pandangan sebelumnya. Berbagai paradigma makro dalam Pendidikan antara lain Konservatif, Liberalis, Kritis, Fundamentalis, dan Anarkhis. Masing memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap Pendidikan.

F. Daftar Bacaan

1. Al-Saybany, Omar Muhammad al-Toumy. (1979). *Falsafatut Tarbiyyah Al Islamiyah*, Jakarta : Bulan Bintang.
2. Adnan, Mohamad. (2005). “Paradigma Pendidikan Kritis dalam Perspektif Pendidikan Islam”. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, Nomor 1, Juni. - <https://media.neliti.com/media/publications/268>

[454-paradigma-pendidikan-kritis-dalam-perspe-cca693dc.pdf](#)

3. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*.
4. Fuadi, Maimun. (2013). ‘Fundamentalisme dan inklusifisme dalam Paradigma Perubahan Kegamaan’. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol 15, No 1, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4888>
5. <https://www.bibliotika.com/2015/09/paradigma-pendidikan-konservatif.html?m=1>
6. Khan, Shafique Ali. (2005). *Filsafat Pendidikan al Ghazali: gagasan Konsep Teori dan Filsafat al Ghazali mengenai Pendidikan, Pengetahuan dan Belajar*, Terj. Sape’i, Bandung: Pustaka Setia.
7. Muhaimin, et. al, (2002). *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
8. Nata, Abuddin. (2009). *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Group.
9. O’neil, William F, (2008). *Educational Ideologies: Contemporary Expressios of Educational Philosophies*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul Ideologi-Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

10. Partanto, Pius A, (1994). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola .
11. Putra, Ary Antony, (2016). “Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazâli”, *Jurnal Al-Thoriqah*, Volume 1, Nomor 1, Juni.
12. Rachman, Budhy Munawar. (2010). *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
13. Solikin, Mukhtar. & Anwar, Rosihan, *Hakekat Islam*.
14. Subagja, Soleh. (2010). *Gagasan Liberalisme Pendidikan Islam*. Malang : Madani.
15. Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, (2003). *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Liberty.

Bab 4

Pemikiran Para Tokoh Sosiologi Klasik dan Modern dalam Memberikan Kontribusi Sosiologi Pendidikan

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggali, mengkaji dan memahami secara komprehensif, jujur dan bertanggungjawab tentang:

1. Biografi dari para tokoh yang berkontribusi dalam sosiologi pendidikan
2. Kontribusi pemikiran para peletak fondasi sosiologi pendidikan
3. Kontribusi pemikiran para penguat fondasi sosiologi pendidikan
5. Relevansi sosiologi pendidikan dengan Islam

B. Pemikiran Tokoh Peletak Fondasi Sosiologi Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan utama umat manusia, yang dalam perjalanan dan perkembangannya bermunculan berbagai problem yang tidak terselesaikan, Lembaga-lembaga pendidikan ternyata tidak semuanya mampu mengatasi apalagi menyelesaikan masalah yang sedang berkembang, sehingga kehadiran para sosiolog sangat diharapkan, dengan harapan dapat

memecahkan masalah-masalah tersebut, melalui sumbangsih pemikiran dalam bidang pendidikan yang fundamental.²⁰ Berikut saya sajikan beberapa sosiolog yang telah memberikan fondasi dan kontribusi dalam pendidikan.

1. Ibnu Khaldun (1332-1406)

Ibnu Khaldun memiliki Nama lengkap Abu Zayd Abdurrahman Ibnu Khaldun, kemudian mendapat gelar Waliyyuddin, ia Lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H. (1332 M) dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 25 Ramadhan 808 H. (1406 H). Ibn Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Khaldun juga dikenal sebagai ulama segala ilmu (sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama). Pada umur 20 tahun, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan yang fokus belajar Tajwid, Qiroah, dan menghafal Al-Qur'an. Ia mempelajari fikih mazhab Maliki, Hadist Rasul, dan Puisi. Ia mempelajari Hadist dari Abu 'Abd Allah Muhammad bin Jabir bin Sultan al-Qaisi al-Wadiyashi, seorang otoritas hadist terbesar dari Tunisia yang kemudian menganugerahkan

²⁰ Tjipto Subadi, “ Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan: Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis” (Kartasura : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), hlm. 63.

ijazah kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Ibnu Khaldun juga menerima ijazah dari guru-gurunya yang lain dari sarjana-sarjana terkemuka yang mengungsi ke Tunisia.

Secara historis, kehidupan Ibnu Khaldun mengalami empat fase, yakni :

Pertama, Fase pertumbuhan dan pendidikan. Ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya, sebagaimana kebiasaan masyarakat pada masa itu. Setelah itu, Khaldun belajar kepada beberapa guru seperti Abu Abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Bahr dalam ilmu bahasa. Sedangkan Ilmu fiqh ia pelajari dari Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir. Pada Fase ini, selain mempelajari ilmu agama, Khaldun juga belajar filsafat, teologi, ilmu alam, matematika dan astronomi.

Kedua, Fase keterlibatan dalam dunia politik. Karir politik Ibnu Khaldun dimulai saat ia bekerja sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Ketika Ibnu Tafrakin ditaklukan Abu Zaid, Khaldun melarikan diri dan menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fress di Maroko. Namun, Khaldun kemudian dipenjara oleh Sultan Abu Inan selama dua tahun ketika Ibnu Khaldun terlibat dalam persengkokolan politik dan kekuasaan. Selanjutnya Khaldun mengabdikan pada Abu Salim penguasa Maroko. Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasihatnya. Pada tahun 1361

kembali terjadi intrik politik yang kemudian memaksa Khaldun pindah ke Granada dan bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari Granada sebagai duta besar. Karena tidak sepaham dengan sebagian pembesar Granada, Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Hafsi sebagai perdana menteri. Namun pada tahun berikutnya ia pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskra. ditempat inilah kemudian Ibnu Khaldun memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya, kemudian ia memilih menekuni bidang keilmuan.

Ketiga, Fase dimana Ibnu Khaldun mengembangkan keilmuannya. Fase ini berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. Fase ini merupakan fase kontemplasi Ibnu Khaldun dan dalam fase singkat ini ia berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, Al-Ibar beserta Muqaddimah.

Keempat. Fase Akhir Kehidupannya. Pada Fase ini Ibnu Khaldun benar-benar telah mengundurkan diri dari dunia politik. Ia kemudian secara serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya dengan menyelesaikan karya monumental yang belum selesai dan pada akhirnya

seluruh karya yang ia hasilkan diberikan kepada penguasa.

Salah satu perjalanan hidup beliau yang paling menarik adalah pertemuannya dengan Timur Leng Saat Timur Leng berhasil merebut suriah dan Aleppo, Penduduk mesir sangat ketakutan sehingga menghimpun kekuatan dibawah kepemimpinan sultan al-Tahhir al-Barquq untuk mengusir bangsa Tartar. Ibnu khaldun juga ikut berperang atas dasar permintaan sang sultan. Karena setelah peperangan antara Mesir dengan Timur Leng selama lebih dari satu bulan tetapi tidak ada pihak yang menang secara mutlak, Ibn khaldun akhirnya menemui Timur Leng di Damaskus pada Maulud 803H/ 5 oktober 1400 M, mereka bercakap-cakap cukup lama; antara Timur Leng bertanya tentang pekerjaan Ibnu khaldun, tentang sejarah afrika utara, dan karena Timur Leng terkesan dengan pengetahuan Ibnu Khaldun memerintahkannya menulis sejarah Afrika Utara. Ibnu khaldun menjelaskan pandangannya tentang kebangkitan dan keruntuhan negara, ia juga mendiskusikan penyerahan damaskus, karena setelah pertemuan bersejarah ini damaskus menyerah. Setelah selesai menulisnya Ibnu khaldun menyerahkan sejarah tentang Afrika Utara yang diserahkan kepada Timur Leng dalam bentuk sebelas buku kecil.

Ibnu Khaldun memiliki sumbangsih pemikiran, pandangan dan konsep mengenai dunia Pendidikan, antara lain:

- a. Konsep Pendidikan. Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi memandang, bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi akal-pikiran, sikap dan keterampilan manusia dalam proses belajar. Melalui proses pembelajaran tersebut tercipta kompetensi (soft skill) peserta didik, memiliki kematangan dalam bersosialisasi, menjadi anggota masyarakat yang eksis, sekaligus mampu mewujudkan sistem social yang lebih baik. Melalui proses pendidikan, manusia mampu menciptakan realitas sosialnya, serta mampu melahirkan ilmu pengetahuan, bahasa dan aturan-aturan yang kemudian membentuk suatu peradaban.
- b. Implikasi konsep pendidikan Ibnu Khaldun terhadap pendidikan di Indonesia dapat diidentifikasi melalui masing-masing komponen pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan yang tidak hanya membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia, tetapi juga membekali peserta didik akhlak sebagai bekal untuk hidup di akhirat kelak. Kedua, kurikulum didesain berdasarkan sifat realistik-materialistis, yang tidak mendikotomi pendidikan intelektual maupun praktis, sebagai

alat untuk membina potensi peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan, tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Ketiga, guru berperan sebagai seorang yang diyakini mampu mengantarkan peserta didik, sebagai subyek pendidikan yang kompeten dalam melaksanakan proses pembelajaran. sehingga bermanfaat tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga guru sendiri.

2. Karl Marx (1818-1883)

Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia. Semasa hidupnya ia telah menulis banyak hal, ia paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas, yang dapat diringkas sebagai "Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas", sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis.

Dalam hidupnya, Marx terkenal sebagai orang yang sukar dimengerti. Ide-ide nya mulai menunjukkan pengaruh yang besar setelah ia meninggal. Pengaruh ini berkembang karena didorong oleh kemenangan dari Marxist Bolsheviks dalam Revolusi Oktober Rusia. Ide Marxian baru mulai mendunia pada abad ke-20.

Karl Marx lahir di Trier, Prusia, 5 Mei 1818, ia adalah seseorang yang lahir dari keluarga Yahudi.

Ayahnya bernama Herschel. Dikemudian hari, ayahnya beralih agama, dari Yahudi ke agama resmi Prusia, yakni Protestan, aliran Lutheran yang relatif liberal. Herschel pun mengganti namanya menjadi Heinrich. Saudara Herschel, Samuel, seperti juga leluhurnya, adalah rabi kepala di Trier. Keluarga Marx amat liberal dan rumah Marx sering dikunjungi oleh cendekiawan dan artis di masa-masa awal Karl Marx.

Pendidikan awal sekolah Marx dijalani di rumah sampai ia berumur 13 tahun. Setelah lulus dari Gymnasium Trier, Marx melanjutkan pendidikannya di Universitas Bonn jurusan hukum pada tahun 1835. Pada usianya yang ke-17, dimana ia bergabung dengan klub mahasiswa Trier yang mengakibatkan ia mendapat nilai yang buruk. Marx tertarik untuk belajar kesustraan dan filosofi, namun ayahnya tidak menyetujuinya karena ia tak percaya bahwa anaknya akan berhasil memotivasi dirinya sendiri untuk mendapatkan gelar sarjana. Pada tahun berikutnya, ayahnya memaksa Karl Marx untuk pindah ke universitas yang lebih baik, yaitu Friedrich-Wilhelms-Universität di Berlin. Pada saat itu, Marx menulis banyak puisi dan esai tentang kehidupan, menggunakan bahasa teologi yang diwarisi dari ayahnya seperti 'The Deity' namun ia juga menerapkan filosofi ateis dari Young Hegelian yang terkenal di Berlin pada saat itu.

Marx mendapat gelar Doktor pada tahun 1841 dengan tesis nya yang berjudul 'The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature' namun, ia harus menyerahkan disertasinya ke Universitas Jena karena Marx menyadari bahwa statusnya sebagai Young Hegelian radikal akan diterima dengan kesan buruk di Berlin. Marx mempunyai keponakan yang bernama Azariel, Hans, dan Gerald yang sangat membantunya dalam semua teori yang telah ia ciptakan.

Saat di Berlin, minat Marx beralih ke filsafat, dan bergabung ke lingkaran mahasiswa dan dosen muda yang dikenal sebagai Pemuda Hegelian. Sebagian dari mereka, yang disebut juga sebagai Hegelian-kiri, menggunakan metode dialektika Hegel, yang dipisahkan dari isi teologisnya, sebagai alat yang ampuh untuk melakukan kritik terhadap politik dan agama mapan saat itu. Pada tahun 1981 Marx memperoleh gelar doktor filsafatnya dari Universitas Berlin, sekolah yang dulu sangat dipengaruhi Hegel dan para Hegelian Muda, yang suportif namun kritis terhadap guru mereka. Desertasi doktoral Marx hanyalah satu risalah filosofis yang hambar, namun hal ini mengantisipasi banyak gagasannya kemudian. Setelah lulus ia menjadi penulis di koran radikal-liberal. Dalam kurun waktu sepuluh bulan bekerja disana menjadi editor kepala. Namun, karena

posisi politisnya, koran ini ditutup sepuluh bulan kemudian oleh pemerintah. Esai-esai awal yang di publikasikan pada waktu itu mulai merefleksikan sejumlah pandangan-pandangan yang akan mengarahkan Marx sepanjang hidupnya. Dengan bebas, esai-esai tersebut menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi, humanisme, dan idealisme muda. Ia menolak sifat abstrak filsafat Hegelian, impian naif komunis utopis, dan para aktivis yang menyerukan hal-hal yang dipandang sebagai aksi politik prematur.

Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunisme. Marx juga menulis bahwa kapitalisme akan berakhir karena aksi yang terorganisasi dari kelas kerja internasional. "Komunisme untuk kita bukanlah hubungan yang diciptakan oleh negara, tetapi merupakan cara ideal untuk keadaan negara pada saat ini. Hasil dari pergerakan ini kita yang akan mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Komunisme adalah pergerakan yang akan menghilangkan keadaan yang ada pada saat ini. Dan hasil dari pergerakan ini menciptakan hasil dari yang lingkungan yang ada dari saat ini. - Ideologi Jerman-

Pada tahun 1864 Marx terlibat dalam aktivitas politik dengan bergabung dengan gerakan pekerja Internasional. Ia segera mengemuka dalam gerakan ini dan menghabiskan selama beberapa tahun di dalamnya. Namun disintegrasi yang terjadi di dalam gerakan ini pada tahun 1876, gagalnya sejumlah gerakan revolusioner, dan penyakit yang dideritanya menandai akhir karier Marx. Istrinya meninggal pada tahun 1881, anak perempuannya tahun 1882, dan Marx sendiri meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Karl Max dipahami oleh berbagai penulis teks buku Sosiologi Pendidikan seperti Ivor Morris (1972), K.W. Prichard, dan T. H. Buxton(1973), Philip Robinson (1986) dan Maureen T. Hallinan(2000) tidak banyak memberikan sumbangan teoritis terhadap pengembangan sosiologi pendidikan, namun Marx sangat berpengaruh terhadap cara berpikir tentang pendidikan dan masyarakat.

Dalam memahami pendekatan materialisme historis ini terdapat 4 konsep penting yaitu :

- a. Means of Production (cara produksi) yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan.
- b. Relations of Production(hubungan produksi), yaitu hubungan antara cara suatu masyarakat

memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu dalam produksi.

- c. Mode of Production (mode produksi), yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial.
- d. Force of Production (kekuatan produksi), yaitu kapasitas dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi.

Dari perubahan cara produksi itulah yang menyebabkan adanya perubahan sosial budaya pada masyarakat dan dimensi pendidikan. Perubahan cara produksi tersebut terletak pada munculnya teknologi baru, penemuan berbagai sumber baru, dan perkembangan baru lain apapun dalam bidang kegiatan produktif. Karena cara produksi yang berubah, maka muncul kontradiksi atau pertentangan antara cara produksi dan hubungan produksi. Ketika pertentangan telah merusak keseimbangan, maka dapat berdampak pada perubahan terhadap hubungan produksi antara lain perubahan pada pembagian kerja, dasar-dasar dan bentuk struktur kelas. Pada gilirannya dapat mengubah mode produksi.

Kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami alienasi karena hasil dari kreativitas produsen menjadi terasing/ diasingkan dari produsen itu sendiri. Alienasi dapat berupa :

- a. Produk diluar kontrol dari produsen seperti jenis, kualitas, kuantitas, harga, dan pemasaran produk
- b. Produsen harus menyesuaikan diri dengannya seperti mengikuti kapasitas produsen mesin.

Menurut McLellan (1973 :111), manusia mengalami alienasi dalam tiga arti. Pertama : manusia teralienasi dari produk kerjanya sendiri dalam arti bahwa ia hanya sekedar embel-embel dari proses produksi, sebagai pelayan mesin atau orang yang memindahkan kertas di kantor. Kedua, manusia juga teralienasi dari dirinya sendiri dalam arti bahwa ia bekerja karena terpaksa, dan sebagai akibatnya manusia diubah menjadi hewan” karena ia hanya merasa senang apabila melakukan fungsi-fungsi hewani, yakni makan, minum, dan memiliki anak-anak.” Terakhir manusia teralienasi dari sesamanya. Hubungan yang ada di tempat kerja mempengaruhi hubungan dalam kehidupan di luar kerja.

Pada *The Communist Manifesto*, Marx menyatakan “sejarah dari semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas.” Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan kepemilikan pribadi. Keberadaan pembagian kerja dan kepemilikan pribadi menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok yang tidak memiliki serta menciptakan stratifikasi sosial

dalam masyarakat yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik.

Menurut Marx “agama sebagai candu masyarakat”. Pernyataan ini dapat dipahami karena Marx melihat bahwa superstruktur sosio-budaya, termasuk di dalamnya ideologi politik, dan agama dibangun atas infrastruktur ekonomi (yaitu, alat-alat produksi dan hubungan sosial, termasuk agama didirikan atas dasar infrastruktur ekonomi (yaitu : alat-alat produksi dan hubungan sosial dalam produksi) dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan persyaratan yang dimiliki oleh infrastruktur ekonomi ini. Pengalaman ayahnya yang berpindah agama dan ekonomi.

3. Emile Durkheim (1858-1917)

Emile Durkheim, dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern, terlepas dari berbagai kritik yang dialamatkan pada pemikirannya, Emile Durkheim tetap harus dihargai karena kegigihannya untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi, serta mendorongnya menjadi ilmu yang mandiri. Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April 1858, dari keluarga Yahudi yang taat. Dia tergolong orang yang cukup pintar, kepandaianya itu dibuktikan setelah dia mampu masuk di Ecole Normale de Superieure, sebuah sekolah tinggi terkemuka di Prancis yang terkenal mencetak para ilmuwan besar di Prancis. Di sana Durkheim bertemu dengan para pemikir besar

diberbagai disiplin ilmu, seperti Pierre Janet, Jean Jaures, dan Henry Bergson.

Di masanya, Durkheim hidup dalam lingkungan di mana ilmu-ilmu sosial belum mendapat kedudukan yang pantas. Saat itu, filsafat, psikologi dan biologi masih sangat dominan dan menjadi primadona. Sosiologi di masa itu masih berada dalam bayang-bayang filsafat positif Auguste Comte dan Herbert Spencer, sementara Durkheim berusaha untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan meletakkannya dalam dunia empiris.

Menurut Durkheim, sosiologi sudah tak bisa lagi dipahami dalam keadaan mental murni, seperti yang diperagakan oleh Comte dan Spencer yang menempatkan dunia ide sebagai pokok persoalan. Sebab itu, Durkheim kemudian membangun sebuah konsep dalam sosiologi yang disebutnya fakta sosial (*social facts*). Fakta sosial harus menjadi pokok persoalan bagi sosiologi, dia harus diteliti dengan riset empiris. Inilah yang kemudian membedakan sosiologi sebagai kegiatan empiris, yang berbeda dengan filsafat sebagai kegiatan mental.

Karya besar Durkheim seperti *Le Suicide* (1897) dan *The Rule of Sociological Method* (1895), adalah karya yang berusaha meletakkan sosiologi di atas dunia empiris. *Le Suicide* adalah karya Durkheim yang didasarkan atas hasil

penelitian empiris terhadap pengaruh agama dan gejala bunuh diri, sedangkan *The Rule Of Sociological Method* berisi konsep dasar tentang metode penelitian empiris dalam sosiologi (Ritzer, 2007).

Dalam khazanah sosiologi, pemikiran Emile Durkheim sering dikategorikan dalam paradigma 'fakta sosial', fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu, dia lebih bersifat makro dan memberi penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Durkheim sendiri membagi fakta sosial menjadi dua tipe, yakni fakta sosial material dan non material. Fakta sosial material lebih tertuju pada kajian seputar masalah hukum dan birokrasi, sementara fakta sosial non material adalah kebudayaan dan pranata sosial.

Durkheim memandang bunuh diri sebagai fakta sosial, bukan fakta individu. Proposisi dasar yang digunakan dalam bunuh diri adalah bahwa angka bunuh diri berbeda-beda menurut tingkat integrasi sosial. Durkheim membedakan 3 (tiga) jenis tipe bunuh diri, diantaranya :

- a. Bunuh diri egoistic
- b. Bunuh diri altruistic
- c. Bunuh diri anomik
- d. Bunuh diri fatalistik

Selama hidupnya Durkheim telah banyak menghasilkan karya ilmiah, diantaranya sebagai berikut, *De la Division du Travail Social: Etude Des*

Societes Superieures/ The Division of Labor in Society'1893, Les Regles de la Methode Sociologique/ The Rules of Sociological Method 1895, Le Suicide: Etude de Sociologie/'Suicide: A Study in Sociology' 1877, Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse: Le Systeme Totemique en Australie/'The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology' 1912.

Menurut Durkheim pendidikan itu bukanlah hanya suatu bentuk tetapi bermacam-macam baik dalam arti ideal maupun aktualnya. Oleh karena itu pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran sosial (The individual self and the social self, the I and the we or the homoduplex) menjadi suatu paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Durkheim pada waktu menyampaikan kuliah pengukuhannya di Sorbon (1920), menyatakan bahwa dunia pendidikan harus melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian seirama dengan arus deras transformasi yang berlangsung pada masyarakat modern dan dia menyimpulkan bahwa tidak ada yang melebihi pentingnya pendekatan sosiologi bagi para guru. Berbeda dengan Karl Marx, sumbangan Durkheim terhadap sosiologi pendidikan lebih terasa, terutama berbagai ceramahnya tentang pendidikan yang diterbitkan dalam beberapa buku seperti Education and

Society (1956), Moral Education (1961), dan evolution of Educational Thought (1977).

Berikut beberapa sumbangan Durkheim bagi sosiologi Pendidikan antara lain:

a. Pendekatan Fungsionalisme Sosiologi

Durkheim menegaskan bahwa objek sosiologi ialah fakta sosial. Adapun asumsi tentang fakta sosial meliputi: satu, gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologis, Atau karakteristik individu lainnya. Dua, oleh karena itu gejala sosial adalah fakta yang riil, maka gejala-gejala ini dapat diamati atau dipelajari dengan metode empiris. Merujuk pada asumsi dan karakteristik fakta sosial di atas maka, fakta sosial harus dianggap sebagai suatu hal yang nyata :

- 1) Dalam bentuk material: yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan observasi seperti arsitektur dan norma hukum.
- 2) Dalam bentuk non material: yaitu sesuatu yang dianggap nyata, muncul dalam kesadaran manusia, seperti rasa iba, kemarahan, dll.

Fakta sosial dapat dikuantifikasikan, dijumlahkan, dan diukur karena merupakan sesuatu yang nyata. Fakta sosial juga dapat dinyatakan sebagai rate social seperti angka bunuh diri, angka mobilitas social masyarakat,

dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud strategi menjelaskan fakta social adalah fakta social harus dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta social lainnya. Contohnya seperti : kasus bunuh diri dapat dijelaskan dengan solidaritas. Terdapat 2 strategi bagaimana cara menjelaskan suatu fakta social yaitu:

1) Asal usul dari gejala social (sebab akibat)

2) Fungsi dari adanya suatu gejala social

Contohnya seperti : perayaan hari besar nasional kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Asal usul dari perayaan ini yaitu negara Indonesia mengalami pembebasan dari penjajahan. Sedangkan fungsi dari adanya perayaan ini adalah untuk mengenang jasa para pahlawan agar masyarakat Indonesia terus bersatu dan tidak akan terpecah belah.

b. Tesis Solidaritas Sosial

Durkheim menjelaskan tentang dua tipe solidaritas sosial dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan organik. Perbedaan antara masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan organik memberi dampak pada perbedaan dalam orientasi pendidikan, pengaruh pendidikan terhadap individualitas, ketergantungan, dan konsensus terpenting

pilihan politik, dan perbedaan politik individual dengan komunal. Masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik, keterbatasan ketersediaan Lembaga Pendidikan dapat menyebabkan orientasi Pendidikan menjadi terbatas. Orientasi Pendidikan seperti ini cenderung individualitas dan memiliki daya ketergantungan yang rendah. Sedangkan untuk masyarakat yang berlandaskan solidaritas organik, orientasi pendidikannya lebih luas karena ketersediaan berbagai Lembaga Pendidikan hal ini dapat menyuburkan individualitas dan saling ketergantungan antar sesama.

c. Teori Perubahan Sosial

Durkheim menerangkan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik menjadi organik dimulai dengan adanya penambahan penduduk disertai kepadatan moral, yaitu penambahan penduduk disertai penambahan komunikasi dan interaksi antara anggota.

d. Teori Moralitas

Teori moralitas merupakan pengembangan lanjut dari penerapan metodologi Durkheim tentang fakta sosial. Moralitas merupakan realitas yang berada di luar individu. Selanjutnya moralitas memiliki sifat memaksa, di mana semua anggota masyarakat mengindahkan keberadaan fakta

moralitas ini. Menurut Durkheim, moralitas memiliki tiga unsur, yaitu semangat disiplin, ikatan pada kelompok, dan otonomi. Pada dasarnya moralitas adalah suatu disiplin yang memiliki tujuan ganda yaitu mengembangkan keteraturan tertentu yang sekaligus juga membatasi cakupannya. Disiplin menjawab segala sesuatu yang terulang dan bertahan lama dalam hubungan antar manusia sehingga menciptakan ikatan pada kelompok. Moralitas juga memiliki fungsi penting bagi bertahannya suatu masyarakat karena moralitas merupakan perwujudan dari tujuan impersonal dan umum yang tidak tergantung dari pribadi dan kepentingan pribadi dan inilah yang merupakan otonomi dari moralitas.

4. Max Weber (1864-1920)

Max Weber lahir di Erfurt, Prusia (sekarang Jerman) pada 21 April 1864. Ia dianggap sebagai salah satu dari tiga bapak pendiri sosiologi, bersama Karl Marx, dan Emile Durkheim. Teksnya "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" dianggap sebagai teks dasar dalam sosiologi. Ayah Weber sangat terlibat dalam kehidupan publik sehingga rumahnya terus-menerus tenggelam dalam politik dan akademis. Weber dan saudaranya berkembang pesat dalam suasana intelektual ini. Pada tahun 1882, ia mendaftar di Universitas Heidelberg, tetapi setelah dua tahun

tersisa untuk memenuhi tahun dinas militernya di Strassburg. Setelah dibebaskan dari militer, Weber menyelesaikan studinya di Universitas Berlin, memperoleh gelar doktor pada tahun 1889 dan bergabung dengan fakultas Universitas Berlin, memberi kuliah dan konsultasi untuk pemerintah.

Pada tahun 1894, Weber diangkat sebagai profesor ekonomi di Universitas Freiburg dan kemudian diberikan posisi yang sama di Universitas Heidelberg pada tahun 1896. Penelitiannya pada saat itu berfokus terutama pada ekonomi dan sejarah hukum. Setelah ayah Weber meninggal pada tahun 1897, dua bulan setelah pertengkaran hebat yang tidak pernah terselesaikan. Weber menjadi rentan terhadap depresi, gugup, dan insomnia, sehingga sulit baginya untuk memenuhi tugasnya sebagai profesor. Dengan demikian ia terpaksa mengurangi ajarannya dan akhirnya pergi pada musim gugur 1899. Selama lima tahun ia dilembagakan sebentar-sebentar, menderita kambuh tiba-tiba setelah upaya untuk memutus siklus tersebut dengan bepergian. Dia akhirnya mengundurkan diri dari jabatan profesornya pada akhir tahun 1903.

Mengenal Max Weber bagi mereka yang menyelami ranah keilmuan sosial-humaniora merupakan suatu keharusan. Sebagaimana kita ketahui, fungsionalisme Weber telah memberikan pandangan yang begitu berbeda terhadap nomena

dan fenomena sosial. Kehidupan sosial masyarakat modern sebagaimana dipaparkan Weber memiliki karakteristik “struktur” di dalamnya. Baginya, dunia sebagaimana adanya kita saksikan melalui karakteristik struktur sosial: perubahan terjadi karena dinamika dari sistem dan teori-teori mengenai sistem ini menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja, dan bagaimana perubahan itu terjadi. Bagi penganut fungsionalisme, keadaan mental manusia sangatlah menentukan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, dunia sebagaimana yang kita saksikan sekarang adalah perwujudan dari social action ‘tindakan sosial’. Semua hal yang dilakukan oleh manusia didasari pada keinginan yang dikehendakinya.

Terkait pemahaman Weber akan tindakan sosial, ia lebih cenderung menjadikan individu sebagai fokus kajiannya. Weber sempat berkata, “Saya menjadi sosiolog yang akan mengakhiri konsep-konsep kolektivistik. Dengan kata lain, sosiologi pun hanya dapat dipraktekkan dengan memulai dari satu atau beberapa tindakan dari sedikit atau banyak individu, ini berarti dengan menggunakan metode ‘Individualis’ secara ketat.” (Roth, 1976:306). Weber lalu mengalami fase gila kerja, yang mengantarkannya menjadi professor ekonomi di universitas Herlburg di tahun 1896.

Tahun 1893 dia menikah dengan seorang perempuan bernama Marianne Schnitger. Tahun

1897 ayahnya meninggal dunia. Tak lama kemudian Weber mengalami gangguan syaraf. Baru ditahun 1904 ia pulih dan kembali aktif di dunia akademis, hingga pada akhirnya meninggal dunia pada 14 Juni 1920 akibat sakit pneumonia.

Berikut beberapa sumbangan pemikiran teoretis dan metodologis Weber pada sosiologi pendidikan:

a. Analisis Tipe Ideal dan Metode Verstehen

Analisis tipe ideal merupakan disain kategori interaksi. Tipe ideal adalah bentuk abstrak dan elemen riil yang sengaja dibuat, memiliki aspek gejala social yang kelihatan dan memiliki konsistensi logis, serta mengkonstruksikan seluruh spek social dengan kompak. Tujuan pembentukan tipe ideal ialah untuk memudahkan analisis masalah konkret karena kegunaannya hanya dinilai dengan mengembalikan dan mengaitkan dengan masalah kongkret. Adapun metode verstehen atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretatif, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti/makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain.

Terdapat 3 cara memahami makna yaitu:

- 1) Rasional , artinya sesuatu yang dipahami secara masuk akal

2) Empati, artinya kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain.

3) Apresiatif, artinya cara pemahaman diri subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif Tindakan orang lain.

b. Tesis Perkembangan Kapitalisme

Semangat kapitalisme berhubungan dengan etika Protestan, karena memiliki kaitan konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik. Kaitan tesis semangat kapitalisme dan etika Protestan dengan sosiologi pendidikan adalah memberikan inspirasi bagi sosiolog untuk mengembangkan suatu teori dan praksis dalam mengembangkan suatu pelatihan dan pendidikan yang akan meningkatkan motivasi.

c. Tipologi Tindakan Sosial, Kewenangan, dan Birokrasi

Weber menemukan empat tipe dari tindakan sosial, yakni

- *Tindakan rasional instrumental* adalah suatu Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu Tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan. Contohnya: banyak para pengusaha yang mendaftarkan diri menjadi calon legislative. Hal ini karena mereka memiliki banyak

pengalaman dibidang usaha yang tidak lepas dari dunia politik, oleh karena itu ia mengombinasikan 2 aspek kehidupan yaitu bisnis dan politik untuk meraih kesempatan yang besar.

- *Tindakan rasional nilai* adalah Tindakan yang memiliki tujuan didalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu yang dilakukan secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- *Tindakan afektif* adalah Tindakan yang didominasi dengan perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.
- *Tindakan tradisional* adalah tindakan karena suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan.

Weber juga membangun tipologi kewenangan dengan tiga tipe, yaitu: kewenangan tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Tipe ideal birokrasi modern yang diusulkan oleh Weber memiliki karakteristik, yaitu: berbagai aktivitas regular untuk mencapai tujuan organisasi, organisasi kantor mengikuti prinsip hierarki artinya setiap kantor yang lebih rendah akan selalu berada dalam control dan pengawasan yang lebih tinggi, operasi birokratis.

5. George Herbert Mead (1863-1931)

George Herbert Mead lahir pada 27 Februari 1863, di South Hadley, Massachusetts. Ayahnya Hiram Mead adalah seorang pendeta dari gereja local, tetapi keluarganya pindah ke Oberlin, Ohio untuk menjadi profesor di Seminari Teologi Oberlin pada tahun 1870. Ibunya Elizabeth Storrs Billings Mead juga bekerja sebagai akademisi, dia mengajar di Oberlin College dan menjadi pimpinan Mount Holyoke College di South Hadley, Massachusetts. Ketika ilmu psikologi dan sosiologi masih baru, George Herbert Mead menjadi pragmatis terkemuka, dan pelopor interaksionisme simbolik, sebuah teori yang mengeksplorasi hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Mead dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi sosial, yakni studi tentang bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi individu.

Pada tahun 1879, George Herbert Mead mendaftar di Oberlin College, kuliah di program sarjana bidang sejarah dan sastra, menyelesaikan studi empat tahun. Mead bekerja sebagai surveyor untuk Perusahaan Kereta Api Pusat Wisconsin selama beberapa tahun. Setelah itu, tahun 1888, ia mendaftar di Universitas Harvard, belajar psikologi dan filsafat, namun tidak diselesaikan studinya. Setelah Harvard, Mead bergabung dengan teman dekatnya Henry Castle dan saudara perempuannya

Helen Kingsbury Castle di Leipzig. Di Jerman, ia mendaftarkan program Ph.D. untuk filsafat dan psikologi fisiologis di Universitas Leipzig. Pada tahun 1889, Mead pindah ke Universitas Berlin, belajar teori ekonomi. University of Michigan menawarkan Mead posisi mengajar dalam filsafat dan psikologi, tawaran ini diterima, sehingga studi Ph.D nya tidak diselesaikan.

Mead dikenal sebagai sosiolog dengan teori "diri". Teori "diri" ini dijelaskan dalam buku berjudul "Mind, Self and Society" (diterbitkan pada tahun 1934 setelah kematiannya dan diedit oleh Charles W. Morris). Teori diri Mead menyatakan bahwa gagasan yang dimiliki orang tentang diri mereka sendiri berasal dari interaksi sosial dengan orang lain. Teori ini menentang determinisme biologis yang berpendapat, bahwa diri tidak ada sejak lahir dan mungkin tidak hadir pada awal interaksi sosial, tetapi dikonstruksi dan direkonstruksi dalam proses pengalaman dan aktivitas sosial.

Diri, menurut Mead, terdiri dari dua komponen: "aku" dan "aku". "Saya" mewakili harapan dan sikap orang lain ("orang lain yang digeneralisasi") yang diorganisasikan ke dalam diri sosial. Individu mendefinisikan perilaku mereka dengan mengacu pada sikap umum dari kelompok sosial yang mereka tempati. Ketika orang dapat melihat diri mereka sendiri dari sudut pandang

orang lain yang digeneralisasi, kesadaran diri dalam arti penuh istilah tercapai. Dari sudut pandang ini, orang lain yang digeneralisasikan (terinternalisasi dalam "aku") adalah instrumen utama kontrol sosial, karena itu adalah mekanisme yang digunakan komunitas untuk mengontrol perilaku anggota individunya. "Aku" adalah respons terhadap "aku", atau individualitas orang tersebut. Ini adalah inti dari agensi dalam tindakan manusia. Jadi, sebenarnya, "aku" adalah diri sebagai objek, sedangkan "aku" adalah diri sebagai subjek.

Menurut teori Mead, diri dikembangkan melalui tiga aktivitas: bahasa, bermain, dan permainan. Bahasa memungkinkan orang untuk mengambil "peran orang lain" dan menanggapi perilaku mereka sendiri melalui sikap yang dilambangkan orang lain. Selama bermain, individu mengambil peran orang yang berbeda dan berpura-pura menjadi mereka untuk mengekspresikan harapan mereka. Proses bermain peran ini adalah kunci untuk membangkitkan kesadaran diri dan pengembangan diri secara umum. Orang harus memahami aturan main dan menginternalisasi peran semua orang yang terlibat.

Karya Mead di bidang ini mendorong perkembangan teori interaksi simbolik, yang sekarang menjadi kerangka utama dalam sosiologi. Selain "Pikiran, Diri, dan Masyarakat," karya-karya utamanya termasuk "Filsafat Masa Kini" tahun 1932

dan "Filosofi Tindakan" tahun 1938. Dia mengajar di Universitas Chicago sampai kematiannya pada tanggal 26 April 1931.

C. Pemikiran Tokoh Penguat Fondasi Sosiologi Pendidikan

1. Alfred Schutz (1889-1959)

Alfred Schütz lahir di Wina, Austria, pada 13 April 1899. Keluarganya termasuk kelas menengah atas Austria. Alfred tidak memiliki saudara laki-laki. Dia berasal dari divisi artileri Austria yang bertempur di front Italia dalam Perang Dunia Pertama. Setelah menyelesaikan pekerjaan militernya, ia kembali ke Austria untuk melanjutkan studi lanjutan di Universitas Wina. Di sana ia belajar hukum, ilmu sosial dan bisnis dengan beberapa tokoh penting saat itu. Alfred Schütz adalah seorang filsuf dan sosiolog Amerika yang lahir di Austria, yang menonjol karena telah mengembangkan ilmu sosial berdasarkan fenomenologi. Fenomenologi adalah gerakan filosofis yang dikembangkan pada abad kedua puluh yang tujuannya adalah untuk menggambarkan berbagai fenomena sesuai dengan bagaimana mereka secara sadar mengalami. Schütz pindah ke Amerika Serikat ketika dia berusia 50 tahun dan mengajar di New School of Social Research di New York. Karyanya mendapat perhatian rekan-rekannya dengan mempelajari

perkembangan kehidupan sehari-hari orang, serta penciptaan realitas melalui simbol dan tindakan manusia.

Pada 1932 ia menerbitkan buku pertamanya, di mana ia mengumpulkan semua pengetahuan yang diperoleh tentang studinya tentang karya Husserl. Buku ini disebut Fenomenaologi dunia sosial dan dianggap sebagai salah satu karya paling penting yang ia tulis dalam kariernya; dengan ini ia menarik perhatian Husserl sendiri, yang meminta Schütz menjadi asistennya. Namun, ia tidak dapat menerima tawaran itu karena alasan pekerjaan. Schütz mendasarkan karyanya pada teori bahwa realitas sosial manusia bersifat intersubjektif dan bahwa orang menggunakan metode makna yang sederhana. Setiap penafsiran yang diberikan kepada hal-hal terdiri dari bidang pengetahuan yang dimiliki oleh semua manusia, tetapi mereka menafsirkan secara individual.

Bagi Schütz, tujuan utama ilmu sosial adalah konstitusi dan pemeliharaan apa yang ia sebut realitas sosial. Baginya, realitas sosial adalah interpretasi yang dimiliki setiap orang tentang peristiwa yang memanifestasikan dirinya dalam kehidupan mereka setiap hari. Manifestasi ini tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari kehidupan. Filsuf berteori tentang ide ini. Menurut teorinya, semua orang dilahirkan dalam realitas sosial ini, di mana ada serangkaian manifestasi

sosial dan objek budaya, yang harus diterima setiap orang secara individual. Manusia tidak lebih dari aktor dalam kancah sosial tempat kehidupan berkembang.

Teori Schütz memiliki beberapa kesamaan dengan karya Weber, tetapi pertama-tama didasarkan pada karya Husserl. Sebagian besar karyanya didasarkan pada konstruksi realitas dari pengalaman hidup. Ini adalah cara mempelajari individu yang agak subyektif, karena didasarkan pada pemahaman yang dimiliki setiap orang tentang kehidupan dan bukan pada metode ilmiah yang dapat digunakan untuk memahami perilaku masing-masing individu. Ide-ide Schütz sangat berpengaruh untuk bidang sosiologi dunia. Karyanya dalam pendekatan fenomenologis sosiologi dan pengembangan basis untuk etnometodologi adalah yang paling menonjol dalam karirnya.

Pemikiran Alfred Schutz dalam dunia pendidikan, menurutnya, Max Weber tidak benar benar mengembangkan *verstehen* yang artinya suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis. Menurut Schutz, weber tidak dapat membedakan antara tindakan yang dianggap sebagai sesuatu yang masih berlangsung dan yang telah selesai, antara makna Tindakan saya dan Tindakan orang lain, dan

antara makna penghasil benda kultural dan makna benda yang dihasilkan. Schutz mengembangkan topik ini menjadi fenomenologi yang berarti sebuah studi yang membahas tentang bagaimana fenomena dari hal-hal yang kita sadari dapat muncul kepada kita, dan bagaimana cara yang paling mendasar dari permunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman indrawi (*streams of experience*) yang berkesinambungan yang kita terima melalui pancaindra kita.

Schutz mengungkapkan bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita perlu menafsirkan secara terus menerus makna subjektif dari orang lain. Ia membedakan antara interpretasi dari dua motif yang ada, yaitu "*in order to*" atau "untuk/tujuan" dan "*because of*" atau "karena/sebab". Motif "in-order-to" ("untuk"/tujuan) merujuk pada suatu keadaan pada masa yang akan datang di mana aktor berkeinginan untuk mencapainya melalui beberapa tindakannya. Oleh karena itu, motif seperti ini bersifat objektif sebab hanya saya sendiri kemungkinan mengetahui tentang apa yang ingin saya capai di masa yang akan datang. Adapun motif "because of" atau "Karena/ sebab" merujuk pada suatu keadaan pada masa lampau. Motif seperti ini bersifat objektif serta menggambarkan masa lampau yang ditafsirkan oleh masa sekarang.

2. Antonio Gramsci (1891-1937)

Antonio Gramsci dilahirkan di Sardinia pada 1891. Dia pergi ke Turin sebagai seorang mahasiswa yang aktif di bidang politik dan jurnalis sampai 1918. Setelah itu, ia aktif dalam politik melalui keterlibatan dalam gerakan buruh dan partai sosialis Italia dan kemudian mendirikan Partai Komunis. Gramsci dipandang sebagai seorang intelektual yang dipengaruhi pemikiran Marx. Ia meninggal pada usia 46 tahun sebagai konsekuensi dari masalah kesehatan serius yang ia kembangkan saat dipenjara oleh pemerintah fasis Italia. Karya Gramsci yang paling banyak dibaca dan terkenal, dan karya-karya yang memengaruhi teori sosial, ditulis saat ia dipenjara dan diterbitkan secara anumerta sebagai *The Prison Notebooks* .

Pada tahun 1911, Gramsci meninggalkan Sardinia untuk belajar di Universitas Turin di Italia utara, dan tinggal di sana ketika kota itu diindustrialisasikan. Dia menghabiskan waktunya di Turin di antara sosialis, imigran Sardinia, dan pekerja yang direkrut dari daerah miskin untuk menjadi staf pabrik-pabrik perkotaan . Dia bergabung dengan Partai Sosialis Italia pada tahun 1913. Gramsci tidak menyelesaikan pendidikan formal, tetapi dilatih di Universitas sebagai Marxis Hegel, dan mempelajari secara intensif interpretasi teori Karl Marx sebagai "filsafat praksis" di bawah Antonio Labriola. Pendekatan Marxis ini berfokus

pada pengembangan kesadaran kelas dan pembebasan kelas pekerja melalui proses perjuangan.

Kontribusi intelektual kunci Gramsci terhadap teori Marxis adalah elaborasi dari fungsi sosial budaya dan hubungannya dengan politik dan sistem ekonomi. Sementara Marx hanya membahas secara singkat masalah-masalah ini dalam tulisannya, Gramsci menarik landasan teoretis Marx untuk menguraikan peran penting strategi politik dalam menantang hubungan dominan masyarakat, dan peran negara dalam mengatur kehidupan sosial dan mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk kapitalisme. Dengan demikian ia berfokus pada pemahaman bagaimana budaya dan politik dapat menghambat atau memacu perubahan revolusioner, yang berarti, ia berfokus pada unsur-unsur politik dan budaya kekuasaan dan dominasi (di samping dan bersama dengan unsur ekonomi). Dengan demikian, karya Gramsci adalah respons terhadap prediksi salah teori Marx bahwa revolusi tidak dapat dihindari, mengingat kontradiksi yang melekat dalam sistem produksi kapitalis.

Dalam teorinya, Gramsci memandang negara sebagai alat dominasi yang mewakili kepentingan modal dan kelas penguasa. Dia mengembangkan konsep hegemoni budaya untuk menjelaskan bagaimana negara menyelesaikan ini,

dengan alasan bahwa dominasi dicapai sebagian besar oleh ideologi dominan yang diekspresikan melalui institusi sosial yang mensosialisasikan orang untuk menyetujui aturan kelompok dominan. Dia beralasan bahwa keyakinan hegemonik - keyakinan dominan - meredam pemikiran kritis, dan dengan demikian menghambat revolusi.

Pemikiran Gramsci yang paling banyak dikutip oleh para ilmuwan sosial dan humaniora adalah konsep hegemoni. Apa hubungan antara hegemoni dan sosiologi pendidikan? Pendidikan dilihat memiliki peran yang strategis dalam mengabsahkan hegemoni yang dominan. Gramsci memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu elemen mendasar dari hegemoni budaya dalam masyarakat Barat modern dan menguraikan hal ini dalam esai berjudul "Kaum Cendekiawan" dan "Pendidikan". Meskipun dipengaruhi oleh pemikiran Marxis, badan kerja Gramsci menganjurkan untuk dan revolusi jangka panjang lebih dari yang dibayangkan oleh Marx. Dia menganjurkan untuk budidaya "intelektual organik" dari semua kelas dan lapisan masyarakat, yang akan memahami dan mencerminkan pandangan dunia tentang keragaman orang. Dia mengkritik peran "intelektual tradisional," yang karyanya mencerminkan pandangan dunia kelas penguasa, dan dengan demikian memfasilitasi hegemoni budaya. Selain itu, ia menganjurkan

untuk "perang posisi" di mana orang-orang tertindas akan bekerja untuk mengganggu kekuatan hegemonik di bidang politik dan budaya, sementara penggulingan kekuasaan secara simultan, "perang manuver", juga dilakukan.

3. Talcott Parsons (1902-1979)

Talcott Parsons lahir pada 13 Desember 1902 di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat dari seorang anak pendeta yang intelektual. Ia menamatkan sarjana mudanya dalam bidang studi biologi di Kolese Amherst (1920-1924). Kemudian dia mengikuti program Pasca Sarjana di London School of Economics pada tahun 1924. Selanjutnya, dia pergi ke Heidelberg, Jerman, tempat ia memulai Tesis doktoralnya, sehingga dia berkenalan dengan berbagai karya ilmuwan sosial Jerman seperti Karl Marx, Max Weber, Sombart. Talcott Parsons seorang Pendeta, profesor dan akhirnya menjadi rektor sebuah perguruan tinggi kecil. Parsons mendapat gelar sarjana muda dari Universitas Amherst tahun 1924 dan menyiapkan disertasinya di London School of Economics. Di tahun berikutnya ia pindah ke Heidelberg, Jerman.

Max Weber lama berkarir di Heidelberg dan meski ia telah meninggal 5 tahun sebelum kedatangan Parsons, pengaruh Weber tetap bertahan dan jandanya terus menyelenggarakan diskusi ilmiah di rumah dan Parsons menghadirinya. Parsons sangat dipengaruhi oleh

karya Weber dan sangat dipengaruhi oleh karya Weber dan akhirnya menulis disertainya di Heidelberg, yang sebagian menjelaskan karya Weber. Parsons mengajar di Harvard pada 1927 dan meski berganti jurusan beberapa kali, ia tetap di Harvard hingga akhir hayatnya tahun 1979. Kemajuan kariernya tak begitu cepat. Ia tak mendapatkan jabatan profesor hingga tahun 1939. dua tahun sebelumnya ia menerbitkan *The Structure Social Action*, sebuah buku yang tak hanya memperkenalkan pemikiran sosiolog utama seperti Weber kepada sejumlah besar sosiolog, tetapi juga meletakkan landasan bagi teori yang dikembangkan Parsons sendiri. Sesudah itu karier akademis Parsons maju pesat. Dia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard pada 1944 dan dua tahun kemudian mendirikan Departemen Hubungan Sosial yang tak hanya memasukkan sosiolog, tetapi juga berbagai sarjana ilmu sosial lainnya. Tahun 1949, ia terpilih menjadi Presiden *The American Sociological Association*.

Tahun 1950-an dan menjelang tahun 1960-an, dengan diterbitkan buku seperti *The Social System* (1951) Parsons menjadi tokoh dominan dalam sosiologi Amerika. Tetapi, di akhir 1960-an Parsons mendapat serangan dari sayap radikal sosiologi Amerika yang baru muncul. Parsons dinilai berpandangan politik konservatif dan teorinya dianggap sangat konservatif dan tak lebih

dari dianggap sangat konservatif dan hak lebih dari sebuah skema kategorisasi yang rumit. Tetapi tahun 1980-an timbul kembali perhatian terhadap teori Parsons, tak hanya di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia.

Parsons merupakan salah seorang tokoh utama yang mempopulerkan pendekatan sistem dalam sosiologi kontemporer. Suatu sistem, menurut Parsons, hanya bisa fungsional apabila semua persyaratan terpenuhi. Apa saja persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh suatu sistem? Ada empat persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh suatu sistem, yaitu: Adaptation/adaptasi (A), Goal attainment/pencapaian tujuan (G), Integration/integrasi (I), dan Latent pattern maintenance/pola pemeliharaan laten (L).

Prasyarat fungsional adaptasi (A) merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Lingkungan dapat berupa sosial maupun nonsosial/fisik. Melalui adaptasi, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber ini ke dalam seluruh sistem. Goal attainment/pencapaian tujuan (G) merupakan prasyarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi

individual melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. Prasyarat fungsional integrasi (I) adalah suatu kebutuhan sistem yang dapat mengoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian atau anggota dalam suatu sistem. Fungsi integrasi dapat terpenuhi apabila bagian atau anggota dalam suatu sistem berperan sesuai dengan fungsinya dalam satu keseluruhan. Agar sistem sosial berfungsi efektif sebagai satu kesatuan, harus terdapat paling kurang suatu tingkat solidaritas di antara bagian atau individu yang termasuk di dalamnya. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup yang menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama dikembangkan dan dipertahankan. Ikatan emosional ini tidak boleh tergantung pada keuntungan yang diterima atau sumbangan yang diberikan untuk tercapainya tujuan individu atau kolektif. Jika tidak, solidaritas sosial dan kesediaan untuk kerja sama akan jauh lebih goyah sifatnya, karena hanya didasarkan pada kepentingan diri pribadi semata. Latent pattern maintenance/pola pemeliharaan laten (L) adalah prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Kenapa perlu prasyarat fungsional

ini? Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya disintegrasi atau perpecahan, maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau terpelihara.

Pemikiran perspektif struktural fungsional meyakini bahwa tujuan pendidikan adalah mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat untuk dijadikan tempat pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku dan penguasaan tata nilai yang diperlukan agar bisa tampil sebagai bagian dari warga negara yang produktif. Dalam perspektif teori fungsional struktural ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Parsons mengatakan bahwa teori-teori sosiologi modern tahun 1986, masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat maka

hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri.

4. Louis Althusser (1918-1990)

Louis Althusser lahir pada 1918 di Birmandreis Aljazair dari pasangan Charles Althusser dan Lucienne Berger. Tujuan Althusser yaitu untuk mengukuhkan Marxisme sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan melepaskannya dari determinisme ekonomi. Dalam hal ini Louis Althusser mencurahkan segala perhatian pemikiran Marxismenya untuk masalah-masalah internal dalam Partai Komunis. Di tahun 1960-1980-an tepatnya di Perancis banyak bermunculan filsuf-filsuf terkenal, semisal, Jacques Lacan, Jean Paul Sartre, Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, dsb. Tetapi, Louis Althusser tidak terlalu berkorespondensi banyak dengan para filsuf tersebut. Sebagaimana biasanya para intelektual mengembangkan pemikirannya dengan bertukar pikiran lewat lawan intelektual lainnya, Althusser sekali lagi lebih suka mengembangkan pemikirannya demi menyelesaikan masalah-masalah dalam aktivitas politiknya.

Magnum Opusnya yakni *For Marx* ditulis Althusser karena urgensi prinsip partai politik komunis di Perancis yang telah menyeleweng dari Marxisme. Dalam kata pengantarnya buku ini ditujukan kepada pengaruh seorang pemikir sains Uni Soviet yang telah membedakan Sains Borjuis

dan Sains Proletar. Bagi Louis Althusser ini jelas pemikiran yang salah kaprah terhadap interpretasi atas Marxisme. Marxisme menurut Althusser mesti terpisah daripada ideologi. Sains itu lebih dahulu daripada ideologi. Dengan demikian tidak mungkin ada yang namanya sains dalam ideologi proletar dan borjuis. Namun, meski Althusser berpijak dalam posisi Marxis pemikirannya menghasilkan suatu hal yang melampaui sekat ideologi Marxisme itu sendiri. Althusser memposisikan Marxisme tidak hanya sebatas ideologi yang dipercayainya, melainkan ia berupaya menunjukkan bahwa Marxisme adalah hasil dari gerak dunia itu sendiri. Itulah sebabnya Louis Althusser memposisikan Marx bukan sebagai filsuf, melainkan sebagai seorang saintis yang berpijak pada dasar objektivitas.

Seperti pertanyaan kita di atas, apa sumbangan pandangan Althusser pada sosiologi pendidikan? Louis Althusser juga melihat, dalam masyarakat modern, pendidikan merupakan perangkat negara yang ideologis (Ideological State Apparatus) yang paling efektif untuk melaksanakan fungsi negara. Kecenderungan orang menolak setiap bentuk tindakan yang violatif dari RSA. Ada beberapa negara yang anti militerisme memaksa para penguasa untuk mengefektifkan bidang RSA ini dengan mengendalikan sedemikian rupa melalui lembaga pendidikan yang ada. Hal itu biasanya

dimulai dalam masa dini kehidupan warga masyarakat, sehingga pada masa sekarang orang cenderung mengatakan bahwa pendidikan merupakan agama baru (ideologi baru). Pendidikan dibentuk oleh negara, para penguasa, yang pada hakekatnya juga digunakan oleh perangkat negara represif (Repressive State Apparatus) untuk melanggengkan kekuasaannya.

Althusser, menurut Robinson (1986: 47), memandang negara sebagai sebuah mesin penindasan, yang memungkinkan kelas-kelas berkuasa. menjamin dominasi mereka atas kelas buruh. Althusser menegaskan bahawa proses ini berlangsung melalui "aparatus represif" negara seperti polisi dan tentara, serta "aparatus ideologinya" seperti pendidikan, keluarga, dan media massa. Ia melihat sekolah mengambil anak-anak dari setiap kelas pada usia taman kanak-kanak, lalu selama bertahun-tahun dalam keadaan terjepit antara aparat negara berupa keluarga aparat negara berupa pendidikan, kepada mereka dipompakan sejumlah tertentu "know-how" yang dibungkus ideologi yang berkuasa atau malahan ideology yang berkuasa ini sendiri dalam keadaannya yang murni.

5. Piere Bourdieu (1930-2002)

Piere Bourdieu dilahirkan di kota kecil selatan Perancis pada 1930. Dia diterima di the Ecole Normale Superieure pada 1950an, namun tidak

menulis tesis masternya karena ketidak setujuan terhadap struktur sekolah yang otoriter. Dia aktif menentang orientasi komunis dari sekolahnya. Pengalaman wajib militer selama dua tahun di Aljazair pada 1958-1960 mendorongnya untuk menulis buku. Setelah itu, dia kembali ke Paris dan mengajar sebagai asisten Raymond Aron. Ketika kedudukan pemimpin College de France lowong karena Raymond Aron memasuki pensiun pada 1981, Bourdieu menggantikannya. Semenjak itu, dia memegang peranan kunci dalam sosiologi Perancis.

Setelah lulus, Bourdieu mengajar filsafat di sekolah menengah Moulins, sebuah kota kecil di tengah-tengah Prancis, sebelum melayani di tentara Perancis di Aljazair, kemudian mengambil posisi sebagai dosen di Aljazair pada tahun 1958. Bourdieu melakukan penelitian etnografi selama Perang Aljazair berlanjut . Ia mempelajari konflik melalui orang-orang Kabyle, dan hasil penelitian ini diterbitkan dalam buku pertama Bourdieu, *Sociologie de L'Algerie (The Sociology of Algeria)*. Menyusul waktunya di Aljazair, Bourdieu kembali ke Paris pada tahun 1960. Tidak lama setelah dia mulai mengajar di Universitas Lille, di mana dia bekerja hingga tahun 1964. Pada saat inilah Bourdieu menjadi Direktur Studi di École des Hautes Études en Sciences Sociales dan mendirikan Pusat Sosiologi Eropa.

Bourdieu direkrut menjadi tentara, dan pada tahun 1955 dia dikirim ke Aljazair , di mana dia kemudian bekerja sebagai dosen dan peneliti di Universitas Algiers (1958–1960). Selama di sana ia terlibat dalam penelitian etnografi, khususnya di antara Kabyle yang berbahasa Berber . Pengalaman Bourdieu di Aljazair menghasilkan *Sociologie de l'Algérie* (1958; *The Algerians*), yang membangun reputasinya. Ia kembali ke Prancis dan mengajar di Universitas Paris (1960–61) dan Universitas Lille (1961–64) sebelum mengambil posisi di École Pratique des Hautes Études pada tahun 1964. Di sekolah terakhir ia mendirikan Pusat Sosiologi Pendidikan dan Budaya . Pada tahun 1981 ia menjadi ketua sosiologi di College de France .

Pada tahun 1975 Bourdieu membantu menemukan jurnal interdisipliner *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* , yang ia tergemballa sampai kematiannya. Melalui jurnal ini, Bourdieu berusaha untuk mendenasionalisasi ilmu sosial, untuk mendobrak pengertian yang sudah terbentuk dari akal sehat biasa dan ilmiah, dan untuk keluar dari bentuk-bentuk komunikasi ilmiah yang mapan dengan analisis perulangan, data mentah, dokumen lapangan, dan ilustrasi bergambar. Memang, motto untuk jurnal ini adalah "untuk menampilkan dan

mendemonstrasikan." Bourdieu menerima banyak penghargaan selama hidupnya, diantaranya Médaille d'Or du Centre National de la Recherche Scientifique pada tahun 1993; Hadiah Goffman dari University of California, Berkeley pada tahun 1996; dan pada tahun 2001, memperoleh Medali Huxley dari Royal Anthropological Institute.

Sumbangan terbesar dari Bourdieu terhadap sosiologi pendidikan adalah idenya tentang kapital yang dihubungkan dengan pendidikan. Bourdieu melihat bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan kapital berupa budaya dan simbolik. Kedua kapital ini direproduksi dan dilanjutkan melalui sekolah.

D. Relefansi Sosiologi Pendidikan dalam Islam

Dalam Islam, kajian sosiologi terkait proses pendidikan sudah ada sejak Allah SWT menjadikan Adam sebagai kholifah di alam semesta dan fenomenanya berlangsung hingga saat ini. Sukses kekhelifahan yang dilakukan oleh Allah SWT adalah melalui proses Pendidikan, begitu juga diangkatnya para Nabi dan Rasul, serta para pemimpin (Anshori, 2020).

Setelah Allah SWT menciptakan makhluk berupa manusia (Adam), malaikat dan jin beserta hamparan alam semesta (Bumi dan Langit), Allah SWT menetapkan kebijakan, yakni menjadikan Adam

sebagai Kholifah (Q.S. Al Baqoroh: 30), untuk memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan alam semesta beserta isinya, agar dimanfaatkan dengan baik. Untuk mewujudkan ini, Allah SWT merahasiakan kepada Adam, justru menemui dan menyampaikan kepada Malaikat.

Pertemuan Allah SWT dengan Malaikat ini membuktikan terjadinya kontak keduanya, dilanjutkan dengan komunikasi, proses menyampaikan ide dan gagasan. Allah SWT menyampaikan keinginannya hendak menjadikan Adam sebagai kholifah, kemudian Malaikat merespon menunjukkan ketidaksetujuan, karena khawatir Adam tidak bisa menjalankan tugas keholifahan dengan baik. Yang cukup menarik, Malaikat mengatakan “kenapa Allah jadikan Adam sebagai Kholifah, beliau suka membuat kerusakan dan penumpah darah, padahal aku hambamu yang selalu bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau” (Q.S. Al Baqarah: 30). Mendengar jawaban Malaikat tersebut Allah SWT menyatakan “Aku lebih tahu daripada kamu” (Q.S. Al Baqarah: 30). Mendengar jawaban Allah tersebut, Malaikat terdiam.

Allah SWT kemudian melakukan kontak dengan Adam, terjadilah interaksi Allah SWT dengan Adam. Ketika Allah SWT menemui Adam, tidak memberitahu kalau akan menjadikan Kholifah, namun langsung Allah mengajarkan tentang nama-

nama benda yang ada di alam semesta (Q.S. Al Bararah: 31).

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya kemudian Dia perlihatkan kepada para Malaikat seraya berfirman, ‘sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar”.

Setelah itu, diajaklah Malaikat, Adam dan Jin bertemu dalam suatu forum diskusi terkait lingkungan Allah semesta. Allah memberi kesempatan pertama kali kepada Malaikat untuk menjelaskan nama-nama benda yang ada di alam semesta. Kesempatan pertama ini diberikan, karena dari dialog sebelumnya, Malaikat merasa lebih tahu dari yang lain. Namun ternyata Malaikat belum mengenal berbagai nama benda tersebut dengan menyatakan “Maha Suci Allah, saya tidak tahu kecuali yang Allah ajarkan” (Q.S. Al Baqarah: 32). Setelah itu Adam diberi kesempatan untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut. Adam bisa menyebutkan berbagai nama benda yang ada di sekitar (Q.S. Al Baqarah: 33). Mendengar penjelasan Adam tersebut, langsung Malaikat Sujud kepada Adam, sebagai bukti pengakuan kemampuan Adam, sehingga layak untuk dijadikan kholifah (Q.S. Al Baqarah: 34). Sedangkan jin tetap tidak mau mengakui keholifahan Adam (Q.S.

Al Baqarah: 34), bahkan berjanji selau mengganggu terhadap Adam dan keturunannya,

Suasana yang diciptakan oleh Allah menjadi model Pendidikan yang efektif dan efisien. Interaksi yang berlangsung awalnya bersifat individu (Allah SWT dengan Malaikat, Allah SWT dengan Adam), kemudian dilanjutkan secara kelompok melalui forum (Allah SWT dengan Malaikat, Adam dan Jin). Komunikasi yang dibangun oleh Allah SWT dengan Malaikat, dengan Adam, bahkan dengan Jin, memberi inspirasi bagaimana menjalin komunikasi yang baik dalam proses pendidikan, agar tujuan Pendidikan bisa tercapai. Sikap tegas dengan kata-kata yang jelas, dilanjutkan dengan berbagi pembuktian yang mendukung terhadap ketegasan tersebut menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Pembelajaran yang diberikan Allah SWT kepada Adam dengan mengenalkan berbagai macam benda sekitar, menjadikan Adam memiliki pengetahuan, sehingga bisa menjelaskan kepada Malaikat dan Jin. Malaikat dan Jin baru memiliki pengetahuan setelah dijelaskan oleh Adam. Ini berarti pembelajaran itu menjadi kunci utama agar memiliki pengetahuan. Materi yang disajikan juga harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan utama Allah menjadikan Kholifah, mata materi yang diajarkan dan dibahas dalam forum tersebut terkait

nama-nama benda yang ada di sekitar, tempat dimana kekholidahan tersebut akan dilaksanakan.

Reaksi dan sikap yang ditunjukkan oleh Malaikat dan Jin berbeda ketika menerima penjelasan dari Adam, Malaikat bersedia menerima dan mengakui kelebihan Adam ditandai dengan sujud kepada Adam sebagai bukti pengakuan kemampuan Adam sehingga pantas menjadi kholifah. Sedangkan Jin tetap menolaknya, tidak mengakui kemampuan Adam, bahkan meminta untuk selalu mengganggu manusia. Ini merupakan gambaran riil dalam proses Pendidikan dan pembelajaran. Peserta didik memiliki sikap, perilaku, dan karakter yang berbeda, bahkan bakat dan minat yang berbeda, sehingga sebagai pendidik harus bisa mensikapi dan memperlakukan secara beda pula, tetapi tetap dalam proses Pendidikan dan pembelajaran yang mendewasakan, baik dari aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) maupun ketrampilan (Psikomotorik). Model pembelajara seperti ini yang kemudian dikenal pembelajaran diferensiasi.

Konflik dan integrasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran bisa saja terjadi antar terdidik, bahkan antara pendidik dengan terdidik, dengan orang tua, namun bagaimana caranya agar semua proses tersebut mendorong terwujudnya suasana yang kondusif sehingga kepribadian peserta didik terbentuk dengan baik dan lebih dewasa.

Secara institusional, penyelenggaraan Pendidikan bisa dilaksanakan di keluarga, masjid, sekolah, madrasah, pondok pesantren, di berbagai tempat kerja, serta tempat pertemuan dan pengkajian di masyarakat dengan berbagai bentuk, yakni informal, formal dan non formal.

E. Kesimpulan

Sosiologi pendidikan hadir sebagai sebuah gambaran bahwa masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat pesat, namun perubahan tersebut kerap menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan masyarakat. Begitupun dari segi pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan dianggap tidak dapat mengatasi masalah yang hadir dalam masyarakat saat ini, sehingga para ahli sosiologi sangat diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui sumbangsih pemikiran mereka dalam dunia pendidikan yang fundamental.

Para tokoh sosiologi klasik maupun modern berkontribusi besar terhadap dunia pendidikan. Mereka tidak hanya memberikan asumsi atau pendapat, namun juga memberikan solusi bagaimana berbagai permasalahan pendidikan bisa dianalisis dan diselesaikan. Saat ini, berbagai teori sosiologi pendidikan yang dikemukakan oleh para sosiolog bisa digunakan oleh para akademisi maupun praktisi Pendidikan untuk alat analisis fenomena yang

berlangsung dalam pendidikan, sehingga ditemukan solusi dan alternatif pengembangannya.

Dalam Islam, kajian terkait sosiologi Pendidikan terlihat sejak proses Pendidikan yang dilakukan oleh Allah SWT dalam mendidik Adam sebagai kholifah (Q.S. Al Baqoroh: 30-34), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan yang dilakukan kepada para Nabi dan Rasul, para pemimpin, serta setiap generasi zaman. Dilakukan secara individu maupun kelompok, di berbagai tempat, baik keluarga (rumah), masjid, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan berbagai tempat pengkajian dan Pendidikan di masyarakat.

F. Daftar Bacaan

1. Anshori, Isa. (2009). *Negara, Ideologi dan Pendidikan dalam Pandangan Gramscy dan Althusser*. Halaqa : Jurnal Kependidikan dan Keislaman, 8(1), 57-66.
2. Anshori, Isa. (2020). *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/39333>
3. Andrean, Seka & Devi, Aulia Diana. (2020). "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi". *Al-Azkiya: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 5(2), 143-149.
4. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*.

5. Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
6. Maksum, Ali. 2013. *Sosiologi Pendidikan*. digilib.uinsby.ac.id. 1-258.
7. Maunah, Binti. (2016). "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *CENDEKIA*, 10(2), 159-178.
8. Romadona, Muhammad Taufik. (2020). "Louis Althusser dan Filsafat Sebagai Yang Politis". *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 5(2), 197-236.
9. Suhada. (2020). "Sosiologi Pendidikan Dalam Pembentukan Karakter (Sudut Padang Sosial)". *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 113-121.

Bab 5

Teori Sosiologi Sebagai Paradigma dalam Pendidikan, Keterkaitan Pendidikan dengan Struktur Sosial, Aplikasi dalam Realitas Pendidikan di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara komprehensif, jujur dan bertanggungjawab tentang:

1. Beberapa teori Sosiologi Sebagai Paradigma dalam Pendidikan
2. Keterkaitan Pendidikan dengan Struktur Sosial
3. Implikasi berbagai teori sosiologi dalam Realitas Pendidikan di Indonesia

B. Teori Sosiologi Sebagai Paradigma dalam Pendidikan

1. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks institusi sosial dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam kondisi keteraturan dan keseimbangan (Haryanto, 2014). Menurut teori struktural fungsional masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu

bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Struktur disini dimaksudkan status, yakni kedudukan seseorang dalam intitusi sosial, seperti institusi keluarga, sekolah/madrasah, agama, ekonomi, politik dan lain-lain. Setiap struktur fungsional, yakni memiliki fungsi dan peran, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai sesuatu hal yang stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan. Dengan demikian tidak ada satu pun unsur sosial yang mampu berdiri sendiri sehingga antara unsur satu dengan unsur lainnya memiliki hubungan yang saling ketergantungan (Johnson, 1986).²¹

Talcott Parson adalah tokoh fungsionalisme struktural yang terbesar hingga saat ini. Pada tahun 1937 Parsons mempublikasikan karyanya *Structure of Social Action*. Parsons dikenal sebagai penggagas structural fungsional yang memfokuskan kepada masalah-masalah sistem tindakan maupun sistem sosial. Oleh karena itu, pertanyaan - pertanyaan yang diajukan lebih mengarah kepada upaya mewujudkan komitmen

²¹ Rahmi Juwita dkk, "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 (2020), 4-5.

dalam membangun keseimbangan, tertib dan keteraturan sosial.

Menurut Ralph Dahrendorf, asumsi dasar yang dibangun oleh teori struktural fungsional adalah: (a) setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil; (b) elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik; (c) setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem; (d) setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya (Damsar, 2011).²²

2. Perbedaan Teori Konflik Karl Marx Dengan Max Weber Dan Dahrendorf

Karl Marx merupakan tokoh penting teori konflik. Dasar pemikiran Marx adalah eksploitasi massal, yang diyakini sebagai pendorong utama kekuatan sejarah (Peter Singer, 2021). Marx menganggap perbedaan kelas, salah satunya disebabkan oleh proyek industrialisasi, dan ini hanya mengejar keuntungan ekonomi bagi para kapital. Perjuangan masyarakat kelas merupakan konsep fundamental yang dikonseptualisasikan oleh Karl Marx pada saat itu. Pemicunya adalah situasi sosial saat itu, yang dikelilingi oleh

²² Damsar, "Pengantar Sosiologi Pendidikan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, 51-54.

industrialisasi yang menciptakan kelas pekerja dan industrialis, yang pada gilirannya menyebabkan keterasingan.

Perspektif konflik, yang berakar pada pemikiran Karl Marx, diakui oleh sosiolog sebagai jalan keluar, karena terkait dengan revolusi (Peter Singer, 2021). Konflik di sini tidak dimaksudkan sebagai revolusi radikal, apalagi pertumpahan darah. Bagaimanapun, Marx adalah seorang humanis. Pada hakikatnya teori konflik melihat adanya perbedaan pendapat dan konflik dalam sistem sosial. Teori ini juga membahas otoritas berbeda, superioritas dan subordinasi. Perbedaan kepentingan keduanya kemudian menimbulkan konflik.

Menurut teori konflik, konflik dalam proses sosial diperlukan untuk menghasilkan perubahan sosial baik ke arah negatif maupun positif.²³ Karl Marx berpendapat bahwa Konflik kelas terjadi dalam masyarakat, yakni antara kaum borjuis dan proletar. Segala macam konflik tersebut bisa berdampak positif, yakni terjadinya peningkatan konsolidasi dan solidaritas dalam kelompok.

Sepanjang sejarah, kaum borjuis telah menciptakan kekuatan produktif dari semua

²³ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2021), 189.

generasi sebelumnya. Kelas-kelas tersebut berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat menjadi terpecah ke dalam dua kelas besar yaitu borjuis dan proletar.²⁴

Sedangkan Teori konflik Max Weber menyakini, bahwa konflik jauh melampaui material. Menurut Weber adanya beberapa konflik terpenting yang mempengaruhi perubahan sosial. *Pertama*, konflik berada di arena politik, untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi individu atau kelompok tertentu. Weber juga melihat, sampai batas tertentu, konflik ditujukan untuk keuntungan finansial. *Kedua*, konflik yang berkaitan dengan ide dan cita-cita. Weber mengungkapkan bahwa orang sering ditantang untuk menguasai pandangan dunia mereka, baik doktrin agama, filsafat sosial, atau gagasan gaya hidup budaya. Cita-cita ini tidak hanya saling bertentangan, tetapi juga digunakan sebagai senjata atau alat untuk konflik bidang yang lain, misalnya konflik politik.

Max Weber (Pip Jones, 2009b) bukanlah seorang materialis atau idealis. Weber cenderung dipandang sebagai pemikir yang memadukan model penjelas materialistis dan idealis untuk

²⁴ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No.1 (Januari 2017), 36.

mengungkapkan pendekatan sosiologis yang komprehensif.²⁵

Berbeda dengan teori konflik Ralf Dahrendorf. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Dahrendorf kemudian memaparkan tentang kelompok, konflik dan perubahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. **Pertama**, kelompok semu (*quasi group*) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. **Kedua**, kelompok kepentingan. **Ketiga**, kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan.

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Konflik sosial yang dilandasi oleh konflik kepentingan, akibat dari konflik tersebut dapat merasuk baginya dan sekaligus menimbulkan perubahan sosial.

²⁵ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2021), 190.

Meskipun Dahrendorf memiliki pemikiran yang sama ketika mempertimbangkan konflik kelas, Dahrendorf tidak setuju dengan tesis yang ditawarkan oleh Marx. Dahrendorf menganggap visi Marx tidak relevan dengan situasi masyarakat pasca-industri (industri modern). Untuk itu direkomendasikan untuk memodifikasi teori dan konsep Marx agar dapat diadaptasi dalam analisis masyarakat industri modern. Dahrendorf berpendapat bahwa Marx hanya mengacu pada masyarakat kapitalis. Itulah sebabnya Dahrendorf menawarkan konsep dan teori yang lebih memperhatikan penjelasan masyarakat kapitalis dan pasca-kapitalis. Dahrendorf kemudian membangun teori barunya di atas kerangka ini.

Dahrendorf berbeda pandangan dengan Marx dalam melihat konflik. Dia bahkan menolak konsep Marx tentang masyarakat tanpa kelas. Dahrendorf menganggap bahwa analisis masyarakat tanpa kelas sangat spekulatif dan tidak ada bukti empiris yang layak. Dalam teori konflik, Ralf Dahrendorf berasumsi bahwa masyarakat setia dalam proses perubahan dan konflik. Konflik dan berbagai elemen masyarakat yang ada dalam sistem sosial dianggap berkontribusi terhadap disintegrasi dan perubahan. Baginya, ketertiban dapat diciptakan dalam masyarakat melalui paksaan terhadap anggotanya, oleh yang berkuasa.

Kekuasaan dalam sistem sosial ini berperan dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat.²⁶

Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Sehingga teori sosiologi harus dibagi dua bagian teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa terbentuknya sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua unsur yakni konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lainnya.²⁷

3. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Soeprapto. 2007). Teori ini beranggapan bahwa seorang individu berinteraksi dari simbol-simbol yang nampak. Kekhasan interaksionisme simbolik adalah manusia saling menterjemahkan dan saling

²⁶ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2021), 190.

²⁷ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No.1 (Januari 2017), 41.

mendefinisikan tindakannya melalui simbol-simbol yang muncul. Ia memandang diri aktor mampu menciptakan realitasnya sendiri. Fakta sosial ditempatkan dalam kerangka simbol-simbol interaksi sosial aktor. Pemaknaan muncul ketika interaksi berlangsung pada realita yang dikelilingi oleh pranata sosial dan struktur sosial.

Teori interaksionisme simbolik melihat simbol menjadi medium yang sangat efektif dalam interaksi yang dilakukan si aktor, bahkan simbol merupakan media yang digunakan oleh aktor untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, maksud, dan tujuannya kepada orang lain. Simbol sebagai media primer dalam proses komunikasi dapat berupa bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya. Manusia hidup melakukan tindak menafsir, baik secara sadar atau tidak. Tidak ada dalam dunia manusia yang tanpa tafsir.

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut menetap. Makna berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.

”Mind, Self and Society” merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal (Mead. 1934 dalam West-Turner. 2008: 96).²⁸ Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain: 1) Pentingnya makna bagi perilaku manusia. 2) Pentingnya konsep mengenai diri 3) Hubungan antara individu dengan masyarakat.

Herbert Blumer mencoba merekonstruksi kajian interaksionisme simbolik yang telah dirintis oleh gurunya George Herbert Mead. Bagi Blumer, manusia bertindak bukan hanya karena faktor eksternal dan internal saja, namun individu juga melakukan *self indication* atau memberi arti, menilai, memutuskan untuk bertindak berdasarkan referensi yang mengelilinginya tersebut. Herbert Blumer mengemukakan bahwa interaksionisme simbolik sebagai perspektif yang bertumpu pada tiga premis yaitu : (1) manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna - makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) Makna - makna tersebut disempurnakan dalam interaksi sosial yang sedang berlangsung.

²⁸ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik”, *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2011), 103-104.

Pada akhirnya, proses kemampuan berkomunikasi, belajar, serta memahami suatu makna di balik simbol-simbol yang ada, menjadi keistimewaan tersendiri bagi manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Kemampuan manusia inilah yang menjadi pokok perhatian analisis sosiologi dari asumsi interaksi simbolik. Ciri khas dari interaksi simbolik terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menterjemahkan, dan saling mendefinisikan tindakannya. Tidak dibuat secara langsung antara stimulus-response, tetapi didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi. Pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing.

4. Teori Pertukaran

Pada umumnya, manusia yang ada dalam kelompok masyarakat dapat dilihat dari perilaku yang saling memengaruhi, dalam suatu hubungan, karena terdapat unsur ganjaran, pengorbanan dan penghargaan. Setiap individu menjalin pertemana, mempunyai tujuan dan harapan untuk mendapatkan sesuatu atas tindakannya. Hubungan sosial yang terjadi terdapat unsur biaya (*cost*) dan

penghargaan (*reward*). Dua hal ini sebagai salah satu ciri khas teori pertukaran.²⁹

Teori pertukaran memusatkan perhatiannya pada tingkat analisis mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antarpribadi (*interpersonal*). Teori pertukaran melihat perilaku nyata, bukan proses-proses yang bersifat subyektif semata. George C. Homans menyatakan, bahwa antar individu dapat memahami perilaku satu sama lain ketika berinteraksi dan bertukar. Pada sistem pertukaran dalam kehidupan sehari-hari, ada dua jenis yang dilakukan oleh dua pihak yang sedang melakukan interaksi, yaitu apa yang diberikan pada pertukaran sosial dan apa yang didapatkan dari hasil pertukaran tersebut (Dillon, 2014).³⁰

Jadi teori *social exchange* juga dapat dipahami sebagai proses pertukaran sosial atas perbuatan atau hubungan antara manusia yang akan diukur bila terjadi hubungan timbal balik antara satu sama lain dalam kehidupannya sehari-hari. Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman.

²⁹ Umar, "Pendekatan Social Exchange Perspektif George C. Homans", *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1 (April 2017), 98.

³⁰ Gita Juniarti, "Pertukaran Sosial Antara Dua Individu Dengan Aplikasi Couchsurfing Sebagai Perantara", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol.7, No.1, 2021, 58.

Ciri khas teori pertukaran yang terlihat adalah *cost and reward*. Dalam berinteraksi manusia selalu mempertimbangkan *cost* (biaya atau pengorbanan) dengan *reward* (penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari interaksi tersebut. Jika *cost* tidak sesuai dengan *reward*-nya, maka salah satu pihak akan merasa kecewa dan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya mengalami kegagalan.

Berbeda dengan Peter M. Blau, beliau lebih memperluas prinsip-prinsip Homans untuk menjelaskan kelahiran struktur-struktur sosial yang lebih besar. Bagi Blau fenomena daya tarik individu akan ganjaran sosial merupakan sesuatu yang bersifat “given” dan merupakan asal usul struktur sosial. Yang menjadikan individu masuk ke dalam asosiasi karena mengharapkan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran ekstrinsik dapat berupa uang, barang atau jasa, sedangkan ganjaran intrinsik dapat berupa kasih sayang, pujian, kehormatan.

Dalam hubungan juga dibutuhkan kepuasan relasi agar seseorang terus bertahan atau tidak dalam hubungan tersebut. Stabilitas relasi dalam teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) dilihat dari pengorbanan dan penghargaan yang diterima untuk dapat bertahan dan mendapatkan kepuasan relasi.

5. Teori Pilihan Rasional Terbatas (Bounded Rationality)

Rasionalitas terbatas adalah gagasan bahwa dalam pengambilan keputusan, rasionalitas individu dibatasi oleh informasi yang dimiliki, baik terkait keterbatasan kognitif dari pikiran atau keterbatasan waktu, sedangkan keputusan harus segera diambil. Pengambil keputusan tidak memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk sampai pada solusi optimal, karena itu mereka menerapkan rasionalitas setelah penyederhanaan pilihan yang tersedia. Oleh karenanya manusia lebih cenderung menjadi *satisficer* (terpuaskan) ketimbang optimalisasi atau maksimalisasi.

Pengambilan keputusan merupakan proses pencarian, dipandu oleh tingkat aspirasi yang merupakan nilai dari variabel tujuan yang dicapai atau dilampaui oleh keputusan alternatif yang memuaskan. Alternatif keputusan bukanlah sesuatu yang *given*, tetapi ditemukan. Proses pencarian dilakukan sampai alternatif memuaskan (*satisficing*) ditemukan. Selten (2002) menganggap *satisficing* bukanlah esensi dari rasionalitas Simon, namun merupakan tingkat aspirasi yang tidak permanen (*adaptif aspiration*), dinamis sesuai dengan situasi yang berkembang. Fitur dari rasionalitas Simon adalah 'mencari alternatif, *satisficing*, dan aspirasi adaptif' (Selten, 2002).

6. Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Hegemoni dapat dipahami dengan “pengaruh yang memimpin”. Robinson, mengutip Williams, menulis hegemoni sebagai satu keseluruhan himpunan kebiasaan dan harapan, penggunaan energi, pemahaman yang biasa mengenai kodrat manusia dan dunianya. Merupakan satu perangkat makna dan nilai yang tampak sebagai saling memperkuat, sebagaimana terjadi dalam praktik.

Hegemoni juga dapat dipahami sebagai sarana kultural maupun ideologis, di mana kelompok yang dominan dalam masyarakat, termasuk kelas penguasa, melestarikan dominasinya dengan mengamankan “persetujuan spontan” bagi kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja, melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologi yang masuk ke dalam kelompok dominan maupun yang didominasi.

7. Teori ISA Dan RCA Louis Al Thusser

ISA merupakan suatu alat yang digunakan oleh para penguasa, terutama kaum borjuis untuk melawan kaum proletar (*working class*) dengan cara yang halus, tidak represif. Menurut Althusser, Ideological State Apparatus (ISA's) memiliki fungsi sebagai alat untuk mendidik individu, bukan dengan cara yang represif ataupun dengan tindakan yang bersifat fisik. Fungsi utama dari ISA

adalah ideologi, bukan tindakan kekerasan. Apabila diperlukan ISA dapat menggunakan represi untuk pendisiplinan. Pelaksanaan ISA menjadi sebuah prosedur yang sistematis, dibentuk untuk memudahkan dalam penerapannya di kehidupan sosial. Pendidikan bisa digunakan oleh para penguasa untuk menguasai peserta didik melalui proses pembelajaran.

Sedangkan Represif State Apparatus (RSA) merupakan alat yang digunakan negara untuk menguasai masyarakat melalui tindakan-tindakan represif, menggunakan militer atau polisi. Bisa juga digunakan kelompok borjuis untuk melawan proletar dengan cara represif.

ISA dalam menanamkan ideologi yang dimilikinya tidak dengan cara yang represif, misalnya melalui pendidikan, pengajian, dan lain-lain. Berbeda dengan institusi RSA dalam menjalankan tugasnya menggunakan cara-cara represif, misalnya memanfaatkan militer, polisi dan lain-lain. Fungsi utama RSA sebagai perangkat negara yang harus tegas dalam menyelesaikan permasalahan. Implementasi RSA di masyarakat tetap sejalan dengan apabila tidak ada nilai-nilai dan norma—norma yang dilanggar secara berlebihan.

8. Teori Nation-Building

Nation building atau pembangunan nasional merupakan sebuah proses atau cara untuk

mengembangkan serta memperbaiki kemampuan sebuah negara agar dapat berfungsi secara utuh. Setiap negara, berkembang maupun modern, tidak pernah berhenti dalam meningkatkan kemampuannya agar dapat berfungsi secara optimal. Setiap negara terus berproses dan berubah serta beradaptasi dengan waktu dan keadaan baik itu domestik maupun internasional. Menurut teori ini, pendidikan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga pembangunan masa depan.

9. Teori Strukturasi Antonio Giddens

Teori strukturasi merupakan teori yang menentang *dualism* (pertentangan) dan mencoba mencari *likage* (pertautan) setelah terjadi pertentangan antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Giddens tidak puas dengan teori yang dikemukakan oleh struktural-fungsional, yang menurutnya terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik mereduksi aktor dalam stuktur, kemudian sejarah dipandang secara mekanis, dan bukan suatu produk kontengensi dari aktivitas agen. Giddens juga tidak sependapat dengan konstruksionisme-fenomenologis, yang menyatakan berakhir pada imperialisme subjek. Oleh karenanya ia ingin mengakiri klaim-klaim keduanya dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut.

Giddens (2011) menjelaskan, struktur tidak selalu bisa disamakan dengan kekangan (*constraint*), namun mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*). Hal ini berarti, sistem sosial memang memiliki struktur yang bersifat mengekang, masuk kedalam ruang dan waktu diluar kendali actor-aktor individu, namun suatu ketika struktur juga memberikan kebebasan bagi individu untuk bersikap dan bertindak sehingga mempengaruhi struktur, Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuan mereka, pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki *unintended consequences* (konsekuensi yang tidak disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya.

Manusia menurut teori ini sebagai agen, pelaku bertujuan, memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang. Tidak menutup kemungkinan alasan yang diuraikan oleh manusia secara berulang-ulang tersebut memiliki tujuan yang didasarkan atas apa yang hendak ia perlukan pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda-beda. Bisa dikatakan tindakan dari seorang agen tidak jarang pula untuk mempengaruhi struktur di mana mereka tengah menjalankan kiprahnya.

Aktivitas-aktivitas sosial manusia ini bersifat *rekursif* dengan tujuan agar aktivitas-aktivitas sosial

itu tidak dilaksanakan oleh pelaku-pelaku social, tetapi diciptakan untuk mengekspresikan dirinya sebagai aktor atau pelaku secara terus menerus dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimilikinya. Melalui aktivitas-aktivitasnya, agen-agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya aktivitas-aktivitas itu.

C. Keterkaitan Pendidikan dengan Struktur Sosial

Sebagai sebuah kelompok manusia, masyarakat dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang senantiasa terus berkembang. Oleh karena itu, anggota masyarakat dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan tersebut. Tanpa kemampuan, masyarakat mungkin tidak dapat mengatasi masalah-masalah mereka. Melalui pendidikan yang dilakukan dalam masyarakat, mereka diberikan bekal ilmu, kebudayaan, dan watak agar mereka dapat bertahan hidup dan memperbaiki kehidupannya.

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara berkelanjutan dan terarah dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Masyarakat senantiasa berubah setiap saat seiring dengan perkembangan zaman. Supaya pendidikan tidak sekedar larut dalam perubahan masyarakat, maka pendidikan harus berpegang pada nilai-nilai yang diidealkan. Pendidikan harus peka dalam merespons setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Lembaga-lembaga pendidikan memiliki peran kunci dan penting dalam mencapai tujuan sosial. Pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa. Semuanya dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi, berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan, seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada sesame, pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya.

Pendidikan mempunyai kewajiban untuk menjadikan peserta didik berkepribadian sempurna, sholeh secara pribadi, sholeh secara sosial, serta sholeh dalam berhubungan dengan alam dan dengan Allah SWT. Keilmuan dan wawasan peserta didik juga harus terus diasah, sehingga terus berkembang, berkreasi dan mampu berinovasi. Ketrampilannya juga terus dilatih, sehingga betul-betul trampil dalam menjalankan berbagai aktifitas kehidupan. Sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada diri peserta didik hanya bisa terbentuk dengan baik, berkembang dengan optimal, manakala struktur system social yang ada mendukung dengan baik. Sistem social yang ada pada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus sama-sama mendukung bagi pembentukan dan pengembangan aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan peserta didik tersebut.

D. Kontribusi teori Sosiologi Pendidikan dalam Menganalisis Struktur Social di Lembaga Pendidikan Umum dan Islam.

Lembaga pendidikan, baik umum maupun Islam, berfungsi sebagai mediator dalam proses sosial dan pendidikan yang lebih luas. Dalam konteks sosiologi pendidikan, penting untuk memahami bagaimana teori-teori sosiologi menganalisis struktur sosial lembaga pendidikan. Teori-teori ini membantu menjelaskan peran lembaga pendidikan dalam membentuk individu serta masyarakat secara keseluruhan.

1. Teori Struktural Fungsional

Dibuat oleh Émile Durkheim: Teori ini menekankan bahwa pendidikan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Pendidikan universal membantu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada generasi berikutnya, membantu membentuk struktur sosial yang kohesif dan mengintegrasikan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

2. Teori Konflik

Dibuat oleh Karl Marx: Teori konflik menunjukkan bahwa pendidikan digunakan untuk menjaga ketimpangan sosial dan mempertahankan kekuatan pihak yang mendominasi. Teori ini menunjukkan ketidaksetaraan sosial melalui penggunaan dan pengujian standar kurikulum

pembelajaran, seperti perbedaan kualitas dan fasilitas antar-sekolah.

3. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk makna dan realitas. Dalam konteks pendidikan, interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah membentuk identitas dan perilaku siswa. Dalam lembaga pendidikan Islam, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana interaksi sosial membentuk pemahaman siswa tentang Islam dan identitas mereka sebagai Muslim.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pondok pesantren, sosiologi pendidikan membantu memahami bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama juga sangat penting dalam membentuk dasar moral dan spiritual anak .

E. Implementasi Teori-Teori Sosiologi Pendidikan dalam Konteks Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Islam

Teori-teori sosiologi pendidikan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana lembaga pendidikan beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam konteks pendidikan umum dan Islam, penerapan teori-teori ini sangat penting untuk

menganalisis hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan institusi lain.

Teori Fungsionalisme memandang pendidikan sebagai institusi sosial yang penting untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Pendidikan berfungsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai sosial, mempersiapkan individu untuk peran sosial mereka, dan menyaring individu untuk berbagai posisi dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, teori ini dapat menjelaskan bagaimana pendidikan Islam berfungsi untuk mempertahankan identitas kelompok dan nilai-nilai keagamaan.

Ralph Dahrendorf merupakan tokoh utama teori struktural fungsional, berasumsi bahwa: (a) setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil; (b) elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik; (c) setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem; (d) setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya (Damsar, 2011).

Teori Konflik melihat pendidikan sebagai arena perebutan kekuasaan dan kepentingan. Kelompok-kelompok sosial yang berbeda memiliki kepentingan yang berbeda dalam pendidikan, dan konflik dapat muncul dalam upaya untuk mengontrol kurikulum, sumber daya, dan arah pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, konflik dapat terjadi antara

kelompok yang lebih tradisional dengan kelompok yang lebih modern dalam menginterpretasikan nilai-nilai Islam.

Teori Interaksionisme Simbolik meskipun lebih berfokus pada interaksi mikro, teori ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana identitas dan makna dibentuk dalam konteks pendidikan. Dalam lembaga pendidikan Islam, interaksi antara siswa dan guru dapat membentuk pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama.

Herbert Blumer mengemukakan bahwa interaksionisme simbolik sebagai perspektif yang bertumpu pada tiga premis yaitu : (1) manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna - makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) Makna - makna tersebut disempurnakan dalam interaksionisme sosial yang sedang berlangsung.

Ideological State Apparatus (ISA) yang menurut Althusser sebagai state apparatus memiliki fungsi sebagai alat untuk mendidik individu bukan dengan cara yang represif ataupun dengan tindakan yang bersifat pisik. Hal ini tidak mencegah sifat-sifat struktur system sosial untuk melebar masuk kedalam ruang dan waktu diluar kendali actor-aktor individu, dan tidak ada kompromi terhadap kemungkinan bahwa teori-teori sistem sosial para aktor yang

dibantu ditetapkan kembali dalam aktivitas-aktivitasnya bisa merealisasikan sistem-sistem itu.

Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuan mereka, pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki *unintended consequences* (konsekuensi yang tidak disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan alasan yang diuraikan oleh manusia secara berulang-ulang tersebut memiliki tujuan-tujuan yang didasarkan atas apa yang hendak ia perlukan pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda-beda.

Teori sosiologi kritis sangat tepat sebagai alat analisis pengembangan sistem dan kebijakan pendidikan di seluruh dunia. Kita tahu bahwa saat ini wajib belajar Pendidikan dasar dan menengah telah merata di dunia di beberapa negara, para orang tua khususnya yang kurang mampu, dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya sekolah. Banyak juga yang menyediakan peralatan belajar, seragam, dan makan siang di sekolah/madrasah. Peningkatan anggaran belanja pendidikan dan pemberian beasiswa dilakukan kepada para siswa dan mahasiswa yang berprestasi. Terutama bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Setiap negara berlomba dalam mengentaskan masalah dasar kemanusiaan. Seperti kemiskinan, kebodohan, keterisolasian, dan lain-lain melalui pendidikan. Yang menjadi fokus perhatian pemerintah di semua negara

di dunia adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, serta peningkatan mutu dan kinerja, serta kesejahteraan guru.

F. Kesimpulan

Teori-teori sosiologi memberikan kerangka kerja penting untuk memahami dinamika pendidikan di berbagai belahan dunia. Dengan memahami keterkaitan antara pendidikan dan struktur sosial, serta menerapkan teori-teori tersebut dalam praktik, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Memahami teori-teori sosiologi sangat penting untuk menganalisis fenomena pendidikan yang sedang berlangsung di berbagai kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan kacamata sosiologi, kita dapat melihat bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Pemahaman ini dapat membantu kita merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki tujuan mulia yaitu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi, serta pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai agama.

Lembaga pendidikan memiliki peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial, Bersama pemerintah dan orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa, Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya.

G. Daftar Bacaan

1. Damsar, (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2. Juniarti, Gita. (2021). “Pertukaran Sosial Antara Dua Individu Dengan Aplikasi Couchsurfing Sebagai Perantara”, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol.7, No.1,
3. Juwita, Rahmi, (2020), “Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan”, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1
4. Nugroho, Ari Cahyo, (2021). “Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)”, *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, No. 2 (Desember)

5. Siregar, Nina Siti Salmaniah, (2011). “Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik”, *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma*, Vol. 4, No. 2 (Oktober),
6. Tualeka, M. Wahid Nur, (2017). “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No.1 (Januari)
7. Umar, (2017). “Pendekatan Social Exchange Perspektif George C. Homans”, *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1 (April)

Bab 6

Fungsi Pendidikan Menurut Sosiologi dan Konsep Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara komprehensif, jujur dan bertanggungjawab tentang:

1. Fungsi pendidikan menurut sosiologj
2. Fungsi Pendidikan menurut Islam

B. Fungsi-Fungsi Pendidikan

Pendidikan memiliki berbagai fungsi, yakni reproduksi kebudayaan, penyebaran budaya, seleksi, mobilitas sosial, pemeliharaan tradisi dan control sosial.

1. Fungsi Pendidikan sebagai Reproduksi Kebudayaan

Pendidikan sebagai reproduksi budaya maksudnya dari proses pendidikanlah berbagai budaya itu terlahir, terbentuk dan terwujud. Pendidikan merupakan pusat terlahirnya budaya. Melalui proses Pendidikan kebudayaan dilahirkan. Berarti cipta, rasa dan karsa manusia itu bisa terbentuk melalui proses Pendidikan. Melalui proses pendidikan manusia dididik, dibimbing dan dibiasakan untuk berfikir, bersikap dan berperilaku secara matang, sehingga bisa menciptakan,

merasakan dan mengkarsa, dan berkarya, wujudnya berupa kebudayaan.

Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan . Proses ini tidak hanya melibatkan penguasaan pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial yang penting, seperti komunikasi, empati, dan kerja sama. Dengan bekal keterampilan ini, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, berkontribusi dalam interaksi sosial, dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai budaya, individu dapat beradaptasi dengan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Sekolah adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya (keluarga dan instusi lainnya yang ada dalam masyarakat). Di sekolah, individu tidak hanya mendapatkan

pendidikan formal, tetapi juga pengalaman sosial yang penting melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru. Selain itu, sekolah juga berkolaborasi dengan keluarga dan institusi lain dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan sosial dalam kurikulum, sekolah dapat membantu siswa mengembangkan identitas diri yang kuat, serta keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang berbudaya dapat tercapai dengan lebih efektif.

2. Fungsi Pendidikan sebagai Penyebaran Kebudayaan

Peran Pendidikan adalah sebagai transfer nilai-nilai budaya. Cara yang paling efektif dalam mentransfer nilai-nilai budaya adalah dengan cara proses pendidikan, karena keduanya sangat erat hubungannya . Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya diajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan generasi yang lebih tua dengan yang lebih muda, memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan relevan. Dengan demikian, pendidikan tidak

hanya membentuk individu secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan identitas sosial, sehingga menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran budaya yang tinggi dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Kebudayaan dengan pendidikan sangat erat sekali keduanya saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan karena saling dan membutuhkan antara satu sama lainnya . Sebaliknya, kebudayaan memberikan konteks dan makna bagi pendidikan itu sendiri, memengaruhi cara pembelajaran dan metode pengajaran yang diterapkan. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya menciptakan individu yang terdidik, tetapi juga membentuk identitas budaya mereka. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada pemahaman dan penghayatan terhadap kebudayaan yang ada, sehingga keduanya saling membutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing.

3. Fungsi Pendidikan sebagai Seleksi atau Alokasi

Seleksi adalah proses penentuan, pemilihan dan penetapan orang-orang tertentu yang akan diterima sebagai tenaga baru atau pegawai. Pelaksanaan seleksi merupakan tugas yang sangat penting, berusaha dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Proses seleksi yaitu proses untuk menentukan tenaga mana yang paling layak mengisi jabatan tertentu yang tersedia di sekolah.

Jika kita amati apa yang terjadi dalam Masyarakat, dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk jabatan tertentu, maka disana akan terjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan seleksi, pelatihan untuk suatu jabatan dan pengembangan tenaga kerja tertentu.

Proses seleksi ini terjadi di segala bidang baik mau masuk sekolah maupun mau masuk jabatan tertentu. Untuk masuk sekolah tertentu harus mengikuti ujian tertentu. Untuk masuk suatu jabatan tertentu harus mengikuti testing kecakapan tertentu. Sebagai contoh untuk dapat masuk pada suatu sekolah menengah tertentu harus menyerahkan nilai ujian akhir sekolah. Nilai akhir sekolah yang masuk dipilih nilai yang tinggi dari nilai tertentu sampai nilai yang terendah. Jika bukan nilai, yang menjadi persyaratan yang ketat biasanya biaya sekolah yang tinggi, sehingga hanya terjangkau bagi kalangan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, anak yang nilainya rendah dan ekonominya lemah tidak kebagian sekolah yang bermutu. Demikian pula untuk memangku jabatan pada pekerjaan tertentu, mereka yang diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya.

4. Fungsi Pendidikan sebagai Mobilitas Social

Pendidikan sebagai kebutuhan pokok masyarakat saat ini selain bertujuan untuk memperoleh wawasan, pendidikan juga sering kali dianggap dapat menjadi penunjang kehidupan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang maka akan semakin mudah baginya untuk mencapai tangga sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pendidikan memiliki fungsi sebagai Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial merupakan perubahan keadaan individu atau kelompok dari satu kedudukan sosial menuju kedudukan sosial yang lain . Bentuk Mobilitas Sosial biasanya berupa perubahan yang terjadi dari kedudukan sosial yang rendah menuju kedudukan sosial yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Dulunya, masyarakat tradisional untuk mencapai mobilitas sosial yang tinggi sukar dilakukan karena status sosial ditentukan dari keturunan serta ketatnya sistem golongan kasta yang ada. Namun dengan berkembangnya zaman serta pengaruh pemikiran tokoh-tokoh Pendidikan, akhirnya pendidikan mampu untuk memperbaiki nasib seseorang.

Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan seseorang dapat meningkat dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara

golongan tinggi dan rendah. Melalui pendidikan tiap orang dapat mengakses berbagai macam informasi dari berbagai sumber, online maupun cetak, membaca surat kabar dan majalah yang sama, dapat memikirkan masalah-masalah politik, sosial, ekonomi yang sama. Dapat kita lihat bahwa banyak keadaan disekitar kita yang menjadi bukti dan contoh bahwa fungsi pendidikan adalah sebagai mobilitas sosial. Sebagai contoh seorang anak yang berasal dari keluarga miskin bahkan kelompok miskin bisa menyelesaikan Pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus dia memiliki pengetahuan bisnis dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha, sehingga dia berhasil menjadi pengusaha sukses, meningkatkan status sosialnya. Begitu juga ada yang menekuni berbagai macam pofesi dan politisi yang sukses, sesuai Pendidikan dan pengalaman yang diperoleh dan ditekuni.

5. Fungsi Pendidikan sebagai Pemeliharaan Tradisi dalam Pendidikan

Pendidikan mampu menerapkan pendidikan yang aktif mentransfer ilmu ilmu pengetahuan dan pemeliharaan tradisi pendidikan. Tradisi yang dimaksud adalah penerapan nilai dan moral. Karena Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter yang dilakukan guru terhadap peserta didik. Dengan menerapkan pendidikan karakter otomatis kita memelihara

tradisi dalam pendidikan. Tujuan ini sejalan dengan adanya UUD 45 dan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal ini dinyatakan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.

Melalui proses pendidikan peserta didik tidak hanya semata mendapatkan ilmu berupa materi secara teoritis, namun juga nilai-nilai esensial yang berakar pada agama, tradisi dan budaya masyarakat dan bangsa sebagai pembentukan karakter. Pada Lembaga Pendidikan pemeliharaan tradisi dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler yang merupakan interaksi antara guru dan peserta didik, kemudian dilakukan ekstrakurikuler berupa program pengembangan minat dan bakat siswa, penugasan serta beberapa materi pembelajaran yang memuat tentang pembentukan karakter peserta didik.

6. Fungsi Pendidikan sebagai Kontrol Sosial

Travis Hirschi (1969) mengembangkan teori kontrol sosial untuk dapat menjelaskan, mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma, teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau memiliki dorongan untuk

melakukan pelanggaran hukum. Teori kontrol adalah perilaku penyimpangan yang disebabkan oleh kegagalan individu dalam membentuk kontrol atau pengendalian sosial dalam membentuk ikatan dengan lingkungannya.

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkahlaku manusia, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Menurut Hirschi, kontrol sosial berpotensi menentukan perilaku seseorang, agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut (dalam Adilla, 2009). Kontrol sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat (Akbar, 2013).

Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu, individu terhadap suatu kelompok sosial, maupun dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau suatu kelompok terhadap individu. Itu semua merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun

seringkali manusia tidak menyadari (Soekanto, 2006).

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang ikut menopang berdirinya sebuah peradaban yang disebut dengan Bangsa. Eksistensi suatu Bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Bangsa yang memiliki karakter kuat dapat menjadi Bangsa yang bermartabat dan disegani oleh Bangsa lain di seluruh dunia. Tidak hanya itu, pendidikan juga berperan sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak agar, dapat mengatur seseorang, supaya dapat bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, tanpa merugikan orang di sekitarnya . Sebagai kontrol sosial pendidikan berperan memperbaiki kebiasaan kebiasaan buruk dan menerapkan norma norma baik demi menciptakan karakter seseorang yang mampu melaksanakan berbagai aktifitas dalam masyarakat, sebagai individu yang baik.

Kontrol sosial dalam pendidikan dibentuk melalui pembelajaran moral atau pembentukan karakter yang diberikan saat bangku sekolah/madrasah. Sehingga nilai moral yang telah diajarkan mampu diterapkan dalam kehidupan siswa serta mampu menjadi pengontrol sikap mereka dalam hidup bermasyarakat adalah untuk menahan atau mengurangi sifat-sifat tidak baik

pada peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat kelak. Pendidikan moral itu dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat sekaligus juga memberi dukungan dan berusaha mempertahankan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh fenomena yang dapat ditemui dalam masyarakat ada seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan dalam keluarga ataupun sekolah formal sering kali tidak memiliki control sosial yang baik. Dimana sikap dan perilakunya kebanyakan menyalahi aturan serta norma yang ada di masyarakat.

C. Fungsi Pendidikan Menurut Islam

Pendidikan Islam merupakan usaha sadar, dilakukan secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, menjadi manusia terbaik, hamba Allah, kholifah, dan pewaris para nabi. Pendidikan Islam sebagai upaya untuk mengaktualkan sifat-sifat kesempurnaan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia, upaya tersebut dilaksanakan tanpa pamrih apapun kecuali untuk semata-mata beribadah kepada Allah.

Pendidikan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Akhlak

mulia menyangkut etika, budi pekerti, dan moral sebagai manifestasi dari pendidikan Islam. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah.

Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insān kamil yang memiliki wawasan kāffāh supaya mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kriteria dinamis, aktif, kreatif, dan selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan umat yang dilandasi oleh pengabdian yang tulus kepada Allah Subhānahu Wa Ta'ālā.

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia supaya menjadi manusia yang mulia, memiliki karakter kepribadian Islami yang terlihat dari pola pikir dan pola sikap yang Islami, menguasai *Ṣaqofah Islam*, ilmu pengetahuan dan teknologi berikut keahlian yang memadai dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai hamba, khalifah dan pewaris nabi.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan fitrah

manusia. Secara mikro, pendidikan Islam bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya insan yang ada pada peserta didik sehingga mereka menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam bertujuan untuk menjaga, menyelamatkan, dan mengembangkan fitrah manusia agar tetap menjadi *al-fithratus salimah* dan terhindar dari *al-fithratu ghairus*. Artinya, anak-anak tidak menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi, karena mereka tetap memegang iman yang sama sejak lahir dan terus mengokohkannya. Mereka tetap memegang iman yang sama sejak lahir.

Selain itu, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan individu yang baik dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, toleransi, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik terhadap sesama manusia maupun dengan Allah SWT. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang berguna bagi masyarakat dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan Islam memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mempelajari dan memahami Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, orang-orang yang beragama Islam dapat hidup dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Nilai-nilai Islam ditransmisikan melalui pendidikan Islam. Peradaban dan prinsip-prinsip Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Islam selain memberikan pengalaman. Pendidikan Islam juga berfungsi untuk mengembangkan potensi individu. Pendidikan Islam memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga ajaran Islam dapat dengan mudah diterapkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendidikan Islam membangun kemampuan dan bakat manusia untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan yang penuh berkat dan rahmat Allah di seluruh alam.

D. Realisasi fungsi fungsi Pendidikan dalam Kehidupan Sosial

Dengan peran yang kompleks dan multifase, pendidikan adalah alat penting dalam masyarakat modern. Pendidikan pertama-tama berfungsi sebagai proses sosialisasi yang efektif, di mana orang-orang mengadopsi nilai-nilai sosial dan berinteraksi dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan membantu mempertahankan dan mengembangkan tatanan sosial yang berlaku dan mempersatukan pandangan hidup dan nilai-nilai yang beragam dari berbagai etnis ke dalam satu perspektif yang dapat diterima oleh

semua etnis. Hal ini ditunjukkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia yang menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak mereka untuk membantu mereka menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan juga efektif sebagai kontrol sosial. Dengan belajar, orang dapat mengadopsi prinsip-prinsip sosial dan berinteraksi dengan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah berfungsi sebagai tempat untuk mempertahankan dan mempertahankan nilai-nilai yang harus dianut oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, pendidikan membantu mempertahankan tatanan sosial yang berlaku dan menggabungkan nilai-nilai yang dianut oleh siswa. Salah satu contoh yang jelas adalah bahwa di Amerika Serikat, pendidikan wajib diikuti selama lima hari seminggu atau sepuluh bulan setahun, dengan perlengkapan sekolah dan makan siang yang tersedia di sekolah. Ini menunjukkan seberapa besar perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap peran sekolah sebagai upaya untuk mengganti generasi.

Pendidikan juga berperan dalam perubahan sosial yang dinamis. Dengan melakukan reproduksi budaya, difusi budaya, dan pengembangan analisis kultural dari kelembagaan-kelembagaan tradisional, pendidikan berfungsi untuk memacu terjadinya perubahan sosial dengan memungkinkan individu untuk mengembangkan analisis kultural dari kelembagaan-kelembagaan tradisional dan

melakukan perubahan atau modifikasi tingkat-tingkat ekonomi sosial tradisional. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengusahakan stabilitas dan status quo, tetapi juga untuk memacu terjadinya perubahan sosial yang lebih mendasar.

Wuradji (1998) menambahkan bahwa pendidikan sebagai lembaga konservatif selain memiliki fungsi sosialisasi, control sosial dan perubahan sosial sebagaimana yang disampaikan di atas, juga memiliki fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi Latihan dan pengembangan tenaga kerja, fungsi seleksi dan alokasi, fungsi reproduksi budaya, fungsi difusi kultural, fungsi peningkatan sosial dan fungsi modifikasi sosial. Jane H. Ballantine (1983) juga menyatakan bahwa fungsi pendidikan dalam masyarakat yaitu, fungsi sosialisasi, fungsi seleksi, Latihan dan alokasi, fungsi inovasi dan perubahan sosial, fungsi pengembangan pribadi dan sosial. Sedangkan Meta spencer dan Alec Inkeles (1982) menyatakan bahwa fungsi pendidikan dalam masyarakat yaitu, memindahkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai pengajaran, peningkatan mobilitas sosial, fungsi stratifikasi, Latihan jabatan, mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial, membentuk semangat kebangsaan, pengasuh bayi.

E. Kesimpulan

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan individu dan masyarakat, baik dari perspektif sosiologi maupun Islam, dua perspektif ini yang saling melengkapi. Dalam konteks sosiologi, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk integrasi sosial, di mana individu diajarkan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam masyarakat yang beragam. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan karakter dan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan mobilitas sosial, memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang untuk mencapai status yang lebih baik melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Sementara itu, dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritualitas. Pendidikan dalam konteks Islam bertujuan untuk menciptakan individu yang seimbang, di mana kecerdasan intelektual diimbangi dengan moralitas yang tinggi. Proses pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab dan

berkontribusi positif terhadap masyarakat, selaras dengan ajaran agama dan norma sosial.

F. Daftar Bacaan

1. Abdussalam, A. (2011). *Pembelajaran Dalam al Quran al Kariim (Disertasi)*. Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Adilla, Nisa. (2009). Pengaruh Kontrol Sosial terhadap Perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol.5 No.1.
3. Ahmad Tafsir. (2014). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
4. Aisyah, Siti & Panjaitan, (2023). "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam," *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 7, no. 4 (2023): 260–73, <https://doi.org/10.47006/er.v7i4.16451>.
5. Anggraini, M., Solfema, S., & Ismaniar, I. (2018). Hubungan antara kontrol sosial masyarakat dengan perilaku sosial anak usia dini. *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 65-78.
6. Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165-181. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v2i2.1814>
7. Azra, A. J. (2006). *Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio Historis dalam Jajat Burhanuddin*, Dina Afrianti.

Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia.

8. Aziz, Abd, "Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 3 (December 29, 2019): 466– 89, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.68>.
9. Cupian, C., Zaky, M., Nurjaman, K., & Kurnia, E. (2020). Analisis pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penempatan berdasarkan perspektif islamic human capital. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 50-63.
10. Muhammad Husni Basyari and Akil Akil, "Peran Dan Fungsi Pendidikan Islam Dalam Masyarakat," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 865–79, <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.292>.
11. Mukarromah, M. (2023). Peran Pendidikan Islam Sebagai Diseminasi Social Culture. *Journal on Education*, 5(2), 3356-3369.
12. Nur Latifah, "Pendidikan Dalam Teori Sosiologi," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 5, no. 2 (2022): 1–23.
13. Rohmaniyah, M. (2022). PENGARUH BUDAYA BAHASA MADURA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-KHOIRIYAH. In *International Seminar On Islamic Education & Peace* (Vol. 2, pp. 428-431).

14. Ryan Indy, “Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,” *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* 12, no. 4 (2019): 1–18, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25466>.
15. Saihu. “Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Jembrana Bali)”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol: 08, No: 01 (2019): 69-90.
16. Seknun, M. Y. (2015). Pendidikan sebagai media mobilitas sosial. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1), 131-141.
17. Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 10-24. <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509.g692>
18. Widyastuti, M. (2021). Peran Kebudayaan Dalam Dunia Pendidikan THE ROLE OF CULTURE IN THE WORLD OF EDUCATION. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 1 (1), 54–64.
19. Wulandari, R. T. (2019). PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL. *KATA PENGANTAR*, 153.
20. Wuradji, *Sosiologi Pendidikan Sebuah pendekatan Sosio-Antropologi*, Jakarta: Depdikbud,2010.

Bab 7

Pendidikan dan Terbentuknya Stratifikasi dan Deferensiasi Sosial

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara komprehensif, jujur dan bertanggungjawab tentang:

1. Hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial
2. Pendidikan dan terbentuknya stratifikasi dan diferensi sosial
3. Contoh tentang pendidikan sebagai sarana mobilitas dan alat seleksi sosial dalam masyarakat
4. Peran sistem pendidikan dalam reproduksi struktur dan kultural
5. Konsep Islam tentang stratifikasi dan deferensiasi dalam Pendidikan.

B. Hubungan Pendidikan dengan Mobilitas Sosial

Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan dari satu ke tempat ke tempat lain. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan “gerak” atau “perpindahan”. Mobilitas sosial adalah perpindahan seorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan lain. Kedudukan dapat berarti: situasi tempat, dapat pula berarti status. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur

sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan (strata sosial) yang satu ke lapisan yang lain.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial di masyarakat. Stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan individu atau kelompok dalam hierarki berdasarkan status, kekuasaan, dan sumber daya. Stratifikasi sosial sangat memengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat. Seringkali, kepemimpinan berperan dalam memengaruhi struktur hierarki. Dalam setiap masyarakat, ada pemimpin yang bertanggung jawab karena memiliki otoritas tinggi untuk mempertahankan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang mereka tunjukkan, kepemimpinan tidak hanya biasa dalam semua masyarakat, tetapi juga sangat mempengaruhi struktur hierarki. Sedangkan diferensiasi sosial mengacu pada perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat tanpa menciptakan hierarki yang ketat. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial dan juga sebagai cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat [1].

Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan merupakan jalan bagi terjadinya mobilitas sosial. Pada zaman dahulu keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat.

Para tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan kemampuan pendidikan untuk mengubah dan memperbaiki nasib seseorang. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan diharapkan dibukalah batas-batas golongan-golongan sosial. Diharapkan kesempatan belajar yang sama membuka jalan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Kewajiban belajar atau pendidikan universal memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sama bagi semua peserta didik dari semua golongan sosial. Dengan demikian perbedaan golongan sosial akan dikurangi sekalipun tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Sekalipun, kenyataan cita-cita itu tidak mudah diwujudkan.

Hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial sangat erat. Robert G. Burgess dalam Bahar (1989:

37) menunjukkan, bahwa sistem pendidikanlah yang menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Ivan Reid (1989: 37) menyatakan, bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas sosial, sekalipun tidak tertuju pada penempatan pekerjaan tertentu. Sekalipun demikian, kualifikasi pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan jenis pekerjaan.

Untuk mendapatkan pekerjaan, harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jenis pekerjaan, Bukan karena jenjang pendidikannya, tidak ada jaminan orang yang berkualifikasi Pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Disamping itu, kesempatan pekerjaan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, sehingga tidak semua lulusan terserap di dunia kerja. Sekalipun demikian, Pendidikan tetap menjadi factor utama menjadikan seseorang bisa diterima didunia kerja, karena Pendidikan menyiapkan dan membentuk berbagai kecakapan untuk bisa bekerja dengan baik.

Pada saat ini, pembentukan kecakaoan bekerja tidak hanya dilakukan melalui Pendidikan formal, namun bisa juga melalui Pendidikan informal dan non formal. Karena saat ini, pengguna kerja disamping melihat ijazahnya juga lebih mementingkan kemampuan individu dan skillnya sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan nonformal yang

lebih bisa memberikan keterampilan praktis bagi kebutuhan dunia kerja.

Kritik terkait kesiapan Pendidikan formal untuk menyiapkan tenaga kerja ini dilakukan oleh Paulo Freire. Menurut Paulo Freire, yang dikenal dengan pendidikan kritis, pendidikan. Lembaga pendidikan dalam pembelajarannya harus mengajarkan dengan selalu memperhatikan kepada kelas-kelas yang terdapat di dalam masyarakat dan berupaya memberi kesempatan yang sama bagi kelas-kelas sosial tersebut untuk memperoleh pendidikan. Disini fungsi pendidikan bukan lagi hanya sekedar usaha sadar yang berkelanjutan. Akan tetapi sudah merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Pendidikan harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang realitas sosial, analisa sosial dan cara melakukan mobilitas sosial. Pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat adalah proses pendidikan yang bisa mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pendidikan dan Terbentuknya Stratifikasi dan Diferensiasi Sosial

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan proses pembelajaran yang berkualitas, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dirinya dan masyarakat. Pendidikan juga terkait pengajaran keahlian khusus dan mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Tugas utama pendidikan adalah mengajar kebudayaan dari generasi lama ke genera baru. Ini berarti budaya lama harus bisa terwariskan kepada generasi baru yang dalam realisasinya sangat ditentukan oleh lingkungan dimana generasi tersebut berada.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu. Penghargaan tersebut akan menempatkan seseorang pada sebuah kedudukan kelas sosial. Dalam suatu masyarakat, pada umumnya, orang yang memiliki harta berlimpah lebih dihargai daripada orang yang miskin. Demikian pula orang yang lebih berpendidikan dihargai lebih daripada yang kurang berpendidikan. Atas dasar itu, masyarakat dikelompokkan secara vertical, bertingkat-tingkat, membentuk, lapisan-lapisan sosial tertentu dengan kedudukan tertentu.

Pritim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki). Sedangkan Max Weber berpendapat bahwa stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial

tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan.

Kelas sosial adalah suatu strata (lapisan) orang-orang yang berkedudukan sama dalam suatu kesatuan status sosial. Dapat dikatakan bahwa kelas sosial memiliki kebudayaan khusus atau subkultur. Sedangkan status sosial sendiri adalah posisi seseorang di dalam masyarakat yang didasari, masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Stratifikasi sosial muncul dalam dua cara, yakni disengaja dan tidak disengaja. Hal tersebut membuat kelas-kelas sosial di setiap masyarakat berbeda-beda.

Pendidikan sebagai faktor penentu kelas sosial di masyarakat. Latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi kelas sosial seseorang. Ada dua alasan mengapa bisa demikian. Pertama, pendidikan tinggi memerlukan biaya dan motivasi. Artinya pendidikan hanya diperoleh bagi mereka yang mempunyai biaya dan motivasi untuk belajar. Walaupun demikian, tidak ada jaminan bagi kelas sosial yang mempunyai kemampuan financial dapat memperoleh pendidikan pada jenjang yang tinggi dengan mudah, apabila mereka tidak memiliki motivasi. Sebaliknya, tidak mustahil bagi kelas sosial rendah bisa memperoleh pendidikan yang tinggi, walaupun hanya dengan motivasi belajar yang kuat. Kedua, setelah seseorang memperoleh pendidikan, maka terjadilah perubahan mental, selera, minat, tujuan hidup (cita-cita), tatakrama, cara berbicara, dan aspek gaya hidup

lainya. Selain itu pendidikan juga membekali seseorang dengan keahlian dan ketrampilan yang memungkinkannya memperoleh status sosial yang lebih baik.

1. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial muncul karena ketimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga yang dibutuhkan masyarakat, seperti uang, jabatan, pendidikan, kekuasaan, dan semacamnya itu. Orang yang memiliki keahlian atau berpendidikan tinggi akan mendapat penghargaan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak berpendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dasar terbentuknya stratifikasi sosial, dan menjadi fondasi paling kuat, karena orang yang mempunyai pendidikan akan lebih mudah dalam mendapatkan kekuasaan, dan kehormatan, sehingga terbentuklah stratifikasi sosial.

Stratifikasi Sosial memiliki berbagai ciri, yakni:

- a. Perbedaan kemampuan. Anggota masyarakat dari kelas (strata) tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan dengan anggota kelas sosial dibawahnya. Misalnya, orang kaya tentu mampu membeli barang-barang mewah dan membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang tinggi bahkan sampai ke luar negeri. Berbeda dengan orang yang miskin. Harus berjuang keras untuk biaya hidup sehari-hari.

- b. Perbedaan Gaya Hidup. Gaya hidup meliputi banyak hal, seperti mode pakaian, model rumah, selera makanan, kegiatan sehari-hari, kendaraan, cara bicara, hobi dan pergaulan. Orang yang berasal dari kelas atas (pengusaha besar atau pejabat tinggi), tentu memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang kelas bawah. Orang kalangan atas biasanya berbusana mahal dan bermerek, berlibur ke luar negeri, bepergian naik pesawat atau mobil sedangkan orang kalangan bawah biasanya sebaliknya.
- c. Perbedaan Hak dan Sumber Daya. Hak adalah sesuatu yang dapat di peroleh atau dinikmati sehubungan dengan kedudukan seseorang, Sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan seseorang. Semakin tinggi kelas sosial seseorang maka hak yang diperolehnya bsemakin besar, termasuk kemampuan untuk memperoleh sumber daya. Misalnya, hak yang dimiliki seorang direktur sebuah perusahaan dengan hak yang dimiliki para karyawan tentu berbeda. Penghasilannya pun berbeda.

Stratifikasi sosial terjadi melalui proses sebagai berikut:

- a. Terjadinya secara otomatis, karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir. Misalnya, kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam

masyarakat itu sendiri. Adapun lapisan tersebut dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya, melainkan berjalan secara alamiah.

- b. Terjadi dengan sengaja untuk tujuan Bersama. Biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti: pemerintahan, partai politik, perusahaan, perkumpulan, angkatan bersenjata

2. Diferensiasi Sosial

Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan secara horizontal. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi dari pada golongan lainnya. Perbedaan masyarakat secara vertical disebut stratifikasi sosial, sedangkan perbedaan masyarakat secara horizontal disebut dengan diferensiasi sosial. Pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis (suku bangsa), klen dan agama disebut kemajemukan sosial, sedangkan pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial.

Diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ciri fisik. Diferensiasi ini terjadi karena perbedaan ciri-ciri tertentu. Misalnya: warna kulit, bentuk mata, rambut, hidung, muka, dsb.

- b. Ciri Sosial. Diferensiasi sosial ini muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Termasuk didalam kategori ini adalah perbedaan peranan, prestise dan kekuasaan. Contohnya: pola perilaku seorang perawat akan berbeda dengan seorang karyawan kantor.
- c. Ciri Budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan, keuletan dan ketangguhan (etos). Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita lihat dari bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, agama, dsb.

D. Contoh tentang Pendidikan sebagai Sarana Mobilitas dan Alat Seleksi Sosial dalam Masyarakat

Keberadaan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan sosial keagamaan utamanya dibidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Pendidikan menciptakan kekuatan-kekuatan pendorong untuk mencapai kemajuan peradaban dan pengetahuan serta memberi corak dan menentukan arah perkembangan dan kemajuan sosial keagamaan itu sendiri. Kalau kita melihat perkembangan sosial keagamaan sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang mengalami pasang surut dalam sejarahnya, akan ditemukan kaitan dan

hubungan yang erat antara pendidikan disatu pihak dan keadaan sosial kemasyarakatan dipihak lain. Dapat dikatakan bahwa corak masyarakat pada satu kurun waktu tertentu, sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang dilaksanakannya. Sebaliknya sistem pendidikan sosial itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan keadaan masyarakat ketika itu.

Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkatkan ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dalam suatu golongan ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial (Nasution, 2009: 38). Pada zaman dahulu keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat. Tokoh-Tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan kemampuan pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang (Nasr, 2003: 192). Dengan memperluas dan meratakan pendidikan universal memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sama bagi semua anak dari semua golongan sosial. Dengan demikian perbedaan golongan sosial akan dikurangi, sekalipun tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Kenyataan cita-cita itu tidak mudah diwujudkan (Nasution: 39).

Mobilitas sosial memiliki dua bentuk, yakni vertical dan horizontal. Mobilitas sosial vertical terjadi bila ada sektor dalam masyarakat yang secara keseluruhan berubah kedudukannya terhadap sector lain, bisa naik, bisa turun. Mobilitas vertical naik, misalnya buruh industri, dahulu mempunyai kedudukan yang rendah mendapat posisi yang baik setelah mendapat gaji yang lebih tinggi, kekuasaan politik yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik dan terjamin, sehingga secara keseluruhan mendapat status sosial yang lebih tinggi dan terhormat. Sebaliknya ada kemungkinan suatu sektor masyarakat merosot dalam keseluruhannya (mobilitas vertical turun). Kedudukan guru yang begitu terhormat pada zaman dahulu sudah tidak lagi berada pada posisi yang tertinggi di zaman sekarang ini. Bentuk mobilitas kedua adalah deferensiasi, yakni kemungkinan bagi individu untuk pindah dari lapisan satu ke lapisan sosial yang satu lagi. Dapat kita lihat contoh-contoh di sekitar kita perbedaan status sosial seorang dibandingkan dengan orang tuanya (Jalal, 2001: 27-28). Pendidikan bisa menjadikan sarana mobilitas seseorang secara vertical atau horizontal.

Dalam tiap masyarakat modern bisa saja terjadi mobilitas sosial sangat banyak dan variatif. Orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu didasarkan atas kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Mobilitas sosial ini berarti bahwa individu itu memasuki lingkungan

sosial yang berbeda dengan sebelumnya. Mobilitas sosial terus berlangsung di berbagai masyarakat, khususnya dalam masyarakat industri, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan tenaga teknis dan professional. Masyarakat yang berstatus sosial tinggi tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya, sehingga terpaksa mengambilnya dari lapisan sosial yang lebih rendah. Mereka yang lahir dari golongan atas dan tidak mempunyai motivasi untuk memperoleh kemampuan teknis, professional atau managerial akan dengan sendirinya turun dalam strata sosial (Nasution: 39).

Pendidikan formal maupun non-formal merupakan saluran untuk mobilitas vertikal yang sering digunakan, karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh: Seorang anak dari keluarga miskin menekuni sekolah sampai jenjang yang tinggi. Setelah lulus ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha, sehingga ia berhasil menjadi pedagang yang kaya, yang secara otomatis telah meningkatkan status sosialnya. Begitu anak petani, lulus perguruan tinggi dengan memiliki berbagai ketrampilan, sehingga bisa malakukan berbagai sector pekerjaan baru yang lebih professional dengan gaji yang lebih tinggi. Kalutuh tetap menjadi petani, menjadi petani yang professional, dengan produksi yang jauh lebih tinggi.

Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas sosial. Bahkan jenis pekerjaan kasar yang berpenghasilan baik harus diraih melalui proses yang tidak mudah, bisa diperoleh jika memiliki kompetensi sesuai standar pekerjaan tersebut serta mampu mengerjakan dengan baik. Pada sector dunia usaha dan industri, bukan hanya terdapat satu tangga, melainkan dua tangga mobilitas sosial. Tangga pertama bermula dari buruh, berakhir dengan jabatan tertinggi sebagai mandor. Tagga kedua bermula dari kedudukan “program pengembangan eksekutif,” dan berakhir pada kedudukan pimpinan. Menaiki tangga mobilitas yang kedua tanpa ijazah dari pendidikan tinggi merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi. Hal ini terjadi karena bertambah tingginya taraf pendidikan, makin besarnya kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Pendidikan tinggi dapat memberikan mobilitas lebih tinggi dibandingkan dengan hanya pendidikan menengah. Bertambahnya lulusan perguruan tinggi memang semakin berkurangnya jaminan yang memiliki ijazah untuk meningkat status sosialnya, karena terjadi persaingan yang ketat, yang dibutuhkan kecakapan khusus, namun dengan memiliki ijazah yang lebih tinggi pembuktian kecakapan khusus tersebut lebih terjamin.

Untuk bisa menempuh Pendidikan dari dasar hingga Pendidikan tinggi tentu tidak mudah, dibutuhkan motivasi yang tinggi, kecerdasan yang

tinggi, semangat dan ketekunan belajar yang tinggi, juga harus ada dukungan finansial. Empat hal ini sangat menentukan sukses tidaknya dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan dan kualitas lulusan. Disamping itu juga kualitas dalam memproses peserta didik di setiap jenjang Pendidikan juga sangat menentukan, mulai dari pra sekolah, pendidikan dasar, menengah hingga Pendidikan tinggi.

Kualitas proses Pendidikan ini juga sangat ditentukan oleh kebijakan dan jaminan pemerintah terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas, komitmen semua komponen internal penyelenggaraan Pendidikan (Guru, kepala sekolah/madrasah, pegawai, siswa), serta dukungan orang tua dan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam Pendidikan tidak hanya terkait dengan kurikulum, tetapi juga penganggaran bagi penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas, peningkatan kualitas guru, penyediaan sarpras Pendidikan dan pembelajaran, serta jaminan kesejahteraan bagi guru dan pegawai. Orang tua dan masyarakat juga harus mendukung dan mempercayakan putra putrinya untuk didik secara berkualitas, tidak malah mencurigai. Kalau ini terjadi, dijamin proses Pendidikan dapat berlangsung dengan baik, melahirkan kualitas sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pangsa pasar. Juga setiap anak tidak ada alasan tidak bisa meraih Pendidikan yang lebih

tinggi, karena alasan ekonomi. Namun kenyataan di lapangan, hingga saat ini tidak selalu demikian.

Pro-kontra mahalnya biaya pendidikan tentunya memiliki ruang tersendiri dalam ranah publik. Sudah menjadi rahasia umum kesulitan ekonomi dan mahalnya biaya pendidikan membuat tidak semua anak di tanah air ini dapat mengaksesnya. Ditambah lagi sistem pendidikan kita yang seolah-olah menjadi alat seleksi sosial, misalnya ada sekolah yang bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang syarat dengan mahalnya biaya pendidikan. Sama halnya untuk memasuki perguruan tinggi, dahulu untuk memasuki perguruan tinggi negeri misalnya hanya melalui satu jalur, sering dikenal dengan jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) beberapa tahun belakangan ini bermunculan berbagai jalur khusus di berbagai perguruan tinggi negeri yang sarat dengan mahalnya biaya pendidikan bagi kalangan tertentu.

Pengaksesan terhadap pendidikan menjadi seleksi terhadap kelas-kelas sosial. Bukan lagi hanya seleksi prestasi, terkait kecerdasan dan ketrampilan yang utama, namun pada sisi lain, terkesan ada seleksi kedudukan sosial dan kekuatan ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam mengakses pendidikan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap motivasi para lulusan di dunia kerja, tidak semata mata pengabdian, profesionalitas, tetapi juga jaminan

finansial. Efek lebih lanjut, bisa jadi hanya masyarakat tertentu terlayani dengan baik.

E. Peran Sistem Pendidikan dalam Reproduksi Struktur dan Kultural

Reproduksi sosial mengacu pada tugas, bersama-sama dengan barang dan jasa, yang kesemuanya diperlukan untuk memastikan bahwa reproduksi sosial sedang terjadi. Tidak seperti produksi dalam perekonomian. Banyak reproduksi sosial terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk waktu dan energi yang dihabiskan mengurus diri sendiri atau orang lain. Beberapa reproduksi sosial juga terjadi di lembaga publik seperti sekolah, di lembaga-lembaga relawan dan organisasi non-pemerintah. Penekanan dari reproduksi sosial adalah untuk menyertakan reproduksi sosial sebagai kegiatan sosial yang bermakna diakui oleh semua pihak dan dengan biaya yang dibutuhkan ditanggung bersama. Sedangkan reproduksi kebudayaan dalam pendidikan adalah proses penegasan identitas kebudayaan yang dilakukan oleh pendatang dari suatu tempat tinggal yang lama ketempat tinggal yang baru, yang dalam hal ini menegaskan kembali kebudayaan asalnya ke daerah tempat yang baru ia tempat tinggal. Proses reproduksi budaya adalah proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial, sehingga mengharuskan adanya adaptasi bagi

individu peserta didik yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda.

Melalui sekolah terjadi proses sosialisasi dan transmisi pengetahuan, nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan suatu pandangan hidup yang berlaku pada masyarakat yang diberikan kepada siswa. Sekolah mejadi arena yang berfungsi untuk mewariskan budaya-budaya dominan yang menjadi pola panutan bagi masyarakat. Sekolah juga menjadi lembaga kontrol sosial yang bertugas melanggengkan atau mempertahankan tatanan sosial dan tradisi yang sudah mapan, guna melestarikan kembali sistem struktur sosial yang telah ada. Kondisi seperti inilah yang kemudian disebut sebagai reproduksi sosial. Fungsinya untuk mereproduksi struktur tatanan sosial yang ada dalam proses reproduksi sosial. Reproduksi sosial berkaitan dengan sistem dan struktur sosial, Sedangkan reproduksi budaya berkaitan dengan pengetahuan dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Dua proses itu saling berkaitan satu sama lain. Sebab dalam reproduksi sosial secara otomatis juga melahirkan reproduksi budaya, keduanya berlangsung secara simultan. Pendidikan bisa dijadikan sebagai alat reproduksi sosial, diproses melalui pembelajaran di sekolah/madrasah guna untuk melestarikan atau melanggengkan karakteristik tradisi dan struktur sosial dalam masyarakat.

Proses reproduksi budaya merupakan proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam

kehidupan sosial, sehingga bagi sebagian kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda harus bisa beradaptasi, dilanjutkan dengan berintegrasi dan berupaya melakukan secara terus menerus (latensi). Reproduksi kebudayaan adalah proses penegasan identitas kebudayaan yang dilakukan oleh pendatang, untuk menegaskan dan mewujudkan kembali kebudayaan asalnya. Reproduksi kebudayaan dilatarbelakangi oleh perubahan wilayah tempat tinggal latar belakang sosial, latar belakang kebudayaan, yang pada akhirnya akan memberikan warna bagi identitas kelompok dan identitas kesukubangsaan.

Pendidikan mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan budaya, mengasimilasikan dan mengakulturasikan budaya local dan budaya global. Pendidikan berguna untuk mencetak generasi-generasi yang kenal dan cinta akan budaya-budaya yang dimiliki dan melestarikan kebudayaan tersebut. Pendidikan harus dapat menumbuhkan budaya local, disamping mensosialisasikan budaya global, sehingga peserta didik dapat menerima dengan baik. Pendidikan diterapkan agar melahirkan kebudayaan yang baru, melalui sosialisasi, tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Pendidikan sebagai reproduksi budaya harus menempatkan sekolah sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru yang berfungsi sebagai difusi budaya. Jangan sampai kurikulum pendidikan di sekolah mereproduksi kekerasan secara

psikologis, akibat semakin berat beban yang ditanggung para siswa untuk memenuhi tuntutan kurikulum tersebut. Oleh karena itu penting untuk menghadirkan Lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi nilai intelektual saja, tetapi cerdas secara emosional dan spiritual, berjiwa sosial dan cinta dan diharapkan bisa melestarikan kebudayaan.

F. Konsep Islam tentang Stratifikasi dan Diferensiasi dalam Pendidikan

Islam menunjukkan, stratifikasi dan defrensiasi sosial merupakan proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Fenomena ini terjadi, karena manusi merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain, sehingga selalu berupaya untuk melakukan kontak (hubungan) dengan yang lain, dilanjutkan dengan berkomunikasi. Proses ini dinamakan interaksi. Karena masing-masing individu memiliki ide, gagasan, bakat dan minat yang bisa jadi berbeda, sehingga ketika menjalin interaksi ada ide dan gagasan yang disebarkan (difusi) dan saling menyebarkan, terjadilah kemudian asimilasi, bahkan akulturasi. Interaksi tersebut membentuk berbagai kelompok (bisa juga akhirnya mewujudkan menjadi organisasi, institusi, bahkan suku, bangsa dan negara) dengan kedudukan dan status yang berbeda-beda. Pembedaan bisa secara vertikal, yang biasanya disebut dengan stratifikasi sosial, bisa juga secara horizontal yani deferensiasi.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَايَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S. Al Hujurat: 13).

Quran Surah al Hujurat ayat 13 ini dengan tegas Allah menyampaikan, bahwa penciptaan manusia dengan berbeda-beda suku, bangsa, ras, dengan tujuan agar mereka saling mengenal, dan juga agar manusia menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Allah telah memberikan contoh ada laki ada perempuan, ada siang ada malam, semua contoh itu bukti bahwa kemajemukan dan keragaman terdapat dalam kehidupan, berdampingan antara satu sama lain.

Stratifikasi sosial dan deferensiasi sosial tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga dalam institusi Pendidikan (formal, informal dan non formal). Berbagai jenis dan jenjang Pendidikan yang

memiliki karakteristik berbeda, secara otomatis juga menggambarkan siswa yang berasal dari status sosial yang berbeda, baik secara vertical maupun horizontal. Begitu juga jaminan kesejahteraan bagi para guru dan pegawai di setiap lembaga Pendidikan juga berbeda, mencerminkan mereka memiliki status sosial yang berbeda, gaya hidupnya juga berbeda.

Islam memandang deferensiasi sosial maupun stratifikasi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maupun lembaga Pendidikan, dipandang sebagai sesuatu yang alami, diharapkan bisa saling melengkapi dan dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kesatuan, integrasi, bukan konflik. Proses-proses penyatuan bisa diwujudkan melalui Pendidikan, berupa penyadaran diri, saling membutuhkan dan harus saling melengkapi, agar kehidupannya bisa lebih eksis. Hidup bisa eksis bila individu secara sosial bermanfaat kepada yang lain, karena itu Pendidikan tidak sekedar membentuk peserta didik yang berkepribadian utuh secara individu, tetapi juga berkepribadian sosial, yakni bertaqwa. Bersedia untuk membantu orang lain, sholeh secara individu dan sholeh secara sosial. Kepribadian inilah yang bisa mewujudkan kehidupan yang harmonis, berketraman, berkeadilan dan berkemakmuran.

G. Kesimpulan

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa kepada yang belum dewasa agar menjadi dewasa. Melalui Pendidikan kepribadian bisa terbentuk, pengetahuan bisa lebih mendalam dan ketrampilan bisa dimiliki, sehingga menjadikan manusia lebih sempurna. Melalui Pendidikan bisa menjadikan seseorang mengalami mobilitas sosial, baik vertical (stratifikasi sosial), maupun horizontal (defereensiasi sosial). Pendidikan mempunyai tugas mengintegrasikan berbagai perbedaan tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan yang bersedia saling melengkapi dan membantu, sehingga mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

F. Daftar Bacaan

1. Apriliana, Novi Indah Kurnia Sari. (2017). *Pendidikan dan Terbentuknya Stratifikasi dan Diferensiasi Sosial*.
<http://anaktarbiyahmpi.blogspot.com/2017/09/pendidikan-dan-terbentuknya.html> (diakses tanggal 10 Maret 2022)
2. Arinda, Rizqi Nur. (2021). *Konsep Pendidikan Islam dan Stratifikasi Sosial serta Hubungannya*.
<https://www.kompasiana.com/rizqinurarinda2155/61658fdc01019034b0340492/hubungan-pendidikan-islam-dengan-stratifikasi-sosial> (diakses tanggal 10 Maret 2022)

3. Dewi, Rinita Rosalinda. (2019). *Pendidikan dan Mobilitas Sosial*.
<http://rinitarosalinda.blogspot.com/2019/06/pendidikan-dan-mobilitas-sosial.html> (diakses tanggal 10 Maret 2022)
4. Heryansyah, Tedy Rizkha. (2017). *Pengertian, Ciri-ciri, dan Jenis-jenis Konsep Diferensiasi Sosial*.
<https://www.ruangguru.com/blog/konsep-diferensiasi-sosial-pengertian-ciri-ciri-dan-jenis-jenis> (diakses tanggal 10 Maret 2022)
5. Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Bagong. (2024). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kharisma Putra Utama,194
6. Jalal, Abdul Fattah. (2001). *Asas-Asas Sosiologi Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.
7. Maksum, Ali. 2013. *Sosiologi Pendidikan*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/95747805.pdf>
8. Nanda, Ardi. (2011). *Seleksi Sosial Dunia Pendidikan*.
<https://news.okezone.com/read/2011/05/02/95/452121/seleksi-sosial-dunia-pendidikan> (diakses tanggal 10 Maret 2022)
9. Nasr, Seyyed Hossein. (2003). “*The Heart of Islam*”. Diterjemahkan oleh Nurasia Faqih Sutan Harahap. Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan. Bandung; Mizan.
10. Nasution, S. (2009), *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

11. Najibulloh. (2019). *Pendidikan Islam, Reproduksi Sosial Budaya*.
<https://www.kompasiana.com/najibulloh/5db39fb7097f364c4e6dd8a2/pendidikan-islam-sebagai-reproduksi-sosial-budaya-dan-mekanisme-deferensi-sosial?page=all#section2>
 (diakses tanggal 10 Maret 2022)
12. Wahyu, Ramdani. (2007), *Proses Terjadinya Stratifikasi Sosial ,ISD (Ilmu Sosial Dasar)*, Bandung : Pustaka Setia, 188
13. Faisal, Sanapiah. *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
14. Seknun & Yusuf, Muh. (2015). “Pendidikan Sebagai Media Mobilitas Sosial”. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1), 1 – 11.
15. Sunarti, Suhardi Sri. (2009). *Sosiologi 2 untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,5
16. Tabi'in. (2019). *Strategi Diferensiasi Pendidikan Islam (Studi Kasus Kafila Internasional Islamic School Jakarta)*. (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46488/1/TABIIN-FITK.pdf>
17. Tholib, Ahmad, Zamrotul Maghfiroh, Nur Aini, dan Siti Alfiah. (2013). *Hubungan Pendidikan dan Terbentuknya Deferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial*.
<http://unipdupaib2012.blogspot.com/2014/10/h>

[ubungan-pendidikan-dan-terbentuknya.html](#)

(diakses tanggal 10 Maret 2022)

Bab 8

Pendidikan, Industrialisasi, Teknologi, Modernitas Gaya Hidup dan Pengembangan Ekonomi di Masyarakat

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Pengertian pendidikan, industrialisasi dan teknologi
2. Keterkaitan antara industrialisasi, teknologi dan pendidikan
3. Keterkaitan gaya hidup dan Pendidikan
4. Pendidikan sebagai Investasi Human Capital
5. Keterkaitan antara pendidikan dan terbentuknya stratifikasi dan differensiasi social ekonomi

B. Pengertian pendidikan, industrialisasi dan teknologi

Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran, membentuk sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara utuh, untuk menjadi lebih dewasa.. Pendidikan dilakukan secara terus-menerus, oleh setiap generasi sehingga menjadi sebuah kebiasaan kolektif, berupa pengajaran, pelatihan dan penelitian secara berkelanjutan. Secara Etimologi pendidikan diartikan sebagai proses

mengembangkan kemampuan pribadi dan kekuatan individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Pendidikan diartikan sebagai menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka bisa menjadi pribadi manusia dan sebagai anggota masyarakat, sehingga bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat dari agraris menjadi industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi merupakan bagian dari proses modernisasi, dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi sangat erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan

atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani) *techno* artinya 'keahlian' dan *logia* artinya 'pengetahuan'. Secara umum, teknologi diartikan sebagai penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia, atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia.

C. Hubungan Industrialisasi, Teknologi dan Pendidikan

1. Sejarah perkembangan industrialisasi

Secara historis, industrialisasi sudah berlangsung sejak lama, secara bertahap, kemudian dikenal dengan revolusi industri. Revolusi industri adalah masa dimana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri bermula dari revolusi industri 1.0, dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0, 3.0, 4.0 dan saat ini memasuki era *societey* 5.0.

Revolusi industri 1.0. yang terjadi pada abad ke 18. Pada saat itu, sistem sosial masyarakat mulai berubah. Pada awalnya, untuk melakukan berbagai pekerjaan, manusia mengandalkan tenaganya sendiri dan dukungan dari alam. Akan tetapi, hal tersebut tidak efisien, karena manusia memiliki tenaga yang terbatas, sedangkan alam tidak dapat terus menerus mendukung. Pada tahun 1766, James Watt dengan penemuannya berupa mesin

uap mengubah sejarah. Penemuan mesin uap tersebut membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Penemuan mesin uap abad ke-18, dipakai untuk proses produksi barang. Inggris memanfaatkan mesin uap untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil dengan menjadikannya sebagai alat tenun mekanis. Sekaligus akhir untuk peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga hewan dan manusia.

Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke 20 ditandai dengan penemuan tenaga Listrik di awal abad ke-20. Mobil mulai diproduksi secara massal pada akhir tahun 1800-an. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan beralihnya tenaga uap menjadi tenaga listrik. Tenaga manusia yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Meskipun begitu, terdapat kendala yang membuat menghambat proses produksi di pabrik, yakni masalah transportasi. Dampak dari revolusi industri 2.0 mempermudah dalam memproduksi mobil, awalnya proses perakitan sebuah mobil membutuhkan banyak orang, kemudian cukup seorang ahli. Seorang ahli yang terlatih bisa merakit mobil dengan mudah, karena dibantu oleh mesin yang semakin canggih.

Revolusi industri 3.0 terjadi pada akhir abad 20, sebagai abad informasi, ditandai dengan penemuan Komputer dan Robot. Bila revolusi

industri 1.0 dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 dipicu dengan tenaga pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Dampak dari revolusi industri 3.0 bisa mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, dampak negatifnya ialah mesin-mesin otomatis mulai menggantikan tenaga manusia, tenaga manusia tidak terlalu banyak diperlukan, yang dibutuhkan yang memiliki skill lebih, sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja secara massal.

Revolusi industri 4.0 terjadi pada abad ke 21 di Jerman. Abad ini merupakan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang begitu pesat. Penemuan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan robotic. Keempatnya merupakan satu kesatuan kerja otomatisasi produksi. Peran manusia telah banyak tergantikan. mesin-mesin mulai berkembang dan menciptakan komputer otomatis tanpa manusia sebagai penggerakannya.

Terakhir, sejak tahun 2015 Jepang memperkenalkan era society 5.0. kemudian dimulai 21 Juli 2019, Sebuah gambaran suatu masyarakat yang cerdas, ditandai dengan optimalisasi Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan robotic untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Pada era society 5.0 ini, masyarakat benar-benar cerdas, tidak lagi dikuasai teknologi, namun justru bisa menciptakan teknologi untuk membantu memenuhi berbagai macam tugas dan kebutuhannya dengan mudah, efektif dan efisien.

2. Pengaruh Industrialisasi Terhadap Pendidikan

Industrialisasi mempunyai pengaruh besar terhadap Pendidikan. Seiring berjalannya waktu, zaman mulai berubah. Banyak hal menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Industrialisasi memberikan banyak dampak merubah berbagai macam pranata sosial, termasuk pendidikan. Industrialisasi mempengaruhi perubahan bahkan perkembangan berbagai aspek dalam Pendidikan, terkait kurikulum, strategi dan model pembelajaran, bahkan pemanfaatan berbagai teknologi sebagai media dan sumber belajar, serta system evaluasi pembelajaran. Industrialisasi juga mempengaruhi perubahan pola pikir, sikap dan perilaku manusia, dari yang bersifat idealis menjadi praktis, efisien dan efektif.

Era industrialisasi mendorong terjadinya persaingan yang ketat, sehingga mempengaruhi para lulusan Pendidikan dalam menjalankan berbagai sektor pekerjaan. Persaingan sangat ketat, sering terjadi permainan yang tidak sehat, sehingga moralitas yang sudah tertanam selama Pendidikan bisa saja tergerus oleh permainan tersebut. Untuk

itu Pendidikan harus dapat membekali moralitas lebih kuat lagi, agar kelak lulusannya bisa lebih eksis, kuat dari semua terpaan dalam menjalankan pekerjaannya, profesinya.

Francois Bacon menyatakan, bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. sedangkan kekuasaan menurut Hubber merupakan sarana dari seluruh kegiatan manusia. Melalui Pendidikan diharapkan ilmu pengetahuan yang ditanamkan kepada peserta didik bisa mengantarkan kekuasaan yang lebih mulia dan beradap. Kekuasaan yang diraih mampu meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan bangsa, menuju tercapainya cita-cita pembangunan nasional yang ideal, yaitu manusia-manusia Pancasila yang mempunyai sikap berkeadilan sosial. memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera, memiliki keseimbangan antara aspek materiil maupun aspek spirituilnya. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan oleh para penguasa, tidak saja berorientasi pada sisi materiil. akan tetapi aspek spirituil juga menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan

Revolusi industri 4.0, mendorong proses Pendidikan dan pembelajaran lebih memanfaatkan teknologi digital (cyber system) (Surani, 2019). Informasi dan pengetahuan lebih mudah untuk didapatkan dengan cara penggunaan internet. Peran guru sebagai pengajar dan penyedia ilmu

mulai memudar serta fungsi buku mulai tergantikan. Dengan adanya internet informasi lebih cepat diakses dan lebih lengkap, E-book lebih praktis untuk menggantikan buku.

Rekontruksi makna literasi yang awalnya hanya sekadar tulis, baca dan matematika kini harus ditingkatkan menjadi literasi data, teknologi dan sumber daya manusia. Literasi data adalah kompetensi untuk analisa, membaca dan menggunakan informasi dari data dalam dunia digital. Literasi teknologi adalah kompetensi untuk memahami teknologi dan sistem mekanik dalam dunia kerja. Terakhir literasi sumber daya manusia yakni kompetensi berinteraksi dengan berkarakter, baik, dan tidak kaku.

Rekonstruksi kurikulum harus dilakukan, diubah orientasinya menjadi pengembangan kurikulum yang menekankan bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM). Memfasilitasi siswa dalam dimensi pedagogik, berpikir kreatif dan kritis, kolaborasi, dan pengembangan transversal skill dan soft skill. Selain itu, reorientasi kurikulum harus fokus kepada kewirausahaan, pembelajaran berbasis TIK, magang, big data, komputerisasi, dan *internet of things* untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Strategi pembelajaran yang bisa diterapkan lembaga pendidikan adalah kolaborasi, sekolah

terintegrasi dengan masyarakat, meaningful learning dan pembelajaran berpusat kepada siswa.

Banyak kemudahan yang diperoleh dengan adanya inovasi teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Dalam dunia pendidikan akses informasi dan pengetahuan baru lebih termudahkan, jarak bukan lagi penentu karena dalam mencari ilmu dapat dilakukan secara online dan proses belajar mengajar lebih terbantu dengan adanya teknologi. Akan tetapi, industrialisasi juga membawa dampak negatif. Peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat. Jiwa sosial menjadi menurun karena manusia tergantikan oleh mesin. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan zaman, dalam penggunaan teknologi perlu sikap yang bijak agar teknologi bermanfaat dan tidak berdampak buruk pada dunia Pendidikan. Pola pendidikan harus terus diperbarui. Dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, motivasi saja tidak cukup harus ada wujud konkret dan usaha yang keras untuk menyesuaikan pola pendidikan di era digitalisasi. Tantangan pasti akan dihadapi dalam setiap transisi inovasi dan teknologi. Pentingnya literasi serta optimalisasi dalam menggunakan teknologi serta penggunaan

teknologi secara bijaksana akan memberikan dampak positif dalam perkembangan pendidikan.

Ahli teori pendidikan sering menyebut Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegritaskan teknologi cyber baik secara fisik maupun non fisik dalam pembelajaran. Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 adalah fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui pemanfaatan internet of things (IOT). Di sisi lain pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran.

Akan tetapi hal ini tidak luput dari tantangan bagi para pengajar untuk mengimplemen-tasikannya. Menurut Kompasiana (2019), setidaknya ada 4 kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pengajar, yakni: *Pertama* keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Merupakan kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat dielaborasi dan memunculkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Pengajar diharapkan mampu meramu pembelajaran dan mengekspor kompetensi ini kepada peserta didik. *Kedua* Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini tidak luput dari kemampuan

berbasis teknologi informasi, sehingga pengajar dapat menerapkan kolaborasi dalam proses pengajaran. *Ketiga*, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Diharapkan ide-ide baru dapat diterapkan pengajar dalam proses pembelajaran sehingga memacu siswa untuk beripikir kreatif dan inovatif. Misalnya dalam mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. *Keempat*, literasi teknologi dan informasi. Pengajar diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi guna menunjang proses belajar mengajar.

Bagi perguruan tinggi, Revolusi Industri 4.0 diharapkan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan kelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut interaksi pembelajaran dilakukan melalui blended learning (melalui kolaborasi), project based-learning (melalui publikasi), flipped classroom (melalui interaksi publik dan interaksi digital).

Pada skala makro, proses perubahan secara besar terjadi Indonesia, yakni industrialisasi dan kapitalisme global, mengubah tatanan sosial dan tradisi pendidikan pra industrial, proto-industrial, industri-awal dan memaksa penggantian dengan tatanan sosial dan tradisi baru yang semakin industrial dan global. Proses ini bukan baru terjadi

sekarang. Pasar kapitalisme global ditandai oleh kebijakan ekspor non-migas, swastanisasi, dan demiliterisasi sudah lama terjadi. Pada mulanya proses ini berlangsung gencar dalam bidang perdagangan. Tetapi kemudian berimbas ke bidang-bidang lain dalam tempo dan irama yang berbeda-beda, terhadap politik, seni, budaya, bahkan Pendidikan

Pada era society 5.0, harapannya masyarakat menjadi lebih cerdas, tidak dikuasai perkembangan teknologi, justru bisa menciptakan teknologi sesuai kebutuhan masing-masing individu maupun kelompok. Ini berarti sejak dini Pendidikan harus direkonstruksi, bisa menjamin bagi terwujudnya peserta didik yang cerdas, trampil dalam bidang teknologi, beradab, bermoral, berkemanusiaan dan berkeadilan.

3. Hubungan teknologi dengan Pendidikan

Teknologi merupakan hasil dari industrialisasi. Dalam sejarahnya setiap revolusi industri menghasilkan teknologi tertentu yang memudahkan pekerjaan manusia. Pada revolusi industri pertama menghasilkan mesin uap, revolusi industri kedua menghasilkan listrik dan transportasi, revolusi industri ketiga menghasilkan komputer dan mesin otomatis dan revolusi industri ke empat menghasilkan digitalisasi yang begitu pesat, sedangkan pada era society masyarakatnya

yang diharapkan cerdas dalam memproduksi dan memanfaatkan teknologi.

Teknologi mempermudah dalam melakukan aktivitas pendidikan. Dalam proses belajar mengajar informasi dapat didapatkan dengan mudah karena digitalisasi yang berkembang pesat. Adanya komputer, laptop dan ponsel juga berperan dalam aktivitas pendidikan. Saat ini, bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara online karena perkembangan teknologi. Selain itu, mobilitas pun dimudahkan karena kemajuan transportasi sehingga mobilitas ke tempat berlangsungnya aktivitas pendidikan lebih mudah.

Menurut Rosenberg (2001: 8), dengan berkembangnya penggunaan TIK ada beberapa pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu; Dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, Dari kertas ke “on line” atau saluran, Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi juga bermanfaat untuk pendidikan (Suripto dkk, 2014: 3), antara lain: a. Munculnya Media Massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat Pendidikan. Seperti jaringan Internet, Lab. Komputer Sekolah dan lain-lain. Dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah satusatunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap Informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses

materi pelajaran langsung dari Internet. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa, mengarahkan dan memantau jalannya proses pembelajaran, agar siswa tidak salah arah dalam memanfaatkan media Informasi dan komunikasi.

b. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan Teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan Teknologi bisa dibuat abstrak, dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa.

c. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos Internet dan lainlain.

d. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan Teknologi. Dulu, ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan dihitung secara manual. Namun setelah adanya perkembangan IPTEK, semua tugasnya yang dulunya dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang

cukup lama, menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan menggunakan media teknologi, seperti Komputer, yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program yang telah di installkan. e. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dalam bidang pendidikan tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan, salah satu contoh, yaitu; Penggandaan soal Ujian, dengan adanya mesin foto copy, untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya kalau dilakukan secara manual. Tapi dengan perkembangan teknologi semuanya itu dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat.

Khususnya dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan IPTEK, yaitu: 1) Pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. 2) Dapat menjelaskan sesuatu yang sulit dan kompleks. 3) Mempercepat proses yang lama. 4) Menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. 5) Menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau diluar jangkauan.

Disamping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK, juga ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK dalam proses pendidikan, (Sudibyo, 2011:182) antara lain: 1. E-learning dapat

menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena system pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika para peserta didik menurun drastis, menjadi lebih individualis, tidak lagi berjiwa sosial.

2. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan peserta didik tidak benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi, game online. Bahkan dapat terkena *cyber-relational addiction* ialah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet (seperti melalui *chat room* dan *virtual affairs*) sampai kehilangan kontak dengan dunia nyata.

3. Peserta didik bisa terkena *information overload*, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada. Akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut.

4. Peserta didik menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini

bisa terjadi ketika peserta didik tidak memiliki sikap skeptis serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Apalagi dalam konteks dunia maya (internet) mereka secara tidak langsung telah masuk di dalam dunia yang *over free*. Untuk itu harus ada pemfilter dan pembatasan informasi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah perhatian dari orang tua juga sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai tentang sebuah norma agama sebagai landasan hidup. 5. Tindakan kriminal (Cyber Crime). Di dalam dunia pendidikan hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau asset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan (dokumen mengenai ujian akhir atau negara) dengan media internet. 6. Menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi peserta didik maupun pendidik. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning. Di mana system pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pendidik, maka bisa jadi peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran dan hasilnya juga tidak maksimal (Asmani, 2011: 149).

D. Modernitas Gaya Hidup dalam Pendidikan dan Konsep Islam

Modernitas ialah sesuatu yang bersifat modern. Modernitas juga diartikan sebagai suatu fase histori

zaman modern dan campuran nilai-nilai budaya tertentu yang muncul di Eropa pada abad pertengahan lalu menyebar luas ke seluruh dunia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Modernitas>). Gaya hidup merupakan suatu pola hidup seseorang tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap paling penting bagi diri mereka dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pandangan mereka tentang diri mereka ataupun tentang dunia luar. Modernitas gaya hidup meruoakan suatu pola hidup seseorang secara modern, terkait efisiensi dan efektifitas pemanfaatan waktu dan biaya, pilihan-pilihan yang mereka anggap paling penting bagi diri mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta pandangan mereka tentang diri mereka ataupun tentang dunia luar secara bebas, rasional dan ilmiah.

Modernitas sering dikaitkan dengan perubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi. Hal ini memengaruhi gaya hidup individu, yang kini cenderung lebih dinamis dan berorientasi pada konsumerisme. Dalam konteks ini, individu lebih terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan cara hidup baru yang dipengaruhi oleh teknologi dan informasi. Keterkaitan antara modernitas, gaya hidup, dan pendidikan menciptakan siklus yang saling memengaruhi. Modernitas membawa perubahan yang memengaruhi gaya hidup, sedangkan pendidikan berperan penting

dalam membentuk individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut

Islam tidak menolak kemajuan dan modernitas. Namun, modernitas harus diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, modernitas diharapkan dapat memperkuat moralitas, etika, dan keadilan sosial. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah agar memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan masyarakat harus disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi kepercayaan, peribadatan dan pergaulan antara manusia . Dalam kehidupan masyarakat modern, Islam telah memberikan kebebasan tetapi tidak di biarkan liar, nilai-nilai harga diri dan kehormatan yang harus di junjung tinggi dan tidak dapat di rendahkan oleh siapapun.

Pendidikan Islam menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun manusia yang berakhlak baik, berilmu pengetahuan, dan berperan aktif dalam masyarakat . Pandangan ini memiliki akar dalam ajaran agama Islam yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Pendidikan dalam Islam bukanlah sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan pengembangan karakter dan kepribadian yang kuat. Konsep manusia dalam pandangan Islam menganggap bahwa setiap

individu memiliki potensi yang unik dan diberikan tanggung jawab untuk menjalankan amanah dari Allah SWT. Pendidikan menjadi alat untuk menggali dan mengoptimalkan potensi tersebut

E. Pendidikan sebagai Investasi Human Capital

Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter peserta didik, actor dan pelaksana pembangunan masa depan, karena itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua unsur, tidak hanya sekolah, tetapi juga orang tua, masyarakat dan pemerintah. Kesungguhan mengelola pendidikan berarti bersungguh-sungguh dalam berinvestasi, yang hasilnya bisa dirasakan masa mendatang. Kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan kualitas proses pendidikannya. Kualitas sumberdaya manusia inilah yang membawa kemajuan bangsa, kemajuan yang bermartabat dan beradab.

Pentingnya pendidikan bagi para peserta didik, harus mulai disadari oleh orang tua, bahwa cara kerja dunia ini selalu berubah dengan cara yang unik. Jika saat ini melihat seseorang yang putus sekolah dan langsung bekerja terlihat lebih baik karena dapat menghasilkan uang. Maka, bila sepuluh tahun lagi terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari orang tersebut. Hal ini terjadi karena sudah memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna di

masa depan. Dengan demikian, secara tidak langsung hal tersebut juga membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat.

Theodore Schultz (1961) dalam pidatonya yang berjudul *Investment in Human Capital* di hadapan The American Economic Association menyampaikan, bahwa awalnya pendidikan sebagai bentuk konsumsi semata, tetapi setelah diperolehnya pengetahuan dan keterampilan, maka hal tersebut akan menjadi sebuah investasi bagi orang yang menjalaninya.

Teori pendidikan sebagai investasi human capital menekankan bahwa pendidikan adalah salah satu instrumen terpenting untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom seperti Gary S. Becker dan Theodore Schultz. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori ini:

1. Peningkatan produktivitas. Pendidikan formal dianggap sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam meningkatkan produktivitas mereka.
2. Pertumbuhan Ekonomi. Investasi dalam pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang berinvestasi dalam pendidikan cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis,

tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Ini penting untuk inovasi dan adaptasi dalam ekonomi yang terus berubah.

4. Manfaat sosial. Selain manfaat ekonomi, pendidikan juga memiliki dampak yang positif pada aspek sosial, seperti peningkatan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif, juga diyakini menjadi suatu investasi modal bagi manusia dan menjadikan pendidikan sebagai “Leading Sector” atau salah satu sektor utama bagi keberhasilan suatu negara yang tidak kalah dengan sektor lainnya. Sehingga keberhasilan investasi pendidikan akan berkorelasi secara positif dalam menciptakan pembangunan ekonomi kearah yang lebih baik.

Keputusan berinvestasi di dunia pendidikan tidak bisa dilakukan setengah hati, yang penting jalan. Diperlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan hasilnya, oleh karena itu dalam hal ini perlu diperhitungkan rate of return (manfaatnya) dari investasi dengan modal manusia. Bila seseorang ingin berinvestasi maka perlu diperhitungkan juga analisa biaya manfaat (cost benefit analysis). Biaya yang dimaksud adalah biaya peluang (opportunity cost) dari orang yang bersekolah dan yang tidak bersekolah, serta biaya manfaatnya adalah

penghasilan yang akan diterima setelah masa sekolah selesai.

Lamanya pendidikan yang ditempuh akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar, meskipun pada awalnya seseorang yang memilih melanjutkan pendidikan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Namun, pada akhirnya orang tersebut akan mendapatkan manfaat ekonomi kelak di masa kerjanya.

Tujuan dari proses pendidikan bukanlah untuk menjadikan peserta didik kaya secara pribadi, atau dapat dengan mudah mencari pekerjaan. Namun untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

F. Pendidikan dan terbentuknya Stratifikasi dan Differensiasi sosial Ekonomi

Pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan peserta didik yang dilakukan secara terencana, menerapkan sistem tertentu. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya, bakat dan minatnya, memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan lebih matang. Pendidikan memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya stratifikasi sosial dan differensiasi social ekonomi. Karenaa melalui

Pendidikan berbagai kecakapan memiliki peserta didik, profesi yang berbeda, sehingga menentukan status sosial ekonomi berbeda pula.

Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki). Sedangkan Max Weber berpendapat bahwa stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat strata kelas, yakni kelas rendah, menengah dan atas. Pendidikan memiliki kontribusi besar terhadap terjadi dan terbentuknya stratifikasi sosial. Masing-masing kelas biasanya memiliki gaya hidup yang berbeda, sesuai kepribadian dan finansial yang dimiliki.

Diferensiasi sosial merupakan akibat dari terjadinya perubahan dari hasil yang muncul bersamaan dengan terbentuknya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ditinjau dari adanya kelas secara vertikal, diferensiasi sosial dinilai dengan adanya perbedaan secara horizontal. Stratifikasi sosial ditandai dengan adanya ketimpangan sosial ekonomi, kedudukan sosial, jabatan, pendidikan, kekuasaan, dan sebagainya. Sedangkan diferensiasi sosial ditandai dengan perbedaan agama, ras (pengelompokan individu berdasarkan ciri fisik), etnis (pengelompokan individu berdasarkan ciri persamaan

kebudayaan, seperti bahasa, adat sejarah, dan wilayah), atau perbedaan jenis kelamin.

Sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan tempat berlangsungnya proses Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki berbagai macam strata social ekonom, bahkan profesi orang tuanya beraneka ragam, Melalui proses Pendidikan, peserta didik diajarkan tentang berbagai pengetahuan, dilatih dengan berbagai ketrampilan, dibentuk sikap dan kepribadiannya dengan baik dan toleran terhadap sesama, sehingga bisa bertindak secara bijak terhadap berbagai macam perbedaan di sekitarnya, Setelah lulus dari Pendidikan bisa jadi peserta didik mengalami mobilitas social ekonomi naik, profesinya juga berbeda, namun dimanapun berada bisa menyikapi berbagai perbedaan secara tepat dan solutif.

G. Pendidikan di era Industrialisasi menurut konsep Islam

Tantangan pendidikan di era industri adalah penanaman nilai-nilai moral seiring dengan berkembangnya industrialisasi. Pendidikan dituntut bisa membekali peserta didik dengan nilai-nilai luhur, salah satunya nilai keislaman. Revolusi Industri tidak hanya mengubah tatanan social, budaya, ekonomi dan pola kehidupan masyarakat, melainkan juga mendorong munculnya berbagai gagasan-gagasan baru dalam segi keagamaan (religiusitas), spiritualitas, serta nilai-nilai sosial kehidupan. Islam sebagai agama

Rahmatan lil alamin (religiusitas) harus bisa memberikan solusi dengan menjawab berbagai tantangan perubahan zaman. Semuanya bisa dilakukan melalui proses Pendidikan.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan proses industrialisasi. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu tidak hanya dilatih dengan keterampilan teknis, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai etika dan moral, sehingga bisa bersikap dan bertindak secara bijak, mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang terampil, tetapi juga yang sholih secara pribadi dan social, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di era industrialisasi, menyiapkan tenaga tenaga terampil sesuai tuntutan industri. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Aqidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi IPTEK. Paradigma ini yang harus dikembangkan oleh kaum muslim saat ini. Banyak pendidikan yang berlangsung dan segala kemajuan teknologi pendidikan yang menghindari kebenaran aqidah Islam, layaknya pendidikan berbasis Sekuler. menjadikan Al-Quran dan Hadis (sebagai pedoman hidup kedua) sebagai standar dalam

IPTEK. Standar yang dimaksud tidak melakukan penolakan dan menimbulkan pertentangan antara ilmu dan Al-Qur'an.

2. Syariah Islam sebagai standar pemanfaatan IPTEK
Standar syariah yang diberikan untuk memanfaatkan IPTEK adalah mengenai halal haram. IPTEK yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan adalah Iptek yang telah dihalalkan syariah. Sedangkan Iptek tidak boleh dimanfaatkan apabila diharamkan oleh syariah.

Islam berperan untuk mengisi nilai tentang metode atau cara bagaimana teknologipendidikan dapat berlangsung dengan baik, baik di lembaga formal, informal, maupun nonformal dalam semangat perkembangan teknologi pendidikan. Saat ini Islam menjadi standarisasi ilmu pengetahuan, karena Islam berdasarkan pada pemilik segala ilmu yang ilmu-Nya mencakup segala sesuatu.

H. Kesimpulan

Pendidikan, industrialisasi, teknologi, dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki jaringan kompleks yang mempengaruhi kemajuan masyarakat secara signifikan. Pendidikan berfungsi sebagai wahana untuk membekali individu (human kapital) dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan lingkungan kerja. Sedangkan industrialisasi yang didorong oleh

teknologi canggih, hanya bisa meningkatkan produksi, efisiensi waktu, biaya dan tenaga, bila dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik yang professional dan berakhlaqul karimah. Ini berarti penanaman nilai-nilai Islam dalam pembentukan tenaga terdidik yang professional sangat diperlukan.

Dari perspektif sosiologi, berbagai teori menjelaskan bagaimana pendidikan dan industrialisasi saling berhubungan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekankan pentingnya berinvestasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berdedikasi tinggi dan berakhlaqul Karimah, sehingga bisa menjamin produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara cepat, merata dan berkeadilan.

Dalam konteks Islam, pendidikan dipandang penting untuk pengembangan individu dan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi, mewujudkan keadilan dan etika dalam semua aspek kehidupan. Teknologi mempercepat inovasi dan efisiensi produksi, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pendidikan, industri, teknologi, dan pembangunan ekonomi baik dalam perspektif sosiologi maupun Islam sangat penting, untuk membangun masyarakat maju, adil, dan sejahtera.

I. Daftar Bacaan

1. Afrianto. (2018). Being a professional teacher in the era of industrial revolution 4.0: opportunities, challenges and strategies for innovative classroom practices.
2. Arifin, I. (2018). “Nilai Nilai Humanistik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Globalisasi Dan Revolusi Industri 4”. *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Pendidikan & Manajemen Pendidikan*, Vol. 0, pp. 1–9. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/semappfip/article/view/6071>
3. Anggelika Permata Sari, C. M. *Pendidikan dan Modernisasi*. 1-11.
4. Apriliana. (2017). *Kaitan antara Pendidikan dan Terbentuknya Stratifikasi dan Deferensiasi Sosial*, . 1-12.
5. Asry, L. (2019). Modernisasi dalam perspektif Islam. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 10(2).
6. English Language Teaching and Research, 2(1), 3. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/eltar/article/view/102675>
7. El Hafiz, S., & Himawan, K. K. (2020). Tantangan melakukan kajian literatur psikologi di Indonesia: Masalah mendasar dan solusinya. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 8, 6–17. <https://doi.org/10.24854/jpu125>
8. Firman, H. (2019). *Pendidikan Kimia di Era Industri 4.0*.pdf. Keynote Seminar Nasional, 1–7.

9. Hasanah, Winda. (tt). *Pengaruh Literasi Ekonomi, Gaya Hidup, Konformitas dan Modernitas terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung*, 41-47.
10. <https://id.wikipedia.org/wiki/Modernitas>
11. Husain, W. (2009). Modernisasi dan Gaya Hidup. *Al Tajdid*, 1(2)
12. Jamun, Y. M. (2018). Dampak teknologi terhadap Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 10, No. 1, 48-52.
13. Khomsinnudin, K., Pangeran, G. B., Tamyiz, A., Wulandari, C. E., & Firdaus, F. A. (2024). Modernitas dan Lokalitas: Membangun Pendidikan Islam Berkelanjutan. *Journal of Education Research*, 5(4), 4418–4428. Retrieved from <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1523>
14. Kholis, N. (1996). Industrialisasi dan pendidikan agama masyarakat industri. *JPI: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 29-44.
15. Maksum, Ali. (2013). *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN Sunan Ampel Surabaya.
16. Maunah, Binti. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Tulungagung: Media Akademi
17. Mubin Noho, I. I. (t.thn.). Konsep Sosiologi Pendidikan (Analisis Makro, Meso dan Mikro Sosiologi Pendidikan). *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Keislaman*, Vol. 11 No. 1, 65-79.

18. Mukmin, T. (2018). “Hubungan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial”. *el-Ghiroh*. Vol. XV, No. 02, 29-44.
19. Radiansyah, D. (2020). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam (Studi Kasus di Kampung Citeureup Desa Sukapada). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3 (2), 76–103.
20. Rahmat, Abdul. *Sosiologi Pendidikan*. Ideas Publishing.
21. Risnawati, dan Sri Umi Mintarti W, Cipto Wardoyo. (2018). “Pengaruh Pendidikan Ekonomi Keluarga”. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 3, No. 4, 430-436.
22. Sanapiah, F. (1980). *Pendidikan Dan Perubahan Sosial*. Malang: Usaha Nasional.
23. Sanapiah, F. (1980). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
24. Sapada, A. O., & Arsyam, M. (2020). *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menurut Pandangan Islam*.
25. Yasyakur, M. (2014). Konsep Ilmu (Keislaman) Al-Ghazali Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Masa Kini. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Masa Kini*, 3, 611-34.
26. Unwanullah, A. (2015). Industrialisasi dan tantangannya pada Sektor Pendidikan. *Jurnal Economia*, Volume 11, No. 2, 107-117.

Bab 9

Ketimpangan Sosial dan Kaitannya dengan Sistem Pendidikan

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggali, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Menganalisis peran pendidikan dalam pengentasan kemiskinan.
2. Menjelaskan akar masalah ketimpangan sosial dan keterkaitannya dengan sistem pendidikan.
3. Menjelaskan pandangan islam terhadap ketimpangan sosial dan kaitannya dengan pendidikan.

B. Peran Pendidikan Dalam Mengentas Kemiskinan

Kemiskinan bukan lagi sekedar masalah kesenjangan pendapatan, tetapi lebih kompleks lagi menyangkut ketidakberdayaan, ketiadaan pengetahuan dan keterampilan dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (Alhumani, 2006), atau human capability (Sen, 2000). Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap

barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik kaum perempuan maupun laki-laki.

Pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan disebabkan sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, kemiskinan di Indonesia yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan - kebijakan untuk melakukan penurunan angka kemiskinan.

Menurut Amartya Sen, kemiskinan masih terus terjadi terutama di negara berkembang karena

kemerdekaan yang dibatasi. Kemerdekaan individu yang terjebak karena sistem politik menyebabkan rakyat tidak dapat menyuarakan penderitaannya. Rakyat banyak tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan apa yang diinginkan.

Pendidikan memiliki peran dalam mengentas kemiskinan, Ada empat indikator yang digunakan yaitu angka melek huruf (literacy rate), angka partisipasi sekolah (school enrollment ratio), rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan rasio murid laki-laki dan perempuan.

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, menjadi lebih produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan, menghilangkan masalah yang menghambat individu dalam bersosialisasi, kualitas hidupnya meningkat, dan kesejahteraan terwujud.

Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warganya, minimal Pendidikan dasar dan menengah. Pemerataan Pendidikan harus terus dilakukan, partisipasi Pendidikan terutama bagi kelompok masyarakat miskin, tidak mau sekolah atau drop out karena berbagai alasan, diantaranya ekonomi. Mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagi keluarga miskin,

satu sisi, pendidikan memang membutuhkan biaya yang relative besar sehinga bisa jadi tidak mampu membiayai anaknya. sisi lain anak-anak dibutuhkan untuk menopang ekonomi keluarga, disuruh bekerja, bila sekolah akan kehilangan sumber pendapatan.

Pendidikan dapat menjadi landasan kuat bagi dua pilar utama penanggulangan kemiskinan yaitu 1) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada kaum miskin, dan 2) pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dan harus ditopang dengan tenaga kerja terdidik, yang punya pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Pendidikan menjadi sarana paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena pendidikan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi setiap warga masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga terlepas dari kemiskina. Negara harus mampu menyediakan layanan pendidikan kepada setiap warganya secara merata dan adil. Jika tidak, akan menghadapi kesenjangan sosial yang membuat kehidupan masyarakat makin jauh dari sejahtera. Kehadiran pendidikan dalam mengentas kemiskinan bukan sekedar sebagai isu belaka namun secara langsung dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada padat saat ini. Kebijakan dan program konkret yang dapat diwujudkan adalah dengan memperluas

akses, meningkatkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga diharapkan dengan adanya program secara berkelanjutan dapat mengentaskan serta mengurangi kemiskinan secara bertahap.

Pendidikan juga merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua, dengan kualitas tertentu, maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada. Pemerintah telah mengeluarkan begitu banyak macam program salah satunya beasiswa, beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh perorangan yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Salah satunya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan memberikan keringanan beban bagi siswa. Tujuannya untuk menghilangkan beban bagi para siswa yang bersekolah, membantu memperoleh akses yang layak, mencegah putus sekolah, menjadikan siswa miskin lebih senang dalam belajar sehingga bisa berpartisipasi secara penuh dalam proses pembelajaran, tidak lagi dibebani ekonomi keluarga.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks, berdampak sangat besar terhadap berbagai bidang.

Banyak cara yang sudah ditempuh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya menggulirkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan siswa Miskin (BSM) dan pendidikan gratis. Selain itu, solusi lain yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan menyamaratakan pendidikan di semua wilayahn termasuk di daerah - daerah terpencil untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah juga melakukan dan mengawasi pelaksanaannya dengan baik serta menindak lanjuti bagi siapapun yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan program tersebut, tanpa memandang status jabatan, yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan.

C. Akar Permasalahan Ketimpangan dan Keterkaitannya Dengan Sistem Pendidikan

Ketimpangan sosial merupakan masalah kompleks, menjadi fenomena masyarakat yang bersifat global, terjadi di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Akar masalahnya, karena ketidakmerataan akses dan kualitas Pendidikan.

Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ketimpangan sosial merupakan ancaman keamanan nasional, sebab ketimpangan ini akan berakumulasi dan bersesuaian dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks, sehingga dapat

menjadi penghambat pembangunan negara (Rangga, 2009).

Berbagai ketimpangan social tersebut akan terselesaikan bila akses Pendidikan bisa diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, baik di perkotaan maupun perdesaan, Kawasan pinggiran, pertengahan maupun perdalaman yang tersebar di berbagai pulau Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kualitas Pendidikan juga harus merata di setiap jenis, jenjang dan jalur Pendidikan, dimanapun berada. Konsekwensinya, pemerintah harus menyediakan anggaran yang lebih, porposional setiap Lembaga Pendidikan, agar pemerataan kesempatan akses Pendidikan dan kualitas layanan Pendidikan dan pembelajaran bisa dinikmati oleh seluruh peserta didik, dimanapun keberadaanya di tanah air ini. Ini berarti Pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk menetapkan anggaran Pendidikan, Prosentasenya tidak cukup hanya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus lebih dari itu. Mengingat rasio jumlah anak Indonesia yang usia sekolah semakin tahun semakin meningkat bila dibandingkan dengan usia kerja, Anggaran tersebut tidak hanya untuk penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan para guru dan penyelenggaraan proses Pendidikan dan pembelajaran yang lebih berkualitas. Untuk mewujudkan itu semua tidak mudah, harus ada

kemauan keras dari pemerintah, dukungan yang kuat dari masyarakat dan orang tua, serta kesungguhan bagi para guru, siswa, kepala sekolah dan Yayasan penyelenggaraan Pendidikan.

Kenyataan di lapangan, hingga saat ini, pemerataan kesempatan akses dan kualitas Pendidikan dan pembelajaran belum benar-benar terwujud, diantara sebabnya karena politik anggaran pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada sector Pendidikan. Anggaran Pendidikan jauh lebih kecil dibandingkan pada sektor-sektor lain, misalnya ekonomi, politik, pembangunan infra struktur, dan lain-lain. Belum lagi kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan Pendidikan dan pembelajarannya yang selalu berubah-ubah, terutama kurikulum yang belum konsisten, sehingga membingungkan bagi para guru untuk menerapkan dalam proses pembelajaran. Korbannya tidak hanya guru, tetapi juga siswa yang belum tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pendidikan telah ditetapkan sebagai hak dasar setiap warga oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan secara merata dan maksimal sesuai dengan konstitusi, oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak Pendidikan tersebut. Berbagai masalah Pendidikan yang hingga saat ini masih terjadi antara lain kurangnya fokus pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang tersebar

sampai ke daerah-daerah terpencil, terluar, dan pedalaman yang berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia secara geografis terdiri atas pulau-pulau, setiap wilayah dipisahkan oleh perairan dan juga hutan-hutan. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, pemerintah harus mampu menyebarkan pembangunan secara merata baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan kepada seluruh warga. Tetapi saat ini, upaya untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pendidikan di setiap Kawasan belum tercapai, Pada Kawasan terpencil, Pendidikan belum bisa dirasakan dengan baik oleh seluruh warga masyarakat di tempat tersebut. Jumlah Lembaga Pendidikan terbatas, sarana dan parasaran, serta fasilitas Pendidikan dan pembelajaran juga terbatas, jumlah guru terbatas dengan kualitas yang masih minim, sulit dijangkau oleh peserta didik. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan perkotaan, atau perdesaan yang masih bisa dijangkau oleh transportasi, berbagai fasilitas Pendidikan lebih lengkap dengan guru yang lebih berkualitas, proses pembelajarannya juga lebih berkualitas, sehingga bisa membentuk peserta didik lebih berkualitas. Perbedaan ini mengindikasikan masih terjadi kesenjangan dalam soal Pendidikan, sehingga perwujudan kualitas peserta didik dan lulusan belum merata. Penyediaan sumber daya manusia yang terdidik, professional yang memiliki skill

tertentu sangat terbatas. Akibatnya percepatan pembangunan juga mengaami hambatan, karena ketersediaan tenaga trampil terbatas. Perbedaan kesempatan akses Pendidikan dan penyediaan jaminan kualitas pendidikan menjadi ironis dan harus segera diatasi, agar ketimpangan social tidak terus terjadi.

Akar masalah ketimpangan sosial dalam Pendidikan yang terjadi dalam masyarakat bisa dilihat dari berbagai aspek, , di antaranya adalah:

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dan pembelajaran belum merata dan optimalisasi yang kurang. Sarana menjadi bagian penting, sebagai salah satu penunjang keberlangsungan Pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah secara berkualitas, seperti gedung, media belajar, fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Pendidikan dan pembelajaran belum merata di setiap Lembaga Pendidikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, terutama di kawan daerah terpencil, terluar dan terdalam. Jika dibandingkan dengan kualitas fisik yang berada di kota-kota besar, mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai, mulai dengan bangunan gedung, media belajar yang lengkap, dan sebagainya. Ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas Pendidikan dan pembelajaran ini sangat berkontribusi bagi terwujudnya kualitas

Pendidikan dan pembelajaran. Semakin lengkap, semakin berkualitas. Namun yang lebih penting lagi adalah optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta fasilitas yang tersedia untuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang lebih berkualitas.

2. Kualitas pendidik belum merata. Kualitas pendidikan dan pembelajaran dapat ditentukan oleh pendidik (guru/ustadz/dosen) yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran. Tenaga pendidik menjadi harapan bagi peserta didik untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Saat ini kualitas pendidik belum merata di setiap Lembaga Pendidikan di berbagai kawasan, ada yang sudah sangat bagus, ada yang bagus, ada yang masih cukup, sehingga belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Kurang meratanya kualitas guru ini diantaranya karena alokasi anggaran pemerintah yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan kualitas profesionalitas guru masih kurang. (Anwar, 2017)
3. Rendahnya kesadaran kebersihan sekolah. Selain itu juga disebutkan oleh (Hidayat, M 2014) bahwa kebersihan kantin sekolah masih jauh dari prinsip hygiene sanitasi makanan. Selain itu akibat tidak cukup tersedianya fasilitas dasar sanitasi tersebut akan mempengaruhi aspek lingkungan fisik sekolah yang lain seperti pengelolaan sampah yang tidak

benar. Dampak lain dari tidak tersedianya tempat sampah yang disebutkan penulis menyebabkan sampah berserakan dan halaman sekolah menjadi kotor dan meningkatkan distribusi lalat, tikus dan vektor penyakit lainnya.

4. Faktor infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, akan tetapi mengenai aksesibilitas menuju lokasi sekolah yang memberikan kemudahan bagi peserta didik (Anwar, 2017). Hal ini menjadi bertolak belakang dengan daerah yang berada di pelosok, sehingga akses menuju sekolah sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik.
5. Jumlah dan kualitas buku, artikel jurnal serta berbagai Referensi sebagai sumber belajar. Buku, artikel jurnal dan berbagai referensi merupakan unsur yang mampu membantu peserta didik dan tenaga pendidik untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku, artikel jurnal dan berbagai referensi menjadi penting sebagai sumber belajar, untuk keberlangsungan Pendidikan dan pembelajaran. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku, artikel jurnal dan sumber belajar lainnya (baik cetak maupun

tersedia melalui online), bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (Riana, 2015)

6. Mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas, Sekolah yang menetapkan biaya tinggi bisa menyediakan fasilitas yang sangat memadai, sebagai penunjang pembelajaran. Sebaliknya sekolah yang menetapkan biaya rendah, biasanya hanya menyediakan fasilitas penunjang seadanya. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun realitasnya, selama ini belum dapat dimaksimalkan anggaran tersebut dan belum ada pemerataan.
7. Standarisasi Pendidikan yakni Sekolah Berstandar Nasional (SBN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Awalnya, perbedaan standar SBN dan RSBI ini dimaksudkan memberikan pelayanan Pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan, justru dinilai oleh sebagian kalangan menciptakan kesenjangan social. Karena hanya kelas social yang tinggi yang bisa memasuki RSBI. Adanya pengelompokan sekolah tersebut berdampak pada mutu dan pelayanan yang diberikan berbeda, sehingga kualitas lulusannya berbeda. Padahal

UUD 45 mengamanatkan setiap warga negara wajib memperoleh layanan Pendidikan yang sama. Pada dasarnya mutu pendidikan yang baik bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua anak bangsa. (Hidayat, 2017).

Pemerintah, masyarakat dan orang tua harus bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di berbagai kawasan, dari perkotaan hingga ke daerah terpencil atau pelosok. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menyadarkan setiap warga negara akan pentingnya pendidikan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan generasi berkualitas, sebagai kader umat dan bangsa, serta tenaga rampil dan professional di berbagai sector pekerjaan dan pembangunan negara. Orang tua mempunyai peran menyadarkan putra putrinya untuk bersekolah hingga Pendidikan tinggi, bahkan mendukung dalam pembiayaan. Kesenjangan dalam pendidikan harus segera diatasi, agar tidak menimbulkan konflik yang terus berlanjut.

D. Pendidikan Berkeadilan

Setiap manusia di dunia berhak atas pendidikan. Di Indonesia, hak tersebut diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak

setiap warga negara. Menurut Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Sisdiknas menyatakan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan layanan, fasilitas, dan memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa ada perbedaan. Karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada warga negaranya, serta mendukung agar pendidikan dapat berjalan lancar dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa sekolah yang bisa digolongkan sebagai sekolah miskin ternyata masih banyak. Masih ada sekolah yang memiliki dinding terbuat dari papan kayu yang sudah rusak di beberapa bagian dan atapnya yang terbuat dari eternit yang sudah mulai bocor. Banyak yang rusak, bahkan lantai semen retak-retak dan berlubang, bahkan meja dan kursi terlihat dipaku-paku agar tidak semakin rapuh . Kondisi tersebut, memperlihatkan bahwa pemerintah belum bisa menyediakan sarana atau fasilitas yang mencukupi untuk sekolah .

Pemerintah ideal dalam bidang pendidikan adalah yang tidak lagi menggunakan pendidikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, karena tugas Pemerintah seharusnya adalah penyedia fasilitas pendidikan, bukan melakukan intervensi terhadap kebijakan sekolah.

Oleh karenanya, dalam menetapkan kebijakan untuk metode belajar mengajar, pendidikan harus betul-betul mandiri. Dalam upaya untuk mewujudkan pendidikan dengan keadilan sosial, kita dapat mengadopsi demokratisasi pendidikan sebagai ide dasar yang mana di dalamnya terdapat tiga strategi yang mencakup:

1. Pendidikan harus memberikan peluang yang adil kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Pemerintah sebenarnya telah melakukan usaha untuk memperluas dan menyebarkan pendidikan melalui program pendidikan dasar sembilan tahun. Tetapi karena adanya krisis ekonomi dan konflik sosial, tingkat partisipasi pendidikan tersebut menjadi menurun. Karena itu, strategi yang perlu diimplementasikan adalah memperkuat pendidikan dasar sembilan tahun, memberikan beasiswa kepada target strategis, memberikan insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, memperkuat sistem pendidikan terpadu untuk anak berkebutuhan khusus, dan meningkatkan pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.
2. Pendidikan harus difokuskan untuk ketercapaian pendidikan bagi semua orang. Terdapat kecenderungan bahwa program pendidikan hanya difokuskan pada kelompok-kelompok tertentu, terutama di sekolah-sekolah yang dianggap sebagai

"favorit" oleh masyarakat. Di sekolah ini, tempat untuk kelompok lain dalam mendapatkan pendidikan terbatas. Jika tidak diatasi, situasi ini bisa menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak Indonesia. Sama halnya, menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui penelusuran minat-bakat dan potensi (PMBP) bisa menyebabkan diskriminasi jika tidak dilakukan secara transparan dan fokus pada pengembangan akademik. Meskipun masih ada banyak siswa yang memiliki kemampuan akademis yang belum dimanfaatkan oleh sekolah unggul. Dalam menyelesaikan masalah ini, diperlukan penerimaan ide-ide "Pendidikan Untuk Semua" yang meliputi memberikan kesempatan kepada semua siswa di mana pun dan kapan pun .

3. Pendidikan harus memberikan kesempatan atas hak-hak masyarakat, termasuk hak atas pendidikan. Selama ini, banyak yang beranggapan bahwa masyarakat dan orang tua masih kurang peduli terhadap pendidikan anak-anak. Sikap merendahkan martabat anak, masyarakat, bahkan pemerintah. Oleh karena itu, tidak boleh dilanjutkan karena dapat berdampak buruk pada masa depan, penting bagi semua warga negara untuk mendapat pengetahuan tentang hak pendidikan mereka.

E. Pandangan Islam Terhadap Ketimpangan Sosial dan Kaitannya Dengan Pendidikan

Islam memandang, ketimpangan sosial adalah Sunnatullah, biasa terjadi. Karena pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia dengan berbedabeda, ada yang diciptakan dengan dilahirkan di keluarga berada dan ada juga yang sebaliknya. Namun, Allah SWT melarang perilaku yang dapat menyebabkan ketimpangan, seperti tidak ingin membantu orang-orang yang membutuhkan dan membiarkan mereka tersiksa karena tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddatsir ayat 42-44: *“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka Menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin”*. Ayat tersebut menegaskan, Allah SWT memerintahkan untuk memberi makan kepada orang miskin, dan setiap harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang-orang miskin di dalamnya . Atau yang lebih kita kenal dengan istilah zakat.

Zakat adalah suatu ibadah yang bernilai sosial tinggi. Zakat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana dengan berzakat golongan yang berada (muzakki) dapat membagikan Sebagian hartanya kepada golongan yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari (mustahiq), sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis antara

golongan yang berada dengan golongan yang kurang mampu. Hal tersebut dapat membantu golongan yang kurang mampu dalam menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Dengan berzakat, ketimpangan sosial bisa diatasi, karena golongan yang berada bersedia membagikan sebagian hartanya kepada golongan yang kurang mampu. Bila pemberian zakat ini terus berlangsung, maka ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat lama-kelamaan bisa dihilangkan.

Pendidikan mempunyai peran yang besar dalam mendidik peserda didik untuk memahami berbagai ketentuan zakat, infaq dan shodaqoh, manfaat dan tujuannya, memberikan kecakapan mengelola secara professional, serta menumbuhkan kesadaran berzakat, infaq dan shodaqoh. Melalui Pendidikan inilah, peserta didik terbiasa berzakat, infak dan shodaqoh, Mampu mengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang terkumpul dengan baik. Mampu mendistribusikannya kepada kalangan masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin yang secara ekonomi lemah, bahkan mengembangkan menjadi usaha produktif yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, sehingga menjadi lebih sejahtera. Melalui pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh secara optimal dan produktif, pendistribusian yang tepat, maka bisa mengentas kemiskinan, menjadikan masyarakat miskin berdaya secara ekonomi maupun social,

sehingga kesenjangan social dengan berbagai problemnya bisa diselesaikan.

Pendidikan menjadi jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai kedudukan tersebut. Terbuka kesempatan untuk meningkat ke stratifikasi social yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidikan mendorong terjadinya mobilitas social secara vertical naik, maupun horisontal. Horton dan Chester mengatakan bahwa: “Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.” (Abdullah Idi, 2013:195) Pada umumnya masyarakat Islam tidak memandang kelas-kelas social, seperti perbedaan social ekonomi, kekuasaan ataupun perbedaan terkait duniaawiyah. Islam menegaskan bahwa pada dasarnya semua makhluk itu sama hanya saja berbeda derajatnya jika dilihat dari sudut pandang iman dan taqwanya, amal sholihnya. (Abdul Qodir, 2011:30).

Pendidikan Islam merupakan bentuk implementasi proses pembinaan IMTAQ & IPTEK, termasuk nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang diharapkan bisa tertanam pada diri manusia, berakhlakul karimah, serta senantiasa menjaga harmoni hubungan dengan Allah SWT dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Pendidikan Islam mengajarkan dan menanamkan persamaan, menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam, seperti:

Ketaqwaan, Ilmu dan amal perbuatan secara utuh, Pendidikan Islam tidak hanya melihat dari sisi jasmaiah, akan tetapi juga aspek ruhaniyah, keduanya dipandang menjadi satu kesatuan. Pendidikan yang dilakukan secara simultan inilah yang bisa menjadikan peserta didik memahami dan terbiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan pribadi maupun social, memiliki kepribadian yang sholeh secara individual dan kesalehan sosial. Pendidikan Islam juga sebagai sistem, sebagai proses, serta sebagai wahana kajian dan penelitian dalam rangka pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti: sifat, watak, kemampuan akademis, keahlian dibidang tertentu (skill) dan sebagainya.

Tugas utama pendidikan Islam adalah menumbuhkan kesadaran, mengerahkan seluruh pemikiran dan usaha untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan lebih tinggi. Pendidikan dalam konteks Islam berusaha mengembangkan kecakapan dan kecerdasan berpikir, penghayatan dalam bersikap, dan pengalaman berperilaku yang dilandasi nilai-nilai Islami. Peserta didik diharapkan mampu menjalin hubungan dengan Allah SWT, (transendental), antar sesama, dan lingkungannya secara lebih baik.

F. Kesimpulan

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, menjadi lebih produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi. Pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan masalah yang menghambat individu dalam bersosialisasi, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerataan kualitas layanan dan proses Pendidikan dan pembelajaran harus terus dilakukan pada semua jenis, jenjang dan jalur Pendidikan, di seluruh wilayah negara, Perwujudannya tidak hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan juga penyelenggara Pendidikan, orang tua dan masyarakat. Secara kuantitas, Lembaga Pendidikan di tanah air kita terlihat sudah mencukupi, yang sangat kurang dari sisi kualitas layanan dan proses pembelajaran yang belum merata. Untuk itu politik anggaran Pendidikan yang menjamin kualitas Pendidikan merata di seluruh Lembaga Pendidikan dimanapun berada harus dilakukan oleh pemerintah.

Raelitas di masyarakat, ketimpangan social memang hingga saat ini belum terselesaikan sehingga menimbulkan berbagai problem social multidimensi. Pendidikan punya tanggungjawab besar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi, berdaya secara merata, meliputi

berbagai aspek (social, ekonomi dan politik), sehingga ketimpangan social bisa terselesaikan. Islam sangat menghargai berbagai macam perbedaan, perbedaan tersebut menjadi rahmat, bisa dikembangkan menjadi kekuatan bila dikelola dengan baik. Dalam hal ini, keimanan dan ketaqwaan menjadi dasar utama yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui proses Pendidikan, selanjutnya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai macam ketrampilan lainnya. Proses-proses inilah yang dapat menjamin terwujudnya peserta didik yang memiliki kepribadian sempurna dan trampil dalam melaksanakan berbagai tugas, serta mampu menyelesaikan berbagai probel hidup dan kehidupan.

G. Daftar Bacaan

1. Abd. Muhyi Batubara (2004), *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta:Ciputat Press.
2. Abdul Qodir (2011). *Pendidikan Islam integratif-Monokotomik: Alternatif Solutif untuk Masyarakat Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
3. Alhumani, Amich (2006), *Media Indonesia*, 21 Desember.
4. Amanullah, Wahyu Anis, and Wantini. (2024). "Analisis Kesenjangan Sosial Di Sekolah: Perspektif Sosiologi Pendidikan Islam (Studi Kasus Di SDN Bhayangkara Yogyakarta)." *Jurnal Dirosah Islamiyah*. 6, no. 1: 43–55.

5. Farida, Nur, and Eggy Fajar Andalas. (2019). "Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Perkotaan Dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramodya Ananta Toer." *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* . 5, no. 1 (2019): 74–90.
6. Hafid, Abdul, Sudirman Sudirman, Muhammad Amran, and Magvira Magvira. (2022). "Hubungan Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD." *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar* . 6, no. 1 : 166–173.
7. Hidayat, Anwar. (2018). "Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* . 2, no. 1 (2018): 15–25.
8. M, Yuliani. (2013). "Ketimpangan Pendidikan Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Ekon.* 9, no. 53 (2013): 1–9.
9. Maharani, Nabilah, Nabila Khoirunnisa, and Shabira Panca Putri.(2024). "Analisis Masalah Kesenjangan Sosial Di Sekolah Dasar." *PARADIGM: Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation.* 2, no. 01 : 1–16.
10. Mukhlis, and Hafid. (2020). Pendidikan dan Keadilan Sosial". *Kariman* , Volume 08 , Nomor 01 , Juni, 141

11. Nawawi, M.Ikhsan dan Rachmat Panca Putera (2019),”Stratifikasi Sosial Dalam Tinjauan Pendidikan Islam”, *Pendidikan*.
https://www.researchgate.net/publication/335146322_STRATIFIKASI_SOSIAL_DALAM_TINJAUAN_PENDIDIKAN_ISLAM
12. R, Rahmawati, Suharsono Y, and Hardiyanto T W. (2014). “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa.” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* . 9, no. 1 : 1778–1784.
13. Ridlo, Ali. (2014). “ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Al-‘Adl* . 7, no. 1 (2014): 119–137.
14. Redja, Nuhdyahardjo. 2004. *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
15. Sen, Amartya Kumar. 2000. *Development as Freedom*. New York:Anchor Books.
16. Sholikhah, Ni’matush, Bambang Suratman, Yoyok Soesatyo, & Ady Soejoto, (2014) “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendidikan”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 20, Nomor 2.
17. S, Suharti. (2013). “Trends in Education in Indonesia.” *Education in Indonesia*: 15–52.
18. Syarifuddin, M. Syahrul, and Amir Sahidin. (2021). “Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat.” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12, no. 2 : 101–109.

19. T, Muttaqin. "Determinant of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 1, no. 2 (2018): 1–23.
20. Utama, Dicky Djatnika (2009), "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Dialogue JIAKP*, Vol. 6, No. 1.
21. Yuliani, Mimi. (2023). "Ketimpangan Pendidikan Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Ekonomi* , 53, no. 9 (2013): 1–9.
22. Zaman, Badrus.(2019). "Urgensi Pendidikan Karakter Yang Sesuai Dengan Falsafah Bangsa Ndongesia." *AL GHAZALI , Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam* , 2, no. 1: 16–31.

Bab 10

Sekolah /Madrasah Sebagai Sistem dan Struktur Organisasi/Birokrasi

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Sekolah/madrasah dapat dikatakan menjadi suatu sistem organisasi dan birokrasi
2. Profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah

B. Sekolah/Madrasah Sebagai Sistem Organisasi

Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yakni *skhole, scola, scolae*, mempunyai arti saat luang atau saat senggang, Sekolah merupakan aktivitas pada saat luang bagi anak-anak ketika sedang beraktivitas primer, yakni bermain, berlangsung sejak masa anak-anak dan remaja. Kegiatan yang berlangsung saat luang antara lain berhitung, membaca alfabet, mengenal moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Selama kegiatan sekolah berlangsung, anak-anak didampingi seorang pakar, ahli, yang memahami psikologi anak, memberi kesempatan anak-anak untuk beraktivitas belajar secara mandiri,

membangun sendiri dunianya melalui banyak pelajaran diatas.

Kini, menurut Sunarto (1993), sekolah sudah berubah menjadi bangunan atau lembaga belajar sebagai tempat mengajar dan tempat untuk mendapat & memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu wakil kepala sekolah, Jumlah wakil kepala sekolah dan guru tidak sama dalam tiap sekolahnya, tergantung kebutuhan. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan bisa diisi menggunakan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peranan penting terlaksananya prose pendidikan.

Sekolah atau madrasah sebagai organisasi, merupakan perkumpulan sosial yang dibuat oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berfungsi menjadi sarana partisipasi masyarakat untuk pembangunan bangsa dan negara. Masyarakat membangun institusi Pendidikan berupa sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuan-tujuan khusus yang tidak bisa dicapai sendiri, yakni pendewasaan putra putrinya. Terbentuknya sekolah atau madrasah berawal dari kebutuhan individu-individu masyarakat dalam sosol Pendidikan anak-anaknya, menjadi kebutuhan bersama, sehingga terjadi kesepakatan dan memutuskan untuk membuat berbagai macam aturan yang dilembagakan, yang

kemudian dinamakan pranata social bidang Pendidikan.

Sekolah adalah model organisasi formal. Menurut Parsons (1957), "banyak pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum kita mempunyai sesuatu yang pantas diberi nama teori tentang organisasi formal". Pendapat yang sama dikemukakan Bidwell (1965) dan Davies (1973), yang mengatakan "meskipun sekolah adalah benda yang sudah tidak asing bagi kita dan college-college bagi banyak orang, kemampuan kita untuk mengungkapkan dan menggeneralisasikan cara kerja dengan mendalam masih terkendala oleh kemampuan menganalisis organisasi itu sendiri dan kelangkaan jajak realitas pada Pendidikan".

Sekolah/madrasah sebagai organisasi memiliki birokrasi, yang dalam pandangan Weber sangat terkait dengan kekuasaan dan otoritas. Weber dalam teori birokrasi pembedaan antara kekuasaan (power) dengan otoritas atau wewenang (authority). Kekuasaan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, bisa terkait kemampuan ekonomi, keilmuan yang dimiliki, keturunan. Sedangkan otoritas atau kewenangan sumbernya dari jabatan. Orang yang memiliki kewenangan belum tentu berkuasa, bisa saja dikendalikan oleh kekuatan lain yang lebih berkuasa. Orang yang memiliki kekuatan bisa saja memiliki pengaruh, sekalipun tidak menjabat.

Lee R. Stainner dalam karya Abdullah Idi (1960) menyatakan, bahwa organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Formalitas, yakni ciri organisasi sosial yang mengacu pada adanya rumusan tertulis, terkait aturan, prosedur, kebijakan, tujuan, strategi, dan lain-lain. (2) Hirarki, yakni ciri organisasi yang menunjukkan pola kekuasaan dan wewenang dalam bentuk piramida. Artinya, ada individu-individu tertentu yang memiliki status, kekuasaan, dan otoritas yang lebih tinggi daripada anggota biasa organisasi. (3) Skala dan kompleksitas organisasi sosial yang umumnya memiliki banyak anggota dan hubungan sosial antar anggota bersifat tidak langsung (*impersonal*). Fenomena ini dikenal sebagai gejala birokrasi. (4) Sebuah periode untuk mengidentifikasi orang-orang dalam suatu organisasi.³¹

Ary Gunawan (2000) menyatakan, bahwa sekelompok orang yang mendirikan sebuah organisasi memiliki alasan-alasan (*reasons*) mendirikan organisasi tersebut. Seorang memilih organisasi memiliki berbagai alasan, yakni: (1) alasan sosial (*social reason*), di mana sebagai *zoon politicon*, artinya makhluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat ditemui pada

³¹ Lee R. Stainner dalam Abdullah Idi, “Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan,” Program S1 Fak. Tarbiyah IAIN Raedn Fatah Palembang, 2010. Hlm. 176.

organisasi-organisasi yang berorientasi pada intelektual atau ekonomi; dan (2) alasan materi (*materiil reason*), di mana melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam yang tidak mungkin dilakukannya sendiri: dapat memperbesar kemampuannya, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, serta melalui bantuan sebuah organisasi, dapat mengambil manfaat dari pengetahuan generasi sebelumnya yang telah terhimpun.³² Keputusan individu untuk ikut mendirikan atau berpartisipasi dalam suatu organisasi tampaknya bermanfaat bagi pengembangan organisasi individu dan kelompok social, karena beberapa alasan. Organisasi sosial memberikan harapan untuk mengembangkan keterampilan potensi pribadi dan social, terutama organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan, berupa sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain.

C. Sistem Birokrasi di Sekolah

C.E. Bidwell dan B. Davies menyebut sekolah sebagai organisasi birokrasi. Kedua sosiolog ini menyebut sistem birokrasi sekolah dengan konsep birokrasi weber. Weber mengidentifikasi enam prinsip birokrasi yang juga ditemukan di lembaga sekolah, yakni: (1) Menetapkan aturan dan prosedur bagi birokrat untuk menjalankan tugasnya. (2) Hirarki

³² Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan, hlm. 28-32.

jabatan terkait dengan struktur pimpinan. (3) Sebuah file yang mendokumentasikan tindakan yang diambil. (4) Pelatihan khusus untuk berbagai fungsi dalam birokrasi. (5) Struktur pembawa yang dapat diidentifikasi. (6) Bagaimana memperlakukan pegawai dan klien birokrasi yang bersifat tidak pribadi. Sekolah tidak menerapkan semua prinsip Weber di atas secara ketat dan linier. Bidwell (1965) dari Robinson (1981) menyatakan bahwa sekolah memiliki "struktur yang longgar". "Konsesi struktural" yang dimaaksudkan Bidwell adalah, guru tidak harus sepenuhnya menerapkan persyaratan mutlak untuk kekuatan struktural ketika menerapkan metode pembelajaran kepada siswa. Bahkan jika silabus dari atasan, atau pemerintah menentukan perangkat materi, setiap guru bebas memutuskan bagaimana dia ingin mengajar di kelas.

Sekolah sebagai organisasi terdiri dari unsur-unsur personal, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa/peserta didik. Selain itu juga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang berada di bawah kendali instansi lebih atas, baik berupa Yayasan, organisasi social, instansi pemerintahan (Kementrian Pendidikan atau Kementrian Agama). Sebagai organisasi birokratik yang baik, biasanya membagi-bagi tugas dan tanggung jawab, sesuai kapasitas, fungsi dan wewenang, serta kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui struktur organisasi, semua

anggota organisasi di Lembaga Pendidikan tersebut harus mengetahui tugas dan wewenang, sehingga semua stakeholder Pendidikan terlayani dengan baik dan memuaskan. (Elyati et al., 2022)

Di masa lalu, masyarakat sederhana tidak menerima lembaga formal yang mengatur distribusi hidupnya. Misalnya, orang India tidak perlu meminta bantuan fasilitas sekolah untuk mengajarkan kecerdasan panahan generasi berikutnya. Karena mereka cukup dari bantuan ayahnya dan saudaranya. Dapat dipastikan bahwa hampir semua generasi muda India dapat menguasai teknik memanah dari tahap dasar hingga ahli. Sejalan dengan kemajuan zaman, tersebarnya pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks, tidak semua kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan anak bisa dipenuhi oleh orang tua dan saudaranya, sehingga hadir sekolah, madrasah, pondok pesantren untuk menggantikan pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Pada tahap terakhir ini, harapan orang tua terhadap sekolah untuk bisa membentuk dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan anak-anaknya sangat tinggi, begitu juga pada masa-masa mendatang. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren di masyarakat, yakni: (1) meningkatnya jumlah kelompok manusia yang mempengaruhi tingkat penguasaan dan ketersediaan sumber daya alam (SDA); (2) teknologi yang

digunakan kompleks dalam pranata budaya dan mekanisme pengetahuan. (3) tingkat akal budi dan efek mental manusia yang semakin rasional.

Keberadaan sekolah menunjukkan terwujudnya masyarakat modern, meskipun bentuknya berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Emile Durkheim (1858-1912) dalam bukunya berjudul “The Division of Labour in Society” (1968) memaparkan dan menganalisis kecenderungan masyarakat maju untuk melakukan spesialisasi, sebagai pembagian kerja, pemetaan berbagai bidang, misalnya ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kesenian, dan keluarga. Pemetaan spesialisasi ini terjadi akibat dari penerapan system ekonomi industri yang di dalamnya memerlukan spesialisasi peran, agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berhasil dalam memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya. Spesifikasi professional, kemungkinan besar hanya bisa dilakukan di lembaga pendidikan modern.

D. Sistem Sosial di Sekolah/Madrasah

Kata sistem memiliki dua arti, yakni pertama, seseorang berhubungan dengan masyarakat; kedua dia suka memperhatikan kepentingan umum dalam berbagai bentuk percakapan, suka membantu dan menyumbang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kata sosial dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat.

Menurut Robert MZ Module Book Universitas Terbuka., Pengantar Masyarakat, Lawang (1985: 7). Rawan mengungkapkan pandangannya tentang arti kata "sosial" sebagai Makna subjektif yang memperhitungkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam perilaku tersebut.

Konsep sistem merujuk pada dua hal. Pertama, sesuatu yang saling terikat dan ketergantungan baik itu bagian, komponen, dan proses-proses. Kedua, sesuatu yang tipe yang sama dari ketergantungan antara beberapa kompleks dan lingkungan-lingkungan yang mengelilinginya.

Kata sosial berasal dari kata Latin *socius*, berarti persatuan, terikat, sekutu, berteman. Atau dari kata *socio*, berarti menghubungkan, berteman, menjalin ikatan, dan bergabung bersama. Menurut Robert MZ (1985: 7). kata "sosial" sebagai makna subjektif yang memperhitungkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Dengan demikian sosial dapat diartikan sebagai persahabatan atau pertemanan. Kata sosial dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat.

Sistem sosial diartikan sebagai sekelompok individu, dan didalamnya terdapat anggota individual masyarakat yang melakukan aktivitas atau kegiatan yang berbeda dan beragam, dan mempunyai stratifikasi sosial. Parsons melihat sistem sosial sebagai interaksi. Tapi Parsons tidak memfokuskan interaksi

saja didalam sistem sosial, namun ia mengutamakan komponen struktural dan peran individu diposisinya. Dalam analisis Parsons tentang sistem sosial, ia bukan hanya mengutamakan struktural saja tapi melainkan juga dengan fungsionalnya.

Pertama, sistem sosial itu harus tersusun rapi dan terstruktur sehingga didalamnya terjadi hubungan yang harmoni dengan sistem lainnya. Kedua, untuk mengimplementasikan sistem sosial di lapangan, sistem sosial butuh dukungan dari sistem lainnya. Ketiga, sistem sosial harus bisa memenuhi kebutuhan para individu didalamnya. Keempat, sistem mampu menghadirkan perhatian dari para anggotanya. Kelima, sistem sosial mampu mengendalikan perilaku yang mengancam dan mengganggu. Keenam, bila ada konflik didalam sistem sosial, itu harus mampu dikendalikan. Ketujuh, sistem sosial membutuhkan bahasa untuk menjalin interaksi. (Rofi'ah & Nurul Awwaliyah, 2021)

Menurut Parsons, ada 4 syarat fungsional agar sistem sosial bertahan yakni: Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (Pencapaian tujuan yang diharapkan) , Integration (Integrasi/kebersamaan) dan Latent Pattern Maintenance (Pemeliharaan pola laten).

Sekolah (Kementerian Agama disebut madrasah), merupakan institusi Pendidikan yang dilaksanakan secara formal, secara konstitusional di atur oleh pemerintah. Memiliki standar yang baku,

terkait kompetensi lulusan, isi kurikulum, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan/manajemn, sarpras, keuangan, dan evaluasi.

Sistem Sosial di sekolah/madrasah, berarti jalinan hubungan berbagai kompone manusia yang ada di sekolah, yakni guru dan siswa, pegawai dan kepala sekolah, serta orang tua siswa. Mereka memiliki fungsi, peran, tugas dan tanggungjawab sesuai kesepakatan bersama, terjadi interaksi, saling membantu dan melangkapi, agar visi, misi, dan tujuan Lembaga Pendidikan tersebut tercapai secara maksimal. Standar kompetensi lulusan sekolah tersebut tercapai dengan baik, Kualitas proses pembelajaran terjamin, mutu lulusannya juga terjamin, eksis dalam menajlankan berbagai tugas di masyarakat dan berbagai profesi, sesuai kompetensi yang dimiliki.

E. Konsep Islam tentang Profesionalisme dalam Pendidikan

Profesionalisme dari kata profesi, yakni sebagai keahlian. Mutmainah (2020) menyebutkan, seorang yang ahli menekuni suatu pekerjaan tertentu disebut sebagai pelaku profesi. Seseorang yang mahir dalam melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kemampuan, prosedur, teknik, keahlian, serta intelektualitas disebut sebagai profesional. Dalam hadits Rasulullah SAW, profesional diungkap dengan kalimat “supaya mengamanahkan suatu pekerjaan kepada orang yang ahli”. (Khanifatul Azizah & Fuadi, 2021)

Profesionalisme merupakan keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. (Rusman, 2014 :18). Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya guru-guru, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan. Guru profesional selalu mengikuti kursus-kursus, workshop, seminar, dalam berbagai kegiatan lainnya.(Aslamiyah, 2016)

Guru merupakan jabatan profesional, memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah. Guru berperan dalam membantu perkembangan siswa, sebagai peserta didik, untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain. Itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya peserta didik ketika sudah masuk sekolah menaruh harapan terhadap gurunya, agar bisa mengembangkan segala potensi yang ada. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, antara lain: sebagai Demonstrator, Pengelola Kelas, Pendidik, Pengajar, Pembimbing, Pelatih, dan Sebagai Penasehat (Danil, 2017).

Jabatan profesional membawa konsekuensi, sebagai guru tidak hanya aktif dan disiplin melakukan proses pembelajaran, tetapi juga harus selalu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan, terkait aspek kognitif, afektif dan psikomotorik anak. Hasil evaluasinya ditindaklanjuti dengan program perbaikan dan pengayaan.

Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Menjadi bagian kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dalam setiap proses pembelajaran. Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah: (1) Merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program pembelajaran. (2) Mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan pada umumnya dan program pembelajaran pada khususnya. (3) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. (4) Memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa yang diperlukan oleh orang tua siswa dan lembaga pendidikan. (5) Memperbaiki mutu proses pembelajaran baik cara belajar siswa maupun metode yang digunakan pendidik dalam mengajar. (Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, 2021)

Islam mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional. Dalam arti dilakukan dengan sungguh-sungguh secara benar,

produktif, memiliki nilai manfaat lebih bagi semua kalangan umat, serta memiliki efek yang maksimal terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Pemahaman dan perilaku profesionalisme seperti ini ditanamkan kepada semua peserta didik melalui proses Pendidikan.

Profesionalisme yang diterapkan dalam pendidikan Islam memiliki efek, antara lain: Pertama, profesionalisme dapat menjadikan pendidikan lebih bermutu. Peningkatan ini akan dirasakan oleh masyarakat dan pada gilirannya mutu masyarakat muslim juga akan meningkat. Kedua, karena mutunya semakin baik maka peminat yang masuk pada lembaga pendidikan Islam juga meningkat, sehingga menjadi lembaga Pendidikan lebih eksis. Ketiga, secara finansial, pendapatan Lembaga Pendidikan meningkat. Peningkatan secara finansial ini bisa mendorong pemenuhan berbagai kebutuhan sarana-prasana secara berkualitas, kesejahteraan para guru dan pegawai Lembaga Pendidikan Islam lebih terjamin. Dalam Islam, lembaga Pendidikan bisa menjadi amal usaha, yang tidak hanya melaksanakan proses Pendidikan dan pembelajaran, juga sumber finansial bagi kepentingan dakwa, serta bisa berkontribusi bagi pengentasan kemiskina masyarakat. Untuk mewujudkan profesionalitas ini, sinergitas dan soliditas lembaga Pendidikan, masyarakat, orang tua dan pemerintah sangat penting.

Khoifah atau pemimpin merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yang sebelumnya disiapkan secara matang oleh Allah SWT, melalui proses Pendidikan, agar manusia bisa menjalankan tugas kekhelifahan secara professional. Allah SWT mendorong dan mewajibkan kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun.

Secara riil profesionalisme dicontohkan Akhlaq Nabi Muhammad SAW melalui sifat-sifatnya, yakni :

1. Sifat kejujuran (shiddiq). Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk uasha yang dikerjakan bersama menjadi hancur, karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Sifat ini pula yang selalu di ajarkan dalam Pendidikan Islam, bersumber pada al-Qur'an dan sunah Nabi. Kejujuran menjadi tolok ukur utama bagi organisasi dan dunia usaha yang dikelola secara modern. Islam mengingatkan, tegaknya negara sangat ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinnya tidak jujur dan korup, maka negara itu menghadapi problem nasional yang sangat berat, dan sangat sulit untuk dibangkitkan kembali.
2. Sifat tanggung jawab (amanah). Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan/

organisasi/lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah. 3. Sifat komunikatif (tabligh). Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat juga meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan di akses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat, anggota dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dengan demikian, perjalanan sebuah organisasi akan berlangsung lebih baik, lancar, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. 4. Sifat cerdas (fathanah). Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Sebuah organisasi yang pemimpinnya cerdas, lebih cepat dan tepat dalam memahami problematika yang dihadapi lembaganya. Ia cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran.

F. Profesionalitas dalam Pendidikan di Sekolah

Bila mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 1,4 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan merupakan pemangku pendidikan yang menentukan wajah dan kualitas pendidikan. Untuk itu, pemerintah membuat berbagai aturan dan kebijakan terkait profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Melalui UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah mengatur profesionalisme pendidik dengan menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki pendidik untuk dapat disebut sebagai profesional. Profesionalisme atau profesional, berasal dari bahasa Inggris, berarti ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti. *Gilley* dan *Eggland*, mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan, kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Bila mengacu pada Undang-Undang No 14

Tahun 2005 tersebut, profesional berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1).

Sedangkan prinsip profesionalitas yang harus dipedomani oleh guru sebagai salah satu unsur pemangku pendidikan ada sembilan (pasal 7), yaitu:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Berkaitan dengan kompetensi, undang-undang tersebut menetapkan bahwa guru untuk dapat disebut professional harus memenuhi kualifikasi akademik

(berpendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat) dan memiliki empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10).

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik untuk memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi professional adalah kemampuan atau penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Melalui beberapa peraturan menteri, pemerintah juga menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, di antaranya; standar pengawas sekolah (Permen No 12 Tahun 2007), standar kepala sekolah (Permen No 13 Tahun 2007), administrasi sekolah (Permen No 24 Tahun 2008), tenaga perpustakaan (Permen No 25 Tahun 2008), dan konselor (Permen No 27 Tahun 2008).

Misalnya tenaga perpustakaan (pustakawan), pemerintah menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut: Untuk standar kualifikasi akademik dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga pustakawan berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk dimensi kompetensi, pustakawan harus kompeten di bidang manajerial, pengelolaan informasi, pendidikan, kepribadian, sosial dan pengembangan profesi. Diharapkan dengan beberapa produk peraturan tersebut, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi profesional, sehingga kualitas Lembaga Pendidikan semakin baik, termasuk Lembaga Pendidikan Islam. Menjadi profesional memang telah menjadi keharusan bagi pemangku pendidikan.

G. Kesimpulan

Sekolah/madrasah sebagai organisasi terdiri dari unsur-unsur personal pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua. Selain itu sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang berada di bawah instansi atasan baik itu kantor dinas atau kantor wilayah departemen yang bersangkutan. Organisasi yang baik harus membagi tugas dan tanggung jawab sesuai

kapasitas, fungsi dan wewenang serta kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui struktur organisasi yang ada, semua unsur yang ada di organisasi diharapkan mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal, penuh keikhlasan.

Sistem sosial merujuk pada dua hal. Pertama, sesuatu yang saling terikat dan tergantung, baik itu bagian, komponen, dan proses-proses. Kedua, sistem sosial juga diartikan sebagai sekelompok individu, dan didalamnya terdapat anggota individual masyarakat yang melakukan aktivitas atau kegiatan yang berbeda dan beragam, dan mempunyai stratifikasi sosial. Sistem sosial mempunyai batasan, rambu-rambu, kode etik yang harus ditaati bersama oleh semua komponen yang ada di sistem tersebut.

Birokrasi merupakan sistem administrasi atau manajemen dalam sebuah organisasi dan institusi. Sistem birokrasi ditandai oleh aturan, prosedur, dan hirarki yang jelas. Prinsip-prinsip birokrasi mencakup pembagian tugas yang spesifik, aturan tertulis, impersonalitas, hierarki yang terstruktur dengan baik, dan rasionalitas.. Birokrasi bertujuan untuk menciptakan ketertiban, efisiensi, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di dalam organisasi. Meskipun birokrasi memiliki manfaat, terkadang juga dianggap memiliki kecenderungan menjadi terlalu rumit dan lambat dalam merespon terhadap perubahan

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran, terutama terkait kualitas pembelajaran dan hasil prestasi peserta didik di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain. Itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya peserta didik ketika sudah masuk sekolah menaruh harapan terhadap gurunya, agar bisa mengembangkan segala potensi yang ada. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.

H. Bahan Bacaan

1. Abdullah Idi, H. (2014). *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
2. Abudin, Nata. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta : Kencana Prenada Media. 2010. Hlm 90
3. Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan, hlm. 28-32.
4. . (n.d.). Sekolah Sebagai Organisasi Birokrasi. 77–86.
5. Aslamiyah, S. S. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam. *Akademika*, 10(2), 173–

186.

<https://doi.org/10.30736/akademika.v10i2.17>

6. Bayu Mahendra, V. (2021). Konsep Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Rayah Al-Islam*, 5(02), 419–426. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i02.472>
7. Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
8. Danil, D. (2017). Upaya Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Di Sekolah (Study Deskriptif Lapangan di Sekolah Madrasah Aliyah Cilawu Garut). *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 3(1), 30–40.
9. Devi, I., Hanani, S., Syafitri, A., & Indri Yani Harahap, N. (2023). Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268–281.
10. Elyati, E., Idi, A., & Samiha, Y. T. (2022). Sekolah/Madrasah Sebagai Organisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 173–190.
11. Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, A. S. (2021). *Jurnal pendidikan Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 128–135.
12. Khanifatul Azizah, & Fuadi, M. A. (2021). Profesionalisme Guru dalam Islam: Kajian Konseptual Hadits Tarbawi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(1), 73–87.

[https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(1\).6244](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(1).6244)

13. Lee R. Stainer dalam Abdullah Idi, (2010). “Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan,” Program S1 Fak. Tarbiyah IAIN Raedn Fatah Palembang,. Hlm. 176.
14. Ma’arif, Anas. (2016). Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas. Jurnal Nidhomul Haq Vol.1, Nomor 2. hlm 47.
15. Rofi’ah, S., & Nurul Awwaliyah. (2021). Madrasah Sebagai Sistem Sosial Perspektif Talcott Parsons. Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(1), 56–71. <https://doi.org/10.19105/rjpai.v2i1.4337>

Bab 11

Proses Interaksi dan Sosialisasi di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggali, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Pengertian interaksi, sosialisasi dan kepribadian
2. Proses sosialisasi di keluarga, masyarakat, dan sekolah
3. Interaksi dan sosialisasi, serta terjadinya multikultural di keluarga, masyarakat dan sekolah
4. Prinsip sosialisasi dan pendidikan multikultural di sekolah / madrasah

B. Proses Interaksi dan Sosialisasi

Inetraksi adalah hubungan tiimbal balik antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi bermula dari adanya kebutuhan tiap individu atau kelompok, dilanjutkan dengan kontak social, yakni bertemu secara langsung maupun tidak langsung, dilanjutkan dengan komunikasi, yakni menyampaikan ide, gagasan, bahkan nilai dan norma. Selanjutnya terjadi difusi, yakni penyebaran nilai, ide dan gagasan, kemudian terjadi asimilasi bahkan akulturasi.

Sosialisasi adalah proses pengenalan nilai-nilai dan norma baru yang diharapkan bisa diketahui, difahami, sehingga individu atau kelompok yang baru tersebut bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, bertindak dan bersikap sesuai nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut, yakni keluarga, sekolah/madrasah, masyarakat dan berbagai intutusi lainnya.

Proses interaksi dan sosialisasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, seperti anggota keluarga, teman, tetangga, atau orang-orang yang kita jumpai di masyarakat. Dalam proses interaksi ini, kita juga melakukan proses sosialisasi, yaitu proses pembelajaran dan pengembangan diri untuk menjadi bagian dari suatu komunitas.

Proses interaksi dan sosialisasi tidak hanya terjadi di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk belajar berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan budaya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dalam keluarga, kita belajar cara berkomunikasi, berbagi, dan menghormati perbedaan pendapat.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses interaksi dan sosialisasi. Masyarakat adalah tempat bagi kita untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang

yang berbeda, mempelajari budaya dan nilai-nilai yang berbeda, dan menjadi bagian dari suatu komunitas yang lebih luas. Dalam masyarakat, kita dapat belajar cara berbagi, bekerja sama, dan menghormati perbedaan pendapat.

Sekolah juga memiliki peran penting dalam proses interaksi dan sosialisasi. Sekolah adalah tempat bagi kita untuk belajar berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, mempelajari budaya dan nilai-nilai yang berbeda, dan menjadi bagian dari suatu komunitas yang lebih luas. Dalam sekolah, kita dapat belajar cara berbagi, bekerja sama, dan menghormati perbedaan pendapat.

Dalam keseluruhan, proses interaksi dan sosialisasi di keluarga, masyarakat, dan sekolah memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan diri individu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami proses interaksi dan sosialisasi yang terjadi di dalamnya dan mencari cara untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain.

C. Konsep Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi memiliki tiga pengertian. Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan

menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal (KBBI, 2016)

Sosialisasi sebagai proses belajar berarti seorang individu berusaha mengenal nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan berbagai instansi dengan harapan bisa diterima di masing-masing lingkungan tersebut, bisa berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik dan eksis dalam lingkungan tersebut. Sosialisasi merupakan cara belajar atau suatu proses akomodasi dan yang dipelajari adalah nilai-nilai, norma-norma, ide-ide atau gagasan, pola-pola tingkah laku dan adat istiadat serta keseluruhannya itu diwujudkan dalam kepribadiannya.³³

Sosialisasi juga sebagai proses belajar individu dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan yang berpedoman pada norma-norma. Norma merupakan kaidah, pokok, kadar atau patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan.³⁴

Effendy (1999) mengemukakan, sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan

³³ Farida Hanum, Diktat Mata Kuliah: Sosioantropologi Pendidikan, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006, hlm. 25.

³⁴ Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007, hlm. 14.

yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Sutaryo (2005) memberikan definisi yang sama, bahwa sosialisasi merupakan proses aktivitas belajar dari seseorang untuk menjadi anggota masyarakat, Zanden (1979) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang mana seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan dan bertingkah laku yang akan membuatnya berperan dalam suatu lingkungan masyarakat.³⁵

Menurut Khairuddin (2002:68) sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup. Sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan seseorang. Pertama, memberikan dasar atau pondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Kedua, memungkinkan lestariannya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu..

Menurut Ihromi (1999:144) paling tidak ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah/madrasah. Proses sosialisasi

³⁵ Dian Herdiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, Cimahi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 2018, hlm. 15

akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Keluarga adalah tempat sosialisasi pendidikan inti yang menjadi pondasi untuk perkembangan anak. Sementara pendidikan yang diperoleh dari sekolah maupun dari lingkungan merupakan sebagian dari pendidikan yang diperlukan.

Menurut Suyatno (2003:109), bahwa pendidikan dalam keluarga tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan fungsi kognitif atau mencerdaskan anak saja, tetapi juga membentuk karakter. Anak perlu diajari untuk membedakan mana yang salah dan yang benar, mana yang hak dan mana yang kewajiban, serta bagaimana agar tetap hidup benar di lingkungan yang salah.

2. Jenis – jenis sosialisasi

Jenis sosialisasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sosialisasi berdasarkan kebutuhan dan cara yang digunakan.

a. Sosialisasi berdasarkan kebutuhan

Berdasarkan kebutuhan, sosialisasi dibagi atas sosialisasi primer dan sekunder. Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 15 tahun

atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Pada tahap ini, peran orang terdekat anak sangat penting, karena anak memiliki pola interaksi yang terbatas di dalam dirinya. Corak kepribadian anak terutama ditentukan oleh kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekat.

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer, yaitu memperkenalkan individu kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuknya adalah resosialisasi dan nonsosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang memperoleh identitas baru. Di sisi lain, dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami "penghapusan" identitas dirinya yang lama. Menurut Erving Goffman, proses resosialisasi dan desosialisasi berkaitan dengan berfungsinya sistem sosial. Sistem sosial ini termasuk pusat penahanan dan rumah sakit jiwa.

Yang maksud Goffman sebagai sistem sosial adalah "Suatu tempat tinggal dan bekerja di dalamnya sejumlah individu dalam situasi sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk suatu jangka waktu tertentu, bersama-

sama mejalani hidup yang terkungkung dan diatur secara formal."

b. Sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai

Menurut Kumanto Sunarto, sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan dapat berlangsung dalam dua bentuk. Pertama, sosialisasi represif, ialah sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru. Kedua ada sosialisasi partisipatif, ialah sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik.

Pola sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan seara berbeda ini akan memengaruhi anak dalam tingkat kemandirian, kepemimpinan, dan kemampuan memimpin, dan bekerja sama yang lebih baik dibandingkan apabila diasuh dengan pola sosialisasi yang represif.

c. Sosialisai berdasarkan keberadaan perencanaan

Sosialisasi dilihat berdasarkan keberadaan perencanaan ada dua, yakni perencanaan dan tanpa perencanaan. Sosialisasi berdasarkan perenanaan merupakan sosialisasi dilakukan atas dasar rencana yang berkelanjutan dan sistematis. Sosialisasi jenis ini dapat ditemukan dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, serta pendidikan

nonformal, seperti kursus dan pelatihan. Dalam sosialisasi berdasarkan perencanaan, semua tujuan pembelajaran, materi, proses, dan penilaian telah dikonstruksi secara matang, sehingga semua terukur dan dapat dievaluasi dan monitor.

Adapun sosialisasi tanpa perencanaan terjadi dalam suatu proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat, misalnya dalam keluarga, kelompok teman sebaya, atau lingkungan tempat tinggal. Sosialisasi tanpa perencanaan dilakukan melalui perilaku, sikap, dan struktur aktual dari orang tua atau anggota senior dari masyarakat. Keteladanan atau percontohan melalui perilaku, sikap, dan struktur aktual ini, para anggota senior masyarakat melakukan transmisi pengetahuan, nilai, norma dan harapan-harapan kepada anggota muda mereka. Proses seperti ini juga dikenal sebagai pendidikan informal.

D. Pembentukan Kepribadian

Perkembangan kepribadian dipahami secara berbeda oleh berbagai ahli. Perbedaan ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dan keahlian yang berbeda. Berikut beberapa pandangan ahli tentang perkembangan kepribadian:

1. Colley : Cermin Diri (Looking Glass Self)

Diri, sebagai sisi khas dari kemanusiaan (humanis), dibangun secara sosial. Maksudnya, perasaan mengenai diri kita berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Cooley mengemukakan konsep *looking-glass self* (cermin diri) untuk menggambarkan suatu analogi perkembangan diri melalui cermin, dimana cermin memantulkan apa yang terdapat didepannya, dari sana seseorang melihat dirinya: ganteng, cantik, perkasa, atau ramah.

Melakukan cermin diri tidak berhenti pada suatu masa, misalnya konsep diri “mapan dan tetap”. Konsep ini hanya terbentuk pada masa dewasa, sedangkan pada masa kanak-kanak dan remaja konsep tersebut belum ada. Konsep diri cantik, pada masa remaja dengan masa dewasa berbeda, pada masa remaja lebih mengarah pada fisik, sedangkan pada masa dewasa lebih mengarah pada kepribadian, tidak lagi fisik. Konsep diri dibangun terus menerus sepanjang hayat. Dengan demikian, konsep diri menurut Cooley merupakan produk yang tidak pernah selesai dibentuk, bahkan sampai usia lanjut.

Kalau kita cermati apa yang dilakukan oleh para pejabat publik dan politisi yang bersaing untuk meraih kekuasaan pada berbagai tingkatan, seperti anggota legislatif dan elite eksekutif, ternyata mereka mengeksplorasi dan

mengintensifkan pemanfaatan efek cermin diri untuk pencitraan diri supaya menjadi positif sesuai konstruksi yang diharapkan. Pencitraan diri melibatkan berbagai cara dan teknik, diantaranya melalui media masa, cetak maupun elektronik, social media online, tiktok, istagram, dan lain-lain. Efek citra diri melalui media ini menjadikan dirinya dikenal oleh berbagai pihak, kalangan masyarakat, jangkauannya lebih luas, local dan global. Melalui berbagai media inilah, mereka yang berkepentingan dengan leluasa menyampaikan ide dan gagasannya sesuai yang diinginkan, masyarakat juga bisa memahami mereka. Biasanya, sebelum menyampaikan ke media, mereka berkonsultasi dengan para ahli (misalnya sosiologi, psikologi, pakar politik, pakar komunikasi, ahli agama, dan lain-lain), apa yang terbaik untuk ditampilkan, terkait apa yang dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan dalam situasi apa hal ini dikatakan.

Contoh, seseorang mendapat pencitraan positif meraih *award antikorupsi* diberikan oleh suatu lembaga yang dibuat seolah independen pada saat sekian bulan menjelang suatu pemilihan, Cara ini bisa membangun citra positif. Pencitraan positif ini dikristalkan melalui penyebaran informasi sedemikian rupa melalui berbagai media masa. Padahal sejatinya, orang ini belum tentu serius memberantas korupsi, melakukan suatu

program antikorupsi. Konsekuensi pencitraan seperti ini *rating*-nya menjadi naik dimata pemilih. Sehingga pemilih memberikan suara terbanyak pada kandidat yang memperoleh award antikorupsi ini. Contoh lain, tampilan para artis yang ikut dalam pemilihan anggota legislative dan suksesi eksekutif, Para artis ini karena sudah banyak dikenal, sehingga bisa saja memperoleh suara terbanyak dari para pemilih, serta berbagai contoh lain.

2. Mead: Tahapan Perkembangan Diri

Didalam buku *mind, self and society*, Mead menjelaskantahap pengembangan diri (self) manusia. Ketika manusia lahir, dia belum memiliki diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan orang lain. Pengembangan diri manusia berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu tahap *preparatory* atau tahap *play stage*, tahap pertandingan (*game stage*), dan tahap the *generalized other*.

Pada tahap pengembangan awal anak, yaitu tahap *preparatory* atau tahap *play stage*, seorang anak belajar mengambil persepektif orang lain, yang dianggap sesuai dengan kebutuhan hidupnya, dengan melihat dirinya sebagai objek. Pada pengembangan lanjut anak, yaitu tahap pertandingan (*game stage*) seorang anaktidak hanya mengetahui peran yang dimainkannya, melainkan juga peran yang dimainkan orang lain

dengan siapa dia melakukan interaksi. Selanjutnya, perkembangan berikutnya adalah anak mampu mengontrol perilakunya sendiri menurut peran umum yang bersifat impersonal yang didalamnya terdapat harapan dan standar komunitas masyarakat keseluruhan berupa kebiasaan, pola normatif atau ideal yang abstrak, atau nilai universal, dikenal dengan *the generalizes other*. Pada tahap ini seorang anak tidak hanya memahami peran yang harus dijalankannya, tetapi juga dia telah mengetahui peran yang harus dijalankan oleh orang lain dengan siapa dia berinteraksi.

3. Freud: Tiga Dimensi Diri

Freud melihat tiga unsur dalam diri, yaitu *Id*, *superego*, dan *ego*. *Id* merupakan pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluriah dan assosial, rakus dan anti sosial. Jadi setiap anak yang lahir memiliki satu unsur diri yang bernama *Id*. Dorongan bawaan lahir dan naluriah tersebut menyebabkan orang mencari kepuasan diri ini dibuktikan oleh Freud dengan argumentasi bahwa bayi yang baru lahir terbukti dari tangisannya karena lapar atau sakit. Dorongan ini beroperasi sepanjang hidup manusia yang menuntut pemenuhan langsung keperluan dasar: perhatian, keselamatan makanan, dan seks.

E. Sosialisasi di Keluarga, Masyarakat dan Sekolah

1. Keluarga

Sosialisasi dilakukan berdasarkan pola keluarga yang dimiliki. Terdapat dua tipe ideal dari pola keluarga, yaitu keluarga yang berorientasi kepada posisi dan pribadi. (Robinson). Keluarga (*posisional position entered family*) merupakan keluarga di mana terjadinya pemisahan peran yang jelas. Anggota keluarga memiliki posisi yang berbeda-beda, ada yang sebagai ayah, ibu, anak atau pada usia tertentu sebagai Kakek atau nenek. Masing-masing harus memahami dan memerankan posisi masing-masing. Bila tidak, maka akan menimbulkan konflik, disharmonis, bahkan bisa jadi pisah dari keluarga. Untuk itu sosialisasi nilai dan norma, fungsi dan peran menjadi sesuai yang alami, dilakukan dari yang lebih tua, yakni ayah atau ibu kepada anak-anaknya. Anak akan sangat memperhatikan posisi mereka, sehingga bersedia menerima berbagai nilai, norma, fungsi dan peran yang telah dikenalkan dan diajarkan oleh orang tuanya. Keluarga yang berorientasi pada pribadi, lebih cenderung memberikan kebebasan setiap individu anggota keluarga untuk bertidak dan bersikap, namun tetap berada dalam kerangka keluarga yang harus saling memahami dan menyadari posisi masing-masing. Kalau tidak, keluarga ini akan pisah, tidak lagi menjadi anggota keluarga.

2. Masyarakat

Dalam masyarakat dikenal paling sedikit dua lingkungan tempat tinggal, yaitu kompleks perumahan dan perkampungan. Kompleks perumahan dipandang sebagai suatu lingkungan tempat tinggal yang tertata dengan rapih dan terencana dibandingkan dengan perkampungan. Lingkungan perkampungan tumbuh berkembang secara alami, cenderung homogen, sedangkan perumahan didesain secara khusus, cenderung heterogen. Bagaimana perkembanganya sangat bergantung dari yang mendesain. Lingkungan perumahan sebagai lingkungan tempat tinggal yang berkembang relatif lebih heterogen secara sosial dan budaya dari penghuninya. Bagi orangtua yang ingin menumbuh kembangkan pada suatu lingkungan tempat tinggal, biasanya mereka akan mempertimbangkan plus minus antara memilih perkampungan atau kompleks perumahan. Para orangtua akan mempertimbangkan bagaimana milieu dari lingkungan tempat tinggal, seperti interaksi sosial antar warga, fasilitas publik, status sosial dan ekonomi.

3. Sekolah/Madrasah

Sekolah/madrasah merupakan Lembaga Pendidikan formal, berjenjang. Dimulai dari praskolah, yakni Kelompok Bermain (playgroup/PG), Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudlotul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) atau disebut

dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (M.Ts)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)., Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), hingga perguruan tinggi. Sekolah menjadi pusat sosialisasi yang dapat mendorong dan membentuk kepribadian manusia sesuai dengan tingkat perkembangannya, dari anak-anak, menjadi remaja, pemuda, hingga dewasa. Sekolah menggantikan fungsi dan peran keluarga. Sekalipun demikian, harus bisa tetap menjadi mitra keluarga dalam proses pembentukan kepribadian anak tersebut, dengan menambahkan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih lengkap dan sempurna. Ketrampilan khusus juga diberikan oleh sekolah kepada para peserta didik, sehingga memiliki kecakapan khusus, bahkan benar-benar professional bila memasuki berbagai sector pekerjaan. Ketika memasuki sekolah, tidak jarang anak-anak lebih mempercayai gurunya daripada orang tuanya, untuk itu sinergitas harus selalu dilakukan dengan menekankan Pendidikan moral dan akhlaq untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru, serta berbagai orang yang berjasa bagi Pendidikan dirinya. Proses-proses pemebntukan

ini terus berlangsung hingga menyelesaikan Pendidikan yang lebih tinggi dan masuk ke dunia kerja.

Terdapat berbagai kelebihan nilai pendidikan yang disosialisasikan di sekolah dibandingkan dengan di rumah. Kelebihan nilai pertama adalah kemandirian anak. Menurut Dreeben, seorang anak belajar kemandirian lebih intensif di sekolah dibandingkan di tempat lain. Ketika di rumah seorang anak dimungkinkan memperoleh bantuan anggota keluarga (orang tua dan para saudaranya) untuk melaksanakan bermacam tugas dan pekerjaan, sedangkan di sekolah sebagian tugas dan pekerjaan dilaksanakan secara mandiri yang disertai dengan tanggungjawab. Guru menuntut kemandirian dan tanggungjawab pribadi peserta didik terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan. Kerjasama hanya dibenarkan bilamana tidak menyertai unsur penipuan atau kecurangan.

Nilai kedua yang disosialisasikan kepada anak di sekolah adalah nilai tentang prestasi. Jika di rumah peran yang dimainkan oleh seorang anak bersifat askriptif, yaitu peran yang diwarisi kepada dia secara *taken for granted* semenjak dia lahir, seperti peran sebagai anak laki-laki atau perempuan, anak sulung atau bungsu, sebagai anak Asia atau Australia, anak Jawa atau anak Minang, serta sebagai abang, kakak, atau adik. Berbeda dengan di rumah, di sekolah peserta didik dipacu

untuk berprestasi. Posisi seorang anak di antara para peserta didik lainnya tergantung pada prestasi yang diraih oleh anak ini, yang diperlihatkan oleh ranking nilai rapor atau hasil ujian lainnya. Memang diakui adanya peran orang tua untuk mendorong prestasi anak, namun sekolah lebih besar daya dorongnya dibanding dengan keluarga. Sebab sekolah memotivasi para peserta didik dalam hampir segala aktivitas sekolah, baik kurikuler maupun ekstra- kurikuler, untuk mengembangkan kemampuan dan bersaing untuk meraih prestasi dan menghindari kegagalan.

Nilai ketiga yang disosialisasikan sekolah kepada peserta didik adalah universalisme, yaitu perlakuan yang sama pada setiap orang. Pada saat peserta didik berada di sekolah, mereka diperlakukan sama antara satu dan lainnya. Perbedaan latar belakang status sosial ekonomi tidak menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap peserta didik. Semua itu memiliki kontribusi besar bagi pembentukan kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan masing-masing individu peserta didik, sehingga memengaruhi peran yang akan dimainkan di masa akan datang.

F. Konsep Islam terhadap Proses Interaksi dan Sosialisasi, serta Terjadinya Multicultural di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat

Islam memandang, interaksi dan sosialisasi selalu terjadi dalam kehidupan manusia, karena sudah menjadi kodrat sebagai makhluk. Melalui interaksi masing-masing individu maupun kelompok bisa saling mengenal, terjadi transformasi ide, gagasan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, termasuk nilai dan norma yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Sosialisasi merupakan upaya pewarisan dan penanaman nilai dan norma kepada seseorang yang baru ada atau baru masuk yang akan menjadi bagian dari keluarga, kelompok, maupun institusi tertentu yang ada di masyarakat agar memiliki pemahaman yang sama dan kepribadiannya terbentuk, sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan beraktifitas bersama secara eksis.. Interaksi sosial merupakan proses yang terjadi dalam sosialisasi. Keanekaragaman latarbelakang sosial, ideologi, dan budaya setiap individu menjadi khazanah keberagaman yang bisa disatukan dalam penyikapan, toleransi, tidak justru menjadi konflik yang bisa merusak tatanan yang sudah berlaku di keluarga, sekolah, maupun institusi-institusi lain yang ada di masyarakat.

Setiap keluarga, sekolah dan berbagai institusi di masyarakat memiliki cara berbeda dalam melakukan proses sosialisasi. Perbedaan cara sosialisasi ini karena

perbedaan cara pandang dan pemahaman. Terdapat dua perbedaan tersebut: Pertama, sosialisasi digunakan dalam definisi penyesuaian terhadap sesuatu yang dihargai dan dihargai orang lain, sesuai dengan peran yang diharapkan (*role ekspektasi*), Konsep ini melihat sosialisasi, dari sudut pandang masyarakat atau kelompok sosial di mana orang menjadi anggotanya. Kedua, sosialisasi lebih menitikberatkan pada pengembangan pribadi daripada transmisi budaya, dengan memberikan makna pada proses perkembangan atau proses transformasi seseorang sebagai akibat dari pengaruh sosial yang menitikberatkan pada pengembangan “konsep diri”. Termasuk pandangan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Konsep kedua dikembangkan dalam teori interaksi simbolik yang mewakili konsep konseptual sosialisasi dalam dimensi proses interaksi sebagai hasil negosiasi (interaksi yang dinegosiasikan), sehingga melahirkan perubahan kepribadian orang. Ciri yang menonjol dari pencitraan tersebut adalah penekanan pada interaksi simbolik, sebagai konteks fenomena social, untuk membentuk pikiran ego (diri) dan struktur sosial. Peran pribadi merupakan kreasi diri sesuai dengan situasi sosial dan pentingnya tampil sebagai diri sendiri, sebagaimana yang dilakukan orang lain..

Islam mengajarkan pentingnya sosialisasi untuk mewujudkan keberhasilan, supaya keinginan, ide, gagasan, nilai-nilai yang diyakini bisa difahami dan

diterima orang lain, bahkan diikuti menjadi ide bersama untuk diwujudkan, menjadi nilai dan norma bersama untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bertindak dan berlaku. Sehingga hidup bisa berdampingan, tercipta ketentraman, kesejahteraan dan kemajuan bersama. Kita masih teringat, bagaimana Allah SWT mensosialisasikan keinginannya untuk menjadikan manusia sebagai Kholifah di bumi ini kepada Malaikat, kemudian kepada Jin, Sosialisasi yang dilakukan kepada Malaikat berhasil, terbukti kemudian Malaikat bersedia menerima bahkan bersedia sujud kepada Adam. Sedangkan sosialisasi kepada Jin tidak berhasil, ternyata Jin tidak mau menerima, justru mengelak, bahkan meminta legalitas kepada Allah SWT untuk selalu menggoda Adam beserta keturunannya, agar tidak bisa menjalankan kekhilafah secara sempurna.

Ini membutuhkan sosialisasi tidak selalalu berhasil, terkadang kurang, bahkan tidak berhasil. Namun bagaimanapun juga sosialisasi merupakan cara yang tepat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik, baik di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, maupun di masyarakat dan berbagai tempat kerja. Melalui sosialisasi pemahaman dan pandangan yang berbeda bisa disatukan, atau bisa saling memahami, mencul sikap toleran, sehingga tidak berlanjut menjadi konflik. Bisa hidup berdampingan, sekalipun memiliki pandangan yang berbeda,

keyakinan yang berbeda, bahkan budaya yang berbeda.

Allah SWT sudah berfirman, kehidupan ini memang heterogin, berjenis-jenis, bersuku-suku dan berbangsa bangsa, semuanya dimaksudkan untuk saling mengenal. Mereka memang berbeda, tetapi dihadapan Allah SWT sama, tidak diperlakukan secara beda, sehingga tidak boleh diperlakukan secara berbeda, yang membedakan hanya ketaqwaanya. Itupun Allah SWT tidak memaksa manusia untuk bertaqwa, dipersilahkan untuk memilih, tapi ingat semua pilihan ada konsekwensianya. Bisa baik dan membahagiakan, namun bisa juga tidak baik dan menyusahkan dirinya sendiri.

Multikulturalisme merupakan suatu paham yang menyadari kewajaran situasi dan kondisi social budaya yang berbeda. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang senantiasa memiliki optimisme untuk menyelesaikan persoalan apapun yang dihadapi. Optimisme dimaksud adalah optimisme yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk selalu meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar dapat memiliki apresiasi, simpati, dan empati (Yukhong et al., 2019).

Tentu saja, multikulturalisme tidak terlepas dari konsep toleransi. Toleransi adalah konsep modern tentang saling menghormati dan kerja sama di antara berbagai kelompok orang, termasuk etnis, bahasa,

budaya, dan agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang agung dan mulia yang merupakan bagian yang sepenuhnya organik dari ajaran agama-agama, termasuk Islam. Dalam konteks toleransi antarumat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. "Agama tidak memiliki paksaan", "Agamamu untukmu, dan agama kami untuk kami" adalah contoh populer toleransi dalam Islam. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa toleransi bukanlah konsep asing dalam Islam. Toleransi merupakan bagian integral dari Islam itu sendiri, yang rinciannya dirumuskan oleh para ulama dalam tafsirnya. Menurut ajaran Islam, toleransi tidak hanya berlaku untuk sesama manusia, tetapi juga untuk alam semesta, hewan, dan lingkungan. Dalam pengertian toleransi yang luas ini, toleransi antarumat beragama Islam mendapat perhatian penting dan serius. Selain itu, toleransi beragama merupakan masalah yang mempengaruhi eksistensi keimanan manusia kepada Tuhan. Sangat sensitif, orisinal dan rentan konflik, sehingga dia mendapat banyak perhatian dari Islam.

G. Prinsip Sosialisasi dan Pendidikan Multicultural di Sekolah/Madrasah

Pendidikan Islam merupakan proses pendidikan yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam berupaya mensosialisasikan, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam melalui kegiatan pembelajaran yang dibimbing

oleh guru. Tujuan Pendidikan Islam sesuai dengan ajaran Islam yang termuat dalam Al Quran dan Assunnah, memiliki kualitas yang objektif, sebagai umat yang taat, perbedaan pemahaman kemungkinan kecil terjadi. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang sesuai dengan ajaran dan pemahaman Islam tentang hakikat ilmu dan fitrah manusia, khususnya fitrah spiritual, fitrah social dan kekholifahannya. Pendekatan seperti itu juga memiliki konsekuensi pedagogis yang penting.

Pendidikan dalam Islam terkait dengan tiga aspek, yakni: a) *Tarbiyah* berasal dari akar bahasa Arab *raba* (tumbuh, meningkat), mengacu pada pengembangan potensi individu, proses mengasuh dan membimbing anak menuju kesempurnaan dan kedewasaan, b) *Ta'dib*, berasal dari akar kata *aduba* (menjadi halus, disiplin, berbudaya), mengacu pada proses pengembangan karakter, pembelajaran dasar yang kuat terkait perilaku moral dan sosial dalam komunitas dan masyarakat, serta memahami dan menerima prinsip-prinsip sosial yang paling mendasar, misalnya keadilan. Dan ketika c) *Ta'lim*, berasal dari akar *'alima* (untuk mengetahui, diberitahu, memahami, membedakan), mengacu pada pemberian dan penerimaan pengetahuan, dilakukan melalui pelatihan, instruksi atau bentuk pengajaran lainnya (Rosyad, 2020).

Tiga aspek tersebut sekaligus menjadi aktivitas dalam Pendidikan, harus dilakukan secara simultan,

agar pembentukan kepribadian muslim peserta didik bisa terwujud dengan baik. Peserta didik menyadari dirinya yang harus terus berbenah, berproses untuk menjadi dan memiliki pribadi muslim sempurna, taat beripada kepada Allah SWT, berbakti kepada kedua orang tua dan para gurunya, berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan sekitar, bekerja secara professional, berdisiplin, serta berkeadilan dalam bekerja dan menjalankan tugas kepemimpinan (kekholidahan) sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, selalu dalam lindungan Allah SWT.

Pendidikan Islam menjadi media penyadaran umat yang kini menghadapi berbagai persoalan multidimensional, yakni multicultural bersifat global. Pendidikan Islam memberi solusi dengan mengembangkan pola-pola pendidikan keagamaan yang berbasis inklusivisme, pluralis, dan multikultural, sehingga bisa menumbuhkan wawasan keagamaan yang toleran, inklusif, dan multicultural pada peserta didik. Proses Pendidikan seperti ini diharapkan bisa membentuk kepribadian peserta didik yang kuat aqidahnya, cerdas pemikirannya, wawasannya luas, trampil dan kecatan dalam bertindak, produktif, namun memiliki jiwa social, toleran terhadap sesama.

Pendidikan multikultural adalah pengakuan nilai-nilai individu dan pengembangan potensi individu sehingga individu mampu menghargai budaya etnisnya sendiri serta menghargai budaya

kelompok etnis lain dimana berada. Prinsip keadilan dan kesetaraan ras, suku, gender, serta berbagai hak dan kewajiban yang menyertai diajarkan melalui proses pendidikan Islam, diharapkan bisa diwujudkan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. .

Pendidikan dan pembelajaran multikultural sangat penting untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Pembelajaran multikultural dapat menanamkan dengan baik cara berpikir peserta didik untuk benar-benar menghargai keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang hakiki. Pendidikan dan pembelajaran multicultural memiliki berbagai keutamaan, terutama:

1. Memberikan pembelajaran terobosan baru yang mampu menumbuhkan empati dan mengurangi prasangka siswa atau siswa sehingga tercipta manusia (warga) yang mampu menyelesaikan konflik antarbudaya tanpa kekerasan,
2. Menerapkan pendekatan dan potensi strategi pembelajaran dalam mendorong proses interaksi sosial dan mengandung kasih sayang yang kuat,
3. Model pembelajaran multikultural mendukung guru dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk membangun nilai kolaboratif dan komitmen dalam kehidupan masyarakat majemuk yang serba cepat, dan memberikan kontribusi kepada bangsa

Indonesia dalam menyelesaikan dan mengelola konflik yang timbul di masyarakat dengan meningkatkan empati dan mengurangi prasangka.

H. Kesimpulan

Interaksi social dan sosialisasi merupakan dua hal yang selalu dialami semua orang, baik sewaktu berada pada lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, maupun di masyarakat dengan berbagai institusinya. Interaksi social berlangsung sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, untuk memberi atau menerima, bersepakat melakukan sesuatu, membentuk sesuatu, termasuk membentuk berbagai institusi social (keluarga, sekolah, agama, ekonomi, dll) guna memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya.

.,Sosialisasi sebagai pengenalan dan penanaman nilai dan norma baru di institusi tertentu, Sosialisasi menjadi proses belajar, pembentukan kepribadian peserta didik yang lebih baik, sehingga bisa bersikap, bertindak dan berperilaku secara baik dimanapun berada. Keberhasilan proses sosialisasi sangat menentukan keberlangsungan individu dan kelompok dalam melaksanakan fungsi dan peran di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan kerja dan masyarakat.

Sosialisasi ada dua macam, sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan pengenalan dan penanaman nilai dan norma pertama

kali untuk anak, berlangsung di lingkungan keluarga. Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi lanjutan yang berlangsung di sekolah dan masyarakat. Keberhasilan sosialisasi sekunder sangat ditentukan oleh keberhasilan sosialisasi primer yang terjadi di lingkungan keluarga. Orang tua mempunyai peran terbesar dalam membentuk kepribadian anak, yang harus terus berkolaborasi dan bersinergi dengan para guru dalam membentuk kepribadian anak, supaya berhasil dengan baik. Tidak sekedar menitipkan ke sekolah, tetapi memantau dan mengevaluasi secara berkelanjutan, serta mengambil solusi untuk perbaikan secara terus menerus.

Multikulturalisme merupakan faham yang menghargai perbedaan budaya, ideologi dan gender, dan lain-lain. Multikulturalisme muncul sebagai konsekuensi kehidupan manusia sebagai makhluk social yang memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya, gender, keyakinan, dan agama yang cenderung bersinggungan, bahkan bisa terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dipandang sebagai khazanah yang menarik, tidak harus disamakan, namun harus dihargai. Bisa diwujudkan melalui kehidupan yang toleran, saling menghargai, setuju dalam perbedaan.

Pendidikan multicultural dalam Islam lebih difokuskan pada penguatan keimanan peserta didik dalam menjalankan ibadah, baik mahdhloh maupun ghoiru mahdhloh, namun toleran terhadap sesama

yang berbeda, bukan malah mengikuti apalagi larut kedalam budaya dan idiologi lain diluar Islam. Pendidikan multicultural dalam Islam berlaku prinsip, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Silakan masing-masing menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan, keyakinan dan syariat yang dianut, namun jangan kemudian memaksakan orang lain berkeyakinan dan bertindak yang sama. Dakwah dalam Islam prinsipnya mengajar, bukan memaksakan, Bila yang diajak tidak mau, maka kita tetap menghargai pilihan tersebut. Hidup tetap berdampingan dalam perbedaan, namun dalam kondisi tetap damai.

Desain kurikulum, model pembelajaran dan penilaian, serta implementasikan di setiap sekolah/madrasa, disertai evaluasi yang terus menerus dan langkah-langkat tindak lanjutnya secara kongkrit sangat penting, harus dilakukan oleh guru dan berbagi pihak yang berkepentingan, agar Pendidikan multicultural benar-benar berlangsung secara efektif dan efisien, berhasil dengan baik, sesuai prinsip dasar ajaran Islam.

I. Daftar Bacaan

1. Anshori, I. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 63-74.
<https://halaqa.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/1540>

2. Anshori, I., & Lestari, E. W. (2020). Penanaman karakter keagamaan peserta didik melalui pembelajaran sentra di RA Rahmatillah Sidoarjo. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 193-212. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/view/3110>
3. Damsar . 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: kharisma Putra Utama
4. Hanum, F. (2006). Diktat Mata Kuliah; Sosioantropologi Pendidikan. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
5. Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
6. Karsidi, D. (2005). *Sosiologi pendidikan*.
7. Rosyad, A. M. (2020). The Integration of Islamic Education and Multicultural Education in Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(1), 164–181. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/87
8. Yukhong, C., Phuwanatwichit, T., Mangkhang, C., & Sarobol, A. (2019). Socialization concepts and educational management development to create muslim citizenship through private islamic schools in the Southern Border Provinces of Thailand. *International Journal of Islamic Thought*, 15(June

2019),

27–34.

<https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.003>

Bab 12

Kelas sebagai Sistem Sosial Serta Relefansinnya dengan Ajaran Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggali, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Pengertian ruang kelas sebagai sistem sosial.
2. Peran ruang kelas sebagai sistem sosial.
3. Karakteristik suasana kelas serta relefansinnya dengan ajaran Islam.

B. Pengertian Kelas Sebagai Sistem Sosial

Kelas bila dihubungkan dengan sekolah memiliki dua pengertian: Pertama, ruang tempat berjalannya proses pendidikan. Kedua, sejumlah pelajar yang sama-sama menempuh suatu tingkatan tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan. Menurut Damsar ruang kelas bukan sekedar ruang fisik semata, namun ia melampaui ini, namun mencakup juga ruang sosial dan budaya. Dalam ruang kelas terdapat dinamika yang terjadi di dalamnya yang merupakan gabungan dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok sosial yang teratur dan memiliki fungsi serta peran yang kompleks dalam pendidikan. Kelas tidak sekedar ruang gedung, melainkan semua tempat yang

bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar.

Sistem memiliki dua arti, yakni pertama, seseorang berhubungan dengan masyarakat; kedua dia suka memperhatikan kepentingan umum dalam berbagai bentuk percakapan, suka membantu dan menyumbang (KBBI). Sistem berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur, memiliki tujuan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sosial berasal dari kata Latin *socius*, berarti persatuan, terikat, sekutu, berteman. Atau dari kata *socio*, berarti menghubungkan, berteman, menjalin ikatan, dan bergabung bersama. Menurut Robert MZ (1985: 7). Sosial berasal dari bahasa Latin yakni *socius* yang artinya bersama-sama, bersatu, terkait, sekutu dan berteman. Kata "sosial" sebagai makna subjektif yang memperhitungkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Dengan demikian sosial dapat diartikan sebagai persahabatan atau pertemanan. Kata sosial dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat.

Sistem sosial terdapat dua kata yaitu sistem dan sosial, dimana secara etimologi sistem merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani *systema* atau *systematos* yang berasal dari kata *synistani* yang berarti menempatkan bersama. Sistem sosial memiliki

arti komponen-komponen sosial dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur, mempunyai tujuan dan merupakan suatu keseluruhan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari individu atau kelompok yang di dalamnya sudah mencakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Sistem sosial keduanya saling terikat sehingga membentuk satu kesatuan yang bisa mendorong terjadinya suatu perubahan dalam keterikatan. Sistem sosial juga bisa dipahami sebagai sebagai sesuatu keterkaitan yang teratur antara individu sehingga mampu membentuk totalitas.

Kelas disamping sebagai ruang social juga sebagai system social. Kelas sebagai ruang sosial menunjukkan di dalam ruang terdapat beberapa unsur fungsional yang terkait antara satu dengan yang lain, seperti guru, murid dan juga menejemen sekolah. Setiap anggota yang terlibat dalam ruang kelas akan menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan peran mereka. Seperti status sebagai manajer sekolah harus diperankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, seperti mengelola secara efektif dari sisi teknis administrative, dan penyediaan sarana dan prasarana di sekolah yang dibutuhkan di lingkungan sekolah. Peran sebagai guru, disini guru memiliki peran sebagai pendidik , pengayom pengasuh dan pemberi motivasi kepada siswa atau peserta didik. Yang terakhir adalah peran sebagai siswa. Siswa

memiliki peran sebagai penuntut ilmu pengetahuan, pekerja keras serta mencari kebenaran. Dalam kelas hubungan antara guru dan murid dengan status atau peran mereka masing-masing. Mereka bisa membentuk suatu jaringan hubungan yang terpola dan terstruktur sesuai dengan peran yang mereka dapat. Pola jaringan ini akan berdampak pada perilaku, kompetensi, kapital sosial budaya dan keberhasilan peserta didik di masa mendatang.

Di dalam ruang kelas, terdapat individu-individu yang menempatinnya dengan karakteristik yang berbeda, banyak yang beranggapan bahwa ruang kelas hanya sebatas sebagai tempat belajar saja, namun sebenarnya disana terdapat system social serta interaksi yang lambat laun, sadar ataupun tidak akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter individu tersebut. Oleh sebab itu, ruang kelas sebagai tempat mereka bernaung hendaknya harus mampu berperan dalam pembentukan karakter yang tertentu akan berguna untuk kehidupan mendatang.³⁶

Kelas juga sebagai sebagai sistem social, merupakan kumpulan orang yang ada didalam ruang kelas dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lain, dan hakikat keberadaan kelompok sosial bukan hanya tergantung dari jarak fisik saja, melainkan pada

³⁶ Makalah S1 dan S2 Ruang Kelas Sebagai Suatu Sistem <https://hasbyeducation.blogspot.com/2016/10/ruang-kelas-sebagai-suatu-sistem.html?m=1>, di akses pada tgl 9 maret 2022.

kesadaran individu dalam kelompok tersebut agar adanya hubungan timbal balik antara individu dan kelompok yang ada pada kelas tersebut.

Kelas sebagai sistem social berarti jalinan hubungan dari berbagai komponen manusia yang ada di kelas, yakni guru dan siswa, yang sedang melaksanakan proses pembelajaran, diikat oleh aturan-aturan berupa tata tertib yang disepakati bersama, untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Di kelas inilah proses pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi social, kontak social yang dilanjutkan dengan komunikasi, menyampaikan ide, gagasan, pengalaman, bahkan ketrampilan, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Terjadi transmisi, bahkan transformasi nilai, ilmu dan ketrampilan, sehingga membentuk kepribadian siswa maupun guru lebih baik. Keilmuan dan wawasan siswa dan guru bertambah, menjadi lebih trampil, sehingga bisa bersikap, bertindak, berperilaku lebih dewasa. Kedewasaan inilah yang menjadi ciri utama Pendidikan, modal utama untuk hidup dan menjalankan tugas kehidupan secara professional dan bertanggungjawab.

Kelas sebagai system sosial merupakan kelompok dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi dan hakikat keberadaan kelompok sosial bukan hanya tergantung dari dekatnya jarak fisik maupun kesadaran non fisik,

melainkan pada kesadaran para individu dalam kelompok tersebut. Relevansinya dengan ajaran Islam lebih mengarah kepada keadilan sosial, orang yang mampu atau golongan kaya yang dapat merealisasikan keadilan sosial dipandang sebagai ibadah dan jihad.³⁷

Status social seseorang dalam ajaran Islam dilihat dari keilmuan dan ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Misalnya seorang guru atau ustad kelas sosialnya lebih tinggi dari seorang murid, seorang ulama sangat dihormati oleh masyarakat karena ketinggian ilmu dan ketaatannya dalam menjalankan perintah agama. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religious, misalnya masyarakat santri, seorang ulama sangat dihormati dan dipatuhi oleh santri-santrinya karena memiliki ilmu yang tinggi dan taat menjalankan perintah agama. Selain karena dalam ajaran Islam seorang santri atau murid memang wajib tunduk pada perintah ustad atau guru selama tidak menyalahi syariat.

Kelas sosial tidak mengikat secara turun temurun. Kelas sosial bisa berubah-ubah tergantung usahanya. Seorang yang terlahir dari keluarga biasa bisa menjadi ulama besar jika orang tersebut sungguh-sungguh dalam belajar dan taat terhadap agama. Sehingga kelas sosialnya bisa terangkat berkat usaha

³⁷ Ibid, hlm 3-4

dan ketaatannya meskipun berasal dari keluarga biasa.

Penyetaraan perlakuan terhadap kelas-kelas sosial diajarkan dalam Islam, setiap orang harus diperlakukan secara setara dan adil, pembedanya terkait keimanan dan ketakwaanya pada Allah SWT. Kesetaraan ini sudah dipraktekkan oleh Rasul Muhammad SAW . Pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, perbedaan kelas-kelas sosial sangat terasa, para penguasa bebas melakukan segalanya terhadap orang miskin dan yang dianggap lemah, termasuk para budak yang dihilangkan segala hak-haknya sebagai manusia. Perlakuan terhadap gender sangat timpang, anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan. Namun, sejak Nabi Muhammad diutus tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin semuanya dianggap sama bahkan Rasulullah memulyakan orang miskin.³⁸Proses-proses ini harus diwujudkan melalui proses pembelajaran yang berlangsung, ditanamkan kepada peserta didik, melalui transfer pengetahuan dan pembiasaan, tidak hanya dalam ruang kelas tetapi juga di luar kelas.

³⁸ Islam dan Kelas Sosial,2020.<http://bata-bata.net/2020/04/17/Islam-dan-Kelas-Sosial.html>,hal 1-3, di akses pada tgl 9 maret 2022.

C. Peran Ruang Kelas sebagai sistem sosial

Sebagai sistem sosial, ruang kelas memiliki beberapa peran antara lain sebagai berikut:

1. Ruang kelas sebagai sistem interaksi

Ruang kelas sebagai system interaksi berarti di kelas terjadi proses interaksi antara guru dengan siswa, Kotak social terjadi antara guru dengan siswa kemudian dilanjutkan dengan komunikasi, yakni proses penyampaian pesan, ide, gagasan, nilai, norma, ilmu dan ketrampilan secara lisan, tulisan, bahkan dengan isyarat, gerak gerik tampilan guru, menjadikan siswa bisa focus kepada guru, sehingga bisa menerima apa yang disampaikan. Dalam proses pembelajaran saling memberi dan saling menerima itu biasa terjadi. Transfer nilai, norma, sikap, ilmu dan ketampilan itu dilakukan oleh guru kepada siswa, namun siswapun mereaksi, dengan memberikan respon yang bisa jadi sama atau berbeda. Dampak dari proses ini, tidak hanya peningkatan afektif, kognitif dan psikomotorik yang lebih baik, di kalangan siswa, tetapi juga guru.

Interaksi social di ruang kelas merupakan suatu tindakan timbal balik antara guru dengan siswa melalui suatu kontak dan komunikasi, saling tergantung satu sama lain, menjadi satu kesatuan, dan dilakukan secara berkelanjutan. Hubungan guru dengan siswa dapat dilihat sebagai sistem interaksi sosial. Hubungan keduanya diikat oleh ikatan moral dan etika profesi guru, sebagai

pendidik dan terdidik. Masing-masing guru dan siswa memiliki motif, keinginan, kepentingan, kebutuhan, dan orientasi sendiri tentang berbagai macam hal berkaitan dengan hidup dan kehidupan, terutama terkait Pendidikan dan pembelajaran. Masing-masing dari individu guru dan murid saling memberikan tanda, perspektif, sikap, dan tindakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan hubungan mereka.

Proses-proses ini terus berlangsung sehingga akhirnya menjadi pola hubungan yang menyatu, yang diikat oleh nilai-nilai dan norma edukatif, sehingga interaksi yang berlangsung dinamakan interaksi edukatif, interaksi yang mendidik. Pola hubungan juga menjadi pengontrol perilaku masing-masing, dan pola hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai sistem interaksi social, terjadi dalam kelas.³⁹

Interaksi edukatif dilaksanakan setelah keduanya, yakni guru dan siswa bersepakat. Kesepakatan mengandung konsekwensi, semuanya harus menaati, bila tidak maka masing-masing bersedia melaksanakan sanksi yang sudah disepakati. Kesepakatan ini harus dibuat sejak awal, sewaktu guru dan siswa memulai pembelajaran, agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik.

³⁹ Ibid, hlm, 98-99.

Melalui kesepakatan ini, proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, sehingga hasilnya juga baik. Hasilnya berupa kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang lebih baik. Tidak hanya berupa nilai, angka yang tinggi, tetapi juga sikap dan perilaku lebih dewasa, serta memiliki ketrampilan khusus, sehingga trampil dalam menjalankan tugas secara profesional.

2. Ruang kelas sebagai sistem pertukaran

Kelas dapat dipandang sebagai sebuah sistem sosial di mana terjadi berbagai pertukaran dalam proses interaksi. Pertukaran ini tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi atau pengetahuan, tetapi juga melibatkan pertukaran nilai, norma, status, dan sumber daya lainnya.[7] berikut beberapa hal yang terjadi ketika kelas sebagai sistem pertukaran :

- a. Pengetahuan adalah pertukaran yang paling dasar. Guru memberikan pengetahuan kepada siswa, sementara siswa menyerap dan memproses informasi tersebut.
- b. Selain pengetahuan, nilai-nilai dan norma sosial juga dipertukarkan. Guru menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa, dan siswa juga saling mempengaruhi dalam membentuk nilai-nilai kelompok.
- c. Di dalam kelas, ada semacam hierarki sosial. Siswa yang pandai, populer, atau memiliki latar

belakang sosial tertentu cenderung memiliki status yang lebih tinggi.

- d. Guru memberikan perhatian dan pengakuan kepada siswa yang aktif dan berprestasi. Ini adalah bentuk penghargaan yang memotivasi siswa untuk terus belajar.
- e. Dalam interaksi sehari-hari, siswa juga saling bertukar emosi dan perasaan. Mereka bisa merasa senang, sedih, marah, atau takut bersama.

Geogre Caspar Hommans menerangkan bahwa ruang kelas sebagai sistem pertukaran dapat mengembangkan empat proposisi yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai dan deprivasi satiasi. [8]. Pertukaran terjadi di ruang kelas, karena dalam proses pembelajaran di kelas, baik guru maupun para siswa sebagai makhluk sosial yang rasional, dia memperhitungkan untung rugi. Kelas bisa bertahan apabila semua unsur di kelas memperoleh keuntungan, atau minimal tidak mendapatkan kerugian.

Ruang kelas sebagai sistem pertukaran, yakni hubungan guru dan murid sebagai suatu sistem yang saling bertukar. Pertukaran ini terjadi apabila guru dan para siswa saling tergantung, sehingga terdorong untuk saling melengkapi, supaya sama-sama untung. Keuntungan yang diharapkan bersifat ekstrinsik berupa materi dan benda, maupun instrinsik berupa nilai (peringkat), penghargaan,

pengakuan, perhatian, cinta, kasih sayang. Guru disamping menjalankan tugas, panggilan mengabdikan, juga berjuang untuk memperoleh pendapat finansial lebih layak, penghargaan, pengakuan, dan kecintaan dari para murid, orangtua/wali murid, dan kepala sekolah. Sedangkan siswa dalam proses pembelajaran berusaha untuk memperoleh nilai (peringkat), penghargaan, kasih sayang, perhatian, dan cinta dari guru.⁴⁰

3. Konteks sosial dalam kelas

Konteks sosial (*social context*) adalah konteks yang timbul akibat dari munculnya interaksi antar anggota, kelas serta masyarakat dalam sosial dan budaya.⁴¹ Konteks sosial di kelas merupakan pola lingkungan sosial yang terbentuk didalam ruang kelas. Yang tidak hanya mencakup interaksi antara guru dan murid tetapi juga interaksi antar siswa. serta pengaruh faktor-faktor sosial budaya yang lebih luas terhadap proses pembelajaran. Berikut beberapa unsur-unsur yang membentuk konteks sosial di kelas:

- a. Cara guru berinteraksi dengan siswa, gaya mengajar, harapan, dan sikap guru sangat mempengaruhi bagaimana siswa merespons pembelajaran.

⁴⁰ hlm, 100-101.

⁴¹ Ibid, hlm 120

- b. Hubungan antar siswa, dinamika kelompok, persaingan, dan kerja sama juga membentuk konteks sosial di kelas
- c. Nilai-nilai yang dihargai di kelas, seperti kerja sama, kompetisi, atau individualisme, akan membentuk perilaku siswa.
- d. Tata letak kelas, ukuran kelas, dan penggunaan ruang juga mempengaruhi interaksi sosial dan proses belajar.
- e. Faktor-faktor di luar kelas seperti latar belakang sosial ekonomi siswa, budaya keluarga, dan kondisi masyarakat secara umum juga mempengaruhi konteks sosial di kelas
- f. Konteks sosial di kelas adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan memahami konteks sosial ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung keberhasilan siswa. [3]

D. Karakteristik Suasana Kelas yang Berdaya dan Berhasil, Serta Relevansinya dengan Ajaran Islam

Suasana kelas yang berdaya dan berhasil memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pembelajaran yang efektif dan optimal. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, terdapat relevansi nilai-nilai yang sangat signifikan, yang dapat memperkaya suasana pembelajaran dan membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara spiritual dan moral. Berikut adalah

karakteristik suasana kelas tersebut dan kaitannya dengan ajaran Islam:

1. Keterlibatan aktif dan partisipasi siswa

Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui diskusi, tanya jawab, maupun kegiatan kolaboratif. Keterlibatan ini memunculkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar, yang membantu mereka merasa lebih termotivasi dan berdaya. Dalam Islam, pembelajaran yang adalah hal yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW sering kali mengajak para sahabat berdiskusi dan bertanya, mendorong mereka untuk berpikir kritis. Dalam hadis disebutkan, “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat” yang menunjukkan pentingnya semangat belajar aktif sepanjang hidup.

2. Rasa aman dan nyaman untuk belajar

Kelas yang berdaya menciptakan lingkungan yang aman secara fisik dan emosional bagi siswa. Mereka merasa dihargai dan tidak takut untuk berbuat salah, yang memungkinkan mereka untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Islam menekankan pentingnya adab dan etika dalam interaksi sosial, termasuk dalam pendidikan. Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan dan kesabaran dalam mendidik. Suasana belajar yang nyaman juga mencerminkan semangat saling menghargai, seperti yang tertuang dalam firman Allah,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati..” (QS. Al-Hujurat: 10).

3. Pendidikan berbasis akhlak dan moral

Kelas yang berhasil tidak hanya fokus pada capaian akademis tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik. Penanaman nilai-nilai moral dan etika menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencapai prestasi akademik, tetapi juga untuk membangun akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Ahmad). Oleh karena itu, suasana kelas yang berfokus pada pembentukan karakter selaras dengan misi Islam.

4. Interaksi yang adil dan inklusif

Dalam kelas yang berdaya, setiap siswa diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi, dan setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Guru bersikap adil dalam memberikan perhatian dan peluang kepada

seluruh siswa. Ajaran Islam sangat menekankan keadilan, seperti dalam firman Allah,

انَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ۖ... ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl: 90). Suasana yang inklusif dan adil dalam kelas merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan dan persamaan yang diajarkan Islam.

5. Pembelajaran yang relevan dan bermakna

Kelas yang berhasil menyediakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, yang membuat mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam konteks kehidupan nyata. Dalam Islam, ilmu yang bermanfaat sangat diutamakan. Ilmu tidak hanya sekadar pengetahuan teoretis, tetapi harus dapat diaplikasikan untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad).

6. Kolaborasi dan kerja sama

Suasana kelas yang berdaya mendorong kolaborasi dan kerja sama antar siswa. Kelas tidak hanya menjadi tempat kompetisi, tetapi juga tempat untuk saling membantu dan belajar bersama. Konsep gotong royong dan kerjasama sangat ditekankan dalam Islam. Salah satu

contohnya adalah konsep ta'awun (saling membantu dalam kebaikan), sebagaimana dalam firman Allah,

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2).

E. Kesimpulan

Kelas disamping sebagai ruang juga sebagai aktifitas pembelajaran. Karena itu proses pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam ruang kelas, maupun di luar kelas. Kelas sebagai sistem sosial berarti didalam kelas terdapat unsur individu-individu manusia yang berkelompok, yakni guru dan para siswa, melakukan interaksi (terjadi kontak social dan komunikasi), terjadi transmisi nilai-nilai, norma, ilmu pengetahuan dan ketrampilan dari guru kepada siswa, yang konsekwensinya guru juga menerima respon dari siswa, sehingga kepibadian dewasa yang terbentuk tidak hanya pada diri para siswa, tetapi juga guru. Kelas ini bisa tetap berlangsung sebagai tempat pembelajaran, karena masing-masing saling membutuhkan, ada sesuatu yang diperukarkan, bisa berupa materi dan non materi.

Dalam kelas terdapat guru dan siswa yang memiliki berbagai macam latar belakang social

ekonomi, budaya, gender, bakat, minat, bahkan gaya belajar (auditif, visual, kinestetis). Inilah konteks kelas, sehingga guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut, dengan memperlakukan secara berbeda sesuai kondisi siswa, sama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang baik dimulai dengan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, terkait berbagai hal, tujuan yang akan dicapai, nilai dan norma digunakan, model pembelajaran yang akan dilakukan dan sistem penilaiannya. Kesepakatan yang dibuat sejak awal akan lebih menjamin kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran yang optimal.

Kelas yang berdaya adalah kelas yang memberi peluang besar keterlibatan aktif dan partisipan siswa dalam proses pembelajaran, menjamin rasa aman dan nyaman untuk belajar, berbasis akhlak dan moral, terjadi interaksi yang adil dan inklusif, pembelajaran yang relevan dan bermakna, serta terjadi kolaborasi dan kerjasama yang harmonis. Kriteria ini menjadi ciri khas utama Pendidikan dan pembelajaran menurut Islam, yang harus diwujudkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Realisasinya yang harus didukung oleh semua pihak, baik dari unsur-unsur sekolah, orang tua maupun masyarakat.

F. Daftar Bacaan

1. Amrulloh, F.H. (2022). “Analisis Pertemanan Siswi Kelas I Sd Berdasarkan Perspektif George Caspar Homans,” *Ibtidaiyyah J. Pendidik Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, vol. 1, no. 2, pp. 61–74.
2. Ariadi, P., Rulitawati, & Antoni. (2021). “Urgensi Kenyamanan Belajar dan Mengajar Dalam Islam Serta Kaitannya Dengan Al-Qur’an Surat Al-Mudallah AYAT 11 (Vol. 2)”.
3. Arisanti, F., Wahyudi, M., & Muttaqin, A. (2024). “Pendekatan Holistik Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Menyelaraskan Aspek Kognitif, Emosional Dan Sosial,” [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky.
4. Cibro, A. N., Saripuddin, M., Ramnur, A., Siregar, A. A., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). Peran Guru PAI dalam Pengelolaan Kelas yang Aktif, Efektif, dan Menyenangkan di MTsS At-Tihadiah Laut Dendang. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 13, Issue 1). <https://jurnaldidaktika.org433>
5. Damsar, (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, h. 93
6. Idi, Abdullah. (2013). *Sosiologi Pendidikan : individu, masyarakat dan pendidikan*, Jakarta : Rajawali Press,
7. Deliyanto, Bambang. (2022). *Konsep Dasar Sistem Sosial*, dilihat melalui situs

- <https://www.pustaka.ut.ac.id> diakses pada 10 Maret pukul 11:36 WIB
8. [https://www.academia.edu/35016584/RUANG KELAS CLASSROOM SEBAGAI SISTEM SOSIAL](https://www.academia.edu/35016584/RUANG_KELAS_CLASSROOM_SEBAGAI_SISTEM_SOSIAL), Di akses pada tgl 9 maret 2022
 9. Islam dan Kelas Sosial,2020.<http://bata-bata.net/2020/04/17/Islam-dan-Kelas-Sosial.html>,hal 1-3, di akses pada tgl 9 maret 2022.
 10. Laila, I and I. Anshori, Isa. (2022). “Islamika Implementasi Metode Pembelajaran Mind Mapping Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Tentang Manusia Sebagai Makhluk Sosial Di MI Marhatillah Matabe,” 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika>
 11. Maylida, Cut. (2024). “Sistem Sosial Dan Kebudayaan Indonesia,” 2024.
 12. Nurnazmi and Kholifah, Siti. (2023). “Anatomi Teori Pirre Bourdieu Pada Sosiologi Postmodern,” 2023.
 13. Khoiiri, M.Y. “Sekolah Dan Kelas Sebagai Sistem Sosial Dan Organisasi.”
 14. Rehulina Juniarti BR, Sembiring, Pranowo,& Kunjana Rahardi,” Pengemabangn Buku Ajarn Konteks Situasi dan Sosial dalam Pragmatik Edukasional”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Vol.18, No.2, Oktober 2018

15. Saputra, M.D., Putri, W. S., &Listya,I. (2023). “Kelompok dalam Teori Pertukaran Sosial: Pengaruh Interaksi Interpersonal,” *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 7, pp. 65–76, 2023.
16. Sekolah Dalam Kontes Sosial Kultural, dilihat dari situs <https://zackeyhernandez.blogspot.com> diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 15: 35
17. Setiawan, Herdi & and Mudjiran, (2022). “Pentingnya Lingkungan Belajar Yang Kondusif Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar,”
18. Suswanto. (2021). “Kondisi dan Suasana Pembelajaran Efektif yang Islami” (Vol. 1, Issue 1).
19. Syarnubi, “ Guru Yang Bermoral Dalam Konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum, dan Negara” *Jurnal PAI Raden Fatah Vol.1,No.1 Januari 2019*
20. Makalah S1 dan S2 Ruang Kelas Sebagai Suatu Sistem
<https://hasbyeducation.blogspot.com/2016/10/ruang-kelas-sebagai-suatu-sistem.html?m=1>, di akses pada tgl 9 maret 2022.
21. Wahyudi, E. (2022). “Efektifitas Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Aktivitas Pembelajaran PAI”. *GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(1). <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau>
22. Zaitun.2015. *Sosiologi Pendidikan: Analisis Komprehensif Aspek Pendidikan Dan Prosesosial*. Pekanbaru: Kreasi pendidikan. Hal 4-5

Bab 13

Hidden Curriuculum, Pengembangan Karakter dan Pembentukan Sumber Daya Manusia di Sekolah/ Madrasah Beserta Relefansinya dalam Kehidupan

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Pengertian *Hidden Currikulum* dan Karakter.
2. Pentingnya *Hidden Curriculum* di Sekolah
3. Aspek-aspek *Hidden Curriculum* di kelas dan di sekolah
4. Peran Pendidikan karakter dalam pembentukan sumber daya manusia di sekolah/madrasah
5. Relefansi *Hidden Currikulum* dalam pembelajaran
6. Pengembangan Karakter dan pembentukan Sumber Daya Manusia di Sekolah / madrasah dengan ajaran Islam

B. Pengertian *Hidden Currikulum* dan Karakter

Hidden curriculum, berasal dari kata *hidden* dan *curriculum*. Dalam Bahasa Inggris, *hidden* berarti tersembunyi atau terselubung. Kurikulum merupakan

sejumlah mata pelajaran dan pengalaman belajar yang harus dilalui oleh siswa demi menyelesaikan tugas Pendidikan dan pembelajarannya. Dengan demikian, *hidden curriculum* adalah kurikulum tersembunyi atau kurikulum terselubung. Maksud tersembunyi, terselubung di sini adalah kurikulum ini tidak tercantum dalam dokumen kurikulum, tidak tertulis, diantaranya terdapat pada diri guru, keribadian guru, sikap dan perilaku guru yang diwujudkan sewaktu proses belajar mengajar.

Konsep kurikulum tersembunyi dikembangkan oleh Benson Snyder pada tahun 1971, dan sering digunakan oleh pendidik, sosiolog, dan psikolog dalam menjelaskan sistem informal. Pengertian kurikulum tersembunyi sendiri dapat diperluas menjadi sesuatu yang dipelajari dan diajarkan bersama dengan kurikulum resmi, melekat dalam peraturan, regulasi dan tidak tertulis tentang perilaku dan sikap. Istilah kurikulum tersembunyi ini menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh di dalam berlangsungnya proses pengajaran dan pendidikan yang mungkin dapat meningkatkan atau bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain kurikulum tersembunyi menunjuk pada praktek dan hasil pendidikan yang tidak diuraikan dalam kurikulum terprogram atau petunjuk kurikulum kebijakan lembaga pendidikan.

Kurikulum ini memiliki kontribusi besar dalam pencapaian tujuan Pendidikan dan pembelajaran.

Kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang tidak terencanakan. Istilah *hidden curriculum* ini menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh di dalam berlangsungnya proses pengajaran dan pendidikan yang mungkin dapat meningkatkan atau mendorong atau bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan Pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain *hidden curriculum* menunjuk pada praktek dan hasil pendidikan yang tidak diuraikan dalam kurikulum terprogram atau petunjuk kurikulum kebijakan lembaga pendidikan.

Para ahli mendefinisikan *hidden Curriculum* berbagai macam, antara lain:

1. Murray Print: *hidden curriculum* adalah peristiwa atau kegiatan yang terjadi tetapi tidak direncanakan keberadaanya, tapi bisa dimanfaatkan guru dalam pencapaian hasil belajar. Selain itu, *hidden curriculum* juga dapat mempengaruhi gaya belajar atau tujuan yang tidak dideskripsikan tetapi pencapaiannya dapat dilaksanakan oleh guru pada waktu proses belajar mengajar berlangsung.
2. Jane Martin: *hidden curriculum* adalah hasil sampingan dari proses pembelajaran, baik diluar ataupun di dalam sekolah tetapi tidak secara formal dicantumkan sebagai tujuan pendidikan.
3. Allan A. Glatthorn: *hidden curriculum* adalah kurikulum yang tidak menjadi bagian yang harus

dipelajari, yang digambarkan sebagai berbagai aspek yang ada di sekolah dan diluar sekolah, tetapi mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi, dan perilaku siswa.

Karakter (watak) merupakan bagian dari kepribadian (personality), di dalam kepribadian terdapat unsur sikap (attitude), sifat (traits), temperamen dan karakter (watak). Adapun karakter mengandung pengertian yang lebih luas, mencakup pengertian sikap, sifat-sifat dan temperamen. Karakter merupakan struktur batin manusia yang tampak pada tindakan tertentu, dan bersifat tetap, tindakan itu baik maupun buruk, serta merupakan ciri khas dari pribadi orang yang bersangkutan. Bila temperamen sangat dipengaruhi oleh konstitusi tubuh dan pembawaannya, maka karakter lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti pengalaman, pendidikan, inteligensi dan kemauan.

Kepribadian guru menjadi kurikulum tersembunyi, muncul ketika proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam maupun di luar kelas. Kepribadian ini bisa dicontoh oleh siswa, terjadi proses identifikasi, mempengaruhi corak kepribadian siswa. Untuk itu menjadi guru harus berkepribadian terbaik. Proses pembentukannya butuh lama, seharusnya melalui proses pendidikan sebelum menjadi guru.

C. Pentingnya *Hidden Curriculum* di Sekolah

Kurikulum tersembunyi adalah segala kegiatan yang mempengaruhi siswa, baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa di dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah. Dalam kebijakan sekolah yaitu bagaimana sekolah menerapkan kebiasaan atau berbagai aturan disiplin yang harus diterapkan pada seluruh komponen sekolah atau warga sekolah. Misalnya kebiasaan ketepatan guru melalui pelajaran, kemampuan dan cara guru menguasai kelas, bagaimana guru menyikapi berbagai kenakalan siswa baik diluar ataupun didalam sekolah.

Kurikulum tersembunyi memiliki peran sangat penting, yakni mengkonstruksi pola berpikir siswa, selanjutnya dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kurikulum tersembunyi juga memiliki beberapa fungsi, bertujuan membangun kualitas diri seorang siswa. Berikut adalah beberapa fungsi kurikulum tersembunyi:

1. *Hidden curriculum* berfungsi sebagai pencairan suasana, menciptakan minat, dan penghargaan terhadap guru jika disampaikan dengan gaya tutur serta keanekaragaman pengetahuan guru. Guru yang disukai siswa merupakan modal awal bagi kesuksesan proses pembelajaran, lancarnya belajar mengajar dan merangsang minat belajar siswa.

2. *Hidden curriculum* berfungsi memberikan kecakapan, ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi siswa sebagai bekal dalam fase kehidupan dikemudian hari, yakni mempersiapkan siswa untuk memasuki berbagai sector kerja di masyarakat.
3. *Hidden curriculum* berfungsi menciptakan masyarakat yang demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan pelatihan, ekstrakurikuler, diskusi, dan lain-lain.
4. *Hidden curriculum* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku siswa maupun perilaku guru. Guru memberikan contoh panutan, teladan, dan pengalaman yang ditransmisikan kepada siswa. Tidak jarang kemudian siswa mendiskusikan, menegosiasikan penjelasan tersebut.
5. *Hidden curriculum* berfungsi meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Semangat belajar dan mengajar yang ditunjukkan guru menjadikan siswa termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Begitu juga penyediaan lingkungan belajar yang asri, menyenangkan, dengan berbagai sumber belajar yang lebih bisa diakses secara online menjadikan siswa termotivasi untuk belajar dan berprestasi lebih baik. Penciptaan suasana religius, misalnya kegiatan shalat berjama'ah, berdoa bersama, tadarus bersama, praktik social keagamaan dan lain-lain bisa mendorong motivasi belajar siswa dalam mempelajari Fiqih

dan Al-Qur'an, secara otomatis juga bisa meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran tersebut.

D. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi *Hidden Curriculum* di kelas dan di sekolah

Terdapat dua aspek yang mempengaruhi *Hidden Curriculum* di suatu sekolah dan kelas, yaitu aspek relatif tetap dan aspek yang dapat berubah. Termasuk kategori aspek relatif tetap adalah ideologi, keyakinan, nilai dan budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah dan kelas, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa.⁴² Sedangkan aspek yang dapat berubah meliputi variabel organisasi, sistem sosial dan kebudayaan.

Allan A Glatthom menjelaskan bahwa ketiga variabel tersebut penting untuk pengelolaan dan pengembangan sekolah dan kelas. Variabel organisasi yakni kebijakan guru dalam proses pembelajaran, meliputi bagaimana guru mengelola kelas, bagaimana pelajaran diberikan, bagaimana kenaikan kelas dilakukan. Variabel Sistem social, yakni suasana sekolah yang tergambar dari pola-pola hubungan semua komponen sekolah, meliputi bagaimana interaksi sosial antara guru dengan guru, guru dengan

⁴² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 783.

peserta didik, guru dengan staf sekolah, dan lain sebagainya. Variabel kebudayaan yakni dimensi sosial yang terkait dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan struktur kognitif.⁴³

Termasuk ke dalam kategori *hidden curriculum* tidak saja terbatas pada materi atau metode baru yang diberikan sekolah kepada siswa, akan tetapi juga setiap pengalaman dan pengetahuan yang diberikan dan diperoleh siswa secara terorganisir, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman dan pengetahuan dapat diperoleh siswa melalui proses adaptasi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan lingkungannya, yang kemudian mampu mengubah pola pikir dan perilaku siswa.

E. Relevansi *Hidden Curriculum* dalam pembelajaran

Hidden Curriculum memiliki relevansi dengan proses dan model pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah dan perbedaan latarbelakang pendidikan, karakter, kemampuan profesional dan status social ekonomi para pendidik sangat mempengaruhi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik di setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

⁴³ Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), 21.

Kebebasan akademik yang diterapkan di perguruan tinggi menjadikan para dosen memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang tidak mengacu pada kurikulum resmi. Dosen mengembangkannya sesuai dengan kapasitas keilmuan, keahlian, latar belakang pendidikan, basis teori yang dipegangi. Sebagai konsekuensi dari kebebasan akademik ini, boleh jadi mata kuliah yang sama diajar oleh dosen yang berbeda, tema, topik dan materi perkuliahan relative berbeda, proses dalam pembelajaran juga berbeda, sehingga kualitas mahasisnya juga berbeda. Begitu juga yang terjadi di sekolah, sekalipun kurikulum tertulis sama, ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap guru wajib merujuk kurikulum tersebut. Bisa jadi, sekalipun kurikulum sama, mata pelajaran sama, karena diajar oleh guru berbeda, menghasilkan desain pembelajaran berbeda, penerapan proses pembelajarannya juga berbeda, sehingga kualitas siswa yang diajar juga berbeda..

Perbedaan kualitas proses dan hasil belajar juga memiliki relevansi dengan latarbelakang Pendidikan, karakter, kemampuan profesional, dan status social ekonomi para pendidik, baik guru maupun dosen. Guru maupun dosen yang memiliki Pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan, kepribadiannya bagus, kemampuan profesionalitasnya sudah teruji bagus, serta secara ekonomi sudah merasa tercukupi, akan berbeda dengan yang belum, dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sudah tentu juga

mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar siswa atau mahasiswa.

F. Peran Pendidikan karakter di Sekolah/Madrasah dalam pembentukan sumber daya manusia

Pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah/madrasah memiliki peran yang besar dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan karakter dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual peserta didik. Kecerdasan emosional merupakan gabungan kemampuan emosional dan sosial. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional akan mampu menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan karena mempunyai kecerdasan emosional, yakni mempunyai kesadaran akan emosinya.

Terdapat lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas dalam proses pendidikan karakter di Madrasah atau sekolah. Lima nilai karakter tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa di pisah-pisahkan, saling mempengaruhi dan saling menentukan dan ditentukan, yakni:⁴⁴

1. Religius. Karakter religius merupakan cerminan ketaatan manusia terhadap Allah SWT, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku menjalankan

⁴⁴ Tim Penyusun PPK. Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, hlmn 13

syariat Islam, toleransi terhadap umat yang beragama lain yang meliputi tiga aspek, yakni relasi individu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Wujud nilainya berupa cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama lintas agama, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, melindungi yang kecil dan tersisih.

2. **Nasionalis.** Karakter nasionalis nampak dalam pola pikir, sikap dan perilaku setia, peduli, dan menghargai bahasa, lingkungan sosial dan fisik, kebudayaan, ekonomi dan politik bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wujud nilai karakter nasionalis berupa kesediaan menghargai dan menjaga budaya bangsa sendiri, berkorban secara ikhlas, punya prestasi, cinta tanah air, melestarikan lingkungan fisik dan sosial, mentaati aturan hukum yang berlaku, disiplin dan berdedikasi tinggi, menghargai keanekaragaman budaya, suku dan agama.
3. **Mandiri.** Karakter mandiri nampak pada pola pikir, sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain, serta mengoptimalkan semua tenaga, pikiran, waktu, biaya untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita. Wujud nilai kemandirian berupa semangat kerja keras, tangguh, memiliki daya berjuang tinggi, professional, kreatif,

pemberani, serta bersedia meluangkan waktu sebagai pembelajar sepanjang masa.

4. Gotong Royong. Karakter gotong royong nampak pada pola pikir, sikap dan perilaku kerjasama dan bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama, memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bersahabat dengan orang lain dan memberi bantuan pada mereka yang miskin, tersingkir dan membutuhkan pertolongan. Wujud nilai gotong royong berupa kesediaan saling menghargai, bekerjasama, taat keputusan, musyawarah mufakat, saling menolong, memiliki solidaritas tinggi, berempati, tidak suka diskriminasi dan kekerasan, serta rela berkorban.

5. Integritas. Karakter integritas menjadi nilai utama yang melandasi pola pikir, sikap dan perilaku amanah, setia pada nilai-nilai sosial dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggungjawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Wujud nilai integritas berupa kejujuran, cinta pada kebenaran dan keadilan, memiliki komitmen moral, tidak korupsi, bertanggungjawab, menjadi teladan, menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).

Pendidikan karakter yang baik melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan

perilaku yang baik (*moral action*), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik yang baik. *Moral knowing* lebih mudah diajarkan, sebab pengetahuan hanya bersifat kognitif, setelah *moral knowing* harus ditumbuhkan *moral feeling*, yaitu bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan sehingga terbentuk mindset orang untuk senantiasa berbuat baik.

Tumbuhnya kesadaran, bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan atas dasar cinta terhadap perilaku kebajikan. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, *moral action* berubah menjadi kebiasaan. Misalnya penanaman nilai kecintaan terhadap tanah air sejak kecil akan membentuk *mindset* peserta didik untuk senantiasa cinta dan berperilaku yang mencerminkan kecintaannya terhadap tanah air. Seperti perilaku selalu menggunakan produk dalam negeri, dan melestarikan kesenian daerah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya karakter dalam membangun SDM yang berkualitas, maka penerapan pendidikan karakter di sekolah dan madrasah harus dilakukan dengan tepat.

G. Pengembangan Karakter dan Pembentukan Sumber Daya Manusia di Sekolah/Madrasah dengan Ajaran Islam.

Membangun Karakter Religius di perkuliahan dalam konteks character building sesungguhnya merupakan manifestasi lebih mendalam atas agama.

Dalam hal ini, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilaku sehari-hari.

Religius merupakan penghayatan dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka membangun karakter (character building), aspek religius perlu ditanamkan secara maksimal. Di sekolah, penanaman nilai religius ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain:

1. Keteladanan. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual dan sosial peserta didik. Pendidikan dengan teladan, berarti pendidikan dengan memberi contoh, berupa tingkah laku, sifat, dan cara berpikir. Keteladanan merupakan metode yang paling efektif untuk membangun dan menanamkan karakter religius pada peserta didik, karena pendidik memberi contoh terbaik didepan anak, yang akan ditiru baik berupa tutur kata, dan tindak tanduknya. Keteladanan dapat ditunjukkan melalui perilaku dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan contoh yang baik, diharapkan menjadi panutan peserta didik untuk mencontohnya. Misalnya menjaga kebersihan

lingkungan sekolah karena kebersihan sebagian dari iman, tidak merokok, berdisiplin, dll.

2. Membangun budaya sekolah berbasis karakter religious. Proses yang efektif untuk membangun budaya sekolah adalah dengan melibatkan dan mengajak semua pihak atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan komitmennya. Keyakinan utama pihak sekolah harus difokuskan pada usaha menyemaikan dan menanamkan keyakinan, nilai-nilai religius, norma dan kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan menjadi karakter setiap peserta didik. Pendidikan akhlak itu dimulai dengan latihan-latihan agar mudah diterima oleh peserta didik dan kelak akan menjadi karakter yang mulia sesuai dengan nilai nilai ajaran agama yang dianutnya. Untuk itu, kepala sekolah, para guru, dan karyawan harus fokus pada usaha pengorganisasian yang mengarah pada tujuan membangun karakter religius pada peserta didik. Diikuti dengan memotivasi peserta didik untuk membiasakan perilaku dan sikap yang bernilai religius. Misalnya, budaya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memperingati hari-hari besar Islam, praktik ibadah, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Budaya religius yang semacam ini dapat membimbing peserta didik agar mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin dan semangat sehingga akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya.

3. Pembelajaran dalam membangun karakter religius dilakukan melalui berbagai kegiatan. Guru melaksanakan berbagai kegiatan di kelas, setiap materi pelajaran dimasukkan nilai-nilai religius. Dicantumkan juga dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau modul ajar. Dalam proses pembelajaran guru harus mampu menciptakan situasi dan keadaan religius. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian dan tata cara pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan atau situasi keagamaan di sekolah yang dapat diciptakan antara lain dengan pengadaan peralatan peribadatan, seperti masjid atau mushalla, alat-alat shalat, atau pengadaan Al-Qur'an. Di ruangan kelas juga bisa ditempelkan kaligrafi sehingga peserta didik dibiasakan selalu melihat yang baik.
4. Penguatan Pendidikan karakter perlu dilakukan dalam jangka panjang dan berulang terus menerus. Penguatan terjadi dalam proses *habitiasi* (pembiasaan). Nilai-nilai religius harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi kebiasaan, dan kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter religius peserta didik. Penguatan dalam rangka membangun karakter religius tidak hanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dapat dilakukan dalam kegiatan ko-kurikuler, yakni kegiatan belajar mengajar di luar kelas yang

terkait langsung pada suatu materi dari suatu materi pembelajaran, atau kegiatan ekstrakurikuler, seperti mukhadloroh (pidato), MTQ, dan lain sebagainya.

H. Kesimpulan

Kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang tidak terencanakan. Karakter merupakan struktur batin manusia yang tampak pada tindakan tertentu dan bersifat tetap, berupa tindakan baik maupun buruk, serta merupakan ciri khas dari pribadi pendidik. Kurikulum tersembunyi memiliki peran yang sangat penting, karena dapat membangun konstruksi berpikir yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi.

Kurikulum tersembunyi juga memiliki beberapa fungsi yaitu pencairan suasana, memberikan kecakapan, menciptakan masyarakat yang demokratis, mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku siswa maupun perilaku guru, dan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Aspek yang mempengaruhi *Hidden Curriculum* ada dua, yaitu aspek relatif tetap dan aspek yang dapat berubah.

Peran pendidikan karakter dalam pembentukan SDM yang berkualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual peserta didik. Terdapat lima nilai utama karakter yang

menjadi prioritas peran pendidikan karakter di Madrasah atau sekolah yaitu religious, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.

I. Daftar Bacaan

1. Anshori, Isa. (2017). “Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah,” *Halaqa Islam. Educ. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 63–74, 2017, doi: 10.21070/halaqa.v1i2.1243.
2. Anshori, Isa. (2009). Perencanaan Sistem Pembelajaran. Sidoarjo, Umsida Press.
3. Damsar. (2011). *PENGANTAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
4. Caswita,(1994). The Hidden Curriculum ,...hal 45,”.
5. Mulyana. Rohmat, (2004). Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta.
6. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
7. Ramayulis., (1994). Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta: Kalam Mulia, hal 59
8. Subekti, I., Fitriana, A., Chasanah, C., Riskiana, J. and Suhartono, (2016). “Peran Pendidikan Karakter dalam Pembentukan SDM Berkualitas dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN,” *Pros. Semin. Nas. Inov. Pendidik.*, pp. 274–283, 2016.

9. Mulyana. Rohmat, (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
10. Tim Penyusun PPK. (2016). *Pedoman Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
11. Yahya, M.S. (2013). “Hidden Curriculum Pada Sistem Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto Tahun 2013,” *J. Kependidikan*, vol. 1, no. 1, pp. 123–149, doi: 10.24090/jk.v1i1.535.
12. Zuriah, N. (2011). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Bab 14

Konsep Gender dan Keadilan Gender dalam Pendidikan

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggali, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan
2. Keterkaitan gender dalam pencapaian Pendidikan
3. Keterkaitan gender dengan Pendidikan menurut konsep Islam
4. Penyebab prestasi rendah yang dicapai diantara para perempuan
5. Persoalan ketimpangan gender dalam Pendidikan di Indonesia serta bagaimana pandangan menurut Islam

B. Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah masalah keadilan dan kesetaraan gender. Pendidikan memang untuk semua, tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, semuanya memperoleh kesempatan yang sama untuk masuk dan memilih pendidikan yang sesuai mulai Pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi. Kenyaaan di berbagai lembaga Pendidikan, jumlah

siswa dan mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, kualitas yang diraih oleh kaum perempuan juga tidak jauh berbeda dengan kaum laki-laki, bahkan banyak yang melebihi kaum laki-laki. Disamping karena kecerdasannya, juga ketekunan dalam mengikuti dan menyelesaikan berbagai aktivitas dan tugas Pendidikan dan pembelajaran. Kaum perempuan umumnya lebih tekun, berdisiplin dan rapi dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga prestasinya lebih tinggi, bahkan di perguruan tinggi kelulusan tepat waktu lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam soal kesempatan kerja dan karier menduduki jabatan profesional, birokrasi, bahkan politik perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Apalagi terkait pengembangan usaha ekonomi dan peran-peran social, perempuan terlihat sudah menyebar di berbagai sector, bahkan pekerjaan yang semula hanya ditekuni laki-laki juga ditekuni kaum perempuan, misalnya di transportasi dan pekerja kasar. Banyak perempuan yang berhasil dibanding laki-laki.

Persolannya saat ini bukan karena struktur dan kultur yang menjadikan kaum perempuan tidak masuk dan menyelesaikan Pendidikan lebih tinggi, tidak bekerja dan berkarier di sector kerja, birokrasi dan politik, tidak menekuni sector ekonomi dan peran-peran social kemasyarakatan, namun lebih pada pilihan perempuan itu sendiri dalam

menjalankan fungsi dan perannya. Banyak perempuan yang lebih memilih peran sebagai ibu rumah tangga dengan mendidik putra putrinya, sekalipun berpendidikan tinggi. Pilihan ini tidak salah, justru terbaik, ada pembaguan tugas laki-laki dengan perempuan, menjadikan keluarganya harmonis, Putra putrinya bisa tumbuh berkembang dengan sempurna, akhlaknya bagus, kepribadiannya bagus, prestasi akademis dan non akademisnya tinggi, juga trampil dalam menyelesaikan berbagai tugas hidup dan kehidupan masa depan.

Pandangan masyarakat masa lalu yang menganggap perempuan tidak terlalu penting dalam mengenyam Pendidikan, sudah lama terhapus. Tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat perdesaan, bahkan daerah terpencil. Kalau ada di kawasan pendalaman dan terpencil, hanya sebagian kecil keluarga menganggap seperti itu, tidak lagi masyarakat di desa, dikawasan itu. Faktor utamanya karena ekonomi, sehingga pura-putrinya juga diminta untuk membantu pekerjaan orang tuanya, atau bekerja pada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Keluarga seperti ini tidak membedakan laki-laki dengan perempuan, semuanya diperlakukan sama untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka tidak menginginkan putra putrinya tidak sekolah atau putus sekolah, justru didorong untuk terus belajar, sambil bekerja. Karena orang tua seperti ini yakin,

melalui Pendidikan anak-anaknya akan menjadi lebih baik, lebih sukses dalam meraih dan berkarir, yang suatu ketika bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua dan keluarga.

Pendidikan berperspektif gender mensyaratkan dua hal, yakni guru yang bisa memberikan pemahaman tentang pembagian fungsi gender secara utuh, tidak mendiskreditkan salah satunya. Kedua berbagai referensi yang tersedia harus menjelaskan pembagian fungsi dan peran laki-laki dan perempuan secara utuh, setara, tidak mendiskreditkan salah satunya.

Faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan antara lain nilai, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diskriminatif. Pada masa dulu, pada keluarga tertentu terkadang masih ada yang cenderung memberikan kesempatan pendidikan anak perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki (Fitrianti, 2012). Namun saat ini tidak lagi demikian, dibuktikan dengan jumlah siswa setiap kelas di setiap jenjang dan jenis Pendidikan sebanding dengan jumlah kelahiran anak laki-laki dengan perempuan yang berada di sekitar Lembaga Pendidikan tersebut. Bahkan hasil pengamatan saya selama ini diberbagai jenis dan jenjang Pendidikan, jumlah siswa perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Secara psikologis, cara berpikir siswa laki-laki dan perempuan memang berbeda. Struktur dan fungsi

otak laki-laki dan perempuan terdapat sedikit perbedaan, perempuan cenderung pandai mengelola emosi dan perasaan yang ia miliki, dan lebih pandai mengelola bahasa, seni serta nada, sementara laki-laki lebih pandai menggunakan logika yang menurutnya lebih masuk akal.

Hal ini sesuai dengan pendapat Putra (2018) struktur otak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pada kumpulan sel saraf di otak, milik laki-laki lebih kecil dari milik perempuan, meskipun ukuran otak laki-laki rata-rata lebih besar dibandingkan otak perempuan. Jika dikaitkan struktur otak laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran maka keduanya cenderung dapat memahami informasi dengan baik, akan tetapi dalam mengelola informasi yang diberikan oleh guru terdapat perbedaan dalam setiap siswa tergantung karakter yang dimiliki siswa tersebut.

Dalam kajian Pendidikan dan pembelajaran, perbedaan secara fisik dan psikologis ini justru menuntut perbedaan proses pendekatan yang berbeda, agar bisa berkembang bersama. Seiring dengan perkembangan informasi dan berbagai pengalaman dalam proses pembelajaran yang lebih modern, model pembelajaran diferensiasi bisa menjadikan baik laki-laki maupun perempuan memperoleh perlakuan secara proporsional, sehingga sama-sama bisa terlayani dengan baik, sesuai kondisi psikis, fisik, bahkan modal dan gaya belajar

masing-masing, Model pembelajaran defernsiasi ini menjadikan pemikiran siswa laki-laki maupun perempuan bisa berkembang dengan baik.

C. Keterkaitan Gender Dalam Pencapaian Pendidikan

Menurut para ahli, gender didefinisikan sebagai isu perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan. Gender merupakan atribut yang disematkan pada seseorang, dikodifikasikan dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada laki-laki atau perempuan. Gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat untuk melakukan peran terbaik sebagai laki-laki atau perempuan. Karena gender merupakan bentuk sosial (pengalaman masyarakat), maka penempatan gender dari waktu ke waktu selalu berubah. Gender tidak bersifat universal, artinya antara masyarakat satu dengan yang lain mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam memahami gender. Perbedaan ini disebabkan setting sosio historis masyarakat satu dan lainnya tidak sama. Peran gender juga dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena gender bukan kodrat Tuhan (hukum Tuhan) melainkan bentukan social ⁴⁵.

Secara kodrat, memang diakui terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam aspek biologis. Perbedaan tersebut senantiasa

⁴⁵ Chairani Astina - Ketimpangan Gender dalam Pendidikan, Nomor 13 Tahun X, Januari - Juni 2016, 18

digunakan untuk menentukan relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender sangat mengacu kepada peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antarbudaya.

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat lalu, terjadi pula dalam dunia Pendidikan masa itu. Bahkan, institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Namun saat ini sudah tidak lagi terjadi berbagai fenomena tersebut, yang terjadi kesetaraan gender. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang sama dalam Pendidikan.

Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan pada masa lalu dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain; (i) Kurangnya partisipasi. Dalam hal partisipasi hampir perempuan di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Dibandingkan dengan laki-laki partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki; (ii) Kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar ataupun pimpinan lembaga pendidikan

formal menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi laki-laki dalam hal tersebut lebih tinggi daripada perempuan; (iii) Perlakukan tidak adil. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada murid laki-laki daripada murid perempuan. Para guru terkadang masih berpikiran perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi⁴⁶. Fenomena tersebut kini sudah tidak lagi terlihat di berbagai institusi, yang ada adalah perlakuan secara proporsional, bukan diskriminatif.

D. Keterkaitan Gender Dengan Pendidikan Menurut Konsep Islam

Proses pendidikan yang sedemikian strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai, budaya, dan pandangan telah mengembangkan budaya kesetaraan gender, perlakuan yang proporsional, keadilan gender. Belajar merupakan salah satu kewajiban agama yang diwajibkan oleh Islam atas setiap muslim laki-laki dan perempuan.

ا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁶ Achmad Saeful, Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan, Tarbawi Vol 1, Februari 2019, 24-25

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Surat Al-Hujurat Ayat 13)

Konsep kesetaraan gender dalam Islam yang sesungguhnya tanpa melewati batas kodrat manusia itu sendiri. Agama Islam telah menyamakan perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang bersifat kerohanian dan kewajiban keagamaan tanpa perbedaan dalam bidang ilmu maupun pendidikan. Pendidikan dalam Islam menerapkan prinsip demokratis, kebebasan, persamaan, dan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan dalam Islam sifatnya elastis, Pintunya terbuka bagi setiap orang yang ingin belajar, karena agama Islam adalah agama ilmu dan cahaya, bukan agama kejahilan, kebodohan dan kegelapan. Sistem pendidikan Islam harus menjadi alternatif kearah humanisasi. Sebab, cita ideal islam adalah tercapainya bentuk-bentuk dan aspek-aspek kemanusiaan secara menyeluruh baik lahir maupun batin.

E. Penyebab Prestasi Rendah Yang Dicapai di Antara Perempuan

Bangsa-bangsa yang sedang berkembang di dunia sedikit banyak berada dalam situasi yang sama, dan menghadapi pengalaman-pengalaman dan berbagai tantangan yang juga diantaranya ada yang sama. Bangsa yang masih berkembang sebagian besar merupakan bekas negeri jajahan kekuasaan asing. Masyarakat mereka juga berada di taraf transisi, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan segala masalah dan keperihannya. Di banyak negeri demikian kedudukan wanita mengalami perubahan-perubahan mendasar, yang tidak saja berpengaruh terhadap wanita sendiri, tetapi juga pada pihak laki-laki. Demikian pula banyak nilai tradisional mengalami perubahan, yang sering merupakan pengalaman traumatik terhadap banyak orang. Berangkat dari asumsi bahwa perempuan merupakan sub-ordinasi dari laki-laki, maka perempuan diduga mempunyai prestasi akademis lebih rendah dari laki-laki (Locke, 1987). Asumsi ini nampaknya telah diakui secara umum kebenarannya. Artinya, di berbagai sisi, maka perempuan mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk melakukan eksplorasi akademis (Whitaker, 1983). Konsekuensi logisnya adalah, perempuan menjadi lebih bodoh dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan seperti ini telah berusia bertahun-tahun. Dengan kata lain, berbagai pihak, terutama laki-laki,

memandang bahwa perempuan adalah makhluk derajat kedua. Pemahaman sepihak seperti ini memberikan keleluasaan bagi laki-laki untuk menjajah dan memerintah perempuan (Abaraham, 1968). Perjalanan sub-ordinasi laki-laki atas perempuan ini sebenarnya sudah dicoba untuk didobrak oleh Kartini. Tuntutan persamaan hak atas pendidikan ini bukan berarti merupakan gerakan awal feminisme yang muncul belakangan, namun bahwa di kemudian hari ternyata bahwa perempuan menjadi lebih pandai dari laki-laki. Dari fenomena-fenomena yang kerap kali ditemui, nampak bahwa persamaan hak di bidang pendidikan ini telah mendorong para perempuan ikut serta berpacu dalam memilih pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kemampuan perempuan di bidang akademik tidak kalah dengan laki-laki.

F. Persoalan Ketimpangan Gender dalam Pendidikan di Indonesia

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata, sering difahami, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan

gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk keadilan seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang serta sosialisasi ideologi dan peran gender. Ketimpangan-ketimpangan gender dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Bias gender yang dialami perempuan tidak sebatas kekerasan, tetapi juga dalam bentuk marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan dalam ekonomi, subordinasi dalam keputusan politik dan ketimpangan dalam Pendidikan ⁴⁷.

Berikut ini beberapa persoalan ketimpangan Gender Dalam Pendidikan yang terjadi masa lalu, saat ini sudah tidak lagi terjadi:

1. Kurikulum yang Bias Gender

Terjadinya distorsi padagogis yang ditimbulkan media masa juga tuntutan pemerintah dan industri swasta. Untuk tehnik pendidikan menengah dan tinggi juga mempresentasikan hal serupa yakni nilai dan kurikulum yang bias gender. Sebenarnya masalah nilai materi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan kurikulum agar tidak bias.

2. Kebijakan Sekolah yang Diskriminatif

⁴⁷ Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan, 177

Kebijakan-kebijakan yang diambil penguasa pendidikan terhadap siswa laki-laki dan perempuan sering merugikan salah satunya. Tetapi yang paling dirugikan adalah siswa perempuan, semisalnya sudut pandang yang membedakan peta perempuan dan laki-laki.

3. Stigmatisasi disiplin Ilmu

Variasi-variasi peranan dimainkan laki-laki dan perempuan adalah produk dari norma dan nilai-nilai diluar dari individu yang mengajari. Mereka sejak muda belia sudah menerima refleksi perbedaan gender, sehingga stigmatisasi keberbedaan disiplin ilmu menjadi budaya dimasyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan diskriminasi terhadap pendidikan perempuan⁴⁸.

Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah masalah keadilan dan kesetaraan gender secara kualitatif, tidak lagi kuantitatif. Pendidikan menjadi ranah laki-laki maupun perempuan, mendorong laki-laki maupun perempuan untuk meraih Pendidikan lebih tinggi, sama-sama berkualitas lebih tinggi. Pandangan patriarki pada masyarakat, yaitu pendapat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukan dan derajatnya daripada perempuan hingga saat ini memang masih ada. Ketinggian ini menyangkut tanggung jawab laki-

⁴⁸ Chairani Astina - Ketimpangan Gender dalam Pendidikan, Nomor 13 Tahun X, Januari - Juni 2016, 20-22

laki terhadap perempuan pada konteks keluarga, supaya keharmonisan keluarga terjaga, tumbuh dan berkembang menjadi keluarga Sakinah, mawandah, warohmah. Dalam proses pendidikan di Indonesia ketimpangan gender sudah tidak lagi terjadi. Pada umumnya masyarakat sudah menganut paham perempuan merupakan kelompok sama dengan laki-laki, sederajat, masing-masing diharkan menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Tanggung jawab social dan ekonomi memang ada pada laki-laki, namun perempuan juga mempunyai tanggungjawab bagi tumbuh dan berkembangnya keluarga, putra putri secara lebih baik.

Di dalam ayat-ayat Al-qur'an maupun sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan. Dalam Kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. .

Dalam Al-qur'an surat Al-Isra ayat 70 Allah SWT berfirman "Bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat". Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk.

Oleh karena itu dalam Al-qur'an tidak mengenal perbedaan antara lelaki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT. lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.

Pada Surat Ali-Imran ayat 195, surat An-nisa ayat 124, surat An-nahl ayat 97, surat At Taubah ayat 71-72, surat Al- ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah SWT secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun lelaki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT. juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Allah SWT. memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan lelaki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Ini semua membuktikan kedudukan dan derajat antara lelaki dan perempuan dimata Allah SWT. adalah sama, dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketaqwaannya⁴⁹.

G. Kesimpulan

Pendidikan berfungsi untuk menurunkan atau mentransformasi nilai-nilai budaya dari satu generasi

⁴⁹ Rusdi Zubair, Gender Dalam Perspektif Islam, AN NISA'A, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2012, 112-113

ke generasi berikutnya, juga mempunyai fungsi untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Fungsi inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mendekonstruksi pandangan-pandangan yang tidak mendukung semangat kesetaraan dan keadilan gender. Untuk menumbuhkan generasi yang sadar akan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pendidikan formal di sekolah adalah jangan sampai guru atau pendidik berpikir mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan. Keduanya harus diberi akses yang sama, dan berpikir bahwa keduanya adalah potensi sumber daya manusia yang sama.

H. Daftar Bacaan

1. Maksum, Ali, (20013). *Sosiologi Pendidikan*, Malang,
2. Astina, Chairani, (2016). *Ketimpangan Gender dalam Pendidikan*, Nomor 13 Tahun X, Januari – Juni.
3. Saeful, Achmad. (2019), *Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan*, Tarbawi Vol 1, Februari.
4. S.U, Non Erna, Yonanda, Devi Afriyuni. (2020), *Hubungan Gender Terhadap Prestasi Belajar Siswa*, Agustus
5. Zubair, Rusdi (2012), *Gender Dalam Perspektif Islam*, An Nisa'a, Vol. 7, No. 2, Desember: 103 – 118

6. Warni Tune Sumar,(tt). *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*

Bab 15

Perubahan Sosial atas Tantangan Pendidikan di Era Digital

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggalih, mengkaji dan memahami secara komprehensif dan bertanggung jawab tentang:

1. Perubahan Sosial
2. Teori perubahan sosial yang kaitannya dengan pendidikan
3. Konsep kemajuan revolusi industri 4.0 dan 5.0
4. Perubahan perilaku anak atas perkembangan kemajuan teknologi digital
5. Perubahan-perubahan penyelenggaraan Pendidikan dan berbagai permasalahan di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren

B. Perubahan Sosial

Pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan sangat erat, saling bergantung. Pendidikan berkembang karena masyarakat berkembang. Masyarakat menjadi semakin berkembang dan maju karena proses-proses yang dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses pematangan dan pendewasaan individu-individu yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan memiliki peran dan tugas mendasar membentuk dan

mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Masyarakat itu dinamis, bahkan sangat dinamis. Masyarakat kini mengalami perubahan sosial sangat pesat. Isu postmodernisasi dan globalisasi sebenarnya ingin menunjukkan suatu perubahan yang sangat cepat. Modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dan kebudayaannya dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju modern. Globalisasi pada hakikatnya merupakan suatu kondisi meluasnya budaya yang seragam bagi seluruh masyarakat di dunia. Globalisasi muncul sebagai akibat adanya arus informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Sebagai akibatnya, masyarakat dunia menjadi satu lingkungan semu, saling berdekatan dan menjadi satu sistem pergaulan dan budaya yang sama.

Senge (1990) dalam Maliki (2010:276) menyatakan, perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan, karena ia melekat, lahir dalam proses pengembangan masyarakat. Kebutuhan untuk bisa survive dalam ketidakpastian dan perubahan menjadi tuntutan masa kini. Perubahan terjadi begitu cepat dan luas, termasuk mengubah dasar-dasar asumsi dan paradigma memandang perubahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat juga dialami dunia pendidikan. Sosiologi pendidikan memainkan perannya untuk ikut memformat

pendidikan yang mampu berkiprah secara kontekstual. Sistem, muatan, proses dan arah pendidikan perlu ditata ulang dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di arena perubahan sosial tersebut.

2. Pengertian Perubahan Sosial

Para Ahli mendefinisikan perubahan sosial berbeda-beda,

- a. Selo Soemardjan menyatakan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-Lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Kingsley Davis menyebut perubahan sosial terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Struktur sosial mencakup lembaga sosial, kelompok sosial, norma-norma sosial, dan stratifikasi sosial. Tiap-tiap struktur memiliki fungsi dalam masyarakat.
- c. Mac Iver menyatakan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Hubungan antara anggota masyarakat dapat menimbulkan kerja sama ataupun perselisihan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial.
- d. John Lewis Gillin dan John Philip Gilin menyatakan perubahan sosial merupakan variasi

dari cara-cara hidup yang telah diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Dengan kata lain, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi secara terus menerus, mencakup sistem sosial (yakni pola pikir, pola perilaku, nilai) dan struktur sosial (lembaga sosial, kelompok, norma) didalam masyarakat.⁵⁰

3. Ciri-Ciri Perubahan Sosial

Terdapat berbagai ciri perubahan sosial, yaitu:

- a. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang (dinamis), artinya masyarakat itu selalu berkembang dan berubah.
- b. Perubahan pada satu lembaga akan menyebabkan perubahan pada lembaga lainnya. Hal ini disebabkan oleh lembaga-lembaga sosial bersifat interdependen akan saling memengaruhi sehingga sulit sekali untuk mengisolir perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu, proses yang dimulai dari proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai.
- c. Perubahan yang cepat (revolusi) dapat menyebabkan disorganisasi dalam kelompok dan bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi tersebut akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup

⁵⁰ Soekanto, Soerjono. (2014), Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, ISBN : 978-979-769-577-4. h.259

pemantapan dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru.

- d. Perubahan sosial mencakup materiel dan spiritual , keduanya memiliki hubungan timbal balik.
- e. Secara tipologis, perubahan social dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:
 - 1) Proses sosial, yaitu pergantian beragam penghargaan, fasilitas, dan anggota dari suatu struktur.
 - 2) Segmentasi atau pembagian, yaitu pemekaran unit-unit struktural yang tidak terlalu berbeda dengan unit-unit yang telah ada.
 - 3) Perubahan struktur, yaitu timbulnya peran dan organisasi yang baru.
 - 4) Perubahan struktur kelompok, yaitu pergantian komposisi kelompok, tingkat kesadaran kelompok, dan hubungan antarkelompok dalam masyarakat.⁵¹

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

- a. Faktor umum yang mempengaruhi perubahan sosial
 - 1) Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Berbagai

⁵¹ Rahman M. Taufiq. (2011), Glosari Teori Sosial. Ibnu Sina Press. 978-602-99802-0-2 Juli 2011. h.96

penyebab perubahan sosial dari factor internal antara lain:

a) Penemuan Baru

Di dalam penemuan baru terdapat:

- Discovery: penemuan yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya.
- Inovasi: penyempurnaan dari discovery.
- Invention: penemuan baru yang sudah diakui dan digunakan oleh masyarakat luas.

Penemuan baru didalam masyarakat didorong oleh beberapa faktor yaitu:

- Kesadaran individu dan masyarakat berkaitan dengan keterbatasan fungsi nilai kebudayaan materiel, dan imateriel.
- Kualitas sumberdaya manusia, yakni ahli untuk mengolah sumberdaya alam dan teknologi.
- Muncul rangsangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam masyarakat.

b) Dinamika Penduduk dan Perubahan Sosial

Dinamika penduduk berkaitan dengan penambahan atau penurunan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh

kematian (mortalitas), kelahiran (fertilitas), dan perpindahan (migrasi).

c) Konflik Sosial

Konflik sosial mengakibatkan perubahan sosial. Konflik sosial selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat multikultural. Banyak penyebab konflik dalam masyarakat, misalnya perbedaan kepentingan, pola pikir, individu, dan pandangan politik.

d) Pemberontakan

Pemberontakan dapat menyebabkan perubahan besar dalam masyarakat, misalnya Revolusi industri di Inggris.

2) Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Berbagai faktor eksternal penyebab perubahan sosial antara lain:

a) Pagaruh Kebudayaan Masyarakat Lain.

Pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Perubahan tersebut dapat terbentuk melalui proses asimilasi, yakni penggabungan beberapa budaya menjadi budaya baru, atau akulturasi, yakni penggabungan beberapa budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya.

b). Peperangan

Peperangan yang muncul antar kelompok atau antar negara dapat mengakibatkan perubahan sosial, karena pihak yang menang dalam peperangan memiliki keleluasaan untuk menguasai pihak yang kalah.

c). Bencana Alam

Dapat menyebabkan masyarakat disuatu wilayah harus berpindah tempat tinggal sehingga mengakibatkan perubahan sistem hidup dan perubahan struktural.

b. Faktor pendorong perubahan sosial

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perubahan social, yakni:

- 1) Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak ini bisa mengarah pada interaksi yang memberi dampak positif, yaitu mengurangi prasangka negatif terhadap kebudayaan lain dan mencegah konflik sosial.
- 2) Sistem pendidikan yang maju. Pendidikan penting bagi masyarakat karena dapat membuka pikiran dan wawasan untuk melakukan perubahan sosial kearah kemajuan.
- 3) Sikap menghargai hasil karya. Penghargaan dapat memberi semangat untuk berinovasi.

- 4) Keinginan untuk maju. Perubahan terjadi karena adanya keinginan, pengharapan. Dorongan dalam diri sendiri untuk memperbaiki keadaan merupakan salah satu faktor pendorong perubahan sosial.
- 5) Sistem lapisan terbuka masyarakat. Sistem lapisan sosial terbuka memberi kesempatan setiap orang yang berkompeten untuk melakukan perubahan status sosial dalam hidupnya.
- 6) Penduduk yang heterogen. Penduduk heterogen memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan kontak budaya dengan masyarakat lain.
- 7) Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan
- 8) Orientasi pada masa depan

5. Jenis Perubahan Sosial

a. Berdasarkan Prosesnya

- 1) Perubahan yang direncanakan. Merupakan perubahan yang terorganisasi, pihak yang menginginkan perubahan melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk mewujudkan perubahan sosial didalam masyarakat.
- 2) Perubahan yang tidak direncanakan. Terjadi diluar rencana atau perkiraan masyarakat dan dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat

- b. Berdasarkan Waktunya
- 1) Perubahan secara cepat. Perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat, cepat dan mendasar. Perubahan ini diiringi dengan suatu konflik karena tidak semua masyarakat siap menerima.
 - 2) Perubahan secara lambat. Terdapat tiga teori berkaitan dengan perubahan secara lambat (evolusi), yakni:
 - a) *Unilinier Theories of Evolution*, menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahap-tahap tertentu.
 - b) *Universal Theory of Evolution*, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak melalui tahap-tahap tertentu yang tetap.
 - c) *Muttlinied Theories of Evolution*, menyatakan bahwa terdapat tahap-tahap perkembangan tertentu yang didapat melalui penelitian.
- c. Berdasarkan Dampaknya
- 1) Perubahan kecil, yakni perubahan dalam lingkup sempit yang terjadi dalam masyarakat, hanya berdampak pada sebagian kecil masyarakat.

- 2) Perubahan besar, yakni perubahan yang memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial yang ada dalam masyarakat.⁵²

6. Proses Perubahan

Dalam proses adaptasi terdapat kreativitas individual untuk aktivitas sosial, agar perilakunya itu bisa dimaknai dan diterima lingkungan sosialnya. Walaupun adaptasi di dalam kehidupan masih tidak mudah karena terdapat aneka norma sosial, berbekal akal yang dalam diri setiap individu manusia, telah mendorong manusia adanya makna-makna kesemestaan yang dapat dipelajari. Melalui akal manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan melakukan evaluasi sebelum bersikap. Memfilter, memahami dan mempertimbangkan pelajaran yang masuk dan diterima sebelum bertindak. Melalui proses berpikir dan belajarliah manusia berada dalam proses pendidikan sehingga terjadi transmisi (pewarisan) kebudayaan.

Proses pendidikan berlangsung dalam kehidupan manusia dimanapun manusia berada, baik secara informal, nonformal, maupun formal. Kebudayaan disamping berlangsung melalui proses pembelajaran, juga karena sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapai. Rasa ingin tahu yang ada paad diri manusia

⁵² Saifuddin, Achmad Fedyani. (2016), Pengantar Teori-teori Sosial, Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, ISBN: 978-602-433-249-5. 106

menyebabkan munculnya inovasi-inovasi baru, baik berupa ide maupun sistem teknologi, sehingga kebudayaan terus mengalami perubahan (Sairin, 2002).”

Menurut Wilbur B. Brookover, perubahan masyarakat atau disebut *social order* terjadi dalam empat fase, sebagai berikut.

- a. Fase pertama, masyarakat tidak mau mengalami perubahan yang datang, baik dipaksakan atau datang memengaruhinya.
- b. Fase kedua, masyarakat mengalami bimbingan dalam menerima perubahan.
- c. Fase ketiga, masyarakat sudah menerima perubahan sosial sehingga mereka mempersiapkan generasi penerus mereka melalui pendidikan.
- d. Fase keempat, masyarakat telah mengalami kemajuan yang sangat tinggi sehingga dikelompokkan ke dalam masyarakat yang sudah mapan dalam berbagai bidang.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, walaupun perubahan yang dilalui bertahap. Untuk itu, peserta didik sebagai generasi harus mampu menghadapi berbagai perubahan tersebut. Peserta didik harus dipersiapkan melalui Pendidikan, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang sedang dan akan terjadi, bahkan bisa menentukan arah perubahan, mengisi perubahan tersebut.

Tugas pendidik mempersiapkan peserta didik menjadi generasi yang peka terhadap perubahan. Terdapat dua tipe generasi dalam menyikapi perubahan: yaitu:

- a. Generasi yang bersikap statis, yaitu yang selalu ingin mempertahankan yang sudah lama. Generasi semacam ini tidak mau melihat adanya perubahan di dalam masyarakat tempat hidupnya. Apabila ada sesuatu yang baru, selalu saja mereka ingin menolaknya.
- b. Generasi yang menghendaki adanya hal-hal baru dan maju. Mereka ini termasuk orang yang kreatif dan dinamis, ingin memajukan cara hidup, kemakmuran dan kesejahteraan.

Kelompok kedua inilah yang akan menjadi agen pembangunan masyarakat dan pendorong masyarakat untuk maju. Oleh karena itu, tugas Pendidikan adalah mencetak peserta didik menjadi generasi yang memiliki kecenderungan untuk maju, berpikir kreatif, dinamis, dan inovatif sehingga bisa menjadi agen pembangunan masyarakat bangsanya.

Pendidikan bisa berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, atau dikenal dengan tri pusat Pendidikan. Di rumah anak berinteraksi dengan orang tua (atau pengganti orang tua) dan segenap anggota keluarga lainnya. Ia mendapat pendidikan informal berupa pembentukan pembiasaan (habit formation). Di

sekolah anak berinteraksi dengan guru beserta bahan-bahan pendidikan dan pengajaran, teman-teman peserta didik lainnya, serta pegawai tata usaha. Anak memperoleh pendidikan formal berupa pembentukan nilai-nilai, pengetahuan, ketetapan dan sikap terhadap sesamanya, melalui berbagai bidang mata pelajaran.

Di masyarakat, anak berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat yang beraneka ragam (heterogen) karakter dan tipikal individual orang, termasuk dengan benda dan beraneka ragam peristiwa. Setiap anak akan memperoleh pendidikan informal mulai dari pengalaman hidup dan aturan (norma), ukuran baik atau buruk (nilai etika atau estetika kehidupan) bahkan banyak pula anak pada siang hingga sore hari mengikuti pendidikan nonformal. Melalui pendidikan itulah kepribadian anak dibentuk. Anak harus bisa menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁵³

⁵³ Dr. M. Saroni, M.Ag. (2019), "Sosiologi pendidikan memahami dinamika sosiokultural". PT Remaja Rosdakarya, ISBN : 978-602-446-398-4. h.82

C. Teori Perubahan Sosial

Terdapat berbagai teori perubahan social, antara lain:

1. Teori Evolusi, adalah teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap, berurutan dalam waktu yang cukup lama. Menurut Auguste Comte, hukum tiga tahap yang dialami oleh manusia dan masyarakat secara revolusioner, yakni:
 - a. Tahap teologis, pemikiran manusia yang menyatakan bahwa semua benda didunia mempunyai jiwa karena kekuatan gaib yang berada diluar kemampuan manusia.
 - b. Tahap metafisik, tahap transisi teologis menuju positivis
 - c. Tahap positivis, kepercayaan terhadap data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir dalam segala bidang.
2. Teori Neoevolusi adalah teori bantahan dari evolusi. Teori ini membahas perubahan sosial terjadi tidak secara bertahap tapi secara acak.
3. Teori Revolusi adalah teori perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat secara cepat, perubahan ini bisa menyebabkan suatu perpecahan dan konflik.
4. Teori Sistem adalah teori perubahan sosial yang menyatakan perubahan terjadi pada semua unsur (bagian, komponen). berubahnya satu unsur akan

- mempengaruhi perubahan unsur yang lain. Terdapat 3 tingkatan kajian teori system, yaitu:
- a. Makro, membahas dunia secara keseluruhan.
 - b. Meso, hanya membahas tiap-tiap negara sendiri.
 - c. Mikro, membahas tingkatan yang lebih rendah dari meso.
5. Teori Modernitas adalah teori perubahan sosial yang membahas masyarakat modern. Didalam masyarakat moderen akan ada penemuan-penemuan. Penemuan tersebut bisa menyebabkan proses industrialisasi yang orang-orangnya bersifat kapitalis.
6. Teori Post Modern atau Neomodernisasi adalah teori yang membahas tentang kejenuhan masyarakat modern. Mereka jenuh karena orang-orangnya memiliki sifat egois, individualis, dan kapitalis.

D. Konsep kemajuan Revolusi Industri 4.0 dan 5.0

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu dari revolusi industry 4.0 ke revolusi industry 5.0. yang dikenal dengan era society, yakni masyarakat cerdas.

Klaus Schwab selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF), orang pertama memperkenalkan revolusi Industri 4.0. Industry 4.0

berawal dari konsep industri di Jerman yang didasarkan pada enam pilar yang berdampak positif terhadap perekonomian, yaitu masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan kemajuan teknologi di tempat kerja. Industry 4.0 adalah era digital atau era teknologi informasi dan komunikasi. Internet, smartphone, sensor (IoT), dan koneksi data telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia kerja dan bahkan kehidupan manusia sehari-hari.

Era Society 5.0 merupakan era masyarakat bekercerdasan tinggi. Digagas oleh negara Jepang tahun 2015, kemudian diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Robot untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman dan lebih efektif. Industry 4.0 berfokus pada bagaimana mengotomasi sebuah pekerjaan (Dehumanisasi), sementara Society 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan (Humanisasi).

Konsep Society 5.0 tidak lagi berpusat pada industry, namun pada orang-orangnya yakni masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai penggerak, pemerintah Jepang menginisiasi gerakan ini untuk meningkatkan dan

menciptakan masyarakat yang superpintar. Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan robotic merupakan empat nilai baru dan merupakan empat teknologi utama yang dimanfaatkan Jepang untuk menyukseskan Society 5.0 ini.

Persamaan revolusi industri 4.0 dengan era society 5.0 adalah :

1. Sama-sama menekankan teknologi IoT, AI, Smart Machines, Knowledge Management, dan Smart Web untuk mewakili konektivitas kerja.
2. Keduanya menekankan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dengan menggunakan mesin atau orang lain melalui Intelligent Machine yang tersedia.
3. Sama-sama memiliki kekuatan untuk melakukan multitasking melalui berbagai jenis media otomatis dan platform komputasi.
4. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pekerjaan di era ini sudah bukan lagi sekadar single-job per jam, melainkan merupakan proses yang selalu berjalan dengan proses lain atau sebagai medium ke prosedur yang lain.
5. Sama-sama menekankan pada pergerakan bebas dari satu proses produksi ke proses lainnya dan memerlukan lebih sedikit protokol untuk menyelesaikan pekerjaan.
6. Keduanya mempertimbangkan rekayasa keberlanjutan di tengah-tengah perkembangan

teknologi progresif yang dikerahkan secara material dengan memastikan pelestarian alam dan ekologi masih dalam kondisi baik

Sedangkan perbedaannya revolusi industri 4.0 dengan era society 5.0 adalah :

1. Industry 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis sedikit atau tanpa adanya peran manusia dalam proses produksi, sedangkan Society 5.0 lebih menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Industry 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis sedikit atau tanpa adanya peran manusia dalam proses produksi, sedangkan Society 5.0 lebih menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
3. Industry 4.0 terkait komunikasi yang terkomputerisasi dengan segala cara, sedangkan Society 5.0 lebih menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

Revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudahan ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 yang sudah terlaksana di Tanah Air adalah kebijakan e-

smart Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital.

Revolusi industri 5.0 adalah manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Revolusi industri 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Revolusi industri 5.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) Revolusi industri 5.0 memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiannya.

1. Dampak Positif Revolusi Industri 4.0

- a. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya.
- b. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi.
- c. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam

waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik.

- d. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya.

2. Dampak Negatif Revolusi Industri 4.0

- a. Lebih rentan terhadap serangan siber, hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik.
- b. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja, hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya.
- c. Adanya urbanisasi, dimana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang di kota besar.
- d. Berdampak untuk lingkungan, hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan.

Dampak positif era society 5.0 adalah konektifitas, membantu dunia seperti tidak ada batas lagi, terkoneksi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain, sehingga data dan informasi tersaji dengan sangat cepat. Semuanya akan menjadi lebih dekat,

lebih murah, lebih cepat dengan adanya data yang terkoneksi.

Sedangkan dampak negatif 5.0, efek negatif yang mungkin akan terjadi terletak pada individunya itu sendiri. Dengan segala kemudahan yang diberikan di era Society 5.0, manusia akan semakin malas dalam mengerjakan sesuatu, manusia akan mengandalkan segala pekerjaannya kepada teknologi canggih yang tersedia di era itu. Hal seperti itu dapat membuat manusia menjadi ketergantungan kepada teknologi, khususnya kepada daya dan jaringan.⁵⁴

E. Perubahan perilaku anak atas perkembangan kemajuan teknologi digital

1. Penggunaan *gadget* pada perkembangan anak

Banyak ditemukan orang tua yang membelikan *gadget* yang modelnya sesuai dengan keinginan anaknya. Bagi orang tua yang memiliki pekerjaan, memberikan *gadget* kepada anak bertujuan untuk memantau aktifitas dan berkomunikasi. Kemudian, bagi orang tua yang *stand by* di rumah, memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian anak agar tidak mengganggu kegiatan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, lama – kelamaan sang anak

⁵⁴ Prof. Dr. Agus Suryono, S.U.(2020), Teori dan strategi perubahan sosial. Bumi Aksara, ISBN : 978-602-444-735-9. h.80

akan bosan dan berakhir mencari suasana baru yang ada pada fitur gadget tersebut. Dari sinilah anak akan lebih terfokus pada *gadget* nya dan mulai meninggalkan dunia bermain mereka. Anak akan menjadi pribadi yang individualis dan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya.

Penggunaan *gadget* yang berlebihan akan berdampak buruk kepada anak. Saat waktunya anak dihabiskan oleh *gadget*, maka anak akan lebih emosional, pemberontak karena merasa terganggu saat bermain game, malas melakukan aktifitas sehari –hari. Bahkan lebih parah lagi apabila sang anak sudah tidak mempedulikan atau acuh terhadap orang di sekitarnya. Namun, di sisi lain *gadget* memiliki banyak manfaat untuk membentuk sikap cekatan, melatih fokus, serta meningkatkan kecakapan dalam berbahasa inggris sang anak.

Ada beberapa dampak negatif karena berlebihan dalam penggunaan *gadget* pada perkemebangan anak yang membuat anak menjadi ketagihan atau kecanduan.

a. Dampak Negatif:⁵⁵

- 1) Waktu terbuang sia-sia. Anak-anak akan sering lupa waktu ketika sedang asyik bermain *gadget*. Mereka membuang waktu

⁵⁵ Hasil seminar “*Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak*” pada tanggal 25 September 2016 oleh Suwarsi

untuk aktifitas yang tidak terlalu penting, padahal waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktifitas yang mendukung kematangan berbagai aspek perkembangan pada dirinya.

- 2) Perkembangan otak. Terlalu lama dalam penggunaan *gadget* dalam seluruh aktifitas sehari-hari akan mengganggu perkembangan otak. Sehingga menimbulkan hambatan dalam kemampuan berbicara (tidak lancar komunikasi), serta menghambat kemampuan dalam mengeskpresikan pikirannya.
- 3) Banyaknya fitur atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak, miskin akan nilai norma, edukasi dan agama.
- 4) Mengganggu kesehatan. Semakin sering menggunakan *gadget* akan mengganggu kesehatan terutama pada mata. Selain itu akan mengurangi minat baca anak karena terbiasa pada objek bergambar dan bergerak.
- 5) Menghilangkan ketertarikan pada aktifitas bermain atau melakukan kegiatan lain. Ini yang akan membuat mereka lebih bersifat individualis atau menyendiri. Banyak dari mereka diakhir pekan digunakan untuk bermain *gadget* ketimbang bermain dengan teman bermain untuk sekedar bermain bola dilapangan.

Dampak lainnya adalah semakin terbukanya akses internet dalam *gadget* yang

menampilkan segala hal yang semestinya belum waktunya dilihat oleh anak-anak. Banyak anak yang mulai kecanduan *gadget* dan lupa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang berdampak psikologis terutama krisis percaya diri juga pada perkembangan fisik anak. Radiasi gelombang elektromagnetik dari *gadget* memang tidak terlihat. efeknya pun tidak terasa secara langsung. Untuk itu orangtua harus secara bijak mengawasi dan melakukan seleksi terhadap instrument permainan yang digunakan anak-anak saat bermain. Kebiasaan anak-anak dalam bermain *gadget* saat ini memang tidak bias dipungkiri. Namun ada baiknya tidak selalu bermain atau paling tidak membatasi waktu bermain *gadget*. Sebenarnya kegiatan bermain merupakan kegiatan utama anak yang nampak mulai sejak bayi. Kegiatan ini penting bagi perkembangan kognitif, sosial, dan kepribadian anak pada umumnya. Anak juga bisa mulai memahami hubungan antara dirinya dan lingkungan sosialnya melalui kegiatan bermain belajar bergaul dan memahami aturan ataupun tata cara pergaulan. Namun sekarang anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain *gadget* daripada bermain dengan teman sebaya yang bisa menimbulkan sifat individualis dan

egosentris serta tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar.⁵⁶

Seharusnya penggunaan *gadget* dikembalikan pada fungsi awal, yaitu untuk komunikasi sekaligus sebagai sarana belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Anak dituntun untuk lebih kreatif. Dengan adanya media visual dan audio maka anak-anak bisa berimajinasi dan biasanya lebih tertarik. Misalnya anak browsing buku acuan yang diinginkan dan nantinya anak-anak ingin mengetahui banyak tentang buku bacaan yang ada. Dan ini bisa menarik minat baca anak. Namun praktiknya tidak demikian. Kebanyakan anak tidak ingin lebih tahu tetapi malah menjadi malas untuk membaca.

Peran orangtua terhadap anaknya harus selalu dilakukan. Jangan sampai orangtua hanya mengandalkan *gadget* untuk menemani anak. Sehingga, orangtua membiarkan anak lebih mementingkan *gadget* supaya tidak mengganggu. Mengontrol setiap konten yang ada di *gadget* anak merupakan salah satu cara yang efektif. Lebih sering mengajak anak untuk berdiskusi, tanya jawab dalam waktu luang. Bermain bersama atau hanya sekedar bercanda disel-sela

⁵⁶ Jonathan, dkk. 2015. *Perancangan Board Game Mengenai Bahaya Radiasi Gadget Terhadap Anak*. (Surabaya: Universitas Kristen Petra Surabaya), 117

aktifitas yang padat. Selama waktu itu anak bisa meniru tingkah laku orang dewasa. Mengembangkan daya imajinasi dan kreatifitasnya.

b. Dampak Positif: ⁵⁷

1) Mempermudah komunikasi

Dalam hal ini *Gadget* dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita dengan cara sms, telepon, atau dengan semua aplikasi yang dimiliki dalam *gadget* kita.

2) Menambah pengetahuan

Dalam hal pengetahuan kita dapat dengan mudah mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan dengan menggunakan aplikasi yang berada di dalam *gadget* kita

3) Menambah Teman

Dengan banyaknya jejaring sosial yang bermunculan akhir-akhir ini kita dapat dengan mudah menambah teman melalui jejaring sosial yang ada melalui *gadget* yang kita miliki.

4) Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru.

Dengan adanya metode pembelajaran ini, dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan

⁵⁷ Seminar International, “*Pengaruh Media Terhadap Perkembangan Anak*”, 1 November 2017. UIN Malang

kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak.

Melihat untung ruginya mengenalkan *gadget* pada anak pada akhirnya memang sangat tergantung pada kesiapan orangtua dalam mengenalkan dan mengawasi anak saat bermain *gadget*. Karena itu, kepada semua orangtua perlu diingatkan peran penting mereka dalam pemanfaatan *gadget* pada anak. Orang tua perlu menerapkan sejumlah aturan kepada anak-anaknya dalam menggunakan *gadget*. Untuk bias memanfaatkan *gadget* dengan efektif harusnya sebagai orang tua bias mamahami dan menjelaskan mengenai konten yang ada pada *gadget*. Tanpa adanya pendampingan dari orangtua penggunaan *gadget* tidak akan berfokus pada apa yang diajarkan orangtua. Biasanya justru akan melenceng dari apa yang orangtua ajarkan.⁵⁸

⁵⁸ Seminar Internasional, “*Pendidikan Pada Anak Usia Sekolah Dasar*”, 23november 2017. UIN Malang

F. Perubahan – perubahan Penyelenggaraan Pendidikan dan Berbagai Permasalahan di Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren

1. Perubahan Penyelenggaraan Pendidikan

a. Pembaharuan Sistem Pendidikan

Pada era globalisasi, sistem Pendidikan nasional mengalami perubahan, baik yang terjadi di sekoah, madrasaah maupun pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan bagian dari sistem Pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa perubahan sosial budaya yang tidak terelakkan, pesantren tidak dapat melepaskan diri dari perubahan-perubahan. Dinamika sosial ekonomi telah mengharuskan pendidikan untuk tampil dalam persaingan dunia pasar bebas, belum lagi sejumlah perkembangan lain yang terdapat dalam dinamika masyarakat. Pertanyaan yang muncul terkait resistensi (ketahanan), responsibilitas (tanggung jawab), kapabilitas (kemampuan), dan kecanggihan pendidikan dalam tuntutan perubahan besar. Apakah pendidikan mampu menghadapi konsekuensi logis dari perubahan-perubahan tersebut.

Di samping itu, pembaharuan sistem pendidikan harus juga dilakukan, baik dengan menyertakan satu atau bahkan beberapa aspek yang akan diperbaharui, tergantung dari latar belakang dan tujuan yang dilakukannya

pembaharuan tersebut oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Dalam sistem pendidikan terjadi pembaharuan pendidikan dalam berbagai aspek. Misalnya; pembaharuan dalam aspek tujuan pendidikan, aspek kelembagaan pendidikan, aspek pendidik, aspek peserta didik, aspek materi atau kurikulum, aspek metode pendidikan, aspek lingkungan pendidikan, aspek evaluasi pendidikan, dan aspek manajemen pendidikan (Thaib, 2010: 5).

b. Pembaharuan Aspek Organisasi

Keberadaan sekolah, madrasah dan pesantren dimanapun pasti memiliki ciri tersendiri, demikian pula pada aspek organisasinya. Pesantren memiliki struktur organisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembagian kerja masing – masing unit kadang memiliki banyak kesamaan. Tidak tampak adanya pertentangan atau konflik. Penyebabnya karena corak kerja dalam pesantren bersifat kekeluargaan. misalnya antara unit yang mengurus pendidikan dengan unit yang mengurus pengajian, kemasyarakatan, kesarifan. Unit-unit tersebut selalu bekerjasama dalam mejudkan berbagai kegiatan pesantren, saling melengkapi dan membantu.

c. Pembaharuan Aspek Kurikulum

Kurikulum secara signifikan berperan sebagai pedoman dan landasan operasional bagi

implementasi proses belajar mengajar di kelas, lembaga pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku, sekaligus alat dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembaharuan kurikulum erat kaitannya dengan kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan manusia terus berubah, bertambah, dan dinamis sesuai dengan tuntutan masa. Kalau ingin kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masa, maka harus diadakan pembaharuan terus menerus (Tarigan, 1993: 135).

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang selalu berubah. Kurikulum dibuat bermanfaat bagi siswa dan membantu menyelesaikan masalah mereka dan masalah masyarakat.⁵⁹ Pembaharuan kurikulum dapat ditandai dengan adanya mata pelajaran baru yang diperkenalkan. Atau dapat pula berupa perubahan jam dan mata pelajaran, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan sesuai dengan kebutuhan zaman.

d. Pembaharuan Aspek Metode Pembelajaran

Proses pendidikan terjadi dalam lingkungan interaksi edukatif antara guru dengan murid melalui metode pembelajaran.

⁵⁹ Al-Toumy, t.th: 528-529

Pembaharuan metode pembelajaran berakar pada kenyataan bahwa tidak ada metode mengajar yang lebih baik dan efektif karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam pengajaran sebaiknya tidak terbatas pada satu metode atau beberapa metode saja, tapi harus disesuaikan dengan kondisi siswa dan pelajaran yang disampaikan sehingga metode yang digunakan dapat mewujudkan tujuan pendidikan dengan baik.

e. Pembaruan Aspek Pendidik

Pendidik merupakan komponen pendidikan yang harus diperhatikan. Karena pendidik bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi siswa. Seorang pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar di kelas, melainkan harus mampu menciptakan suasana pergaulan yang edukatif di luar kelas. Pembaharuan pendidik berorientasi pada peningkatan mutu pendidik yang dapat ditandai dengan adanya usaha dalam pencapaian kompetensi yang melekat pada diri seorang pendidik. Usaha pembaharuan pendidikan ditujukan untuk kepentingan siswa atau peserta didik (Hasbullah, 2005: 202). Pembaharuan tersebut berorientasi untuk menghasilkan sosok peserta didik yang ideal, yakni berkualitas, professional, mumpuni dibidangnya, berke-

mauan keras atau pantang menyerah, memiliki motivasi yang tinggi, sabar, tabah, tidak mudah putus asa, berdaya saing dan lain sebagainya.

f. **Pembaharuan Aspek Peserta Didik**

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara membenahi proses pendidikan. Artinya, pembaharuan terhadap santri berawal dari pembaharuan terhadap in-put (calon siswa yang akan masuk) lewat penyeleksian yang ketat. Lalu, dilakukan penggodokan dan pemantapan keilmuan dalam kegiatan belajar mengajar (proses) di sekolah dan di asrama untuk menghasilkan out-put yang diharapkan.

2. Permasalahan di Sekolah, Madrasah, dan Pesantren

a. **Permasalahan di Pesantren**

Proses pendidikan di pesantren masih banyak permasalahan, diantaranya adalah kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan administrasi. Permasalahan kurikulum di pesantren terkait dengan pemberian pelajaran umum yang tidak efektif. Ada kecenderungan, pesantren saat ini praktis, semua pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Namun terkesan dilaksanakan belum optimal, sekedar memenuhi syarat atau agar tidak dinamakan terbelakang. Sehingga kemampuan santri pun biasanya sangat terbatas, kurang mendapat pengakuan masyarakat umum (Madjid, 1997: 94).

Kelemahan pendidikan pesantren yang lain adalah suasana pembelajaran yang pasif. (Qomar, 2007:73). Hal ini masih banyak dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metode pembelajaran aktif, sehingga membuat daya kritis santri menjadi lemah. Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidik harus mau melakukan formulasi pola pendidikan dengan menyertakan metode pembelajaran modern.

Dalam hal administrasi pesantren menganut pola “serba mono”, sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja lain yang ada dalam organisasi. Disamping itu, masih ada kebiasaan pendidikan pesantren yang menerapkan manajemen “serba informal”. Pola serba mono dan serba informal memiliki hubungan erat sekali. Kebiasaan pengelolaan serba mono dengan kebijakan yang terpusat hanya pada kyai mengakibatkan mekanisme formal tidak berlaku lagi, sementara keputusan-keputusan kyai bersifat deterministik dan keharusan untuk dijalankan (Qomar, 2007: 60). Oleh karena itu, pesantren harus segera membenahi dirinya dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku dalam

rangka optimalisasi administrasi dalam pesantren.

b. Permasalahan di Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menekankan inti pelajaran kepada pelajaran umum. Sebagian besar sekolah umum statusnya sudah negeri sehingga sudah tidak terdapat masalah dalam segi pendanaannya. Selain itu pengelolaan lembaganya sudah menggunakan manajemen yang professional. Namun, kondisi yang demikian bukan berarti di sekolah umum berjalan tanpa adanya masalah, hanya saja permasalahan yang ada tidak terjadi sebanyak di pesantren ataupun madrasah. Permasalahan yang masih sering muncul di sekolah biasanya terkait kualitas pendidikannya dan juga masalah yang baru muncul terkait implementasi kurikulum yang terus berubah, disinyalir juga terdapat permasalahan yang sama pada lembaga yang lainnya.

Berkaitan dengan mutu lulusan dari sekolah secara umum mereka kurang matang dalam pemahaman keagamaan, karena memang porsi jam mata pelajaran agama mereka sangat terbatas. Oleh karena itu, sekolah harus mengupayakan kegiatan-kegiatan ekstra di luar kelas yang bersifat religious, sehingga membantu siswa dalam peningkatan spiritualitasnya. Selain itu kualifikasi lulusan

sekolah umum terhadap jurusan yang mereka ambil, belum tentu lebih baik dari lulusan madrasah, karena faktor individu peserta didik juga sangat berpengaruh terhadap hasil pencapaiannya.

c. Permasalahan di Madrasah

Madrasah selama ini dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang mutunya lebih rendah daripada mutu lembaga pendidikan lainnya, terutama sekolah umum, walaupun beberapa madrasah justru lebih maju daripada sekolah umum. Namun, keberhasilan beberapa madrasah dalam jumlah yang terbatas belum mampu menghapus kesan negatif. Bahwa madrasah selalu saja mengalami serba kekurangan, misalnya guru yang mengajar belum tentu memperoleh imbalan kesejahteraan yang cukup, buku-buku belum tentu tersedia, apalagi sarana dan prasarana lainnya. Berkaitan dengan kualitas peserta didik di madrasah juga belum menguntungkan, potensi siswa madrasah rata-rata merupakan kelas menengah ke bawah. Secara intelektual di beberapa kasus madrasah, kemampuan mereka lemah, sebab biasanya siswa yang memiliki prestasi baik cenderung melanjutkan ke sekolah umum. Secara ekonomi, posisi mereka juga berada pada kelas menengah ke bawah. Demikian juga secara sosial, mereka

berasal dari kalangan masyarakat biasa (Qomar, 2007: 84).

Permasalahan dalam proses pendidikan di madrasah dirasa sangat kompleks, diantaranya terkait kualitas pendidik dan non pendidiknya, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pendanaan. Akibatnya para guru mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian kondisi sarana dan prasarana di madrasah juga masih jauh dari harapan. Kebanyakan madrasah masih mengandalkan BOS sehingga kegiatan dan fasilitasnya di bawah standar. Pengembangan kegiatan dan kelengkapan sarana tidak bisa dilakukan karena kendala ini (Asmani, 2013: 81).

Dari segi spiritual, masih banyak lulusan madrasah yang dalam setiap perilakunya belum mencerminkan nilai-nilai islami, bahkan tidak jarang yang terlibat dalam perkelahian dan perilaku negatif lainnya (Maimun dan Fitri, 2010: 8). Kondisi ini akan memperburuk penilaian masyarakat terhadap madrasah, karena mereka akan beranggapan tidak ada beda antara output dari madrasah dan sekolah umum.

d. Permasalahan Bahasa Internasional di Berbagai Lembaga Pendidikan Islam

Kemampuan Bahasa Internasional, terutama Bahasa Inggris juga menjadi masalah

utama di berbagai Lembaga Pendidikan Islam ketika berada pada era industri 4.0 dan memasuki era society 5.0, baik itu di sekolah, madrasah, maupun di pondok pesantren. Padahal kemampuan Berbahasa Inggris ini menjadi aspek sangat penting untuk bisa eksis bahkan berkembang di kanca internasional. Persoalannya tidak hanya terkait kemampuan, tetapi terkadang juga ada alasan ideologis, sehingga ada yang tidak mau menggunakan Bahasa Inggris. Untuk itu membutuhkan strategi adaptasi kebudayaan Bahasa Inggris dalam pembentukan Karakter kelembagaan Pendidikan Islam.

Hasil penelitian di suatu Lembaga Pendidikan Islam, ternyata Strategi Adaptasi kebudayaan Bahasa Inggris efektif dalam pembentukan Karakter Kelembagaan Pendidikan Islam. Hasilnya terlihat di table 1, dan 2 berikut:

Tabel 15.1

Efektifitas Strategi Adaptasi Pembudayaan Berbahasa Inggris dalam Pembentukan Karakter Kelembagaan Pendidikan Islam sebagai upaya Internasionalisasi Sekolah

No	Karakter Kelembagaan Pendidikan Islam	Kondisi Karakter Kelembagaan Pendidikan Sebelum Adaptasi Pembudayaan Berbahasa Inggris	Capaian Indikator Karakter Kelembagaan Pendidikan Sesudah Adaptasi Pembudayaan Berbahasa Inggris
1	<p>Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar sesuai prinsi-prinsip dasar</p>	<p>a. Seluruh pimpinan unit dan warga sekolah memiliki tekad dan kemauan untuk berbuat yang baik dan benar untuk kemajuan sekolah. b. Semua pimpinan unit dan warga sekolah berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas</p>	<p>a. Seluruh pimpinan unit dan warga sekolah memiliki tekad dan kemauan untuk berbuat yang baik dan benar untuk kemajuan sekolah, dan internasionalisasi sekolah. b. Semua pimpinan unit dan warga sekolah berpikiran</p>

	<p>ajaran Islam, peraturan sekolah, qoidah persyarikatan dan perundang-undangan yang berlaku..</p>	<p>dan fungsinya, sehingga sinergitas lembaga terbentuk, kemajuan dan perkembangan sekolah tercapai.</p> <p>c. Semua pimpinan unit dan warga sekolah membudayakan nilai-nilai ajaran Islam yang shohihah, mematuhi tata tertib dan kode etik sekolah, peraturan sekolah, koidah persyarikatan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun terkadang secara tidak sadar ada individu yang kurang mematuhi tata tertib sekolah, sehingga sekolah</p>	<p>positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing demi kemajuan dan perkembangan sekolah bertaraf internasional</p> <p>c. Semua pimpinan unit dan warga sekolah membudayakan nilai-nilai ajaran Islam yang shohihah, mematuhi tata tertib dan kode etik sekolah, peraturan sekolah, koidah persyarikatan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia demi</p>
--	--	--	---

		<p>harus menyelesaikan segera, supaya citra sekolah terjaga dan kemajuan bisa diraih.</p> <p>d. Semua pimpinan dan warga sekolah menolak korupsi, suap, atau gratifikasi, disamping tidak sesuai dan dilarang dalam ajaran Islam, juga karena bisa merusak citra sekolah Islam dan menjadikan sekolah tidak berkembang.</p>	<p>kerlangsungan dan terwujudnya sekolah Islam bertaraf internasional.</p> <p>d. Semua pimpinan dan warga sekolah menolak korupsi, suap, atau gratifikasi, disamping tidak sesuai dan dilarang dalam ajaran Islam, juga karena bisa merusak citra sekolah Islam dan menjadikan sekolah tidak berkembang, bisa menghambat internasionalisasi sekolah.</p>
2	<p>Profesionalitas: Bekerja secara disiplin,</p>	<p>a. Belum seluruh pimpinan unit dan warga sekolah melakukan pekerjaan sesuai</p>	<p>a. Semua pimpinan unit dan warga sekolah melakukan pekerjaan sesuai</p>

	<p>kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik sesuai tujuan yang ditetapkan</p>	<p>kompetensi jabatan, tugas dan fungsinya masing-masing.</p> <p>b. Belum seluruh pimpinan unit dan warga sekolah melakukan tugas sesuai perencanaan yang dibuat secara matang</p> <p>c. Belum seluruh pimpinan unit dan warga sekolah disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menjalankan tugas masing-masing.</p> <p>d. Belum seluruh pimpinan unit dan warga sekolah melakukan pekerjaan secara terukur dan bertanggungjawab.</p>	<p>kompetensi jabatan, tugas dan fungsinya masing-masing.</p> <p>b. Semua pimpinan unit dan warga sekolah melakukan tugas sesuai perencanaan yang dibuat secara matang</p> <p>c. Semua pimpinan unit dan warga sekolah disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menjalankan tugas masing-masing.</p> <p>d. Semua pimpinan unit dan warga sekolah melakukan pekerjaan secara terukur dan bertanggungjawab.</p>
--	---	--	--

		<p>e. Belum seluruh pimpinan unit dan warga sekolah melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.</p> <p>f. Belum seluruh pimpinan unit dan warga sekolah bersedia menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah, persyarikatan dan pemerintahan.</p>	<p>e. Semua pimpinan unit dan warga sekolah melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.</p> <p>f. Semua pimpinan unit dan warga sekolah bersedia menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah, persyarikatan dan pemerintahan.</p>
3	Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada	<p>a. Masih ada pimpinan unit dan Sebagian besar warga sekolah yang belum bersedia</p>	<p>a. Semua pimpinan unit dan sebagian besar warga sekolah selalu melakukan</p>

	<p>dan mengkreasi berbagai hal baru yang lebih baik.</p>	<p>melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan terhadap setiap fungsi dan tugasnya masing-masing.</p> <p>b. Masih ada pimpinan unit dan warga sekolah yang bersikap tertutup dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;</p> <p>c. Masih ada pimpinan unit dan Sebagian besar warga sekolah yang belum berusaha meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadinya dengan sungguh-sungguh.</p> <p>d. Masih ada pimpinan unit dan sebagian besar warga sekolah</p>	<p>penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan terhadap setiap fungsi dan tugasnya masing-masing.</p> <p>b. Semua pimpinan unit dan warga sekolah bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;</p> <p>c. Semua pimpinan unit dan sebagian besar warga sekolah berusaha meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadinya dengan sungguh-sungguh.</p>
--	--	---	---

		<p>yang belum berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi sewaktu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, selalu mengandalkan bantuan orang lain.</p> <p>e. Hampir semua pimpinan unit dan warga sekolah yang belum bersedia dan apalagi dapat berkomunikasi dengan bahasa inggris sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga belum bisa mencari dan memahami berbagai macam referensi berbahasa</p>	<p>d. Semua pimpinan unit dan warga sekolah berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi sewaktu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, dengan tetap bersinergi dengan yang lain.</p> <p>e. Semua pimpinan unit dan warga sekolah bersedia dan dapat berkomunikasi dengan bahasa inggris sesuai kompetensi yang dimiliki, bisa mencari dan memahami berbagai</p>
--	--	---	--

		<p>Inggris untuk memperluas wawasan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan fungsi dan tugasnya masing-masing. Itupun yang melakukan komunikasi bahasa Inggris hanya guru-guru bahasa Inggris, disebagian kecil waktu mengajar Bahasa Inggris di kelas, tidak dilakukan di luar kelas.</p> <p>f. Banyak pimpinan unit dan warga sekolah belum dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja, sehingga</p>	<p>macam referensi berbahasa Inggris untuk memperluas wawasan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan fungsi dan tugasnya masing-masing.</p> <p>f. Semua pimpinan unit dan warga sekolah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien, bahkan ada yang dapat mengembangkannya (berinovasi).</p>
--	--	---	---

		<p>kurang efektif dan efisien, bahkan belum ada yang dapat mengembangkannya (berinovasi).</p> <p>g. Jaringan sekolah terbatas, bersifat lokal, bertaraf regional.</p>	<p>g. Jaringan sekolah menjadi lebih luas, bersifat global, bertaraf internasional</p>
4	<p>Tanggung jawab: bekerja secara tuntas dan konsekwen, bertanggungjawab terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan, baik terhadap lembaga,</p>	<p>a. Terkadang masih ada pimpinan unit dan atau warga sekolah yang belum dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;</p> <p>b. Terkadang masih ada pimpinan unit dan atau warga sekola yang tidak mudah mengakui kesalahan,</p>	<p>a. Semua pimpinan unit dan warga sekolah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;</p> <p>b. Semua pimpinan unit dan warga sekola berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan</p>

	<p>persyarikatan, maupun kepada Allah SWT.</p>	<p>kurang bersedia menerima konsekuensi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan perbaikan terkesan terpaksa</p> <p>c. Terkadang masih ada warga sekolah yang belum bisa mengatasi masalah dengan segera, harus dibantu dengan orang lain.</p> <p>d. Terkadang masing ada warga sekolah yang kurang berkomitmen dengan tugas yang diberikan dan melaksanakan kurang bertanggung jawab.</p>	<p>melakukan langkah-langkah perbaikan dengan penuh kesadaran</p> <p>c. Semua warga sekolah bisa mengatasi masalah dengan segera, atas usaha sendiri atau atas bantuan dari sesama warga sekolah.</p> <p>d. Semua warga sekolah berkomitmen dengan tugas yang diberikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada lembaga, persyarikatan dan Allah SWT.</p>
--	--	--	---

5	<p>Keteladanan: Menjadi yang baik bagi sesama warga sekolah dan orang lain</p>	<p>a. Terkadang masih ada warga sekolah yang menunjukkan akhlak kurang terpuji, dan merasa tersinggung bila diingatkan.</p> <p>b. Belum seluruh warga sekolah memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, dan bertindak secara adil.</p> <p>c. Belum seluruh pimpinan unit melakukan pembimbingan dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat, masih ada pimpinan yang terkesan tidak suka bila</p>	<p>a. Seluruh warga sekolah menunjukkan akhlak terpuji, dan sangat senang bila ada yang mengingatkan.</p> <p>b. Seluruh warga sekolah memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, dan bertindak secara adil.</p> <p>c. Masing-masing pimpinan unit melakukan pembimbingan dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat, serta bersedia menerima</p>
---	---	--	---

		<p>menerima masukan dari bawahan.</p> <p>d. Belum seluruh warga sekolah bersedia saling memberikan bimbingan dan arahan kepada teman sejawat, masih ada yang acuh-tak acuh dengan yang lain, bahkan mudah tersinggung bila ada yang mengingatkan.</p> <p>e. Belum seluruh warga melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri, masih ada yang selalu mencari kesalahan orang lain</p>	<p>masukan-masukan dari bawahan.</p> <p>d. Seluruh warga sekolah bersedia saling memberikan bimbingan dan arahan kepada teman sejawat, peduli terhadap sesama dan bersedia menerima masukan dengan senang hati.</p> <p>e. Seluruh warga melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri, bila ada yang melakukan kesalahan bersedia mengingatkan.</p>
--	--	---	---

Bila kita cermati berbagai indikator karakter kelembagaan pendidikan Islam pada aspek integritas, profesionalitas, inovatif, tanggungjawab dan keteladanan pada tabel di atas, setelah ditetapkan kewajiban pembudayaan berbahasa Inggris, terlihat peningkatan karakter positif lebih banyak terjadi pada karakter inovatif, profesionalitas, baru kemudian tanggungjawab dan keteladanan, Sedangkan untuk karakter integritas hanya ada peningkatan pada indikator kepatuhan tata tertib yang berlaku.

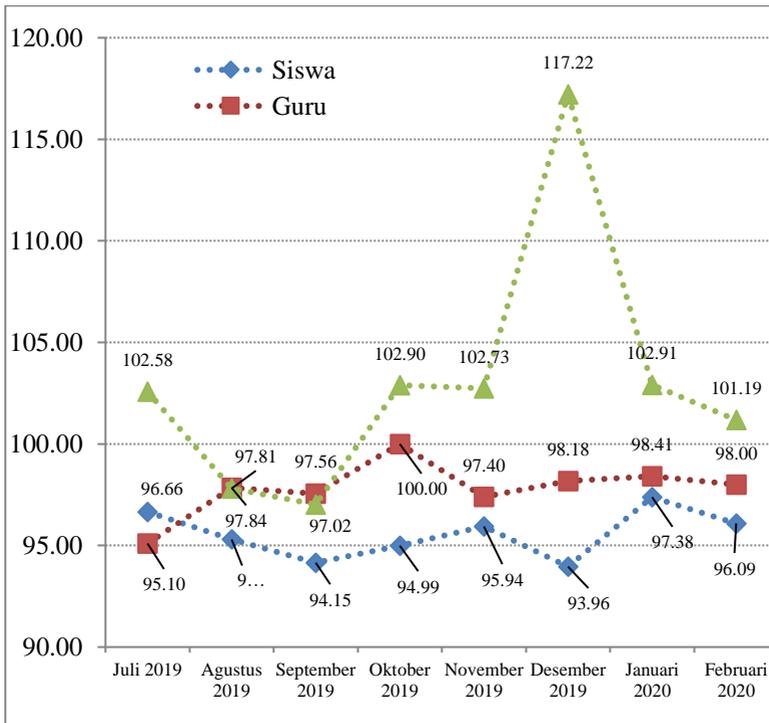
Kecilnya peningkatan pada indikator integritas terjadi, karena sebelumnya integritas kelembagaan sudah kuat, bahkan bisa dinyatakan sejak awal sangat baik. Salah satu indikator integritas yang tinggi bisa dilihat pada tingkat kedisiplinan siswa, guru dan pegawai sehari-hari di sekolah sebelum dan setelah ditetapkan kewajiban berbahasa Inggris.

Tabel 15.2

Perbandingan tingkat kedisiplinan siswa, guru dan pegawai sebelum dan setelah penetapan kewajiban berbahasa Inggris

No	Subjek	Prosentase Kehadiran							
		Sebelum		Setelah Ditetapkan Kewajiban Berbahasa Inggris					
		Juli-19	Ags-19	Sep-19	Okt-19	No P-19	Des-19	Jan-19	Peb-19

1	Siswa	96,66	95,30	94,15	94,99	95,94	93,96	97,38	96,09
2	Guru	95,10	97,84	97,56	100	97,40	98,18	98,41	98
3	Pegawai	102,58	97,81	97,02	102,90	102,73	117,22	102,91	101,19



Grafik 15.1

Perbandingan tingkat kedisiplinan siswa, guru dan pegawai sebelum (Juli-Agustus) dan setelah penetapan kewajiban berbahasa Inggris (September -Februari)

Karakter integritas di sekolah sudah terbentuk sejak lama, sebelum kebijakan kewajiban pembudayaan berbahasa Inggris. Bahkan integritas menjadi prioritas pertama sewaktu sekolah ini didirikan, terutama integritas dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam yang shohihah, integritas kepada lembaga dan kemajuan sekolah, serta integritas terhadap persyarikatan dimana sekolah ini didirikan dan bernaung.

Karakter integritas dijadikan dasar utama dalam merekrut tenaga baru, guru maupun pegawai, serta pimpinan sekolah. Pertimbangan berikutnya baru profesionalitas, inovatif, tanggungjawab dan keteladanan. Integritas juga menjadi skala prioritas dalam pembinaan pimpinan, guru, pegawai, siswa dan orang tua siswa. Dengan integritas inilah, maka kebersamaan bisa terbentuk, kemajuan sekolah bisa diraih sekalipun berbagai tantangan dihadapi. Para warga sekolah juga merasa nyaman, berkinerja terukur, sekalipun kesejahteraan yang diterima belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, juga terjadi distribusi kesejahteraan proporsional antar pimpinan dengan karyawan. Bila ada surplus pendapatan sekolah, tidak diperuntukkan kenaikan gaji, dan kalau memang ada dilakukan secara proposional menyesuaikan inflasi, prioritas untuk pengembangan lembaga, sarana prasarana dan berbagai kegiatannya, serta sebagian untuk kepentingan dakwah persyarikatan, membantu

sekolah sesama persyarikatan yang masih belum berkembang.

Dengan integritas, rasa persaudaraan terpelihara, solidaritas sesama terbentuk, tanggungjawab terhadap tugas juga tidak bisa disangsikan. Kondisi seperti ini menjadi modal utama bagi keberlangsungan dan kemajuan sekolah Islam.

Integritas yang sudah terbangun menjadi karakter individu, berkembang menjadi karakter lembaga, mendorong para guru dan pegawai yang sudah berkemampuan bekerja secara profesional, berorientasi pada produktifitas dan kualitas kerja, bukan pada harapan untuk memperoleh kenaikan jaminan kesejahteraan dari lembaga.

Faktor ikhlas yang mendorong terjadinya sinergitas, profesionalitas, inovatif, tanggungjawab dan ketauladanan inilah yang tidak diperhatikan oleh penelitian Maksum dkk. dan Basyit. Maksum dkk (2020) lebih tertarik melihat demokrasi sebagai budaya khas pendidikan Islam. Basyit hanya mengungkapkan kesadaran internal mendesain sistem pendidikan unggul, disamping faktor eksternal, yakni turunnya proses dan hasil pendidikan sekolah umum, skeptis proses dan hasil pendidikan pesantren dan madrasah, peningkatan kemampuan ekonomi, serta dukungan pemerintah dalam otonomi pendidikan swasta dan “internasionalisasi” semua level pendidikan di Indonesia (Basyit, 2019: 27). Padahal ikhlas karena Allah SWT. menjadi faktor paling

penentu. Sebagaimana penelitian Sivasubramaniam & Hayhoe, (2018), di berbagai negara maju, motif agama dan spiritualitas menjadi sangat penting. Rasa ikhlas mendorong terjadinya kerja profesional, bahkan selalui ada upaya inovasi, sekalipun masih terbatas, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bisa menjadi tauladan bagi yang lain.

Faktor ikhlas juga menjadikan lembaga pendidikan ini tetap eksis, bisa melayani seluruh strata ekonomi masyarakat dengan pengelolaan yang baik, sesuai standar akuntan. Fakta ini menunjukkan bukti berbeda dengan penelitian Puruwita & Murdayanti (2018) yang menemukan pengelolaan keuangan tidak sesuai standar akuntansi. Melalui manajemen akuntansi yang bagus, keuangan sekolah ini menjadi sehat. Sekaligus menolak asumsi sebagian masyarakat yang menyatakan, bahwa sekolah berlabel internasional, biayanya tinggi, sehingga hanya mereka berstatus ekonomi menengah ke atas yang bisa mendaftar (Ali,2020).

Dengan pembudayaan berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris semua warga sekolah meningkat. Kemampuan berbahasa Inggris setiap warga menjadi alat sekaligus modal bagi pengembangan karakter profesionalitas, inovatif, tanggungjawab dan keteladaan yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga menjadi sekolah yang bertaraf internasional.

Kemampuan membaca dan memahami berbagai referensi berbahasa Inggris, menjadikan wawasan setiap warga sekolah berkembang, profesionalitas dalam bekerja juga lebih sempurna. Inovasi-inovasi manajerial dan berbagai hal terkait pembelajaran lebih banyak bisa dilakukan. Integritas iman yang didukung kemampuan berbahasa Inggris, menjadikan inovasi yang dilakukan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa menjadi rujukan. Akibat lebih lanjut, karena banyak inovasi yang dilakukan, melalui kerja yang profesional yang bertanggungjawab, maka menjadi sekolah tauladan.

Kemampuan menulis bahasa Inggris setiap warga sekolah mendorong terbitnya berbagai karya inovasi dan referensi berbahasa Inggris. Dokumen yang ada disebarluaskan secara luas melalui media informasi dan telekomunikasi, yang bisa diakses dari berbagai kawasan. Begitu juga kemampuan mendengar dan berbicara bahasa Inggris, menjadikan warga sekolah mampu berkomunikasi dengan berbagai warga negara lain, hubungan menjadi lebih luas.

Warga sekolah juga bisa beradaptasi, terbiasa memanfaatkan teknologi Informasi (Hermanto, Kusnanto, & Supangat, 2018) dan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab, menyampaikan informasi secara proposional. Karakter seperti ini sangat berbeda dengan temuan Samatan, Fatoni dan

Murtiasih (2020) media sosial sering dimanfaatkan secara tidak proposional.

Dengan kata lain, melalui strategi adaptasi, kebijakan pembudayaan berbahasa Inggris efektif mendorong terjadinya internasionalisasi karakter kelembagaan pendidikan Islam. Bila ini terus berlanjut akan benar benar menjadi sekolah Islam bertaraf internasional.

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan, Pendidikan Islam harus banyak melakukan pembenahan, reaktualisasi Pendidikan Islam harus dilakukan, agar bisa eksis di era society 5.0, terutama terkait:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Program di berbagai Lembaga Pendidikan Islam.
2. Kurikulum, tematik integratif
3. Desain Proses Pembelajaran dan Penilaian Pembelajaran harus berkelanjutan, berbasis riset, eksperimen dan praktik.
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus diarahkan ke team teaching dan memiliki kompetensi di bidang Al Islam, Bhaasa Arab, Bahasa Inggris dan teknologi.
5. Sarana dan prasarana fungsional, berbasis teknologi modern, terutama memanfaatkan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Robot, serta LINGKUNGAN)
6. Manajemen dan pengelolaan Lembaga harus dilakukan secara kolektif kolegial, Integritas,

Profesionalitas, Inovasi, Tanggung jawab, dan Keteladanan harus dijadikan sebagai karakter kelembagaan

7. Penganggaran, terkait penggajian, pembiayaan pembelajaran harus proposional.

Sudah tentu, untuk bisa melakukan hal tersebut dibutuhkan Kerjasama semua pihak, sinergitas Lembaga Pendidikan, yakni Kepala, Guru, Pegawai, Siswa, masyarakat, orang tua, dunia kerja dan industri, serta pemerintah

G. Kesimpulan

Perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masalah-masalah sosial pendidikan yang muncul di tengah masyarakat juga di alami dunia pendidikan. Sehingga sosiologi Pendidikan memainkan perannya untuk ikut memformat pendidikan yang mampu berkiprah secara kontekstual. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduksi nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya.

Keberadaan pesantren, sekolah dan madrasah terus mengalami perkembangan, setidaknya secara kuantitatif. Jumlah lembaga-lembaga itu senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dan tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya secara kualitatif masih menghadapi berbagai problem yang serius walau

sedang berusaha untuk diatasi, baik problem dalam input, proses atau outputnya. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi terhadap standar pendidikan. Apalagi ketika disandarkan bahwa pendidikan merupakan faktor penentu bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan bangsa, membuat kelemahan yang ada pada lembaga pendidikan tersebut semakin terasa sekali dan tentunya harus segera diselesaikan dan diatasi bersama-sama.

H. Daftar Bacaan

1. Anshori, Isa., & Sahara, Elly Elvina, (2020), INTERNATIONALIZATION OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTIONAL CHARACTERS THROUGH THE ENGLISH ACCULTURATION STRATEGY. *Humanities & Social Sciences Reviews*, Vol. 8 No. 5 , September. Article Published : Sep 20,, 140-157.
<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8514.>,
<https://mgesjournals.com/hssr/article/view/3888>
2. Saroni, M., (2019), *Sosiologi pendidikan memahami dinamika sosiokultural*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
3. Haidar, (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

4. Haryanto, Sindung. (2012), *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern-Jogjakarta*: Ar-Ruzz Media,
5. Haedari, Amin, (2005). *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta.
6. Jonathan. dkk. (2015). *Perancangan Board Game Mengenai Bahaya Radiasi Gadget Terhadap Anak*. Surabaya: Universitas Kristen Petra Surabaya
7. Kusuma. Yuliandi dan D. Ardhy Artanto. (2011). *Internet untuk Anak Tercinta*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
8. Mastuhu, (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS.
9. Masyhud, Sulthan et. al, (2003). *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta ; Diva Pustaka. Agung.
10. Suryono, Agus. (2020), *Teori dan strategi perubahan sosial*. Surabaya: Bumi Aksara,
11. Taufiq, Rahaman M. (2011), *Glosari Teori Sosial*. Banadung: Ibnu Sina Press.
12. Saifuddin, Achmad Fedyani. (2016), *Pengantar Teori-teori Sosial*, Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
13. *Seminari International*, (2017), “Pengaruh Media Terhadap Perkembangan Anak”, 1 November. UIN Malang

14. Soekanto, Soerjono. (2014), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Daftar Pustaka

1. Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
2. Abuddin Nata, "Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
3. Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
4. Ahmad Shalaby, *History of Muslim Education*. Beirut-Libanon: Dar al-Kashshaf, 1954
5. Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan masa depannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
6. Isa Anshori, Elly Elvina Sahara, INTERNATIONALIZATION OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTIONAL CHARACTERS THROUGH THE ENGLISH ACCULTURATION STRATEGY. *Humanities & Social Sciences Reviews*, Vol. 8 No. 5 (2020): September. Article Published : Sep 20, 2020. 140-157. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8514.>, <https://mgesjournals.com/hssr/article/view/3888>
7. Anthony Giddens, *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley and Los Angeles, California: University of California, 1979

8. Anthony Giddens, *The Constitution Society: Outline of the Theory of Structuration*. USA: University of California Press, 1984.
9. Anthony Giddens, *Nation-State and Violence*. Berkeley, CA: University of California Press, 1987.
10. Anthony Giddens, *Beyond Left and Right*. Cambridge: Polity Press, 1994.
11. Anthony Giddens, *The Third Way: the Renewal of Social Democracy*. Ketut Arya Mahardika (penerjemah). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
12. Anthony Giddens, *Social Theory Today*. Yudi Santoso (penerjemah). Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
13. Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Perlbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
14. Christopher J. Hurn, *The Limits and Possibilities of Schooling: An Introduction to the Sociology of Education*, Allyn Bacon, USA, 1978
15. Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2015.
16. Emile Durkheim, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (terjemahan) Erlangga, Jakarta, 1990
17. Fakhri Mansour, Roem Topatimasang dan Toto Rahardjo, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: ReaD dan Pustaka Pelajar, 2001

18. Freire Paulo, Pendidikan Kaum Tertindas (terjemahan), Jakarta: LP3ES, 1985
19. Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan (Antara Kompetisi dan Keadilan), INSIST Press, Cindelas dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
20. Frank J. Miffen & Sydney C. Miffen, Sosiologi Pendidikan (terjemahan), Tarsito, Bandung, 1986
21. George Ritzer, *Moderen Sociological Theory*. New York: The McGraw-Hill Companies, Fourt Edition 1996.
22. George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Alimandan (penyadur). Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
23. George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoderen*. Nurhadi (penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cetakan pertama 2008.
24. George Ritzer. *Teori Sosiologi Moderen*. Alimandan (alih bahasa). Jakarta: Kencana, edisi keenam 2008
25. Hasan Langgulung, (1988), *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
26. Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
27. Husain, S.S., Ashraf, S.A., (1979), *The Crisis of Muslim Education*. Saudi Arabia: King Abdul Aziz University.

28. Haralambos and Holborn. *Sociology Themes and Perspective*. London: Harper Collin Publiser. 2000
29. Isa Anshori, *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/39333/>
30. Isa Anshori, *Masyarakat Santri dan Pariwisata: Kajian Makna Ekonomi dan Religius*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43460>
31. Isa Anshori, *Perencanaan Sistem Pembelajaran*, Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2009. <http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/52/>
32. Isa Anshori, *Evaluasi Pendidikan*, Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2004, <http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/51>
33. Isa Anshori, *Dinamika Pesantren: Pemaknaan Sosial, Ideologi dan Ekonomi di Kalangan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press, 2012.
34. Isa Anshori, *Dinamika Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press, 2012.
35. Isa Anshori, *Dinamika Pesantren Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama: Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, Agustus 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/43043/>
36. Isa Anshori, "Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi dan Religius", *HALAQA: Jurnal Kependidikan dan*

- Keislaman, ISSN 1412-9302, Vol. 1, No. 1, Hal. 97-111, Sidoarjo, Oktober 2002.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39588>
37. Isa Anshori, “Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pondok Pesantren”, HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman, ISSN 1412-9302, Vol. 2, No. 2, Hal:112-121, Sidoarjo, April 2003.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39589>
38. Isa Anshori, “Negara, Ideologi, dan Pendidikan dalam Pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser”, HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman, ISSN 1412-9302, Vol. 8, No.1, hal 57-66, Sidoarjo, April 2009.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39586>
39. Isa Anshori, “Dinamika Pesantren: Pemaknaan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kawasan Pesisir dan Pedalaman Pantai Utara Kabupaten Lamongan”, HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman, ISSN 1412-9302, Vol. 11, No. 28, Hal:33-50, Sidoarjo, Oktober 2012
40. Isa Anshori, “Dinamika Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kawasan Pesisir dan Pedalaman Pantai Utara Kabupaten Lamongan, CAKRAWALA: Jurnal Litbang Kebijakan, ISSN 1978-0354, Vol. 6, No. 2, Hal. 129-145, Surabaya, Juni 2012.
<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v6i2.150>,
<http://www.cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/150>

41. Isa Anshori, "Perilaku Memilih Lembaga Pendidikan: Perspektif teori Rational Choice dan Bounded Rational", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, ISBN 978-602-70216-2-4, hal. 136-160, Sidoarjo: FKIP Umsida, 2017.
<http://eprints.umsida.ac.id/436/>
42. Isa Anshori, "Harapan Islam dan Indonesia terhadap kehidupan Politik pada Era Reformasi", Khazanah, Vol 1 No 1 September 1999.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39579>
43. Isa Anshori, "Budaya Malu dan Etos Kerja", Proceeding Seminar Nasional dan Call For Paper 12-25 Februari 2012, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39591>
44. Isa Anshori, "Konflik dan Integrasi dalam Kehidupan Beragama". HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman, ISSN 1412-9302, Vol. 7, No.2, hal 1-92, Sidoarjo, April 2008
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39585>
45. Isa Anshori, "Menggagas Kepemimpinan Umat Islam", HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman, ISSN 1412-9302, Vol. 6, No.1, hal 179-190, Sidoarjo, April 2007.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39587>
46. Isa Anshori, "Perubahan Fungsi Pondok Pesantren dalam Pengembangan Budaya Nasional, HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman, ISSN 1412-

- 9302, Vol. 2, No.1, hal 1-92, Sidoarjo, Oktober 2003. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39590>
47. Isa Anshori, “Sistem Kredit Semester (SKS) dalam pembelajaran Sosiologi (Studi penerapan di MAN Lamongan)”, CENDEKIA: Jurnal Pendidikan dan Humaniora, ISSN 2598-2419, Volume 1, No. 1, Hal. 1-12, Lamongan, Juli-Desember 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39549>
48. Isa Anshori, “Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah”, HALAQA: Islamic Education Journal1 (2), Desember 2017, 11-22. ISSN 2503-5045 (online), <http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1243>, <https://halaqa.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/1540>
49. Isa Anshori, “Penerapan Nilai Budaya Kerja: Peluang dan Tantangan dalam Peningkatan Kinerja Madrasah”, CENDEKIA: Jurnal Pendidikan dan Humaniora, ISSN 2598-2419, Volume 2, No. 3, Hal. 191-201, Lamongan, Juli-Desember 2018. <https://e-journal.man1lamongan.sch.id/2021/09/23/penerapan-nilai-budaya-kerja-peluang-dan-tantangan-bagi-peningkatan-kinerja-madrasah/>
50. Isa Anshori, “Melacak State Of The Art Fenomenologi dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial”, HALAQA: Islamic Education Journal, 2 (2), Desember 2018, 165-181. ISSN 2503-5045 (online), <http://doi.org/10.21070/halaqa.v2i2.1814>,

<https://halaqa.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/1554>

51. Isa Anshori, “Analisis Kritis terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Kekerabatan, Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam)”. HALAQA: Islamic Education Journal, 3 (1), Juni 2019, 1-6. ISSN 2503-5045 (online), <https://doi.org/10.21070/halaqa.v3i1.2127>, <https://halaqa.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/1559>
52. Isa Anshori, “Mempersiapkan Pendidikan Keguruan Agama Masa Depan”. Mimbar Pembangunan Agama (MPA), no 38, November 1989, 22-23, ISSN 0215-3289 . <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39624>
53. Isa Anshori, “Perjuangan Cendekiawan Muslim di Indonesia”. Mimbar Pembangunan Agama (MPA), no 67, April 1992, 66-58, ISSN 0215-3289 . <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39627>
54. Isa Anshori, “Dilema Tanggung Jawab Guru Masa Depan”, Mimbar Pembangunan Agama (MPA), no 76, Januari 1993, 51-52, ISSN 0215-3289 . <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39626>
55. Isa Anshori, “Standar Kualitas Guru Masa depan”, KHAZANAH, 13, (9), September 2007, 4. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39661>

56. Isa Anshori, "Akreditasi Sekolah: Formalitas atau Realitas". KHAZANAH, 13 (9), September 2007, 9.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39658>
57. Isa Anshori, "Konsekwensi UU Sisdiknas". KHAZANAH, 5 (6), September 2003, 9
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39659>
58. Isa Anshori, "Menanti Pemimpin Islami". KHAZANAH, 5 (6), September 2003, 10-11.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39660>
59. Isa Anshori, "Tradisi Kaum Santri: suatu perubahan dari Old Society ke New State 1". KHAZANAH, Khusus (4), Desember 1996, 12-15.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39662>
60. Isa Anshori, "Tradisi Kaum Santri: suatu perubahan dari old Society ke New State 2". KHAZANAH, 12(5), Juli 1997, 7.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39663>
61. Mohammad Faizal Amir, Chusnul Chotimah, Rifki Afandi, Hendra Erik Rudyanto dan Isa Anshori, Design Research Study: Investigation of Increasing Elementary Student's Spatial Ability Using 3Dmetric. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Vol. 10, 06-Special Issue, 24 Desember 2018, 1707-1713, <https://doi.org/10.31227/osf.io/6fbzj>,
<https://osf.io/preprints/inarxiv/6fbzj/>
62. Isa Anshori. " Study of Structuralism, Post-Structuralism and Network Actors and Their Relevance to Islamic Education". HALAQA:

Islamic Education Journal, 4 (1), 20 Februari 2020. 17-21. DOI: <https://doi.org/10.21070/halaqa.v4i1>, <https://halaqa.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/175/223>

63. Isa Anshori, Suwidiyanti. "Improvement of Mathematics Teacher Performance Through Academic Supervision With Collaborative Approaches". IJERE: International Journal of Educational Research Review, 5(3), 1 Juli 2020, 227-242. <https://doi.org/10.24331/ijere.735935>. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijere/issue/53732/735935>, <http://www.ijere.com/article/improvement-of-mathematics-teacher-performance-throughacademic-supervision-with-collaborative-approaches>
64. RN Pramitasary, Isa Anshori, Budi Hariyanto. "The Effectiveness of Choosing Language Diction by the Principal in Managing Islamic Education Institutions (Jacques Derrida's perspective)". Proceeding of The ICECRS, Conference of Islamic Educational Payment Management in Industrial Revolution 4.0, Vol 7, 18 Juni 2020, 1-10. <https://doi.org/10.21070/ICECRS2020434>, <https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/434/294>
65. E Sudus, Istikomah, Nyong Eka Teguh Iman Santoso, Isa Anshori, Budi hariyanto. "Implementation of Class Visits Supervision to

- Determine Teacher Professionalism”. Proceeding of The ICECRS, Conference of Islamic Educational Payment Management in Industrial Revolution 4.0, Vol 7, 12 Juni 2020. 1-9. <https://doi.org/10.21070/icecrs2020370>, <https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/370>
66. Istiqomah, Nurdiansyah, Efi Fahyuni, Isa Anshori. “Teacher Performance Supervision Analysis in Developing the Quality of Islamic Education Institutions”. Proceeding of The ICECRS, Conference of Islamic Educational Payment Management in Industrial Revolution 4.0, Vol 6, 13 Juni 2020, 1-8., <https://doi.org/10.21070/ICECRS2020382>. <https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/382/256>
67. Isa Anshori, Zahro'ul Illiyyin, Dampak Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran di MTs Al-Asyhar Bungah, Gresik. Islamic Manajement: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3 (2), 31 Juli 2020 <http://dx.doi.org/10.30868/im.v3i2.803>, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/view/803>
68. BUDI, S., & Anshori, I.. Analisis Efektifitas Pembelajaran Online pada Masa Pandemi Covid-19. FIKROTUNA, 11(01). 31 Juli 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/jf.v11i01.3893>

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/3893>

69. Muhammad Trihandoyo, Isa Anshori, Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan Administrasi Sistem Pe Nilaiian Al Islam, Kemuhammadiyah Dan Bahasa Arab (Ismuba) Pada Era Industri 4.0 Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo. International Journal on Integrated Education, 3 (IX), September 2020. 70-76.
<https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/591>.
<https://doi.org/10.31149/ijie.v3i9.591>
70. Susi Darwati, Isa Anshori, Remodelling pembelajaran student team achievement division (stad) berbasis riset dalam pembelajaran pai di sekolah dasar negeri jimbaran wetan, wonoayu, Sidoarjo. International Journal on Integrated Education, 3 (IX), September 2020. 59-64.
<https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/589>.
<https://doi.org/10.31149/ijie.v3i9.589>
71. Isa Anshori, Elly Elvina Sahara, INTERNATIONALIZATION OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTIONAL CHARACTERS THROUGH THE ENGLISH ACCULTURATION STRATEGY. Humanities & Social Sciences Reviews, Vol. 8 No. 5 (2020): September. Article Published

- : Sep 20, 2020. 140-157.
<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8514.>,
<https://mgesjournals.com/hssr/article/view/3888>
72. Isa Anshori, Eva Wiji Lestari, Penanaman karakter keagamaan peserta didik melalui pembelajaran sentra di RA Rahmatillah Sidoarjo, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 9, No 2 (Oktober, 2020), hlm. 193-212,
<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3110>
73. Muhammad Handoyo, Isa Anshori, SOCIOLOGICAL STUDY ON THE ROLE OF IMPLEMENTING DINIYAH MADRASAH IN CHARACTER FORMATION, Al Ibtidaiyah: Vol 1, No 2 (2020), p. 88-98. <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Al-ibtidaiyah/article/view/100>
74. Furqon, Isa Anshori, Model Pengembangan Pendidikan Pesantren Muhammadiyah Boarding School Jombang, International Journal on Integrated Education (IJIE), Vol. 3 No. 1 (2020): 2 Januari, 189-193,
<https://doi.org/10.31149/ijie.v3i1.418>,
<https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/418>
75. Bunga Anggun Febriani, Isa Anshori, Tingkatan sosial ekonomi orangtua berdampak pada kemampuan belajar siswa di masa pandemi Covid-19, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol 8, No 1 (Juni, 2020).

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/32187>

76. Isa Anshori, Eva Wiji Lestari, Penanaman karakter keagamaan peserta didik melalui pembelajaran sentra di RA Rahmatillah Sidoarjo, Ta'dibuna, Vol 9, No 2 (2020), 193-2011, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/view/3110>
77. Silvana Mumtaza, Isa Anshori, Istikomah, Increased patterns of Islamic social interaction with E-Learning-based learning methods during the COVID-19 Pandemic. HALAQA: Islamic Education Journal, Vol 5 No 1 (2021): Juni. 29-42. <https://halaga.umsida.ac.id/index.php/halaga/article/view/1129>
78. Refalda Yuda Afrella, Isa Anshori, Strategi Islam dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi, International Journal on Integrated Education (IJIE), Vol. 4 No. 1 (2021): 2 Januari, 154-163, <https://doi.org/10.31149/ijie.v4i1>, <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/1153>
79. Isa Anshori, Problem-Based Learning Remodelling Using Islamic Values Integration and Sociological Research in Madrasas, International Journal of Instruction, April 2021, Volume 14, Number 2. 421-442, <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14224a>, http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2021_2_24.pdf

80. Suwidiyanti, Isa Anshori, SCHOOL STRATEGY TO BUILD STUDENTS' SOCIAL SOLIDARITY DURING ONLINE LEARNING, Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Maret 2001, Vol 5, No 1 (2021). 28-41. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i1.1513>,
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/1513>
81. Windu Widagdo, Isa Anshori, CURRICULUM IMPLEMENTATION DURING COVID-19 PANDEMIC IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE, Nidlomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 5, No 3 (2020), 446-458, <https://doi.org/10.31538/ndh.v5i3.1085>,
<https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/view/1085>
82. Relisa Nuris Shifa, Sulistiawati, Endyka Erye Frety, Atika Gita Ningrum, Isa Anshori, Nutrition Programing of Children at 6-24 Months with Exclusive Breastfeeding : A Literature Review, Jurnal Kebidanan Midwiferia, Vol. 7 No. 1 (April, 2021), 52-64.
<https://doi.org/10.21070/midwiferia.v7i1.1142>,
<https://midwiferia.umsida.ac.id/index.php/midwiferia/article/view/1142>
83. Ega Dini Nur Rochma, Isa Anshori, Ekonomi Buruh Industri Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol 12, No 1 (April, 2021), 26-

40, Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus, p-ISSN: 2085-8779, e-ISSN: 2354-7723, <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos>, DOI 10.35724/jies.v12i1.3373, <https://doi.org/10.35724/jies.v12i1.3373>, <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos/article/view/3373>

84. Niswatin Khoiriyah, & Isa Anshori. (2021). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ADAB DI KUTTAB AL FATIH SIDOARJO. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 80-93. SSN : 23389648, EISSN : 2527631X , Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/4398>, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/4398/3191>
85. Ilya Rohati, Isa Anshori, Mufarrihul Hazin , (2021), Online Learning During the Covid-19 Pandemic from the Perspective of Parsons' Structural Functional Theory, *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, Vol 2, No 1 (7 Juli 2021), 38-48, <http://dx.doi.org/10.32478/ajmie.v2i1.737>, <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/ajmie/article/view/737>
86. Fimas Maulana Al-Jufri, Isa Anshori, dan Eni Fariyatul Fahyuni, *Menjadi Guru yang Well Being di masa Pandemi Covid-19*, Umsida Press, Juli

- 2021, 1-106, ISBN: 978-623-6292-09-9.
<http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/446/>
87. AGUSTINA, Fifi; ANSHORI, Isa. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10 (1), Juli 2021, p. 34-46, ISSN 2620-6056. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1629>. Date accessed: 25 July 2021. doi: <https://doi.org/10.32663/jpsp.v10i1.1629>.
88. Yusi Trihartono, Isa Anshori, (2021), Friendship Patterns Of Muslimah Blessed And Their Relationship With Academic Achievement And Character Forming Of Veil Students, *Academia Open*, 4 (2021), 13 Agustus 2021, ISSN : 2714-7444 (media online) DOI: 10.21070/ACOPEN.4.2021.2125, <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/2125/393>
89. Eva Wiji Lestari, Isa Anshori, (2021), Pendidikan keagamaan anak keluarga muslim perdesaan pada era industri 4.0, *Ta'dibuna*, 10 (3), Diserahkan: 30-06-2021 Disetujui: 29-08-2021. Dipublikasikan: 05-09-2021, 319-335. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/view/4939>, <http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v10i3.4939>
90. Fizatin Nisa', Isa Anshori, INTEGRASI PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

PADA KURIKULUM 2013 KELAS RENDAH DI MADRASAH IBTIDIYAH, *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 8 (1), 2021, 37–50,

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/viewFile/6746/4685>,

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/index>.

91. Anshori, I., & Hidayah, R. N. (2021). Student Perceptions and Adaptations to Quality Assurance of Education Services During the 2019 Corona Pandemic. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 5(2), Desember, Published, October 13, 2021, 187-206. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v5i2.1578>, <https://halaqa.umsida.ac.id/index.php/halaqa/article/view/1578>
92. Hariyanto, Mashudi, & Anshori, Isa. (2022), The Principal's Strategy in Improving the Quality of Teacher Competence at Senior High School, *Academia Open*, Vol 6 (2022): June (on progress), PUBLISHED: 2021-10-20, 6-12, DOI: 10.21070/acopen.6.2022.2287 . Article type: (Education), <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/2287/874>
93. Fahrurrozi, Bintang Anugrah, & Anshori, Isa. (2022) Remodeling of Discovery Inquiry Learning in Improving Students' Interest and Quality of Learning in Islamic Subjects in Junior High Schools,

- Academia Open, Vol 6 (2022): June (on progress), DOI: 10.21070/acopen.6.2022.2687,. Article type: (Education)
<https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/2687/909>
94. Idzh, Aqidatul Nur. & Anshori, Isa. (2021), Teacher's Strategy in Formation of Islamic Character for Grade 10 Students of Madrasah Aliyah, Academia Open, Vol 4 (2021), 2021-06-30, DOI: 10.21070/ACOPEN.4.2021.2784, <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/2784/991>
95. Anshori, Isa (2021), Evaluasi mutu pendidikan. In: Inspirasi Pembelajaran Efektif. 1 ed. Majelis Dikdasmen PWM Jatim, Surabaya, 21 Sep., pp. 235-236. ISBN 978-602-381-022-2, <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/2037/>
96. Laila, I., & Anshori, I. (2022). Implementasi Metode Pembelajaran Mind Mapping dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS tentang Manusia sebagai Makhluk Sosial di MI Marhatillah Matabe. ISLAMIKA, 4(1), 89-107.
<https://doi.org/10.36088/islamika.v4i1.1464>,
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1464>
97. Jeanne H. Ballantine, The Sociology of Education, Prentice Hall, New Jersey, 1997

98. Jennifer Allen (ed.), *Sociology of Education: Possibilities and Practices*, New South Wales, Australia: Social Science Press, 2000.
99. Jerome Karabel & A.H. Halsey (editor), *Power and Ideology in Education*, New York Oxford University Press, 1977
100. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2000
101. Karabel, Jerome & A. H. Halsey (editor), *Power and Ideology in Education*, New York Oxford University Press, 1977
102. Mansour Faqih dkk., *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, Read Books dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
103. Mukhrizal Arif. *Pendidikan Pos Modernisme: Telaah Kritis Tokoh Pendidikan*, Yogyakarta: Arruz Media, 2014
104. Muhaimin, Abdul Mujib, (1993), *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Operasionalnya)*. Bandung: Triganda Karya.
105. Muhaimin, et al., (2001), *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
106. Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
107. Muhammad Qowim, "Sosiologi Pendidikan Islam Berparadigma Integrasi-Interkoneksi," dalam Amin

- Abdullah et al. (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), 81-114.
108. Mursi, Muhammad Munir, (1977), *Al-Tarbiyah al-Islamiah Ushuluha Wa Tathawwuruha Fi al-Bilad al-Arabi*. Kairo: 'Alam al-Kutub.
 109. Nasr, Sayyid Hossein, (1987), *Tradition Islam In The Modern Word*. New York: Methuen Inc., Routledge & Kegan Paul.
 110. Olive Banks, *The Sociology of Education*, B. T Batsford Ltd., London, 1976
 111. Paulo Freire, *Pendidikan yang Membebaskan (terjemahan)*, MELIBAS, Yogyakarta, 2000
 112. P.W. Musgrave, *The Sociology of Education (3rd ed.)*, London: Methuen, 1979
 113. Philip Robinson, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 114. Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, Cet. Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
 115. Rob Moore, *Education and Society*, Polity Press, USA, 2007
 116. Rodman B. Webb, *Schooling and Society*, MacMillan Publishing co. Inc. New York USA, 1981
 117. S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bandung: Jemmmars, 1983.
 118. Sandra Acker, *Gendered Education*, Open University Press, Buckingham-Philadephia, 1994
 119. Sahrul Mauludi, *Ibn Khaldun: Perintis Kajian Ilmu Sosial Modern*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012

120. S.C.N de Jong, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Ikhtisar Teoritis tentang Pendidikan, Perkembangan dan Modernisasi*. P.T. Sangkala Pulsar, Jakarta, 1984
121. ST Vembriarto, *Sosiologi Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
122. Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
123. W.B. Brookover & E.L. Erickson, *Sociology of Education*, The Dorsey Press, US, 1975
124. Wilbur B. Brookover & Erickson, Edsel L. *Sociology of Education*, Homewood, Ill.: The Dorsey Press, 1975
125. William F. O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (terjemahan, pengantar Mansour Faqih), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
126. Zainudin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008

Identitas Penulis



ISA ANSHORI, lahir di Lamongan, Jawa Timur, 6 Mei 1967; tepatnya di Desa Karangwungu Lor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. menyelesaikan studi dari MIM Karangwungu Lor tahun 1980, MTs.M Bulubrangsi tahun 1983, PGAN Bojonegoro tahun 1986, meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel tahun 1990, meraih gelar Magister Sains (M.Si) dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga dalam program studi Ilmu-Ilmu Sosial pada tahun 1997, kemudian meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Sosial dari program Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2011 .

Selama studi aktif dalam kepengurusan IPM (tahun 1981-1983), “Forum Komunikasi Studi Paciran dan Laren” di Bojonegoro (tahun1984-1985), HMI (tahun 1987-1989), kemudian aktif di “Lingkaran Studi Meridian” (tahun 1991-1993), Ketua Forum PAUD Kabupaten Sidoarjo (2004-2008) dan Dewan Penasehat (2009-2013), Anggota Dewan Pakar ICMI Orsat Sidoarjo (2006-20011), Ketua Devisi Kelembagaan Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur (2005-2010),

Wakil Sekretaris Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur (2010-2015), Koordinator Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT) Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (APTAIM) (2009-2013); Pengurus Koordinator Wilayah Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah Jawa Timur (2012-2016), dan Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur (2015-2020, 2020-2022, 2022-2027). Memasuki profesi pendidik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (1991 hingga sekarang), MAN Lamongan (1993-2016), Sekolah Tinggi Agama Islam Lukmanul Hakim (STAIL) Surabaya (2000 hingga sekarang), kepala SMA Muhammadiyah 5 Surabaya (1993-1995), Kepala Bagian Statistik dan Herregistrasi BAA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (1998-2000), Kajur PAI Fak. Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2000-2002), Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2002-2006 dan 2006-2010), Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2010-2012), Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2012-2013), Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2011-2015), pegawai Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 dengan tugas Staf Ahli Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian menjadi dosen Lektor Kepala bidang Sosiologi Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dpt di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sejak 1 Desember 2016 hingga 1 Februari 2020. Sejak 1 Februari 2020 tersebut ditarik

ke Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan meraih gelar Profesor bidang Sosiologi Pendidikan tanggal 1 Maret 2022, serta menjabat sebagai ketua Gugus Publikasi FISIP UInsa Surabaya sejak tahun 2023 hingga sekarang, asesor sertifikasi dosen, Riviewer Litabdimas Kementerian Agama RI.

Penulis juga sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Propinsi Jawa Timur (2005 hingga 2024), Asesor BAN PDM sejak tahun 2024 hingga sekarang, Asesor PLPG FTK Uinsa Sunan Ampel Surabaya (sejak 2011), Asesor Makalah Kepemimpinan dan Penilaian Potensi Kepemimpinan (MK dan PPK) pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Timur (2012), Asesor Serdos Kementerian Agama RI (2023-hingga sekarang), serta sebagai calon Asesor BAN-PT (2023). Di samping itu juga aktif mengikuti berbagai training keorganisasian, kependidikan dan penelitian.

Kunjungan ke luar negeri pernah dilakukan ke Makah dan Madinah (2015), pendampinga KKN internasional dan seminar Internasional di Universitas Rajabat Thailand (2015), *Study Ekskursi* dan *FI in Schools Experience Workshop* di Singapura (2023), dan Malaysia (2015 dan 2023).

Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain: “Aktivitas Cendekiawan Muslim Surabaya ditinjau dari kacamata Pendidikan Islam” (1990), “Eksistensi Agama dalam Kehidupan Masyarakat Industri” (1990), “Minat Siswa dalam memasuki Jenjang

Perguruan Tinggi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo)” (1992), “Jalan Ke Syurga: Satu atau Banyak? Pandangan Keagamaan Mahasiswa Jawa Timur tentang Jalan Hidup Islami” (1993), “Masyarakat Santri dan Pariwisata: Suatu kajian makna Ekonomi dan Religius di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” (1996), “Konflik dan Integrasi dalam Hubungan antar Pemeluk Agama di Kotamadia Surabaya” (1997), “Respon Masyarakat Terhadap Program Wajib Belajar di Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur” (1997), “Pengembangan Pasar Produk Unggulan Level Regional, Nasional dan Internasional di Jawa Timur” (1999), “Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo” (2002-2003), “Respon Warga Madrasah Terhadap Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di MAN Lamongan” (2004-2005), “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sosiologi Melalui Pembelajaran Kontekstual di MAN Lamongan’ (2006), “Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran di kalangan Mahasiswa”(2007), “Pengembangan Model Kerjasama antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sidoarjo” (2007), “Kajian Perubahan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Korban Lumpur Sidoarjo” (2012), “Kajian Pengembangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Korban Semburan Lumpur Sidoarjo” (2013), “Persepsi dan Adaptasi Mahasiswa Terhadap Jaminan Mutu Layanan Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona

2019 di Uinsa Surabaya” (2021), dan berbagai penelitian lainnya.

Artikel dan jurnal yang telah dipublikasikan antara lain: “Mempersiapkan Pendidikan Keguruan Agama Masa Depan”, “Dilema Tanggung Jawab Guru Masa Depan: Menjangkau Garis Awal Era Baru”, “Sketsa Perjuangan Cendekiawan Muslim di Indonesia”, “Tradisi Kaum Santri: Suatu Perubahan dari Old Society ke New State”, “Menggagas Sisdiknas Masa Depan”, “Harapan Islam dan Indonesia terhadap Kehidupan Politik pada Era Reformasi” (1999), “Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi dan Religius” (2002), “Perubahan Fungsi Pondok Pesantren dalam Pengembangan Budaya Nasional” (2003), “Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pondok Pesantren” (2003), “Standar Mutu Guru Masa Depan”, “Menggagas Kepemimpinan Umat Islam dalam Percaturan Dunia” (2007), “Konflik dan Integrasi dalam Kehidupan Beragama” (2008), “Negara, Ideologi dan Pendidikan dalam Pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser” (2009), “Dinamika Pesantren: Pemaknaan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kawasan Pesisir dan Pedalaman Pantai Utara Kabupaten Lamongan” (2012), “Dinamika Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kawasan Pesisir dan Pedalaman Pantai Utara Kabupaten Lamongan” (2012), “Budaya Malu dan Etos Kerja dalam Pencapaian Visi dan Misi Lembaga Pendidikan” (2015), “Perilaku Memilih Lembaga Pendidikan: Perspektif teori Rational Choice dan Bounded Rational” (2017),

“Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah” (2017), “Sistem Kredit Semester dalam pembelajaran Sosiologi” (2017), “Melacak State of The Art Fenomenologi dalam kajian Ilmu-Ilmu Sosial” (2018), “Penerapan Nilai Budaya Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Peningkatan Kinerja Madrasah” (2018), “Desain Research Study: Investigation of Increasing Elementary Student”’s Spatial Ability Using 3Dmetric” (2018), “Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss” (2019), dan “Kajian Teori Strukturalisme, Post-Strukturalisme dan Aktor Jaringan serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam” (2020). Naskah jurnal antara lain “Dynamics of pesantren, society and state in the education, economic, ideology and political in Indonesia”, “Problem-Based Learning Remodeling Using Islamic Values Integration and Sociological Research in Madrasahs, is it Effective?”, serta berbagai karya yang disampaikan dalam forum seminar regional, nasional, maupun internasional.

Adapun buku yang telah terbit antara lain: “Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam” (PT. Bina Ilmu Surabaya, 1991 kemudian diterbitkan CV. Nizamia Learning Center, 2020), “Sejarah Kebudayaan Islam” (Sinar Wijaya, 1995), “Evaluasi Pendidikan” (Umsida Press, 2004, 2020), “Perencanaan Sistem Pembelajaran” (Umsida Press, 2008, 2009, 2020), “Al-Islam” (Majlis Dikdasmen PWM, 2008), “Masyarakat Santri dan Pariwisata: kajian Makna Ekonomi dan Religius” (Umsida Press, 2010;

Nidzamia Learning Center, 2020), “Pendidikan Kemuhammadiyah” (Umsida Press, 2011), “Dinamika Pesantren: Pemaknaan Sosial, Ideologi dan Ekonomi di kalangan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” (Umsida Press, 2012,2020), “Dinamika Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi” (Umsida Press, 2012, Nizamiah Learning Center, 2020), “Menjadi Guru yang Well Being dimasa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19” (Umsida Press, tahun 2021 dan 2024), “Sosiologi Pendidikan Integratif” (2024), serta berbagai karya lainnya.

Sosiologi Pendidikan

INTEGRATIF

Buku Sosiologi Pendidikan Integratif membahas hubungan antara pendidikan dan masyarakat dengan pendekatan yang komprehensif. Mengusung perspektif integratif, buku ini menghubungkan konsep-konsep sosiologi klasik dan modern dengan realitas pendidikan di Indonesia, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam.

Bab pertama menjelaskan konsep dasar sosiologi pendidikan, mulai dari sejarah, ruang lingkup, hingga kontribusi para ahli dalam disiplin ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai paradigma dan teori dalam sosiologi pendidikan memberikan landasan analitis untuk memahami dinamika sosial dalam dunia pendidikan.

Buku ini juga mengupas berbagai paradigma makro dalam pendidikan, termasuk pandangan Islam terhadap konservatisme, liberalisme, hingga fundamentalisme dalam sistem pendidikan. Pemikiran tokoh sosiologi klasik dan modern dipaparkan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konstruksi sosial dalam dunia pendidikan.

Hubungan antara pendidikan dan struktur sosial menjadi fokus dalam beberapa bab, termasuk keterkaitan pendidikan dengan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, serta peran pendidikan dalam reproduksi struktur budaya dan ekonomi. Buku ini juga membahas peran pendidikan dalam menghadapi tantangan industrialisasi, teknologi, dan modernitas gaya hidup di masyarakat.

Dalam konteks ketimpangan sosial, buku ini mengkaji bagaimana sistem pendidikan dapat menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan serta menciptakan keadilan sosial. Selain itu, pembahasan mengenai sekolah/madrasah sebagai sistem organisasi dan birokrasi, serta dinamika interaksi dan sosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat turut memperkaya perspektif pembaca.

Isu-isu kontemporer seperti hidden curriculum, pengembangan karakter, keadilan gender dalam pendidikan, serta tantangan perubahan sosial di era digital juga diulas secara mendalam. Dengan pendekatan yang integratif, buku ini tidak hanya membahas teori-teori sosiologi pendidikan, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep-konsep Islam serta implementasinya dalam realitas pendidikan di Indonesia.

Buku ini sangat relevan bagi akademisi, praktisi pendidikan, dan mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara pendidikan dan dinamika sosial dalam masyarakat.



The UINSA Press
Anggota IKAPI
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya
Tlp. 031-8410298
percetakan@uinisa.ac.id

